



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**LAPORAN
AKHIR**

TAHUN 2023



LPM UNPAS

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PASUNDAN**

Gd. Rektorat Lt.I & VI JALAN TAMANSARI NO.6-8 BANDUNG 40116



**Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam menyusun Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2023.

Laporan Akhir ini merupakan laporan tahap terakhir dari rangkaian Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan akan dapat lebih terencana, terarah, sejalan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan hingga terselesaikannya laporan ini.

Pangkal Pinang, Oktober 2023

Tim Penyusun



Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	I - 4
1.3. Sasaran	I - 4
1.4. Keluaran	I - 5
1.5. Dasar Hukum.....	I - 5
1.6. Ruang Lingkup Pekerjaan.....	I - 7
1.7. Sistematika Pembahasan	I - 9
 BAB 2 PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKUMAN	 II - 1
2.1 Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	II - 1
2.1.1 Kebijakan Tata Ruang Aspek PKP	II - 1
2.1.2 Batas Administrasi Kabupaten/Kota	II -15
2.1.3 Kondisi Penggunaan Lahan	II -17
2.1.4 Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan PKP.....	II -18
2.1.4.1 RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 - 2025.....	II -18

2.1.4.2 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026	II -19
2.1.4.3 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	II -20
2.1.4.4 Program pembangunan daerah bidang PKP	II -21
2.1.4.5 Program dan Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	II -21
2.2 Profil Umum.....	II -25
2.2.1 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya	II -25
2.2.1.1 Kondisi Ekonomi	II -25
2.2.1.2 Kondisi Sosial Budaya	II -40
2.2.2 Kondisi Fisik Dasar	II -57
2.2.2.1 Topografi dan Kemiringan Lereng.....	II -57
2.2.2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS)	II -58
2.2.2.3 Geologi.....	II -64
2.2.2.4 Hidrologi.....	II -64
2.2.2.5 Klimatologi	II -65
2.2.2.6 Kondisi Rawan Bencana	II -65
2.3 Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II -67
2.3.1 Jenis rumah	II -67
2.3.2 Bentuk rumah	II -74
2.3.3 Pola Sebaran.....	II -76
2.3.4 Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Setiap Kabupaten/Kota.....	II -84
2.3.5 Jumlah dan sebaran backlog rumah setiap kab/kota	II -85
2.3.6 Jumlah Dan Sebaran Rumah Tidak Layak Huni	II -86
2.3.7 Perumahan Yang Berada Di Area Negative List	II -86
2.3.8 Kondisi Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Dalam KSP.....	II -96
2.3.9 Kondisi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Dalam Lintas Daerah Kabupaten/Kota.....	II-106
2.3.10 Kondisi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Hektar Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Hektar.....	II-112
2.3.11 Kondisi Eksisting PSU.....	II-112
2.3.12 Pembiayaan dan Kelembagaan.....	II-123

BAB 3 ANALISIS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN	III - 1
3.1 Kajian Kebijakan.....	III - 1
3.1.1 Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan Dan Kebijakan Tata Ruang Nasional Dan Daerah Provinsi Terhadap Pembangunan Dan Pengembangan Pkp	III - 1
3.1.2 Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan.....	III - 1
3.1.3 Analisis Arah Pengembangan PKP	III - 3
3.2 Analisis Fisik Dasar	III -13
3.2.1 Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	III -13
3.2.2 Tipologi dan Jumlah Rumah Yang Dapat Ditampung	III -13
3.3 Analisis Aspek Sosial, Budaya, dan Kependudukan.....	III -17

3.3.1	Analisis karakteristik sosial kependudukan	III -17
3.3.2	Analisis Budaya Bermukim	III -26
3.3.3	Analisis Potensi Pasar Perumahan.....	III -35
3.4	Analisis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.....	III -42
3.4.1	Analisis Kinerja PSU	III -42
3.4.2	Analisis Kebutuhan PSU	III -46

BAB 4 RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN	IV - 1
4.1 Tujuan Penyelenggaraan PKP.....	IV - 1
4.2 Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	IV - 5
4.3 Arahana Penyediaan Lahan.....	IV - 6
4.4 Rencana PKP di Lintas Kabupaten/Kota	IV-15
4.5 Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	IV-22
4.6 Rencana Penyediaan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	IV-24
4.6.1 Rencana Penyediaan Rumah/Perumahan Layak Huni Korban Terdampak Bencana	IV-24
4.6.2 Rencana Rehabilitasi Rumah/Perumahan Korban Terdampak Bencana	IV-26
4.7 Rencana Penyediaan PSU Sesuai Kewenangan Provinsi.....	IV-31

BAB 5 RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN	V - 1
5.1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Lintas Kabupaten/Kota.....	V - 1
5.2 Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar	V - 2
5.3 Program Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Tidak Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi.....	V - 2
5.4 Program Penyediaan PSU	V - 3



Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rencana Sistem Pusat Permukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung	II - 4
Tabel 2.2 Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kota/Kabupaten	II - 15
Tabel 2.3 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020	II - 17
Tabel 2.4 Kawasan Kumuh Wewenang Provinsi Kep. Bangka Belitung	II - 20
Tabel 2.5 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Jenis Pendapatan, 2021 – 2022	II - 28
Tabel 2.6 PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	II - 30
Tabel 2.7 PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	II - 30
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota	II - 35
Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota	II - 35
Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022	II - 36
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2018-2022	II - 40
Tabel 2.12 Kepadatan Penduduk Netto Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2018-2022	II - 42
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2022	II - 50
Tabel 2.14 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022	II - 52
Tabel 2.15 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022	II - 53
Tabel 2.16 Luas Daerah Aliran Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II - 58
Tabel 2.17 Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II - 66

Tabel 2.18	Sebaran Rumah Komersial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II	- 68
Tabel 2.19	Jumlah Rumah Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.....	II	- 74
Tabel 2.20	Jumlah Rumah Berdasarkan Kepemilikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	II	- 84
Tabel 2.21	Sebaran Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Keselamatan Bangunan Tahun 2022	II	- 87
Tabel 2.22	Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II	-112
Tabel 2.23	Panjang Jalan Berdasarkan Fungsinya Tahun 2022.....	II	-113
Tabel 2.24	SPAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	II	-114
Tabel 2.25	Banyaknya Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	II	-117
Tabel 2.26	Banyaknya Sarana Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	II	-118
Tabel 2.27	Kapasitas Pembangkit Eksisting	II	-120
Tabel 3.1	Arah Pengembangan Kawasan Permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	III	- 4
Tabel 3.2	Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Terhadap Kawasan Permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	III	- 13
Tabel 3.3	Daya Tampung Rumah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2043.....	III	- 14
Tabel 3.4	Proyeksi Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2043	III	- 18
Tabel 3.5	Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2043	III	- 19
Tabel 3.6	Pola Pergerakan Penduduk di Pulau Bangka.....	III	- 22
Tabel 3.7	Pola Pergerakan Penduduk di Pulau Belitung	III	- 23
Tabel 3.8	Potensi Pasar Rumah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	III	- 36
Tabel 3.9	Proyeksi Kebutuhan Rumah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2043	III	- 37
Tabel 3.10	Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Rumah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2043.....	III	- 39
Tabel 3.11	Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan Tahun 2022	III	- 42
Tabel 3.12	Tingkat Pelayanan Sarana Kesehatan Tahun 2022	III	- 44
Tabel 3.13	Analisa Kebutuhan Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Standar	III	- 47
Tabel 3.14	Analisa Kebutuhan Tambahan Sarana Pendidikan	III	- 48
Tabel 3.15	Analisa Kebutuhan Luas Lahan Sarana Pendidikan	III	- 49
Tabel 3.16	Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan	III	- 50
Tabel 3.17	Analisis Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Standar	III	- 51
Tabel 3.18	Analisis Kebutuhan Tambahan Fasilitas Kesehatan	III	- 52
Tabel 3.19	Analisis Kebutuhan Lahan Fasilitas Kesehatan.....	III	- 53
Tabel 3.20	Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan	III	- 54
Tabel 3.21	Analisis Kebutuhan Fasilitas Peribadatan Berdasarkan Standar ...	III	- 55
Tabel 3.22	Analisis Kebutuhan Tambahan Fasilitas Peribadatan	III	- 56
Tabel 3.23	Analisis Kebutuhan Lahan Fasilitas Peribadatan	III	- 57
Tabel 3.24	Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa	III	- 58
Tabel 3.25	Analisis Kebutuhan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Standar.....	III	- 59
Tabel 3.26	Analisis Kebutuhan Lahan Fasilitas Perdagangan dan Jasa	III	- 60
Tabel 3.27	Standar Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk	III	- 61



Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang	II - 11
Gambar 2.2 Peta Rencana Pola Ruang	II - 14
Gambar 2.3 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II - 16
Gambar 2.4 Komposisi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jenis Pendapatan (persen), 2021-2022	II - 27
Gambar 2.5 Distribusi PDRB Menurut Pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2018-2022	II - 31
Gambar 2.6 Distribusi PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2022	II - 32
Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Bangka, Pulau Belitung dan Total Bangka-Belitung (persen), 2018-2022	II - 33
Gambar 2.8 Nilai Investasi Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2017-2021	II - 37
Gambar 2.9 Peta Kapasitas Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2021	II - 39
Gambar 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022	II - 42
Gambar 2.11 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018	II - 45
Gambar 2.12 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019	II - 46
Gambar 2.13 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020	II - 47
Gambar 2.14 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021	II - 48
Gambar 2.15 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022	II - 49

Gambar 2.16	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 ..	II	- 50
Gambar 2.17	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022.....	II	- 51
Gambar 2.18	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS).....	II	- 63
Gambar 2.19	Bentuk Rumah Tunggal di Kawasan Permukiman	II	- 75
Gambar 2.20	Rumah Deret di Perumahan Citraland	II	- 75
Gambar 2.21	Rumah Susun.....	II	- 76
Gambar 2.22	Sebaran Perumahan Komersial di Kabupaten Bangka.....	II	- 77
Gambar 2.23	Sebaran Perumahan Komersial di Kabupaten Bangka Tengah ..	II	- 78
Gambar 2.24	Sebaran Perumahan Komersial di Kabupaten Bangka Selatan ..	II	- 79
Gambar 2.25	Sebaran Perumahan Komersial di Kabupaten Bangka Barat	II	- 80
Gambar 2.26	Sebaran Perumahan Komersial di Kabupaten Belitung	II	- 81
Gambar 2.27	Sebaran Perumahan Komersial di Kabupaten Belitung Timur	II	- 82
Gambar 2.28	Sebaran Perumahan Komersial di Kota Pangkalpinang	II	- 83
Gambar 2.29	Grafik Jumlah Rumah Berdasarkan Kepemilikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.....	II	- 85
Gambar 2.30	Permukiman Di Perlindungan Setempat Di Kecamatan Pangkalbalam Pangkal Pinang	II	- 88
Gambar 2.31	Permukiman Di Sempadan Pantai Di Kecamatan Tukak Sadai Bangka Selatan	II	- 89
Gambar 2.32	Permukiman Di Sempadan Pantai Di Kecamatan Lepar Pongok Bangka Selatan	II	- 90
Gambar 2.33	Permukiman Di Sempadan Pantai Di Kecamatan Tanjung Pandan Belitung	II	- 91
Gambar 2.34	Permukiman Di Sempadan Pantai Di Kecamatan Sijuk Belitung	II	- 92
Gambar 2.35	Permukiman Di Daerah Rawan Bencana di Kota Pangkal Pinang.....	II	- 93
Gambar 2.36	Permukiman di Daerah Rawan Bencana Di Kab. Bangka Tengah	II	- 94
Gambar 2.37	Permukiman Di Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Belitung	II	- 95
Gambar 2.38	Peta Kawasan Strategis Provinsi KIPT Muntok	II	- 97
Gambar 2.39	Peta Kawasan Strategis Provinsi Industri Air Kelik	II	- 98
Gambar 2.40	Peta Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Bandara Depati Amir	II	- 99
Gambar 2.41	Peta Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Bandara HAS Hanandjoeddin	II	-100
Gambar 2.42	Peta Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Dan Pelabuhan Teluk Kalebati	II	-101
Gambar 2.43	Peta Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Sadai	II	-102
Gambar 2.44	Peta Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Sadai ...	II	-103
Gambar 2.45	Peta Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Terpadu Gantung	II	-104
Gambar 2.46	Peta Kawasan Strategis Provinsi KIT Suge Dan Pelabuhan Tanjung Batu	II	-105
Gambar 2.47	Kondisi Perumahan Yang Ada di Lintas Batas Kabupaten Bangka Selatan – Kabupaten Bangka Tengah	II	-106
Gambar 2.48	Kondisi PSU Yang Ada di Lintas Batas Kabupaten Bangka Selatan – Kabupaten Bangka Tengah.....	II	-107
Gambar 2.49	Kondisi Perumahan Yang Ada di Lintas Batas Kab. Bangka – Kab. Bangka Barat	II	-108
Gambar 2.50	Kondisi PSU Yang Ada di Lintas Batas Kab. Bangka – Kab. Bangka Barat.....	II	-109

Gambar 2.51	Kondisi Perumahan Yang Ada di Lintas Batas Kab. Bangka – Kab. Bangka Tengah - Kota Pangkalpinang	II -110
Gambar 2.52	Kondisi PSU Yang Ada di Lintas Batas Kab. Bangka – Kab. Bangka Tengah - Kota Pangkalpinang	II -111
Gambar 2.53	Kondisi Transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II -113
Gambar 2.54	Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II -121
Gambar 3.1	Peta Analisis Pengembangan Permukiman Kabupaten Bangka .	III - 6
Gambar 3.2	Peta Analisis Pengembangan Permukiman Kabupaten Bangka Tengah	III - 7
Gambar 3.3	Peta Analisis Pengembangan Permukiman Kabupaten Bangka Selatan	III - 8
Gambar 3.4	Peta Analisis Pengembangan Permukiman Kabupaten Bangka Barat	III - 9
Gambar 3.5	Peta Analisis Pengembangan Permukiman Kota Pangkalpinang	III - 10
Gambar 3.6	Peta Analisis Pengembangan Permukiman Kabupaten Belitung	III - 11
Gambar 3.7	Peta Analisis Pengembangan Permukiman Kabupaten Belitung Timur.....	III - 12
Gambar 3.8	Peta Pergerakan Penduduk Pulau Bangka	III - 24
Gambar 3.9	Peta Pergerakan Penduduk Pulau Belitung	III - 25
Gambar 4.1	Peta Rencana Ketersediaan Lahan Kabupaten Bangka.....	IV - 8
Gambar 4.2	Peta Rencana Ketersediaan Lahan Kabupaten Bangka Tengah	IV - 9
Gambar 4.3	Peta Rencana Ketersediaan Lahan Kabupaten Bangka Selatan	IV - 10
Gambar 4.4	Peta Rencana Ketersediaan Lahan Kabupaten Bangka Barat....	IV - 11
Gambar 4.5	Peta Rencana Ketersediaan Lahan Kota Pangkalpinang	IV - 12
Gambar 4.6	Peta Rencana Ketersediaan Lahan Kabupaten Belitung	IV - 13
Gambar 4.7	Peta Rencana Ketersediaan Lahan Kabupaten Belitung Timur ..	IV - 14
Gambar 4.8	Rencana Pembangunan Dan Pengembangan PKP Di Lintas Batas Kabupaten Bangka Barat – Kabupaten Bangka	IV - 19
Gambar 4.9	Rencana Pembangunan Dan Pengembangan PKP Di Lintas Batas Kabupaten Bangka – Kabupaten Bangka Tengah – Kota Pangkalpinang.....	IV - 20
Gambar 4.10	Rencana Pembangunan Dan Pengembangan PKP Di Lintas Batas Kabupaten Bangka Tengah – Kabupaten Bangka Selatan	IV - 21
Gambar 4.11	Peta Arah pengembangan hunian vertikal	IV - 25



**Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia terdiri dari dua pulau kecil yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Sumatera Selatan. Terletak pada 105°50' sampai 108°30' Bujur Timur dan 105° sampai 3°10' Lintang Selatan. Mempunyai batas-batas wilayah yakni:

Barat : Selat Bangka,
Timur : Selat Karimata,
Utara : Laut Natuna,
Selatan : Laut Jawa.

Total luas wilayah daratan dan wilayah lautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,06 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,06 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam 6 kabupaten dan 1 kota. Wilayah tersebut terdiri dari 40 kecamatan dan 348 desa/kelurahan.

Kebutuhan akan Perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam rangka peningkatan dan pemerataan

kesejahteraan masyarakat. Permasalahannya yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintahan dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, Hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Sejak awal, pembangunan perumahan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggungjawab masyarakat sendiri.
- b. Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak. Dukungan diberikan melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan lingkungan permukiman, peraturan, perundangan yang bersifat memayungi, layanan kemudahan dalam perijinan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dll.

Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan suatu skenario umum, yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi bakal terjadi pada priode tertentu.

Jika mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman merupakan suatu proses, maka RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) akan merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan dalam konteks penataan ruang, (RP3KP) merupakan penjabaran RTRW di sektor perumahan dan permukiman.

RP3KP mencakup rencana penanganan sektor perumahan dan kawasan permukiman, baik yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan, revitalisasi/optimalisasi pengembangan kawasan baru yang kawasan, maupun dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar, termasuk prioritas implementasi dan rencana kebutuhan investasinya.

Adapun Muatan pokok RP3KP meliputi:

- Penjabaran kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
- Rincian program, target dan sasaran kegiatan dan lokasi dari setiap sektor terkait;
- Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
- Rincian rencana pembiayaan dan sumber dananya;
- Rincian jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan pelakunya (masyarakat, badan usaha, pemerintah);
- Mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan;
- Mekanisme penyaluran aspirasi para pelaku yang terkait;
- Mekanisme pemberdayaan masyarakat;
- Daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan dan kawasan permukiman;
- Daftar kawasan terlarang (*negative list*) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru;
- Strategi dan prioritas penanganan prasarana dan sarana pada kawasan kajian dengan melakukan zoning, sehingga keterpanduan antar zoning sangat diutamakan.

Penyusunan (RP3KP) ini perlu segera dilakukan dikarenakan selama ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penyusunan rencana umum untuk perumahan dan kawasan permukiman belum terwujud dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman belum dapat dirumuskan secara terukur. Dokumen RP3KP tersebut seyogyanya merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stake-holder terkait dan dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan melihat kondisi eksisting terkait dengan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka melalui Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu untuk melakukan Kegiatan "Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung".

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan pekerjaan ini adalah Menyediakan dokumen yang menjadi standar/acuan dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Sasaran

Sesuai dengan maksud dan tujuan di atas, maka Sasaran yang ingin dicapai dengan penyusunan RP3KP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini adalah:

1. Terdokumentasikannya data dan informasi kinerja pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan, penggunaan serta pemantauan RP3KP, serta persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan dibidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
2. Tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan agar praktek penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal.
3. Tersusunnya dokumen yang dilengkapi dengan rekomendasi dan masukan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman
4. Tersedianya data dasar perumahan dan kawasan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (*valid*) sampai waktu mendatang;
5. Teridentifikasinya masalah perumahan dan kawasan permukiman (*existing* dan *prediksi*) serta terindekasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Terkomodasikanya seluruh kebutuhan akan perumahan permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagian kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
7. Terintegrasinya berbagai rencana pembangunan dan peningkatan perumahan dan kawasan permukiman berikut pengembangan prasarana dan sarana penunjangnya.

1.4. Keluaran

Keluaran utama (*output*) yang dihasilkan dari pekerjaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini adalah:

- a. Indikasi arah pengembangan, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- b. Rumusan isu perumahan dan permukiman serta infrastruktur pendukungnya yang meliputi potensi, permasalahan, kebutuhan pengembangan dan tantangan yang dihadapi;
- c. Rumusan tujuan dan sasaran pengembangan, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta infrastruktur pendukungnya yang mendukung arah pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai terjemahan visi, misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mempertimbangkan potensi, peluang, permasalahan dan tantangan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Rumusan kriteria dan indikator penentuan perumahan dan kawasan permukiman prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Identifikasi calon perumahan dan kawasan permukiman prioritas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berserta profilnya;
- f. Terpilihnya perumahan dan kawasan permukiman prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g. Rumusan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta infrastruktur pendukungnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- h. Analisis korelasi dan konsekuensi program pembangunan permukiman dan infrastruktur perumahan dan permukiman; dan
- i. Indikasi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta infrastruktur pendukungnya dalam kurun waktu 20 Tahun yang dibagi dalam 4 periode 5 tahunan.

1.5. Dasar Hukum

Landasan hukum pekerjaan RP3KP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman;
- h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- i. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

- j. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atau UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- m. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- n. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- v. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- w. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- x. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- y. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- z. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- aa. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus;
- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- cc. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- dd. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
- ee. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- ff. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan RP3KP.

1.6. Kedudukan RP3KP

1.6.1 Kedudukan RP3KP dalam Perencanaan Tata Ruang

RP3KP merupakan suatu “alat” yang dapat menyatukan sistem perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Maka dalam penyusunannya, dokumen RP3KP perlu mengacu pada dokumen-dokumen kebijakan daerah yang mencakup perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah agar bisa memenuhi kebijakan dan isu strategis yang belum terjawab pada dokumen perencanaan dan tata ruang. Adapun kedudukan RP3KP terhadap perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Pada bagan kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan tersebut, terlihat bahwa RP3KP disusun dengan mengacu pada produk perencanaan pembangunan dan produk perencanaan tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. RTRW terdiri dari 3 (tiga) tingkatan rencana berdasarkan lingkup wilayahnya yaitu RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang lebih rendah harus mengacu pada perencanaan yang lebih tinggi.

Produk perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Seperti halnya dalam perencanaan tata ruang, produk perencanaan pembangunan juga terdapat tingkatan rencana, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RPJP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, sementara itu RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan tingkatan lingkup rencananya. Tingkatan rencana yang lebih rendah mengacu pada rencana dengan tingkatan di atasnya, misalnya RP3KP Kabupaten/Kota mengacu pada RP3KP Provinsi, RPJP dan RPJM Kabupaten/Kota, dan RTRW Kabupaten/Kota.

1.6.2 Kedudukan RP3KP dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. RP3KP merupakan bagian integral dari rencana pembangunan provinsi maupun kabupaten/ kota;
2. RP3KP merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman, yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
3. RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektoral (misal: rencana pengembangan pertanian, kepariwisataan dan lain-lain);
4. Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah berupa:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara khusus ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman dan berbagai tindak lanjutnya.

Keberadaan RP3KP diperlukan oleh :

1. Tingkat provinsi dalam mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang menyangkut 2 (dua) atau lebih kabupaten atau kota yang berbatasan, penyelenggaraan fasilitasi dan mediasi, bimbingan dan pembinaan;
2. Tingkat kabupaten atau kota, terutama untuk kabupaten atau kota-kota yang telah memiliki permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang tinggi intensitasnya, dalam mengatur dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisasikan.
3. Kedudukan RP3KP dalam kerangka pembangunan wilayah secara keseluruhan adalah sebagai :
 - a. Wahana informasi yang memuat arahan dan rambu-rambu kebijakan, serta rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam suatu tingkatan wilayah dan kurun waktu tertentu (provinsi, kabupaten atau kota);
 - b. Arahan untuk mengatur perimbangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, antara :
 - 1) Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - 2) Perumahan dan kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lain dalam suatu wilayah tertentu;
 - 3) Keselarasan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman terhadap rencana investasi jaringan prasarana dan sarana, jaringan utilitas serta jaringan infrastruktur lain yang berskala regional.
 - c. Sarana untuk mempercepat terbentuknya sistem kawasan permukiman yang mantap, terutama dalam kota-kota yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Penetapan orde/kedudukan kota-kota tersebut dalam kerangka pembangunan daerah, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat untuk :

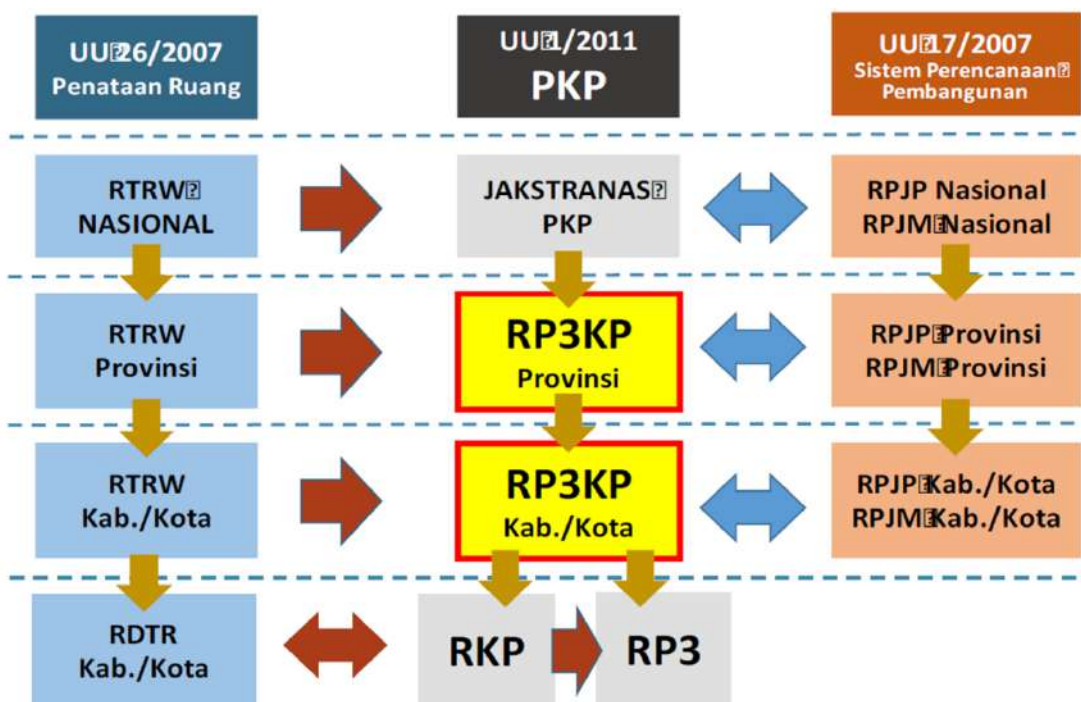
- 1) Menetapkan strategi pengembangan kawasan permukiman dalam wilayah yang bersangkutan;
- 2) Menetapkan strategi pembangunan jaringan investasi prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
- 3) Menetapkan strategi pengembangan untuk masing-masing provinsi, kabupaten atau kota.

Dalam penataan kawasan-kawasan permukiman tersebut perlu dipertimbangkan nilai-nilai budaya dan arsitektur setempat yang dapat secara kental mencerminkan citra atau jati diri masing-masing kota atau daerahnya, khususnya untuk hal ini

perlu diatur secara tersendiri melalui peraturan setempat. Hal ini perlu dilakukan mengingat RP3KP merupakan skenario yang harus dapat mengakomodasikan berbagai hal dan kepentingan daerah, termasuk upaya melestarikan nilai-nilai sosial budaya setempat.

- d. Alat pengawasan dan pengendalian terselenggaranya keterpaduan program antara sektor dan antara lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

Skema kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Kedudukan RP3KP dalam Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan

1.6.3 Hierarki Perencanaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman termasuk dalam fase pemanfaatan ruang, berupa rencana sektor bidang perumahan dan kawasan permukiman, disebut Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

RP3KP adalah skenario pembangunan *Grand Design* perumahan dan kawasan permukiman di daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. RP3KP tersebut ditindaklanjuti dengan:

1. Rencana Kawasan Permukiman (RKP), yaitu dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
2. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3), yaitu dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan Perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang.

Perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman harus dapat menjawab berbagai permasalahan/persoalan perumahan, antara lain mencakup :

1. *Backlog*,
2. Rumah tidak layak huni (RTLH),
3. Rumah liar,
4. *Cluster-cluster* perumahan,
5. *Negative list* (area yang tidak layak/tidak boleh dibangun rumah/perumahan),
6. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
7. Kurangnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU),
8. Kurangnya ketersediaan pembiayaan perumahan, serta
9. Mahalnya harga tanah, terutama di perkotaan.

1.7. Isu Strategis Penyelenggaraan Urusan PKP

Defisit rumah (backlog) yaitu tidak sesuai jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinnya.

1



Skema Penyebab Terjadinya Backlog

Perumahan kumuh yang tumbuh di permukiman padat pada kawasan yang dianggap strategis yaitu kawasan pusat kota dan sekitar industri.

2



Skema Penyebab Terjadinya Kumuh

Rumah tidak layak huni yang disebabkan ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang sehat dan aman, sehingga masyarakat membangun sendiri rumahnya dengan bahan bangunan seadanya.

3

Perumahan belum dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai, seperti akses jalan ke lokasi perumahan yang tidak memadai, kondisi jalan dengan kualitas yang rendah, tidak ada saluran drainase, kurangnya air bersih, tidak ada penerangan jalan umum, dan lain-lain.

4

Rumah liar (*squatters*). Dalam beberapa kasus masyarakat berhadapan dengan persoalan ketidakpastian status hukum penguasaan/penggunaan lahan, menempati lahan yang tidak direkomendasikan sebagai daerah hunian dan lahan publik.

Lahan semakin terbatas dan nilai lahan semakin meningkat.

6

Belum tersedianya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya mismatch pendanaan dalam pengadaan perumahan.

7



1.8. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup substansi materi pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencanan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sekurang-kurangnya memuat tentang:

1. Menjabarkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Arahan lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Rincian program bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Skala prioritas dan indikasi pentahapan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Pengaturan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keterbatasan dinas (dinas/instansi yang memiliki kewenangan dalam menangani perumahan dan kawasan permukiman masih terbatas jumlah dan ruang gerak/aktivitasnya) hal ini disebabkan antara lain:

- a. Belum tertampungnya aspirasi dan kepentingan masyarakat yang memerlukan rumah, termasuk hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
- b. Penyediaan lahan/tanah, prasarana dan sarana, teknologi, bahan bangunan, konstruksi, pembiayaan dan kelembagaan yang masih memerlukan pengaturan yang dapat mengakomodasikan muatan dan kapasitas lokasi.
- c. Belum terselesaikannya masalah ketidak-seimbangan pembangunan desa-kota (dikotomi kota-desa) yang telah menumbuhkan berbagai kesenjangan sosial ekonomi. Akibatnya desa menjadi kurang menarik dan dianggap tidak cukup prospektif untuk dihuni.
- d. Marak dan berkembangnya masalah sosial kemasyarakatan di daerah perkotaan (kesenjangan pendapatan, menajamkan strata antar kelompok dalam masyarakat, ketidaknyamanan bertempat tinggal, urban crime, dan lainnya).
- e. Kekurangan-siapapun dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan fisik dan fungsional kawasan perkotaan, sehingga kawasan kumuh tumbuh sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Hal tersebut diatas telah menumbuhkan kesadaran bahwa dalam menangani pembangunan perumahan dan permukiman, kepada seluruh "PELAKU KUNCI (stakeholder)" perlu memberikan wawasan mendasar tentang :

1. Visi, misi dan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman,
2. Penataan ruang yang berkaitan dengan upaya mengoptimalkan penggunaan ruang wilayah.
3. Strategi global pembangunan perumahan dan permukiman yang menyatakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan tanggung jawab masyarakat.
4. Pemecahan masalah permukiman yang pokok perumahan dan telah dikaitkan dengan unsur/faktor penentu lainnya seperti penyediaan tanah, prasarana dan sarana, teknologi bahan bangunan, konstruksi, pembiayaan dan kelembagaan.

Dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan tersebut diatas, strategi yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat, khususnya berisikan jabaran lebih lanjut dari program pembangunan prasarana dan sarana bersekala wilayah, khususnya dalam suatu kawasan perumahan dan kawasan permukiman.

f. Kedudukan RP3KP dalam pembangunan wilayah, keberadaanya diperlukan oleh :

- Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- Sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang tinggi intensitasnya, dalam mengatur dan menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisasi.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kedudukan RP3KP secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- Wabana informasi yang membuat arahan dan rambu-rambu kebijaksanaan, serta rencana pembangunan perumahan dan permukiman dalam suatu tingkatan wilayah dan kurun waktu tertentu (propinsi, kabupaten atau kota).
- Arahan untuk mengatur perimbangan pembangunan kawasan perumahan dan kawasan permukiman, antara lain:
 - > Kawasan perkotaan dan perdesaan.
 - > Kawasan perumahan dan kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lain dalam suatu wilayah tertentu.
 - > Kawasan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman terhadap rencana investasi jaringan prasaranan dan sarana, jaringan utilitas sertajaringan infrastruktur lain yang berskala regional.
- Sarana untuk mempercepat terbentuknya system permukiman yang mantap, terutama dalam kota yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), penetapan orde/kedudukan kota tersebut dalam kerangka pembangunan daerah, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat dalam :
 - > Menetapkan strategi pengembangan Kawasan perumahan dalam wilayah yang bersangkutan;
 - > Menetapkan strategi pengembangan jaringan investasi prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
 - > Menetapkan strategi pengembangan perumahan dan permukiman;
 - > Mekanisme keterpaduan pelaksanaan di setiap tingkatan kecamatan;

- > Mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- > Mekanisme penyaluran aspirasi dan peran serta masyarakat dan usaha swasta di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- > Mekanisme pergerakan dan pemerdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- > Daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan dan kawasan permukiman, yang merinci kawasan fungsional dalam kabupaten atau kota yang boleh dibangun, atau diekspansi menjadi kawasan perumahan dan kawasan permukiman.
- > Daftar daerah larangan (*negative list*) untuk pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman baru.



Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

BAB 2

PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.9. Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.1.1 Kebijakan Tata Ruang Aspek PKP

A. Tujuan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan penataan ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

”Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan”

B. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan dan strategi penataan ruang dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka **penguatan karakter dan potensi unggulan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu sistem perkotaan yang terpadu** dilakukan melalui strategi :

- a. memantapkan visi setiap ibukota kabupaten dan Kota Pangkalpinang dalam konstelasi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. menguatkan fungsi dan mendorong peran setiap pusat kegiatan sesuai dengan potensi lokal yang dirumuskan dalam visi masing-masing daerah;
 - c. mendorong dan memfasilitasi kerjasama ekonomi antar wilayah dalam kerangka kesatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - d. mendorong pengembangan kegiatan pertanian melalui pendekatan agropolitan dan minapolitan.
2. Strategi untuk **pengembangan ekonomi wilayah melalui perwilayahan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi berbasis agro-bahari** dilakukan melalui :
- a. membantu kabupaten/kota untuk memastikan sub-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi menjadi lokomotif ekonomi daerah;
 - b. mendorong dan membantu pembangunan kawasan industri maritim;
 - c. mendukung pengembangan sumber daya daerah agar mampu meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas pelayanan publik; dan
 - d. membantu kabupaten/kota membangun sistem ekonomi wilayah kota-desa yang terintegrasi secara internal maupun eksternal.
3. Dalam rangka **pengembangan sektor industri pengolahan hasil agro-bahari yang didukung infrastruktur yang memadai**, dilakukan melalui strategi:
- a. membangun kesepakatan antar kabupaten/kota untuk menetapkan sistem perwilayahan industri sesuai dengan potensi lokal yang ada;
 - b. mendorong dan membantu pengembangan kegiatan industri kabupaten/kota; dan
 - c. membantu dan membangun infrastruktur penunjang kegiatan industri.
4. Dalam rangka **pengembangan kegiatan wisata yang berbasis budaya lokal, heritage dan bahari serta ramah lingkungan**, dilakukan melalui strategi :
- a. memfasilitasi dan membangun kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengembangan wisata Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. mendorong dan membantu kabupaten/kota membangun dan merevitalisasi kawasan dan atau objek wisata potensial di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - c. membantu dan membangun prasarana dan sarana penunjang pariwisata sesuai kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Strategi untuk **pengelolaan pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal**, dilakukan melalui :

- a. pemetaan dan klasifikasi kondisi kawasan pertambangan serta status penguasaannya;
 - b. memfasilitasi terbangunnya klaster dan kelompok pertambangan untuk kegiatan pertambangan rakyat;
 - c. membantu dan melakukan langkah perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan pertambangan melalui pendekatan revitalisasi, rehabilitasi dan reklamasi;
 - d. melakukan revitalisasi, refungsionalisasi dan perbaikan lingkungan pada kawasan bekas pertambangan;
 - e. mendorong dan membantu kabupaten/kota melakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan; dan
 - f. memastikan setiap pelaku usaha pertambangan melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan.
6. Dalam rangka **Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan produktivitas lahan**, dilakukan melalui strategi:
- a. membantu kabupaten/kota untuk mengidentifikasi kebutuhan prasarana dan sarana wilayah yang mendukung pencapaian visi masing-masing kabupaten/kota;
 - b. merumuskan rencana pembangunan infrastruktur jangka menengah masing-masing kabupaten/kota dan yang bersifat lintas wilayah; dan
 - c. membangun infrastruktur yang menunjang produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan hasil laut.
7. Dalam rangka **penciptaan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar fungsi ruang dengan basis pembangunan berkelanjutan**, dilakukan melalui strategi :
- a. identifikasi dan perumusan strategi pembangunan kawasan tertinggal dalam konstelasi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan prasarana dan sarana wilayah tertinggal serta peningkatan produktivitas lahan;
 - c. memantapkan tata batas kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memastikan daya dukung lingkungan terhadap pengembangan kegiatan ekonomi, terutama untuk sektor pertambangan, industri, pertanian, perkebunan dan pariwisata.

C. Rencana Struktur Ruang

Secara garis besar rencana struktur ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi rencana sistem pusat kegiatan, dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sedangkan sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari (i) Sistem prasarana utama yang meliputi jaringan transportasi darat, laut dan udara; (ii) Sistem prasarana lainnya yang meliputi rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Salah satu bagian penting dari rencana struktur ruang terkait dengan pengembangan perumahan dan permukiman adalah kebijakan rencana sistem pusat kegiatan. Dimana kebijakan rencana sistem pusat kegiatan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Sistem Pusat Permukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung

Fungsi Pusat	Pusat	Kabupaten/ Kota	Peran
PKNp	Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	• Pusat pemerintahan Provinsi Kep. Bangka Barat, • Pusat perdagangan dan jasa regional • Pusat pendidikan & kesehatan regional • Pusat kebudayaan, dan pariwisata regional • Pusat pertumbuhan regional
PKW	Muntok	Kab. Bangka Barat	• Pusat pemerintahan Kab. Bangka Barat, • Pusat perdagangan dan jasa, • Pusat pendidikan & kesehatan, • Pusat kebudayaan, dan pariwisata.
	Tanjung Pandan	Kab. Belitung Timur	• Pusat kegiatan ekonomi regional (Belitung), pusat pembangkit tenaga listrik (PLTU) • Simpul peregrakan barang dan orang melalui laut (pelabuhan) • Pusat pengembangan pariwisata Belitung
	Manggar	Kab. Belitung	• Pusat administrasi pemerintahan kabupaten, • Pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran skala kabupaten, • Pusat pelayanan sosial ekonomi skala kabupaten, • Pusat pelayanan transportasi regional, • Pusat pengolahan, • Pusat pendidikan tinggi.

Fungsi Pusat	Pusat	Kabupaten/ Kota	Peran
PKWp	Koba	Kab. Bangka Tengah	• Pusat pengolahan/ pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan tetangga; • Simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga; • Jasa pemerintahan kabupaten/kota; serta • Pusat pelayanan publiknya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan di kabupaten tetangga.
	Toboali	Kab. Bangka Selatan	• Pusat Administrasi Pemerintahan (kabupaten, kecamatan, desa) • Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi • Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran • Pusat Perhubungan dan Komunikasi • Pusat Produksi Pengolahan • Pusat Pendidikan Tinggi
PKL	Kelapa	Kab. Bangka Barat	• pusat pemerintahan Kec. Kelapa, pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta pelayanan sektor pertanian dan perkebunan
	Parittiga		• pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta pelayanan sektor perkebunan dan perikanan
	Belinyu	Kab. Bangka	• Pusat pemerintahan kecamatan • Pelabuhan Laut Regional • Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru • Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan lainnya
	Sungailiat		• Pusat pemerintahan kecamatan • Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya • Wilayah pemasaran bagi produksi <i>hinterland</i> • Fungsi dan peran sebagai pusat Kabupaten Bangka akan turut menjadi pendorong perkembangan wilayah • Ketersediaan sarana prasarana yang relatif memadai • Pusat perdagangan & jasa • Kegiatan Wisata • Kesehatan • Pendidikan
	Sungai Selan	Kab. Bangka Tengah	• Pusat pemerintahan • Pusat pengembangan agropolitan
	Sijuk	Kab. Belitung	• Pusat perdagangan dan jasa kedua setelah Tanjung Pandan

Fungsi Pusat	Pusat	Kabupaten/ Kota	Peran
			• Pusat pengembangan perikanan • Pusat penembangan pariwisata
	Membalong		• Pusat pengembangan agropolitan
	Badau		• Pusat pemerintahan kabupaten • Pusat pelayanan jasa
	Kelapa Kampit	Kab. Belitung Timur	• Pusat administrasi pemerintahan kecamatan, • Pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran skala kawasan, • Pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan (beberapa kecamatan), • Pusat pelayanan transportasi skala kawasan/regional,
	Gantung	Kab. Belitung Timur	• Pusat permukiman perkotaan • Pusat pertanian
	Puding Besar	Kab. Bangka	• Pusat pemerintahan kecamatan • Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian • Wilayah pemasaran bagi produksi <i>hinterland</i> • Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya • Agropolitan • Perkebunan
	Pangkalanbaru	Kab. Bangka Tengah	• Pusat pemerintahan kecamatan • Pusat pelayanan transportasi (Bandar Udara) • Pusat perdagangan dan jasa
	Payung	Kab. Bangka Selatan	• Pusat Administrasi Pemerintahan (kabupaten, kecamatan, desa) • Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi • Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran
	Selata Nasik		• Pusat pengembangan minapolitan

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Selain itu, kebijakan lain yang tidak kalah penting terkait pengembangan perumahan dan permukiman adalah kebijakan rencana sistem transportasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan dan jaringan air minum yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Rencana Sistem Transortasi

Rencana sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Rencana sistem transportasi darat diarahkan untuk melayani pergerakan di dalam wilayah daratan dan untuk mendukung pergerakan dari/keluar wilayah Provinsi Kep.

Bangka Belitung melalui simpul-simpul transportasi baik pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan pelabuhan udara.

- b. Rencana sistem transportasi laut diarahkan untuk melayani pergerakan antar pulau di dalam wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan melayani pergerakan dari/keluar wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung.
 - c. Rencana sistem transportasi udara diarahkan untuk melayani pergerakan antar pulau di dalam wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan melayani pergerakan dari/keluar wilayah Provinsi Prov. Bangka Belitung.
 - d. Simpul – simpul transportasi baik pelabuhan, bandar udara dan terminal angkutan umum didukung dengan ketersediaan sistem prasarana jalan yang terstruktur sesuai dengan skala layanan dari masing-masing simpul-simpul transportasi tersebut.
2. Kebijakan Rencana Sistem Prasarana Energi Kelistrikan

Rencana pembangunan pembangkit energi listrik baru untuk jangka menengah adalah sebagai berikut.

- a. Pengembangan PLTU : PLTU 3 Air Anyir, PLTU Mentok, PLTU Bangka Baru II Toboali, PLTU Bangka Baru I Sungailiat, PLTU Bangka Baru III PLTU Suge, PLTU Belitung Baru III, PLTU IPP Belitung, PLTU Listrindo (Biomassa), PLTU Biomassa Bangka Tengah, PLTU Mempaya;
 - b. Pengembangan PLTG Bangka dan PLTG dan PLTGB Belitung;
 - c. Pengembangan PLT Hibrid pulau-pulau dan daerah terpencil dan PLTG Mini Gas;
 - d. PLTD Padang;
3. Kebijakan Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi

Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari rencana pengembangan :

- a. Jaringan teresterial;
- b. Jaringan satelit/stasiun bumi.

Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan sistem terestrial ditetapkan dengan kriteria :

- Jaringan dikembangkan secara berkesinambungan dan terhubung dengan jaringan nasional;
- Menghubungkan antar pusat kegiatan; dan
- Mendukung kawasan pengembangan ekonomi.

Pengembangan jaringan sistem satelit ditetapkan dengan kriteria :

- Mendukung dan melengkapi pengembangan jaringan terestrial;
- Mendukung pengembangan telekomunikasi seluler; dan
- Pemanfaatan bersama menara untuk paling sedikit 3 (tiga) operator setiap menara.

4. Kebijakan Rencana Sistem Jaringan Air Bersih

Selain sebagai air baku untuk keperluan rumah tangga (domestik), air bersih juga dibutuhkan untuk kawasan-kawasan tertentu seperti kawasan industri, pariwisata dan fasilitas umum (peribadatan, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain). Pengembangan jaringan pelayanan air bersih dikembangkan pada setiap pusat kegiatan sakal wilayah, lokal dan kawasan (PKW, PKL dan PPK). Untuk itu setiap daerah (kabupaten kota) perlu dan telah mengidentifikasi sumber air bersih di masing-masing daerah. Lebih rinci sistem penyediaan air bersih dan atau air minum untuk masing-masing kabupaten adalah :

- a. Kabupaten Bangka; selain mengandalkan air baku dari sungai yang ada yaitu sungai Sungai Batu Rusa, Sungai Layang, Sungai Mapur, Sungai Jeruk dan Sungai Menduk juga mencoba untuk memanfaatkan air “kolong” yang merupakan tampungan air bekas galian pertambangan yang sudah tua. Sumber air kolong ini bila memenuhi baku mutu air minum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Kolong yang dimaksud adalah Kolong Pemali, Merawang dan Belinyu. Kolong air Pemali berumur puluhan tahun dan berada di wilayah Kecamatan Pemali, luas kolong seluruhnya lebih kurang 20 ha dengan kedalaman 20 -30 m dengan kondisi air jernih. Kolong Merawang berada di Kecamatan Merawang dengan luas kolong 10 ha dengan kedalaman rata rata 15 m, kondisi air kotor dikarenakan adanya kegiatan reklamasi. Kolong Pasir Merah merupakan sumber air PDAM Tirta Bangka cabang Belinyu dengan luas 15 ha dengan kedalaman rata rata 4 m.
- b. Kabupaten Bangka Barat; Sumberdaya air permukaan di Kabupaten Bangka Barat umumnya berasal dari air sungai yang melintasi semua daerah kecamatan dan jumlahnya sekitar 17 buah sungai. Sungai Pelangas yang melintasi Kecamatan Simpang Tritip merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Bangka Barat dengan panjang sekitar 170.000 meter. Sedangkan Sungai Tempilang di Kecamatan Tempilang adalah sungai yang paling pendek dengan panjang hanya sekitar 200 meter. Sedangkan potensi sumberdaya air yang berasal dari air tanah di daerah yang diidentikan dengan “kawasan timah” tentu pada saat ini potensinya yang cukup besar dari sisi kuantitas.
- c. Kabupaten Bangka Selatan; sumber air bersih diperoleh dari air permukaan yang bersumber dari Wilayah DAS yang terdapat di Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : DAS Bantel, terletak sebagian besar di Kelurahan Toboali dan di Kelurahan

Tukak Kecamatan Toboali. DAS ini berupa hutan non mangrove seluas 5.940 Ha dan lahan terbuka 2.293 ha. DAS Kepoh, terletak bagian timur Kabupaten Bangka Selatan. DAS ini terdiri dari 9.455 ha hutan non mangrove, 5.454 ha lahan terbuka, 509 ha lahan terbuka recharge area (area imbuhan), 26 ha kolong recharge area. DAS Nyirih, terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari hutan non mangrove 42.040 ha, lahan terbuka 9.023 ha, lahan terbuka recharge area 1.641 ha. DAS Kurau, terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Bangka Selatan, DAS ini terdiri dari kawasan hutan non mangrove 23.224 ha, areal terbuka 10.217 ha dan lahan terbuka recharge area 3.110 ha dan kolong recharge area 285 ha. DAS Bangka Kota, terletak di sebelah barat wilayah Kabupaten Bangka Selatan, wilayah DAS ini hanya sebagian kecil saja yang masuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan. DAS ini terdiri dari Hutan non mangrove 24.935 ha, lahan terbuka recharge area 320 ha dan kolong recharge area 38 ha.

- d. Kabupaten Bangka Tengah; Sumber air di Kabupaten Bangka Tengah terdapat Air tanah, Sungai maupun Kolong (cekungan bekas tambang), seperti mata air di gunung Mangkol, aliran mata air di bukit Kejora di kecamatan Pangkalan Baru, dan Air Sadap di desa Perlang, Kecamatan Koba. Untuk sungai-sungai yang ada di kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Potensi cekungan bekas tambang timah atau yang sering disebut dengan kolong yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu alternatif sumber air baku dalam pemenuhan kebutuhan air. Dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah hanya 4 kecamatan yang memanfaatkan kolong sebagai salah satu sumber air baku. Ke empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Koba, Lubuk, Simpang Katis, Sungai Selan dan masing-masing kecamatan terdiri dari 2 kolong seperti yang dijelaskan pada sub bab diatas.
- e. Kota Pangkal Pinang; untuk sumber air baku Kota Pangkal Pinang memanfaatkan kolam atau waduk retensi Kacang Pedang. Kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang adalah kawasan yang terdiri atas daerah cathment area (daerah pengaliran) seluas 46,90 km², waduk (kolam retensi) seluas 60 hektar untuk penumpukan/penampungan air sebanyak 3,4 juta m³ yang berfungsi antara lain sebagai pengendali banjir dan air genangan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Rangkui, sebagai sumber air baku bagi PDAM, tempat intake dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pedindang dengan kapasitas 500 meter perdetik atau setara dengan kapasitas 30.000 sambungan rumah.
- f. Kabupaten Belitung; air kolong merupakan sumber air baku instalasi pengelolaan air (IPA) PDAM Manggar di Dusun Pancur Desa Padang Manggar. Kedepan beberapa

kolong lain yang telah dididentifikasi akan dikembangkan juga sebagai sumber air minum, Secara keseluruhan di Pulau Belitung sendiri terdapat 343 kolong dengan luas 677,14 hektar. Pada sisi lain dalam rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu direncanakan untuk memanfaatkan air laut sebagai air baku melalui proses saltinasi.

g. Kabupaten Belitung Timur; sumber air bersih di kabupaten Belitung Timur juga mengandalkan Kolong (danau bekas tambang) yang terebar di setiap kecamatan. Namun kabupaten ini juga dilintasi oleh Sungai Lenggang yang berpotensi sebagai sumber air baku, baik untuk minum maupun kebutuhan industri.

5. Sistem Prasarana Persampahan

Untuk persampahan perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R (*reuse, reduce dan recycling*). Pendekatan ini akan memberikan solusi terhadap persoalan klasik persampahan, khususnya masalah persampahan perkotaan (pusat-pusat kegiatan). Konsekuensi yang harus dihadapi diantaranya adalah penerapan penegelolaan sampah terpadu, mulai dari rumah tangg/pasar sampai pengolahan akhir sampah. Secara regional dalam kontkes RTRW Provinsi perlu dikembangkan setidaknya 3 unit tempat pemrosesan akhir sampah (TPA), yaitu pada Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Bangka.

6. Sistem Prasarana Pengolahan Limbah

Pengolahan limbah ditekankan pengadaannya untuk wilayah permukiman, pariwisata dan kawasan industri. Untuk kawasan permukiman, terutama permukiman baru perlu dikembangkan IPAL komunal. Sementara itu untuk kawasan wisata diperlukan sistem IPAL sehingga dapat menciptakan kawasan wisata dengan lingkungan yang sehat. Untuk kawasan industri tentunya harus dilengkapi IPAL yang mampu mengolah limbah industri menjadi layak buang ke badan penerima, baik berupa limbah industri biasa (black water) maupun yang sifatnya beracun (bahan beracun berbahaya/B3).



D. Rencana Pola Ruang

Secara garis besar kebijakan rencana pola ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk kawasan permukiman di arahkan pengembangannya di kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direncanakan seluas kurang lebih 59.188 Ha, meliputi meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan diseluruh wilayah Provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan/pelayanan seperti kawasan perkotaan Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Koba, Toboali, Tanjungpandan dan Manggar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pada wilayah belakang (*hinterland* dari pusat-pusat permukiman yang disebut di atas.

Seperti umumnya kawasan permukiman perkotaan, selalu dikembangkan secara lebih efisien dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan prasarana permukiman yang memadai dan sebgayaan berbayar. Sementara itu, kendati juga harus disediakan kelengkapan prasarana permukiman yang memadai, namun itensitasnya untuk kawasan permukiman perdesaan tidak terlalu tinggi.

E. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Bidang Ekonomi
 - a. Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah
 - b. Kawasan terpadu Mandiri Batu Betumpang Kabupaten Bangka Selatan
 - c. Kawasan Minapolitan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan
 - d. Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik di Kabupaten Belitung
 - e. Kawasan Ekonomi Khusus Suge di Kabupaten Belitung
 - f. Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung
 - g. Kawasan Terpadu Mandiri Gantung di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur
 - h. Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK) di Kabupaten Belitung Timur
 - i. Kawasan Pelabuhan ASDP Manggar di Kabupaten Belitung Timur.

2. Bidang Sosial Budaya; adalah Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan STAIN di Kabupaten Bangka, Kota Tua Muntok di Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung
3. Bidang Lingkungan yaitu Pengelolaan Cagar Alam Gunung Lalang (Belitung), Gunung Menumbing (Bangka Barat), Hutan Konservasi Gunung Maras (Bangka), Gunung Mangkol (Bangka Tengah), Gunung Permisan (Bangka Selatan), Jering Menduyung (Bangka Barat), Kawasan Kepulauan Buku Limau (Belitung Timur), Taman Kehati (Belitung); Kota Kapur (Bangka), dan Karantina Hewan (Pulau Nadu, Kabupaten Belitung)

F. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Ketentuan umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap kawasan sesuai dengan rencana tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada kawasan serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Beberapa ketentuan pemanfaatan ruang kawasan permukiman yang diatur dalam kebijakan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- a. Penetapan kawasan permukiman sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
- b. Pengembangan kawasan permukiman didukung sarana dan prasarana jaringan transportasi, energi, telekomunikasi dan sumber daya air dan fasilitas sosial-ekonomi yang memadai;
- c. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya lain diperkenankan dengan persyaratan dan tidak dibenarkan mengubah fungsi utama kawasan ini dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di sekitar kawasan permukiman harus sesuai dengan fungsi utama kawasan ini;
- f. Untuk menjamin fungsi utama kawasan permukiman secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi ditingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.



2.1.2 Batas Administrasi Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 104° 50' sampai 109° 30' Bujur Timur dan 0° 50' - 4° 10' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah:

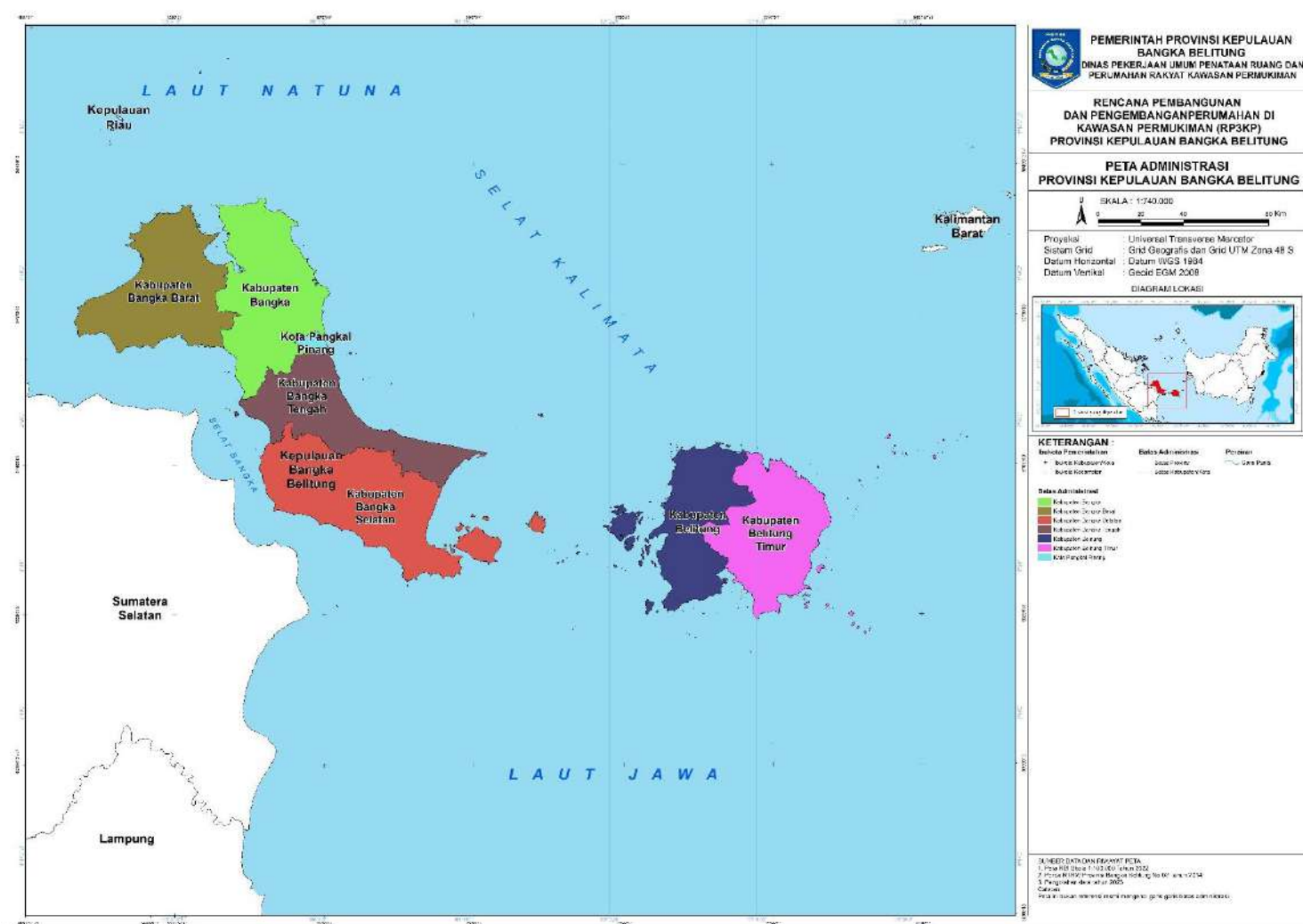
- ◆ Di sebelah barat dengan Selat Bangka
- ◆ Di sebelah timur dengan Selat Karimata
- ◆ Di sebelah utara dengan Laut Natuna
- ◆ Di sebelah selatan dengan Laut Jawa

Luas Provinsi Bangka Belitung mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km² atau 79,90 persen. Secara administratif pemerintahan, Provinsi Bangka Belitung memiliki 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Bangka dengan luas wilayah 2.950,68 km²; Luas masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut. Untuk memberikan gambaran letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat Gambar 3.1, Peta Orientasi wilayah perencanaan.

Tabel 2.2 Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kota/Kabupaten

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)
Bangka	Sungai Liat	2.950,69
Bangka Barat	Muntok	2.820,61
Bangka Tengah	Koba	2.126,36
Bangka Selatan	Toboali	3.607,08
Belitung	Tanjung Pandan	2.293,69
Belitung Timur	Manggar	2.506,91
Pangkal Pinang	Pangkal Pinang	118,80
Luas Daratan		16.424, 14
Luas Total		81.725,14

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2023



Gambar 2.3 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.1.3 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (semak belukar) mencapai 112.019 Ha. Lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel 1.2 dan gambar Peta Tutupan Lahan. Dari seluruh luas lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 69 persennya, digunakan untuk pertanian tegal / kebun / ladang / huma; tambak, kolam / tebat / empang; lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara / swasta dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel 2.3 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persen
1	Bandara/Pelabuhan	253,51	0,02
2	Belukar	306.131,80	18,31
3	Belukar Rawa	73.471,99	4,39
4	Hutan Lahan Kering Primer	486,43	0,03
5	Hutan Lahan Kering Sekunder	83.887,91	5,02
6	Hutan Mangrove Primer	22.789,09	1,36
7	Hutan Mangrove Sekunder	40.665,51	2,43
8	Hutan Rawa Primer	0,15	0,00
9	Hutan Rawa Primer	277,27	0,02
10	Hutan Rawa Sekunder	49.148,81	2,94
11	Lahan Terbuka	8.381,27	0,50
12	Perkebunan	253.359,81	15,15
13	Permukiman	38.845,94	2,32
14	Pertambangan	155.168,33	9,28
15	Pertanian Lahan Kering	56.855,22	3,40
16	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	544.496,27	32,57
17	Rawa	10.673,09	0,64
18	Savana	7.423,64	0,44
19	Sawah	4.705,22	0,28
20	Tambak	522,24	0,03
21	Transmigrasi	2.416,80	0,14
22	Tubuh Air	11.945,68	0,71
	Jumlah	1.671.905,98	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

2.1.4 Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan PKP

A. 2.1.4.1 RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 - 2025

Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semula dan telah dilaksanakan pada tahap I (2005-2012) dan tahap II (2012-2017) adalah **“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera”**, untuk yang akan dilaksanakan pada tahap III (2017-2022) dan tahap IV (2022-2025) yaitu:

**“TERWUJUDNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEBAGAI WILAYAH AGRI-BAHARI YANG MAJU DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN TAHUN 2025”**

dirubah menjadi:

**“PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU,
SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025”**

Adapun pernyataan visi ini mengandung 4 (empat) makna yaitu :

1. Provinsi Kepulauan adalah merupakan cerminan Bangka Belitung sebagai provinsi yang berkarakteristik kepulauan dan merupakan bagian dari NKRI, untuk turut andil dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah.
2. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif sehingga dapat setara dengan daerah lain di Indonesia, bahkan dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dan ketatapemerintahan yang baik.
3. Sejahtera, merupakan tujuan pembangunan Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan pemenuhan atas hak-hak dasar masyarakatnya dalam berbagai aspek kehidupan yaitu, kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan peningkatan pendapatan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; serta mendapatkan rasa aman.
4. Berwawasan Lingkungan adalah berubahnya sikap mental masyarakat yang lebih berorientasi pada kehidupan jangka panjang melalui keinginan yang kuat untuk menjaga kelestarian SDA serta sikap yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Dari pernyataan visi diatas, maka perwujudan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Perwujudan visi 1. Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang berkarakteristik kepulauan untuk maju.
- Perwujudan visi 2. Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang berkarakteristik kepulauan untuk mensejahterakan masyarakat.
- Perwujudan visi 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang berkarakteristik kepulauan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 pada Tahun 2017, misi yang akan dilaksanakan pada tahap III (2017-2022) dan tahap IV (2022-2025) yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari;
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;
3. Mewujudkan pemerintahan yang Amanah;
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan;
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

**B. 2.1.4.2 Rencana Pembangunan Daerah
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026**

Provinsi

Tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah;
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM;
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi;
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi;
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

Untuk mencapai ke 6 tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 19 sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian;
2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan;
3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian;
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan;
5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan;
6. Meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan domestik;
7. Meningkatnya Ekspor;

8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah;
9. Meningkatnya Pembangunan Manusia;
10. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi;
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
12. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur;
13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang;
14. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana;
15. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan;
16. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk;
17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan;
18. Meningkatkan Kesempatan Kerja;
19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup.

C. 2.1.4.3 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan SK Kumuh masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kawasan kumuh wewenang provinsi seluas 154,6 Ha yang terdapat pada 13 kawasan. Kawasan kumuh wewenang provinsi di Kabupaten Belitung Seluas 22,99 Ha, Kabupaten Belitung Timur seluas 13,86 Ha, Kabupaten Bangka Barat seluas 10 Ha, Kabupaten Bangka seluas 21,14 Ha, Kabupaten Bangka Selatan seluas 27,01 Ha dan Kota Pangkalpinang seluas 59,6 Ha. Sedangkan di Kabupaten Bangka Tengah tidak terdapat kawasan kumuh wewenang provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Kawasan Kumuh Wewenang Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Kab/Kota	Kawasan Kumuh Provinsi		Luas (Ha)
		Kecamatan	Kel/Desa	
1	Belitung	Tanjung Pandan	Parit	12,7
			Air Saga	10,29
2	Bangka Barat	Tempilang	Air Lintang	10
3	Bangka	Belinyu	Mantung	10,97
		Sungailiat	Sungailiat (Nelayan 2)	10,17
4	Belitung Timur	Gantung	Gantung (Trans Danau Nujau)	13,86
5	Pangkalpinang	Rangkui	Keramat (RT007-RW003)	12,5
		Rangkui	Parit Lalang (RT001-RW001)	10,3
			Parit Lalang (RT002-RW003)	12,5
6	Bangka Selatan	Lepar	Penutuk	10,32
		Kepulauan Pongok	Pongok	11,53
7	Bangka Tengah	Tidak Terdapat Kawasan Kumuh Provinsi		
JUMLAH				125,14

Sumber:

SK Kumuh Kabupaten Belitung Nomor 188.45/775/KEP/DPUPR/2020
 SK Kumuh Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.45/310.A/4.3.1.1/2020
 SK Kumuh Kabupaten Bangka Nomor 188.45/1335/DINPERKPP/2020
 SK Kumuh Kabupaten Belitung Timur Nomor 188.45-695 Tahun 2020
 SK Kumuh Kota Pangkalpinang Nomor 237/KEP/PERKIM/VII/2022
 SK Kumuh Kabupaten Bangka Selatan Nomor 188.45/19.d/DISPERKIM/2023
 SK Kumuh Kabupaten Bangka Tengah Nomor 188.45/152/DIPERKIMHUB/2022

D. 2.1.4.4 Program Pembangunan Daerah Bidang PKP

Berdasarkan arahan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 terdiri dari:

1. Program Pengembangan Perumahan:
 - Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi
2. Program Kawasan Permukiman
 - Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan
 - Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 - Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU
4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 - Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat kemampuan menengah yang ditingkatkan

E. 2.1.4.5 Program dan Kegiatan Sesuai Dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Program dan kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah bidang perumahan dan permukiman wewenang provinsi adalah sebagai berikut:

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1	04	02	101		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	101	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	02	101	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
1	04	02	101	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
1	04	02	101	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen
1	04	02	101	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	02	101	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	102		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	102	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang
1	04	02	102	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang
1	04	05	101	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi
1	04	05	101	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan
1	04	05	101	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan
1	04	05	101	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	06	101		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah			
1	04	06	101	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan

1.10. Profil Umum

2.2.1 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya

2.2.1.1 Kondisi Ekonomi

A. Pertumbuhan ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah dalam mengukur kemandirian keuangan daerah, karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Selain itu, jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah dengan memberikan kemudahan dalam investasi bagi pihak swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. PAD juga dapat menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil.

Jika tingkat kemandirian suatu daerah rendah sekali (kontribusi 0-25%), dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian rendah (kontribusi >25-50%), itu artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori sedang (kontribusi >50-75%), menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori tinggi (kontribusi >75%), bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

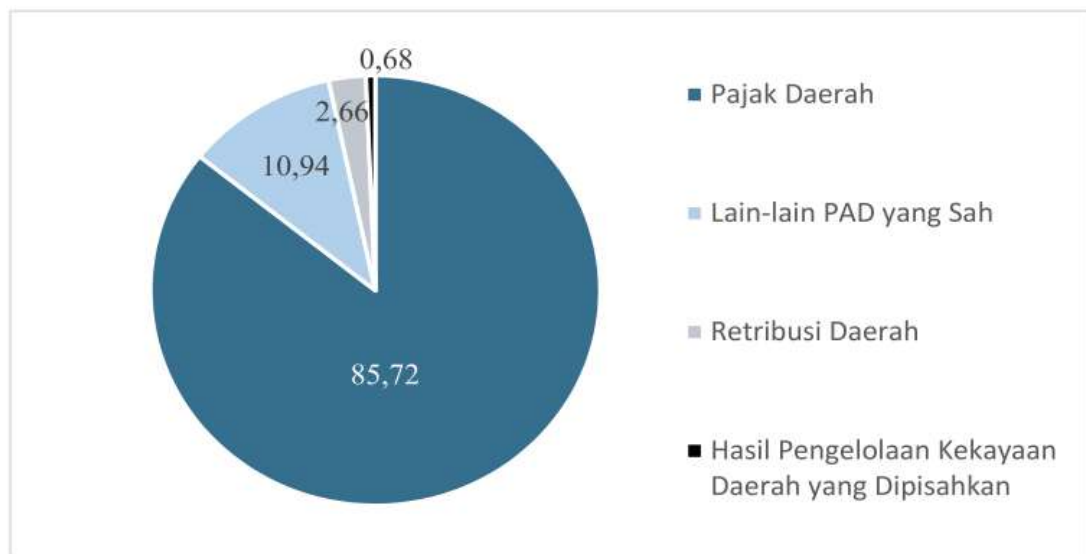
Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD 2021 mencapai 895,763 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 33,07 persen terhadap total pendapatan daerah. Nilai kontribusi ini terkategori sebagai daerah dengan kategori kemandirian rendah. Ini artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena dianggap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Nilai PAD yang mencapai 895,763 miliar rupiah merupakan penjumlahan dari rincian komponen PAD mulai dari pajak daerah sebesar 813,810 miliar rupiah, retribusi daerah sebesar 5,946 miliar rupiah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 5,714 miliar rupiah serta lain-lain PAD yang sah sebesar 70,293 miliar rupiah.

Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021 mencapai 30,04 persen atau 823,810 miliar rupiah. Namun demikian pada anggaran tahun 2022, komponen pajak daerah ditargetkan lebih rendah yakni 698,201 miliar rupiah. Walaupun lebih kecil namun komponen ini mengambil peran yang lebih besar pada anggaran tahun 2022 mencapai 36,22 persen.

Retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,22 persen atau 5,946 miliar rupiah. Namun demikian, pada anggaran tahun 2022 komponen retribusi daerah ditargetkan lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni hanya 5,500 miliar rupiah atau setara dengan 0,29 persen. Menariknya pada komponen lain-lain PAD yang sah mencatatkan realisasi 70,293 miliar rupiah atau setara 2,59 persen. Oleh karena itu pada tahun 2022, komponen ini ditargetkan menerima pendapatan sebesar 89,132 miliar rupiah atau mengambil peran lebih besar menjadi 4,62 persen.

Jika dilihat komposisi anggaran PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jenis Pendapatannya pada tahun 2022, maka diketahui bahwa pajak daerah mengambil peran yang dominan mencapai 85,72 persen dari total PAD. Kemudian disusul oleh anggaran lain-lain PAD yang sah sebesar 10,94 persen dan retribusi daerah sebesar 2,66 persen. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengambil porsi yang paling kecil yakni hanya 0,68 persen saja. Detil informasi tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2.4 Komposisi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jenis Pendapatan (persen), 2021-2022

Pada tahun 2021 total realisasi pendapatan dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6,647 triliun rupiah. Sumber utama pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara pada tahun 2022, anggaran pendapatan dari seluruh kabupaten/kota ditargetkan sebesar 6,430 triliun rupiah. Nilai ini mengalami penurunan dengan selisih mencapai 0,217 triliun rupiah. Secara garis besar tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong sangat rendah karena kontribusi PAD yang kurang dari 25 persen baik di realisasi 2021 maupun anggaran 2022.

Tabel 2.5 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Jenis Pendapatan, 2021 – 2022

Jenis Pendapatan	Nilai (Juta Rupiah)		Kontribusi (Persen)	
	Realisasi 2021	Anggaran 2022 *)	Realisasi 2021	Anggaran 2022 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Daerah	6.647.158	6.430.220	100	100
1. Pendapatan Asli Daerah	831.153	821.602	12,50	12,78
1.1 Pajak Daerah	402.230	461.740	6,05	7,18
1.2 Retribusi Daerah	49.830	71.108	0,75	1,11
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.308	33.183	0,50	0,52
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	345.785	255.571	5,20	3,97
2. Pendapatan Transfer	5.560.283	5.533.976	83,65	86,06
2.1 Pemerintah Pusat	5.210.363	5.101.646	78,38	79,34
2.2 Antar Daerah	349.920	432.330	5,26	6,72
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	255.722	74.642	3,85	1,16
3.1 Pendapatan Hibah	70.435	-	1,06	-
3.2 Dana Darurat	-	-	-	-
3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	185.288	74.642	2,79	1,16

Pengelolaan keuangan negara/daerah yang baik sangat penting agar uang negara dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik adalah adanya pemberian kewenangan yang seimbang kepada pengelola keuangan negara/daerah. Kontribusi PAD yang kecil mengindikasikan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan di level kabupaten/kota. Tentu saja ini merupakan indikator yang kurang baik dalam struktur pendapatan daerah dan menjadi beban pemerintah pusat untuk jangka panjang. Namun demikian ini tidak terlepas dari beberapa aset dan sumber daya alam pemerintah pusat yang berada di daerah dan dikelola langsung

oleh pemerintah pusat sebelum akhirnya dikirimkan dalam bentuk transfer ke setiap daerah.

Realisasi PAD kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 mencapai 831,153 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 12,50 persen terhadap total Pendapatan. Nilai PAD ini merupakan penjumlahan dari rincian komponen PAD mulai dari pajak daerah sebesar 402,230 miliar rupiah, retribusi daerah sebesar 49,830 miliar rupiah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 33,308 miliar rupiah serta lain-lain PAD yang sah sebesar 345,785 miliar rupiah.

Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021 mencapai 6,05 persen. Namun demikian pada anggaran tahun 2022, komponen pajak daerah ditargetkan mencapai 461,740 miliar rupiah. Target ini mengambil peran yang lebih besar pada anggaran tahun 2022 mencapai 7,18 persen.

Retribusi Daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan dari kabupaten/kota di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,75 persen. Namun demikian pada anggaran tahun 2022, komponen retribusi daerah ditargetkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni hanya 71,108 miliar rupiah atau setara dengan peran 1,11 persen.

Menariknya pada komponen lain-lain PAD yang Sah mencatatkan realisasi 345,785 miliar rupiah atau setara 5,20 persen di tahun 2021. Ini menjadi komponen dengan kontribusi terbesar kedua setelah pajak daerah. Selanjutnya pada tahun 2022, komponen ini ditargetkan menerima pendapatan sebesar 255,571 persen atau mengambil peran lebih kecil menjadi 3,97 persen saja.

Pada realisasi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021, jumlah pendapatan transfer menjadi jenis pendapatan terbesar mencapai 83,65 persen atau 5,560 triliun rupiah. Pada tahun 2022 ditargetkan naik menjadi 86,06 persen namun secara nilai hanya sebesar 5,533 triliun rupiah. Transfer pemerintah pusat mendominasi realisasi pendapatan pemerintah kabupaten/kota mencapai 5,210 triliun rupiah atau mencapai 78,38 persen.

Selanjutnya di tahun 2022, ditargetkan pendapatan transfer dari pemerintah semakin lebih kecil di angka 5,101 triliun rupiah atau 79,34 persen. Pendapatan transfer antar daerah pada realisasi 2021 tidak cukup besar dibandingkan dengan transfer

pemerintah pusat. Nilai dari realisasi pendapatan transfer anta daerah mencapai 349,920 miliar rupiah di tahun 2021 atau 5,26 persen saja. Jenis pendapatan ini ditargetkan lebih tinggi di tahun 2022 mencapai 432,330 miliar rupiah atau mencapai 6,72 persen.

B. PDRB dan laju pertumbuhan PDRB

1) PDRB

Secara administratif, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekitar 1,49 juta jiwa di tahun 2022 (hasil proyeksi penduduk SP2020 interim). Jumlah penduduk tersebut akan mampu mendorong pergerakan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Produk Domestik Regional Bruto atau yang dikenal dengan PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian serta sebagai indikator dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang diukur berdasarkan total PDRB atas dasar harga berlaku 7 kabupaten/kota mencapai Rp. 95,32 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 57,85 triliun.

Tabel 2.6 PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)

Kabupaten/kota	PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	13.310.565,01	13.765.427,63	13.932.937,70	16.166.007,55	17.958.776,52
Belitung	9.314.624,93	9.856.802,27	9.826.820,91	11.011.041,86	12.322.373,86
Bangka Barat	13.817.298,69	14.157.204,80	13.414.979,73	15.431.570,35	16.759.677,74
Bangka Tengah	8.213.317,39	8.566.895,53	8.447.020,56	9.372.097,88	10.524.128,79
Bangka Selatan	8.457.248,45	8.664.389,95	8.679.074,82	9.776.172,96	10.692.535,24
Belitung Timur	7.405.859,48	7.713.766,85	7.833.738,65	8.882.481,99	9.785.767,95
Pangkalpinang	12.955.301,61	13.648.934,02	13.454.648,74	15.375.991,21	17.277.544,15

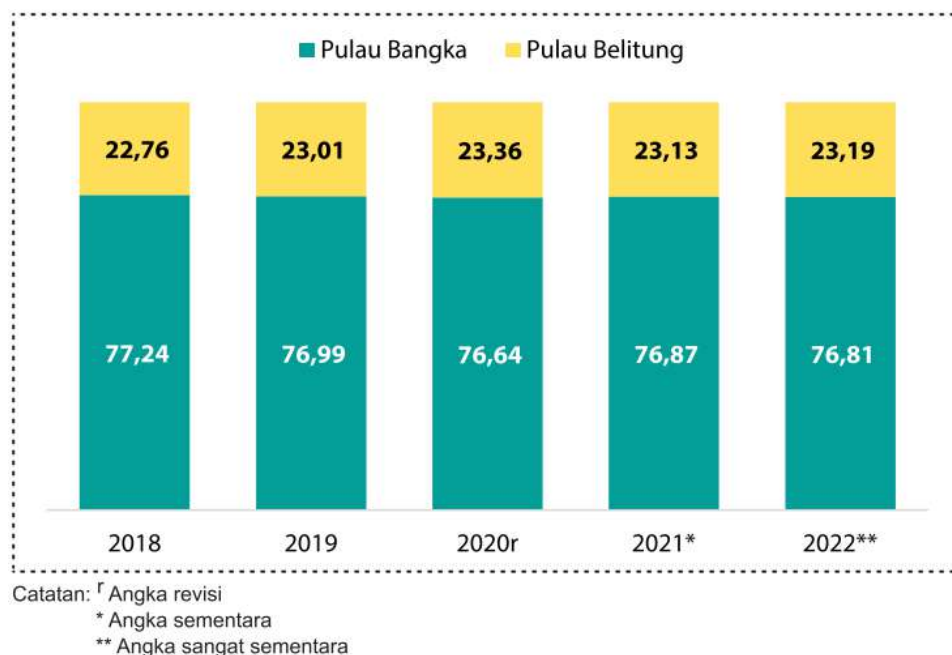
Sumber: PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Tabel 2.7 PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)

Kabupaten/kota	PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	9.778.032,33	10.058.788,63	9.988.799,17	10.733.859,65	11.256.218,82
Belitung	6.290.863,35	6.500.417,14	6.352.858,79	6.710.006,83	7.093.355,47
Bangka Barat	10.177.199,00	10.895.222,51	10.312.212,39	10.332.996,45	10.540.422,63
Bangka Tengah	5.812.697,46	5.883.095,61	5.715.596,35	5.987.136,71	6.352.639,47
Bangka Selatan	6.024.205,32	6.176.844,59	6.057.875,86	6.276.797,99	6.469.331,04
Belitung Timur	5.326.115,79	5.499.978,38	5.465.459,44	5.714.794,20	5.931.759,93
Pangkalpinang	8.782.788,55	9.069.279,72	8.797.128,81	9.611.439,98	10.208.340,29

Sumber: PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

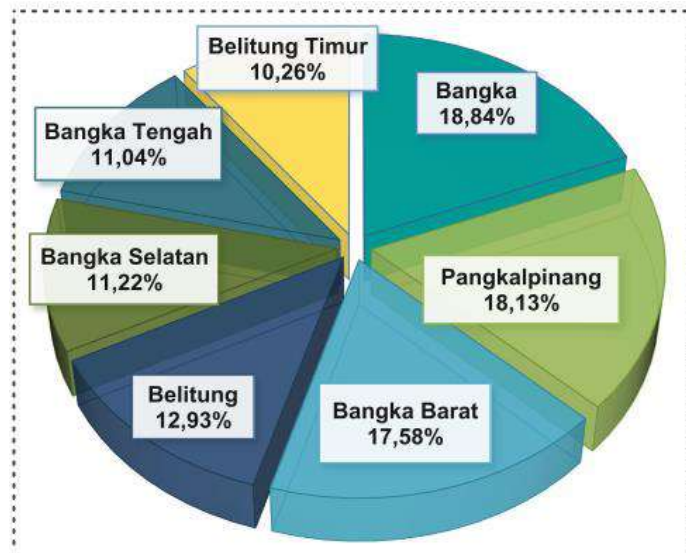
Sebagai pulau dengan luas terbesar, pada tahun 2022 Pulau Bangka mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibanding Pulau Belitung. Nilai tambah atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) yang diciptakan Pulau Bangka sebesar Rp73,21 triliun atau menyumbang sebesar 76,81 persen terhadap total PDRB 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara Pulau Belitung mampu menyumbang sebesar 23,19 persen dengan nilai tambah atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp22,11 triliun. Selama periode 2018-2022, kontribusi Pulau Belitung terhadap pembentukan total PDRB 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menunjukkan tren peningkatan, sedangkan kontribusi Pulau Bangka cenderung menunjukkan tren penurunan.



Gambar 2.5 Distribusi PDRB Menurut Pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2018-2022

Pada tahun 2022, nilai PDRB ADHB Kabupaten Bangka sebesar Rp17,96 triliun sementara nilai PDRB ADHB Kabupaten Belitung sebesar Rp12,32 triliun. Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Bangka mencapai 24,53 persen terhadap PDRB Pulau Bangka dan 18,84 persen terhadap total 7 kabupaten/kota. Sementara itu Kabupaten Belitung sebagai penopang terbesar di Pulau Belitung berkontribusi sebesar 55,74 persen terhadap pembentukan PDRB Pulau

Belitung pada tahun 2022. Sementara terhadap total PDRB 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkontribusi sebesar 12,93 persen.



Gambar 2.6 Distribusi PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2022

Dilihat menurut 7 (tujuh) kabupaten/kota, pada tahun 2022 Kabupaten Belitung Timur merupakan kabupaten yang menghasilkan nilai tambah paling kecil yaitu sebesar Rp9,79 triliun untuk PDRB ADHB, sedangkan PDRB ADHK-nya sebesar Rp. 5,93 triliun.

Di sisi lain, Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat kedua dengan nilai PDRB ADHB sebesar 17,28 triliun pada tahun 2022. Dengan nilai tambah tersebut, Kota Pangkalpinang mampu memberikan kontribusi sebesar 18,13 persen terhadap total PDRB 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebesar 23,60 persen terhadap PDRB Pulau Bangka pada tahun 2022.

2) Laju Pertumbuhan PDRB

Untuk melihat perkembangan riil perekonomian dari waktu ke waktu, maka dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK secara berkala akan menggambarkan perkembangan riil produksi tanpa dipengaruhi faktor harga, baik secara keseluruhan maupun per kategori. Kondisi perekonomian di Pulau Bangka, Pulau Belitung dan secara keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2018-2020 menunjukkan pola penurunan, namun kembali meningkat pada tahun 2021.

Adanya perubahan peraturan pemerintah tahun 2018 yang mengatur tentang ekspor timah menyebabkan ekspor logam timah menjadi terhambat sehingga membuat perusahaan smelter swasta yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhenti beroperasi karena tidak dapat melakukan ekspor logam timahnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian mengingat timah merupakan salah satu produk unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga turut andil dalam perlambatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rendahnya harga komoditas strategis perkebunan Bangka Belitung seperti kelapa sawit, karet dan lada membuat produktivitasnya menurun pada tahun 2018-2019. Perlambatan kinerja perekonomian ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang mulai melanda sejak tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi yang cukup signifikan pada perekonomian Pulau Bangka, Pulau Belitung maupun secara keseluruhan. Namun pada tahun 2021, perekonomian Pulau Bangka dan Pulau Belitung kembali menunjukkan perbaikan yang didukung oleh pertumbuhan yang terjadi pada seluruh lapangan usaha. Sementara tahun 2022 pertumbuhan masih tumbuh positif walaupun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Catatan: ^r Angka revisi

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Bangka, Pulau Belitung dan Total Bangka-Belitung (persen), 2018-2022

Dilihat secara spasial, pergerakan pertumbuhan ekonomi antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung terlihat sejalan. Pada tahun 2018, perekonomian Pulau Bangka tumbuh sebesar 4,65 persen dan terus melambat hingga menjadi sebesar 3,72 persen di tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, perekonomian Pulau Bangka mengalami kontraksi sebesar 2,88 persen. Namun pada tahun 2021, perekonomian Pulau Bangka kembali meningkat menjadi sebesar 5,07 persen dan tumbuh sebesar 4,39 di tahun 2022. Pola pergerakan yang sama juga terjadi di Pulau Belitung. Pada tahun 2018, perekonomian Pulau Belitung tumbuh sebesar 4,85 persen dan melambat hingga menjadi sebesar 3,30 persen di tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, saat terjadi pandemi Covid-19, perekonomian Pulau Belitung mengalami kontraksi yang lebih rendah dibanding Pulau Bangka yakni hanya sebesar 1,52 persen. Namun pada tahun 2021, perekonomian Pulau Belitung kembali meningkat menjadi sebesar 5,13 persen dan sebesar 4,83 di tahun 2022.

Seiring dengan pulihnya pasca Covid-19, berdampak pada pemulihan perekonomian. Pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan yang tinggi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Semakin menurunnya kasus positif Covid-19 dan semakin longgarnya persyaratan bepergian mendorong semakin tingginya mobilitas penduduk yang berdampak pada peningkatan kinerja lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Peningkatan mobilitas penduduk ini juga ikut mendorong kinerja beberapa lapangan usaha pendukung pariwisata seperti Aktivitas Biro/Agen Perjalanan, Akomodasi dan makan minum. Selain itu, tahun 2022 ini umroh sudah dibuka kembali, syarat umroh dipermudah dan pemerintah Arab Saudi memberikan kelonggaran bagi jamaah umroh pasca pandemi, sehingga mendorong peningkatan yang cukup signifikan juga pada kategori Jasa Perusahaan. Namun demikian masih ada beberapa kategori yang mengalami kontraksi pertumbuhan seperti Administrasi Pemerintah, Pertambangan, Konstruksi dan Pengadaaan Listrik dan Gas.

Dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2022 Kota Pangkalpinang mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 6,21 persen, diikuti oleh Kabupaten Bangka Tengah yang tumbuh sebesar 6,10 persen. Sementara itu, kabupaten yang mengalami pertumbuhan terendah yakni Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,01 persen. Laju pertumbuhan pada masing-masing kabupaten ini dipengaruhi oleh pertumbuhan yang terjadi pada kategori lapangan usaha

penyusunnya. Semakin besar kontribusi suatu kategori lapangan usaha, maka semakin besar pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Kabupaten/kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pulau Bangka	4,65	3,72	-2,88	5,07	4,39
Bangka	4,52	2,87	-0,70	7,46	4,87
Belitung	5,38	3,33	-2,27	5,62	5,71
Bangka Barat	5,20	7,06	-5,35	0,20	2,01
Bangka Tengah	3,42	1,21	-2,85	4,75	6,10
Bangka Selatan	4,52	2,53	-1,93	3,61	3,07
Pulau Belitung	4,85	3,30	-1,52	5,13	4,83
Belitung Timur	4,22	3,26	-0,63	4,56	3,80
Pangkalpinang	5,08	3,26	-3,00	9,26	6,21

Sumber: PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Kabupaten/kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pulau Bangka	2,49	4,23	-1,78	12,44	9,10
Bangka	1,89	4,02	2,28	14,46	9,62
Belitung	2,39	3,00	-3,49	13,56	7,24
Bangka Barat	0,98	4,98	-4,90	8,95	10,30
Bangka Tengah	1,51	3,11	3,60	11,38	8,18
Bangka Selatan	4,87	5,96	-6,12	12,07	10,23
Pulau Belitung	3,13	5,76	1,45	11,11	9,65
Belitung Timur	4,44	6,47	1,53	10,63	10,51
Pangkalpinang	1,53	4,87	1,19	11,71	8,57

Sumber: PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari sisi kualitas pembangunan manusia yang dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta berada di peringkat tertinggi dengan nilai IPM sebesar 81,65 dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Sementara itu, Provinsi Papua berada di peringkat terendah dengan nilai IPM sebesar 61,39. IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 mencapai 72,24 (kategori tinggi) dan berada pada peringkat ke-17 secara nasional.

Perkembangan IPM masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selama Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang cukup baik. IPM Tertinggi yaitu Kota Pangkalpinang sebesar 79,24 kemudian disusul oleh Kabupaten Belitung sebesar 73,38, sementara IPM terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan sebesar 67,95. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

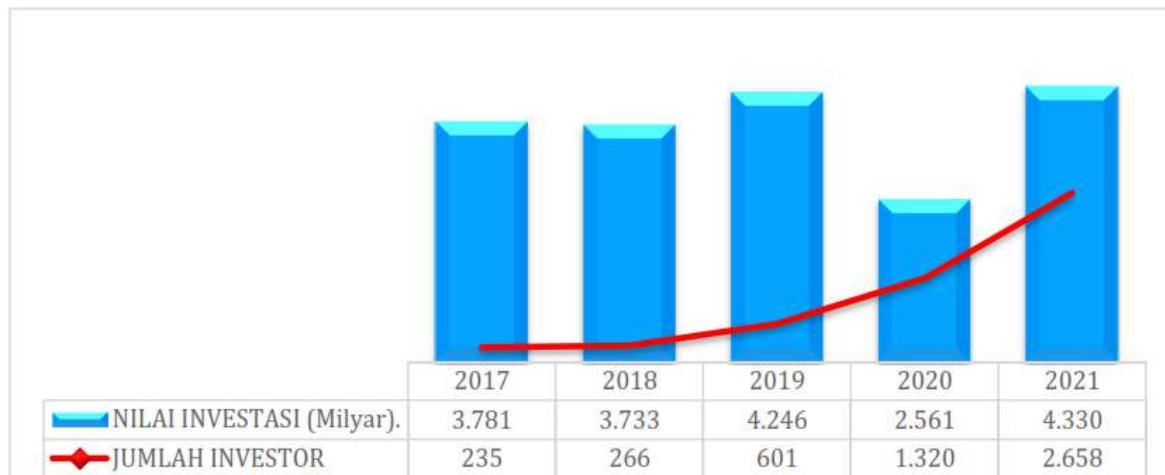
**Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2022**

Wilayah Babel	Indeks Pembangunan Manusia				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	71,80	72,39	72,40	72,46	72,95
Belitung	71,70	72,46	72,51	72,57	73,38
Bangka Barat	68,68	69,05	69,08	69,60	70,12
Bangka Tengah	69,52	70,33	70,45	70,89	71,40
Bangka Selatan	65,98	66,54	66,90	67,06	67,95
Belitung Timur	70,22	70,84	70,92	71,42	72,29
Kota Pangkalpinang	77,43	77,97	78,22	78,57	79,24
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70,67	71,30	71,47	71,69	72,24

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

D. Pertumbuhan nilai investasi

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (capital stock). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan oleh tabel berikut.



Gambar 2.8 Nilai Investasi Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2017-2021

Capaian investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017-2021 relatif meningkat seiring dengan peningkatan jumlah investor. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 seiring merebaknya wabah virus Corona. Wabah COVID-19 telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu wilayah sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi.

Perkembangan nilai investasi dari sebesar 3.781 Milyar (2017) menjadi sebesar 4.330 Milyar (2021). Nilai investasi sebesar 4.330 Milyar dengan rincian 3.677 Milyar PMDN dan 652 Milyar PMA. Nilai investasi ini meliputi 2.371 proyek untuk PMDN dan 287 proyek untuk PMA. Meskipun nilai investasi mengalami penurunan ditahun 2020, namun jumlah investor tetap meningkat.

E. Kapasitas Fiskal

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah dilakukan dengan cara mengurangi Pendapatan dengan Unsur Pengurang. Pendapatan merupakan total Pendapatan Daerah, sedangkan Unsur Pengurang terdiri dari pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Kategori Kapasitas Fiskal Daerah pada masing-masing daerah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, yang ditetapkan dengan 9 (sembilan) Peraturan Menteri Keuangan

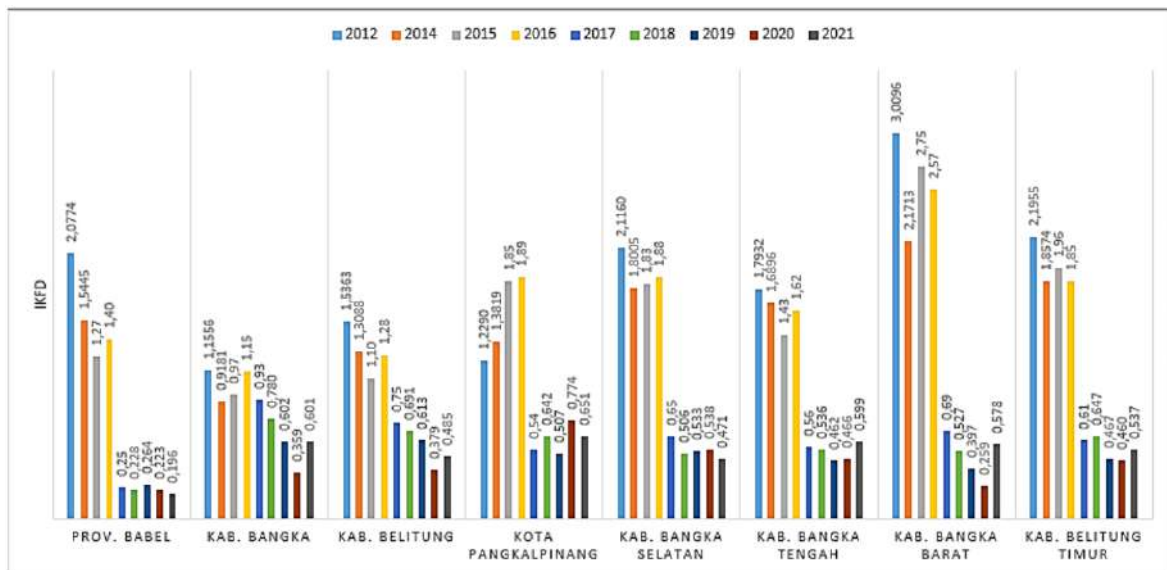
(PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Peta Kapasitas Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 10 tahun terakhir (tahun 2012 – 2021) secara singkat dijabarkan dalam kedua tabel di bawah ini.

Tahun	Prov. Babel		Kab. Bangka		Kab. Belitung		Kota Pangkalpinang	
	IKFD	Kategori KFD	IKFD	Kategori KFD	IKFD	Kategori KFD	IKFD	Kategori KFD
2012	2,0774	sangat tinggi	1,1556	tinggi	1,5363	tinggi	1,2290	tinggi
2014	1,5445	tinggi	0,9181	sedang	1,3088	tinggi	1,3819	tinggi
2015	1,27	tinggi	0,97	sedang	1,10	tinggi	1,85	tinggi
2016	1,40	tinggi	1,15	tinggi	1,28	tinggi	1,89	tinggi
2017	0,25	sangat rendah	0,93	sedang	0,75	sedang	0,54	rendah
2018	0,228	sangat rendah	0,780	sedang	0,691	rendah	0,642	rendah
2019	0,264	sangat rendah	0,602	rendah	0,613	rendah	0,507	sangat rendah
2020	0,223	sangat rendah	0,359	sangat rendah	0,379	sangat rendah	0,774	sedang
2021	0,196	sangat rendah	0,601	rendah	0,485	sangat rendah	0,651	rendah

Tahun	Kab. Bangka Selatan		Kab. Bangka Tengah		Kab. Bangka Barat		Kab. Belitung Timur	
	IKFD	Kategori KFD	IKFD	Kategori KFD	IKFD	Kategori KFD	IKFD	Kategori KFD
2012	2,1160	sangat tinggi	1,7932	tinggi	3,0096	sangat tinggi	2,1955	sangat tinggi
2014	1,8005	tinggi	1,6896	tinggi	2,1713	sangat tinggi	1,8574	tinggi
2015	1,83	tinggi	1,43	tinggi	2,75	sangat tinggi	1,96	tinggi
2016	1,88	tinggi	1,62	tinggi	2,57	sangat tinggi	1,85	tinggi
2017	0,65	rendah	0,56	rendah	0,69	rendah	0,61	rendah
2018	0,506	sangat rendah	0,536	sangat rendah	0,527	sangat rendah	0,647	rendah
2019	0,533	rendah	0,462	sangat rendah	0,397	sangat rendah	0,467	sangat rendah
2020	0,538	rendah	0,466	sangat rendah	0,259	sangat rendah	0,460	sangat rendah
2021	0,471	sangat rendah	0,599	rendah	0,578	rendah	0,537	rendah

Sumber: Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lebih lanjut, untuk menunjukkan perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 10 tahun terakhir (tahun 2012 – 2021), dapat dilihat dalam Diagram berikut ini.



Gambar 2.9 Peta Kapasitas Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2021

Diagram di atas menunjukkan perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah pada 1 (satu) daerah provinsi dan 7 (tujuh) daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Belitung selama periode tahun 2012 – 2021. Berdasarkan diagram tersebut, secara umum dalam periode 5 tahun awal (tahun 2012 – 2016), semua daerah memiliki IKFD yang cukup tinggi secara signifikan, yaitu hampir semuanya masuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah TINGGI atau SANGAT TINGGI. Namun, kemudian posisi tersebut berbalik secara signifikan pada periode 5 tahun terakhir (2017 – 2021), di mana nilai IKFD merosot tajam dan hampir semua daerah pada masa tahun 2017-2021 tersebut termasuk kategori RENDAH atau SANGAT RENDAH .

Kabupaten Bangka Barat mencatat angka IKFD tertinggi dibanding daerah lain pada awal periode, yaitu tahun 2012, dengan nilai IKFD 3,0096 yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah SANGAT TINGGI. Posisi tersebut bertahan hingga tahun 2016, namun kemudian turun secara tajam pada akhir periode hingga menjadi 0,578 pada kategori RENDAH, bahkan pada tahun 2020 Kabupaten Bangka Barat memperoleh nilai IKFD terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain selama periode 10 tahun tersebut.

Selanjutnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk ke dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah SANGAT RENDAH selama 5 tahun terakhir (2017-2021), bahkan pada tahun 2021 hanya mencapai IKFD senilai 0,196 atau terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Padahal, selama periode 5 tahun awal (2012-2016), Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung memiliki IKFD dengan nilai yang signifikan dan masuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah TINGGI atau SANGAT TINGGI. Kondisi Kapasitas Fiskal Daerah serupa juga dialami oleh Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung Timur.

Sementara itu, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung memiliki kondisi perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang serupa pula, yaitu selama periode tahun 2012-2021 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, namun tetap membawa kedua daerah tersebut menjadi daerah dengan Kapasitas Fiskal Daerah RENDAH dan SANGAT RENDAH di akhir periode (tahun 2021).

2.2.1.2 Kondisi Sosial Budaya

a. Jumlah dan Kepadatan penduduk

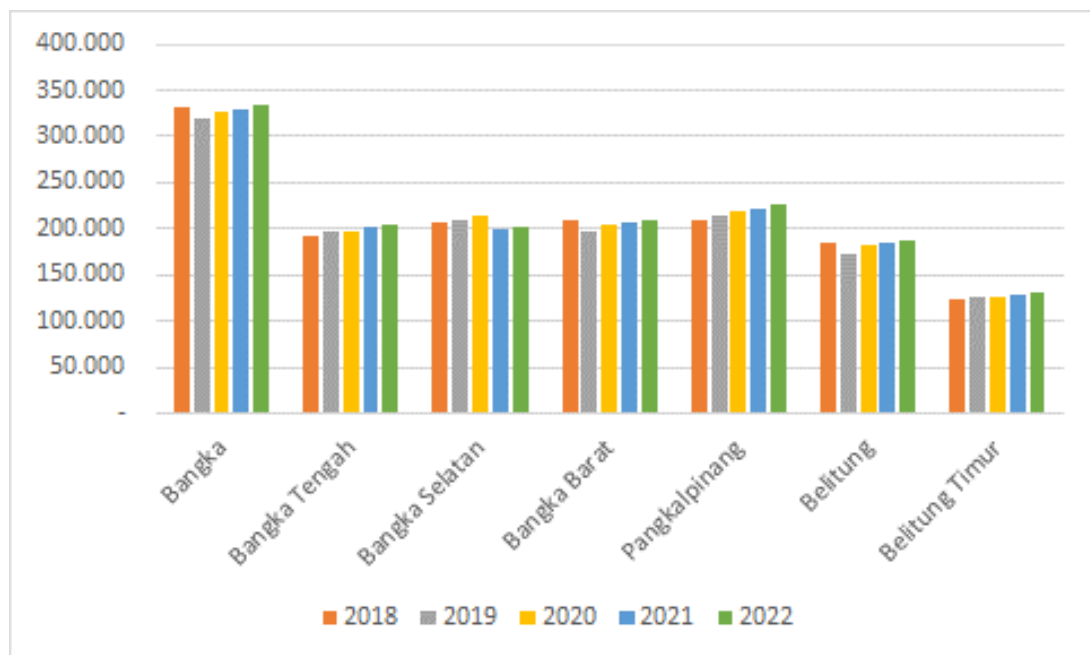
Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2022 sebanyak 1,49 juta jiwa yang terdiri atas 767.582 jiwa penduduk laki-laki dan 727.039 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2021, penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 1,52 persen.

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Bangka		330.793	318.756	326.265	329.911	334.344
	Mendo barat	49.946	48.853	51.133	51.704	52.399
	Merawang	30.315	29.743	30.596	30.938	31.354
	Puding Besar	18.496	19.484	19.419	19.636	19.900
	Sungailiat	100.750	91.822	92.883	93.921	95.183
	Pemali	31.352	33.379	34.705	35.093	35.564
	Bakam	19.123	18.473	19.039	19.252	19.510
	Belinyu	51.992	49.229	50.200	50.761	51.443
	Riau Silip	28.819	27.773	28.290	28.606	28.991
Bangka Tengah		191.979	196.196	196.196	201.861	205.510
	Koba	39.051	40.037	40.037	43.558	44.345
	Lubuk Besar	27.971	28.617	28.610	31.609	32.181
	Pangkalan Baru	49.164	50.641	50.657	46.701	47.546
	Namang	15.467	15.636	15.633	17.084	17.393
	Sungai Selan	34.467	34.982	34.980	36.602	37.263
	Simpang Katis	25.859	26.283	26.279	26.307	26.782

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Bangka Selatan		205.901	209.973	213.966	200.051	202.263
	Payung	21.738	22.110	22.473	21.103	21.337
	Pulau Besar	8.514	8.549	8.582	9.423	9.527
	Simpang Rimba	24.389	24.766	25.133	24.072	24.338
	Toboali	80.726	82.656	84.553	77.938	78.799
	Tukak Sadai	13.126	13.535	13.941	12.907	13.050
	Air Gegas	44.797	45.645	46.475	42.249	42.716
	Lepar Pongok	7.855	7.951	8.042	8.032	8.121
	Kepulauan Pongok	4.756	4.761	4.767	4.327	4.375
Bangka Barat		209.011	196.598	204.612	206.786	209.791
	Kelapa	34.062	32.819	34.451	34.817	35.463
	Tempilang	26.943	26.045	28.460	28.762	29.080
	Muntok	56.869	52.650	52.745	53.306	54.239
	Simpang Teritip	30.456	29.056	30.378	30.701	31.518
	Jebus	22.606	20.977	22.522	22.761	23.193
	Parittiga	38.075	35.051	36.056	36.439	36.298
Pangkalpinang		208.520	215.379	218.569	221.988	226.297
	Rangkui	40.102	38.724	35.703	36.261	36.965
	Bukit Intan	38.211	38.318	41.343	41.990	42.805
	Girimaya	21.141	19.237	18.129	18.413	18.770
	Pangkalbalam	22.684	22.567	22.142	22.488	22.925
	Gabek	26.284	31.482	35.013	35.561	36.251
	Tamansari	23.555	21.283	18.473	18.762	19.126
	Gerunggang	36.543	43.768	47.766	48.513	49.455
Belitung		186.155	173.717	182.079	184.004	186.331
	Membalong	28.772	25.226	26.833	27.117	27.460
	Tanjungpandan	103.594	98.233	103.062	104.152	105.468
	Badau	15.522	14.256	15.168	15.328	15.522
	Sijuk	31.998	30.091	31.342	31.673	32.074
	Selat Nasik	6.269	5.911	5.674	5.734	5.807
Belitung Timur		124.555,00	126.201,00	127.018,00	128.564,00	130.463,00
	Dendang	10.658	10.764	11.007	11.141	11.306
	Simpang Pesak	8.103	8.146	8.434	8.537	8.663
	Gantung	27.580	28.113	28.349	28.694	29.118
	Simpang Renggang	7.406	7.461	7.512	7.603	7.716
	Manggar	39.121	39.645	39.135	39.611	40.196
	Damar	13.304	13.517	13.214	13.375	13.572
	Kelapa Kampit	18.383	18.555	19.367	19.603	19.892

Sumber : BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2023



Gambar 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Kepadatan penduduk netto masing-masing kecamatan di 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kawasan permukiman eksisting cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi Tahun 2022 terletak di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan kepadatan sebesar 181 jiwa/ha dan terendah di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung sebesar 30 jiwa/ha. Berdasarkan tingkat kepadatannya dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu kepadatan rendah <150 jiwa/ha, kepadatan sedang 150-200 jiwa/ha dan kepadatan tinggi >200 jiwa/ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta-peta berikut.

Tabel 2.12 Kepadatan Penduduk Netto Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman (Ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)				
			2018	2019	2020	2021	2022
Bangka		3.710,54	89	86	88	89	90
	Mendo barat	288,84	173	169	177	179	181
	Merawang	339,03	89	88	90	91	92
	Puding Besar	99,11	187	197	196	198	201
	Sungailiat	1.628,65	62	56	57	58	58
	Pemali	229,75	136	145	151	153	155
	Bakam	173,31	110	107	110	111	113

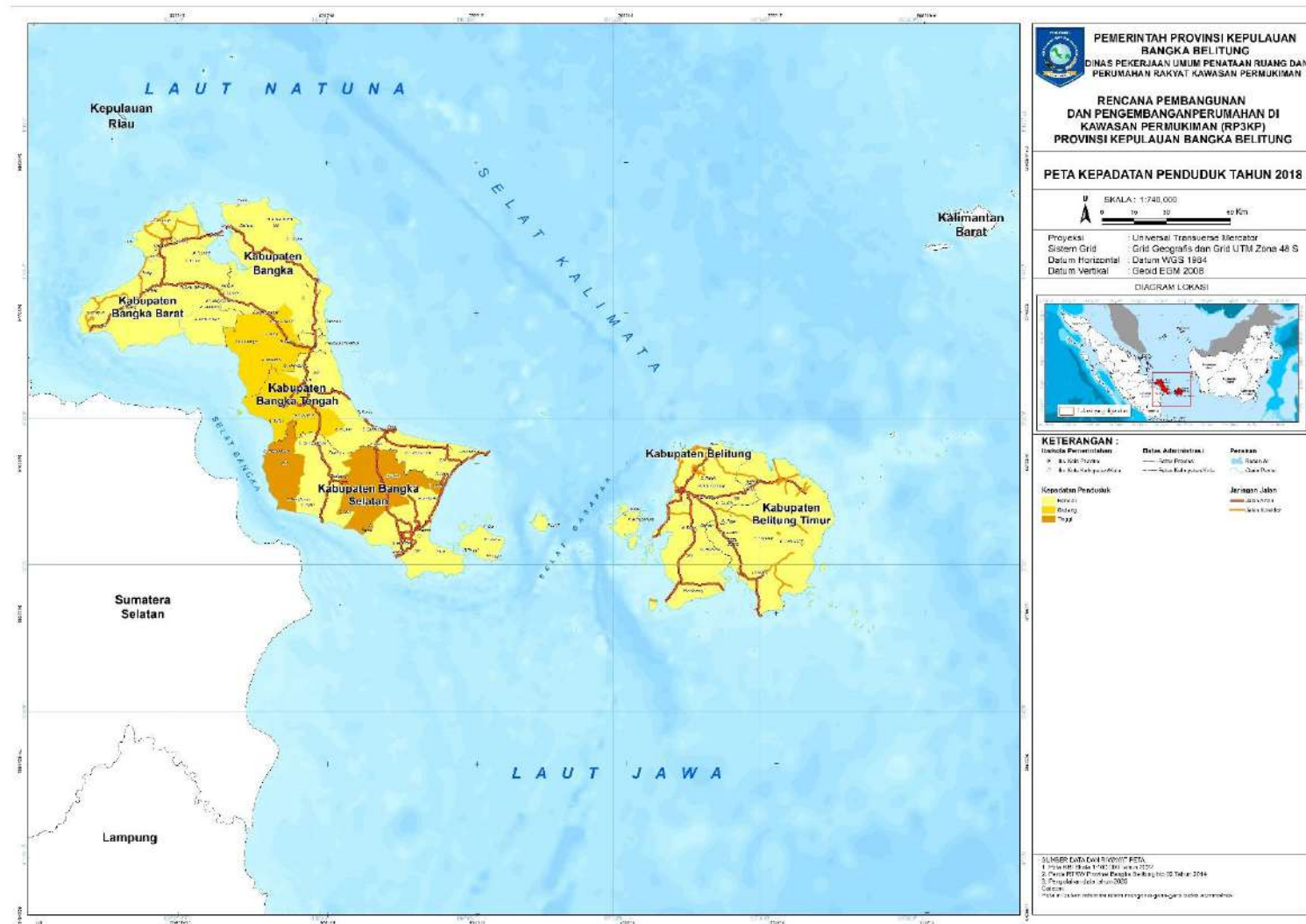
Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman (Ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Belinyu	625,20	83	79	80	81	82
	Riau Silip	326,64	88	85	87	88	89
Bangka Tengah		1.626,01	118	121	121	124	126
	Koba	308,77	126	130	130	141	144
	Lubuk Besar	240,22	116	119	119	132	134
	Pangkalan Baru	539,06	91	94	94	87	88
	Namang	120,35	129	130	130	142	145
	Sungai Selan	209,26	165	167	167	175	178
	Simpang Katis	208,34	124	126	126	126	129
Bangka Selatan		1.830,07	113	115	117	109	111
	Payung	235,37	92	94	95	90	91
	Pulau Besar	71,22	120	120	121	132	134
	Simpang Rimba	116,43	209	213	216	207	209
	Toboali	681,89	118	121	124	114	116
	Tukak Sadai	238,26	55	57	59	54	55
	Air Gegas	217,23	206	210	214	194	197
	Lepar Pongok	190,46	41	42	42	42	43
	Kepulauan Pongok	79,21	60	60	60	55	55
Bangka Barat		2.543,38	82	77	80	81	82
	Kelapa	317,89	107	103	108	110	112
	Tempilang	448,41	60	58	63	64	65
	Muntok	624,01	91	84	85	85	87
	Simpang Teritip	416,52	73	70	73	74	76
	Jebus	210,30	107	100	107	108	110
	Parittiga	526,25	72	67	69	69	69
Pangkalpinang		1.952,78	107	110	112	114	116
	Rangkui	285,33	141	136	125	127	130
	Bukit Intan	337,46	113	114	123	124	127
	Girimaya	248,94	85	77	73	74	75
	Pangkalbalam	197,43	115	114	112	114	116
	Gabek	331,45	79	95	106	107	109
	Tamansari	241,84	97	88	76	78	79
	Gerunggang	310,33	118	141	154	156	159
Belitung		2.599,11	72	67	70	71	72
	Membalong	918,85	31	27	29	30	30
	Tanjungpandan	924,55	112	106	111	113	114

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman (Ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Badau	311,16	50	46	49	49	50
	Sijuk	378,95	84	79	83	84	85
	Selat Nasik	65,60	96	90	86	87	89
Belitung Timur		2.670,57	47	47	48	48	49
	Dendang	241,00	44	45	46	46	47
	Simpang Pesak	218,04	37	37	39	39	40
	Gantung	509,80	54	55	56	56	57
	Simpang Renggang	216,44	34	34	35	35	36
	Manggar	737,05	53	54	53	54	55
	Damar	329,00	40	41	40	41	41
	Kelapa Kampit	419,26	44	44	46	47	47

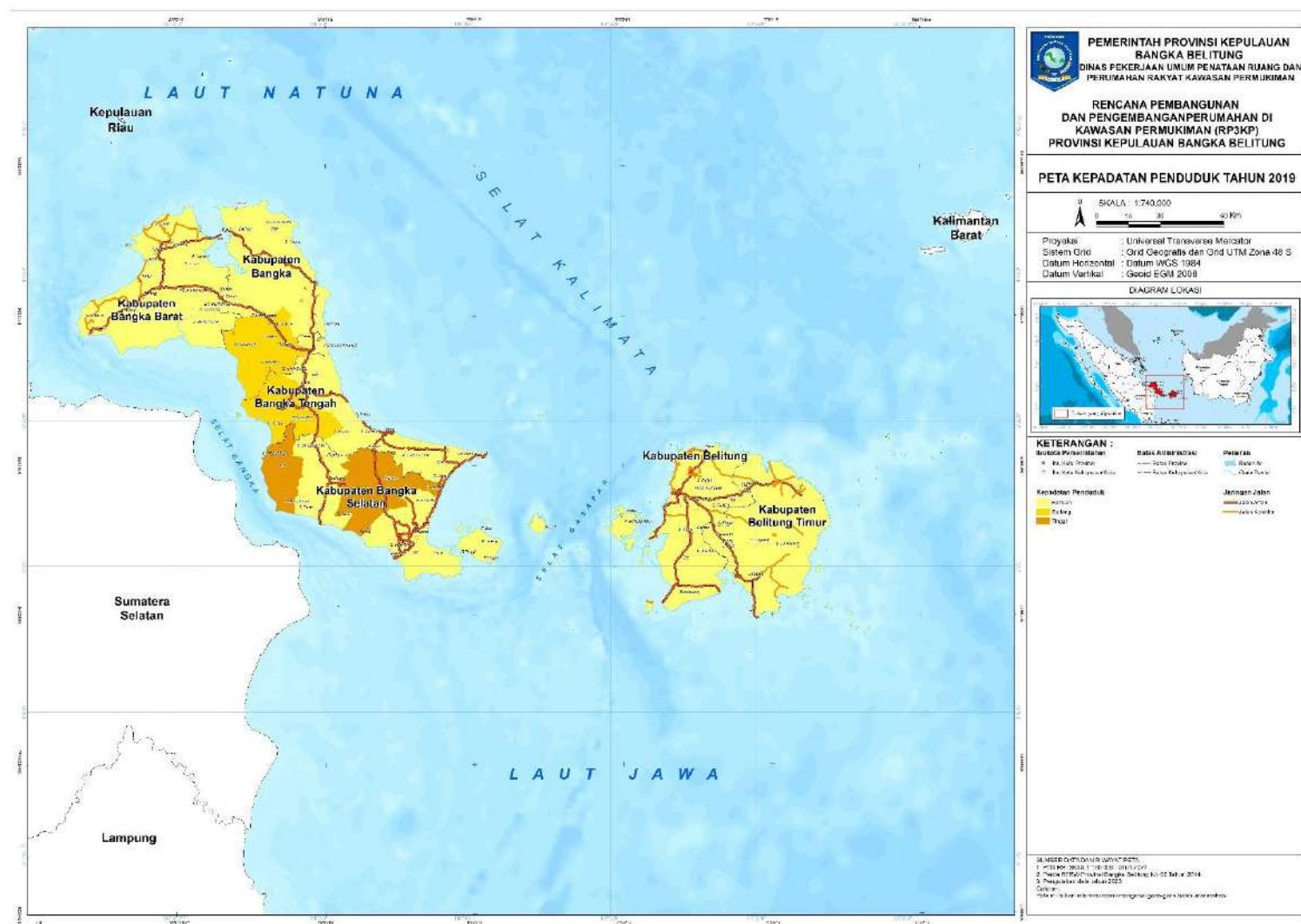
Sumber : Hasil pengolahan data, Tahun 2023

Keterangan:

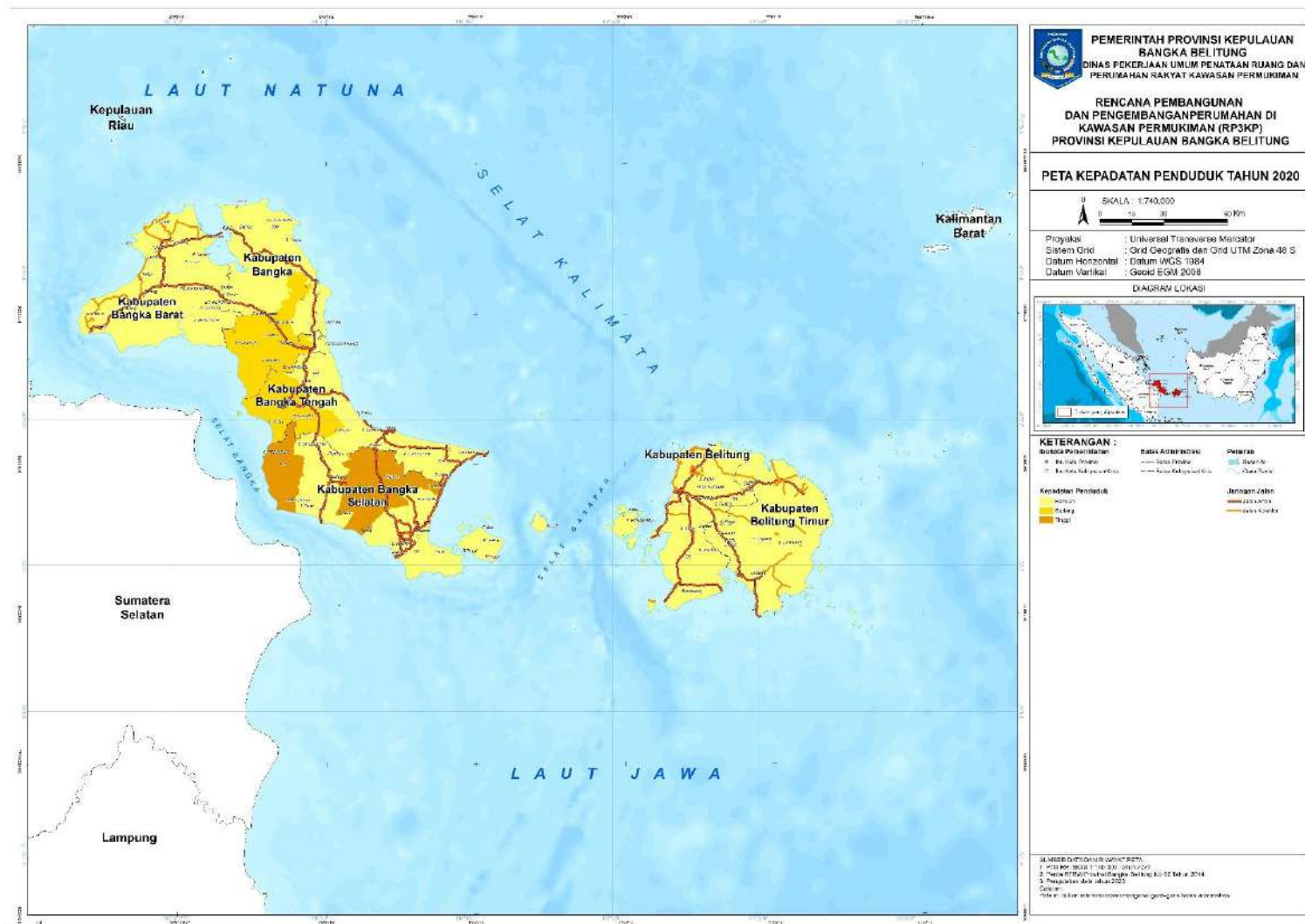
	kepadatan rendah <150 jiwa/ha
	kepadatan sedang 150-200 jiwa/ha
	kepadatan tinggi >200 jiwa/ha



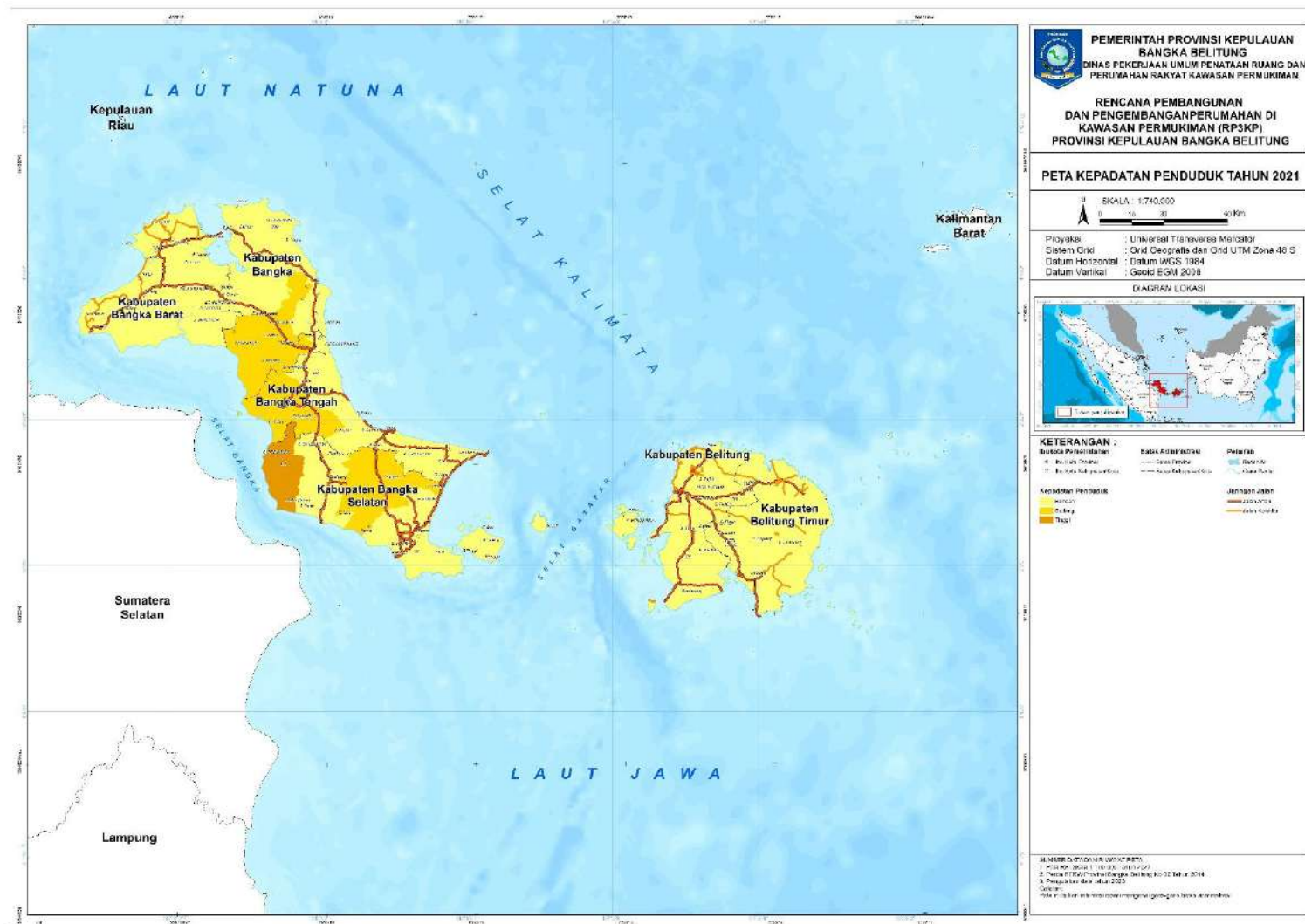
Gambar 2.11 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018



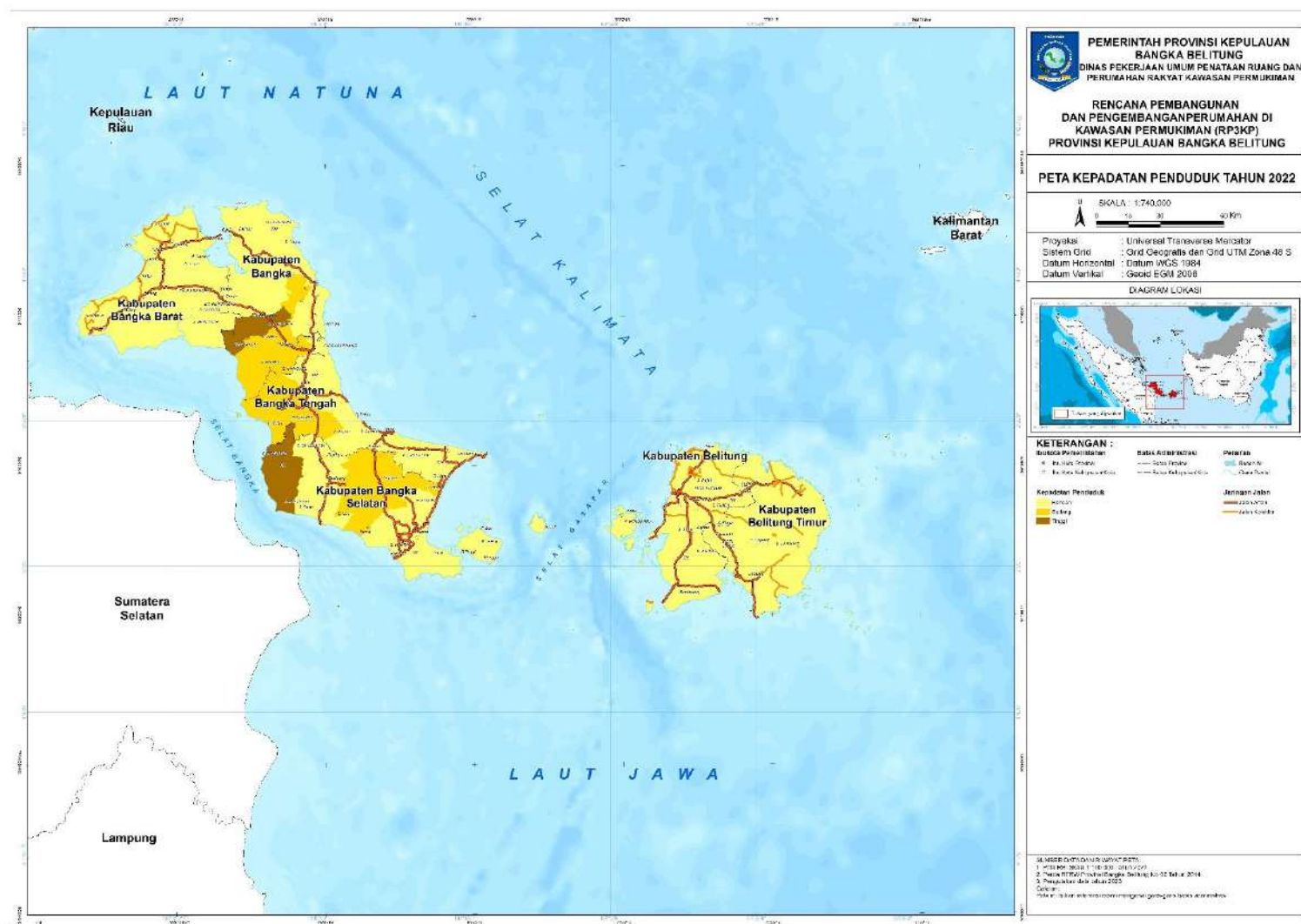
Gambar 2.12 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019



Gambar 2.13 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020



Gambar 2.14 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021



Gambar 2.15 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan hasil Sakernas angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mencapai 767.603 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 67,38 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,77 persen.

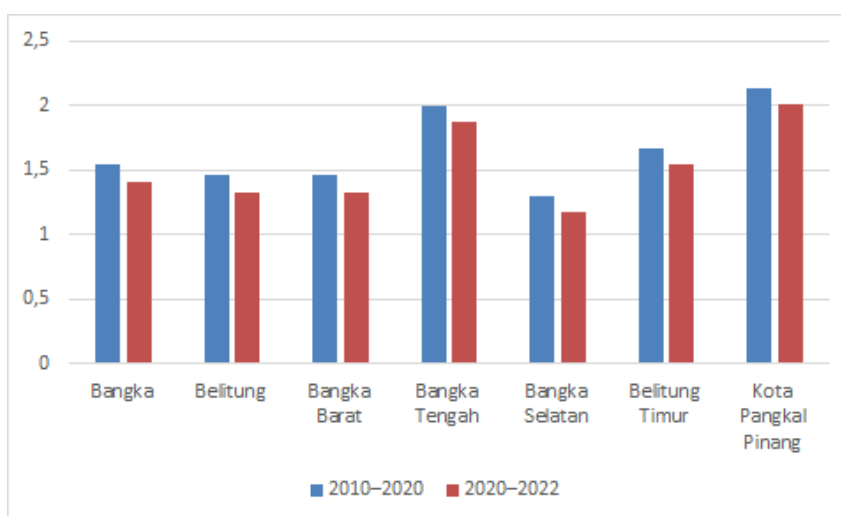
Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebesar 730.972 orang. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan menyerap 183.099 orang pekerja, sementara lapangan usaha pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya menyerap 254 pekerja.

Proporsi terbesar pekerja pada Agustus 2022 masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebanyak 325.048 orang. Sementara proporsi terkecil pekerja adalah pekerja bebas hanya sebanyak 33.194 orang.

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2022

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010–2020	2020–2022
Bangka	1,54	1,41
Belitung	1,46	1,33
Bangka Barat	1,46	1,33
Bangka Tengah	2	1,87
Bangka Selatan	1,3	1,17
Belitung Timur	1,67	1,54
Kota Pangkal Pinang	2,13	2,01
Kep. Bangka Belitung	1,64	1,52

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2023



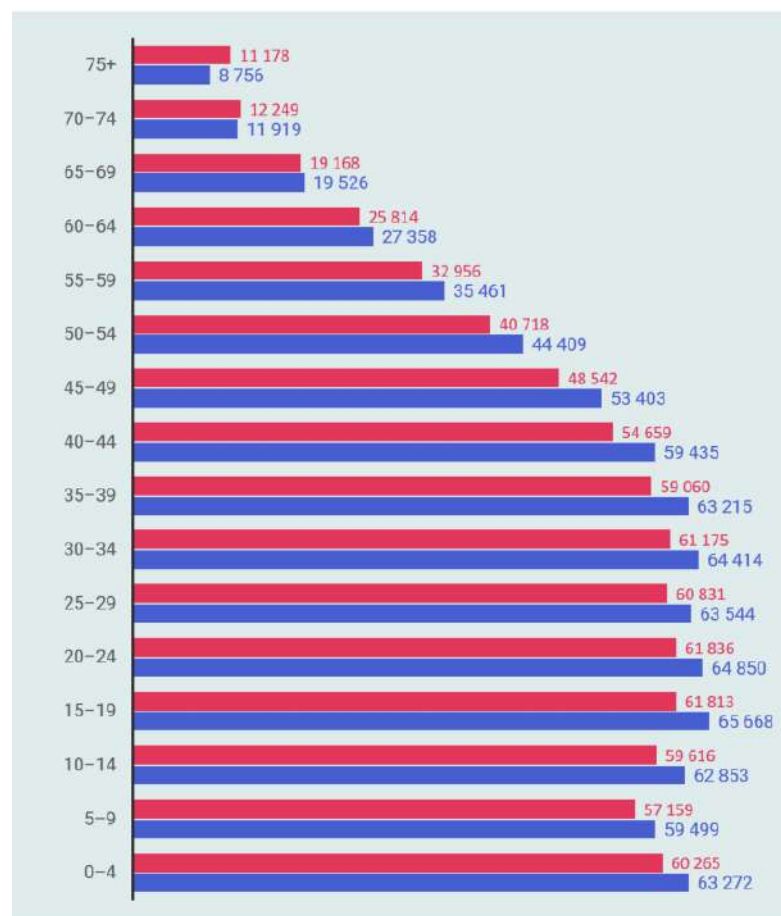
Gambar 2.16 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Ada 3 klasifikasi pertumbuhan penduduk, yaitu :

- Pertumbuhan penduduk termasuk Cepat apabila pertumbuhan lebih dari 2%,
- Pertumbuhan penduduk termasuk Sedang apabila pertumbuhan itu antara 1%-2%,
- Pertumbuhan penduduk termasuk Lambat apabila pertumbuhan itu antara 1% atau kurang.

Berdasarkan klasifikasi pertumbuhan penduduk tersebut dan melihat rata-rata tingkat laju pertumbuhan penduduk selama periode tahun 13 tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk sedang dengan pertumbuhan lebih dari 1-2 % per tahun.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 yaitu perbandingan penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,58. Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mencapai 89,55 jiwa/km².



Gambar 2.17 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

b. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Sakernas angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mencapai 767.603 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 67,38 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,77 persen. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebesar 730.972 orang. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan menyerap 183.099 orang pekerja, sementara lapangan usaha pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya menyerap 254 pekerja.

Tabel 2.14 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Kelompok Umur	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja
15–19	30.361	7.813	38.174
20–24	74.649	7.208	81.857
25–29	87.811	4.442	92.253
30–34	84.330	3.420	87.750
35–39	93.059	2.129	95.188
40–44	87.605	3.427	91.032
45–49	80.417	2.425	82.842
50–54	69.771	2.273	72.044
55–59	51.911	2.260	54.171
60+	71.058	1.234	72.292
Jumlah	730.972	36.631	767.603

Proporsi terbesar pekerja pada Agustus 2022 masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebanyak 325.048 orang. Sementara proporsi terkecil pekerja adalah pekerja bebas hanya sebanyak 33.194 orang.

**Tabel 2.15 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu
yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan
Utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022**

Status Pekerjaan Utama	Lapangan Pekerjaan Utama								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Berusaha sendiri	56.749	60.269	18.729	-		1.101	44.430	2.763	10.138
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	26.707	4.151	5.075	65		1.023	18.654	-	6.310
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	9.321	12.888	2.996	-		5.736	7.191	402	2.632
Buruh/Karyawan/Pegawai	49.258	52.493	18.196	1.947	254	19.032	40.550	10.843	10.942
Pekerja bebas	16.058	5.245	931	-		6.489	450	1.033	586
Pekerja keluarga	25.006	3.923	4.258	-		-	17.434	102	6.126
Jumlah	183.099	138.969	50.185	2.012	254	33.381	128.709	15.143	36.734

Lanjutan tabel

Status Pekerjaan Utama	Lapangan Pekerjaan Utama								Jumlah
	J	K	L	M,N	O	P	Q	R, S, T, U	
Berusaha sendiri	2.518	407	-	1.866		1.080	1.161	5.658	206.869
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	224	-	-	486		-	182	329	63.206
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	165	115	136	275		421	78	782	43.138
Buruh/Karyawan/Pegawai	2.692	6.028	186	4.977.248	40.359	35.409	14.733	17.149	5.297.319
Pekerja bebas	-	-	-	81		283	-	1.871	33.027
Pekerja keluarga	250	221	229			-	111	1.776	59.436
Jumlah	5.849	6.771	551	4.979.956	40.359	37.193	16.265	27.565	5.702.995

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2023

Catatan:

- A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan
- B. Pertambangan dan Penggalian
- C. Industri Pengolahan
- D. Pengadaan Listrik dan Gas
- E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
- F. Konstruksi
- G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- H. Transportasi dan Pergudangan
- I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- J. Informasi dan Komunikasi
- K. Jasa Keuangan dan Asuransi
- L. Real Estat
- M, N Jasa Perusahaan
- O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- P. Jasa Pendidikan/Education

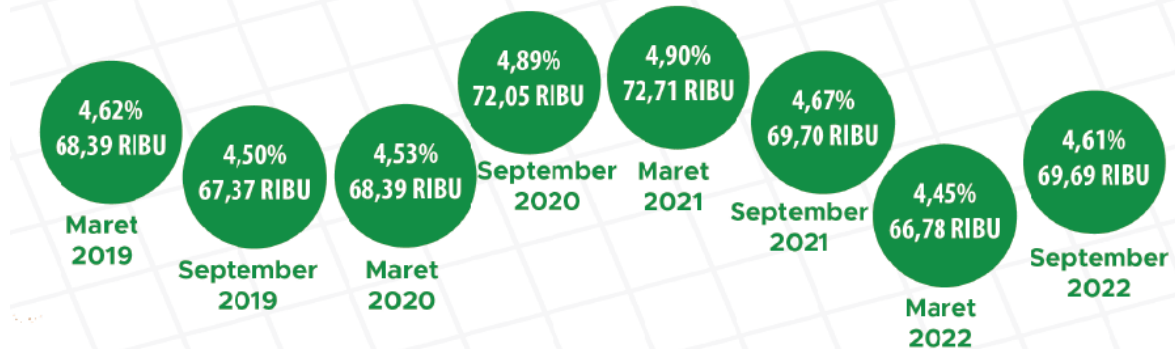
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities
R, S, T, U Jasa Lainnya/Other Services Activities

c. Kemiskinan

- ✚ Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,61 persen, meningkat 0,16 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,06 persen poin terhadap September 2021.
- ✚ Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 69,69 ribu orang, meningkat 2,9 ribu orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,01 ribu orang terhadap September 2021.
- ✚ Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 3,09 persen, naik menjadi 3,48 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 6,26 persen, turun menjadi 6,13 persen pada September 2022.
- ✚ Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 3,7 ribu orang (dari 26,48 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 30,21 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,8 ribu orang (dari 40,30 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 39,48 ribu orang pada September 2022).
- ✚ Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 853.226,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 622.068,-/kapita/bulan dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 231.158,-/kapita/bulan.
- ✚ Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 5,20 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 4.436.775,-/rumah tangga miskin/bulan.

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEPTEMBER 2022

Berita Resmi Statistik No. 8/01/19/Th. XVI, 16 Januari 2023



Pada September 2022, Jumlah Penduduk Miskin

berkurang
0,01 ribu jiwa
dibandingkan
September 2021

meningkat
2,9 ribu jiwa
dibandingkan
Maret 2022



Garis Kemiskinan



Perkotaan
Rp. 836.425
per kapita per bulan



Perdesaan
Rp. 872.843
per kapita per bulan

Garis Kemiskinan



Garis Kemiskinan Bangka Belitung
Tertinggi Se-Indonesia

d. Budaya Bermukim

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan dimana kekayaan laut yang cukup melimpah dan sebagian masyarakat bermatapencaharian sebagai nelayan. Selain itu juga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memanfaatkan lahan-lahan dataran rendah sebagai perkebunan sawit, lada, buah-buahan dan lain sebagainya serta pertambangan timah.

1) Masyarakat Pekebun

Masyarakat Bangka Belitung untuk tanaman perkebunan sangat mengandalkan tiga komoditas yaitu lada, sawit dan karet. Kondisi lada saat ini harga agak turun ditambah serangan penyakit membuat semangat petani berkurang. Petani merasa hasil yang didapat tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. “Tetapi budidaya lada merupakan budaya masyarakat, apapun yang terjadi mereka tetap mengusahakan kebun lada.

Saat ini sudah ada rintisan hilirisasi lada oleh salah seorang petani dengan mendapat bantuan alat pengolah dari pemerintah. Hilirisasi diharapkan akan mendongkrak harga dan petani kembali bersemangat melakukan budidaya lada. Teknologi Agropyke diharapkan memberi jalan keluar masalah penyakit lada.

Sedangkan sawit sebenarnya merupakan komoditas baru, “Tahun 1995 terdapat 2 perusahaan sawit yang akan membangun kebun di Bangka Selatan ditolak warga. Tetapi selanjutnya masyarakat ternyata melihat sawit sangat menguntungkan sehingga banyak yang menanam. Namun, animo yang tinggi ini tidak diikuti dengan praktek budidaya yang baik sehingga produktivitas rendah. Banyak yang menggunakan benih palsu, walaupun menggunakan benih unggul tetapi budidayanya tidak sesuai GAP.



PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) di Bangka Selatan tahun 2020 ditargetkan mencapai 290 ha. Tetapi banyak kendala sehingga saat ini yang sudah tumbang chipping dan menanam 31,5 ha. Sedang tahun 2021 target dinaikkan jadi 816 ha. Bangka Belitung sendiri tahun 2021 target PSR 2.139 ha terdiri dari Bangka Selatan 816 ha, Bangka Barat 598 ha, Bangka 366 ha dan Belitung 358 ha. Batang yakin petani akan semakin

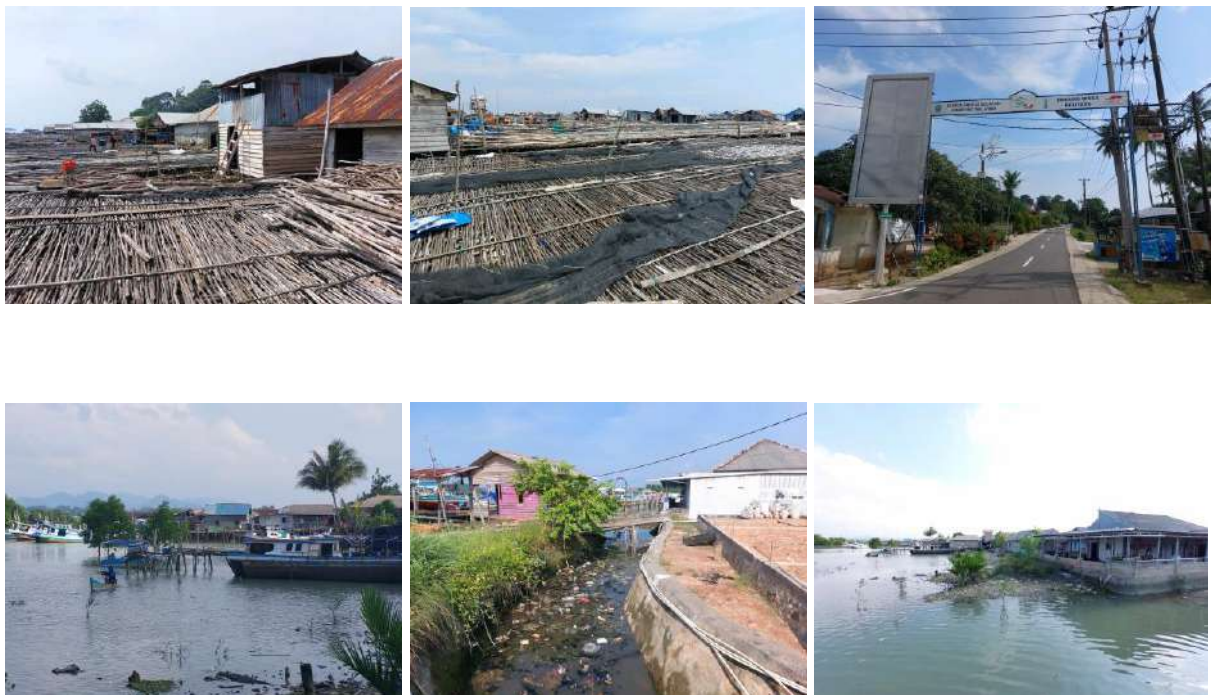
sejahtera dengan PSR ini karena produktivitas naik dan harga sawit akan tetap bertahan.

Sedangkan masyarakat yang punya lahan terbatas memilih karet. Alasannya budidaya karet tidak perlu membangun infrastruktur yang mahal, perawatan tidak sulit dan bisa dilakukan sendiri baik perawatan maupun panen.

2) Permukiman Nelayan

Secara umum permukiman nelayan dapat diartikan sebagai lingkungan tempat tinggal pada pesisir laut, sungai, maupun danau, yang terbentuk sebagai kebutuhan dasar manusia yaitu hunian, ditunjang oleh sarana prasarana dasar, dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Karakteristik permukiman nelayan terlihat dari lokasi dan pola bentukan dari perumahan yang memanjang berderet, mengikuti garis pantai.



3) Masyarakat Penambang Timah

2.2.2 Kondisi Fisik Dasar

2.2.2.1 Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.

Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Komposisi lahan datar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

2.2.2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah aliran sungai di Provinsi Bangka Belitung terdapat sekitar 180 DAS yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota. DAS Mancang merupakan yang terluas yaitu sekitar 85.652,67 Ha, kemudian disusul oleh DAS DAS Linggang seluas 81.451,90 Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut.

Tabel 2.16 Luas Daerah Aliran Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	DAS Air Putih	1.084,62	0,06
2	DAS Airbara	11.790,35	0,71
3	DAS Antan	27.324,73	1,63
4	DAS Aras	962,49	0,06
5	DAS Asem	16.780,40	1,00
6	DAS Babar	32.167,88	1,92
7	DAS Bakong	5.995,79	0,36
8	DAS Bakung	570,86	0,03
9	DAS Balar	57.727,24	3,45
10	DAS Bangkakota	54.837,72	3,28
11	DAS Bantan	423,94	0,03
12	DAS Banten	21.326,99	1,28
13	DAS Batang	1.085,26	0,06
14	DAS Batubadinding	797,03	0,05
15	DAS Batunggal	572,56	0,03
16	DAS Baturusa	68.025,28	4,07
17	DAS Belian	478,51	0,03
18	DAS Betung	14.287,84	0,85
19	DAS Biat	859,47	0,05
20	DAS Bidal	1.164,07	0,07
21	DAS Biduk	887,74	0,05
22	DAS Bikang	19.908,43	1,19
23	DAS Bubus	9.003,49	0,54
24	DAS Buding	57.183,86	3,42
25	DAS Bulin	1.943,82	0,12

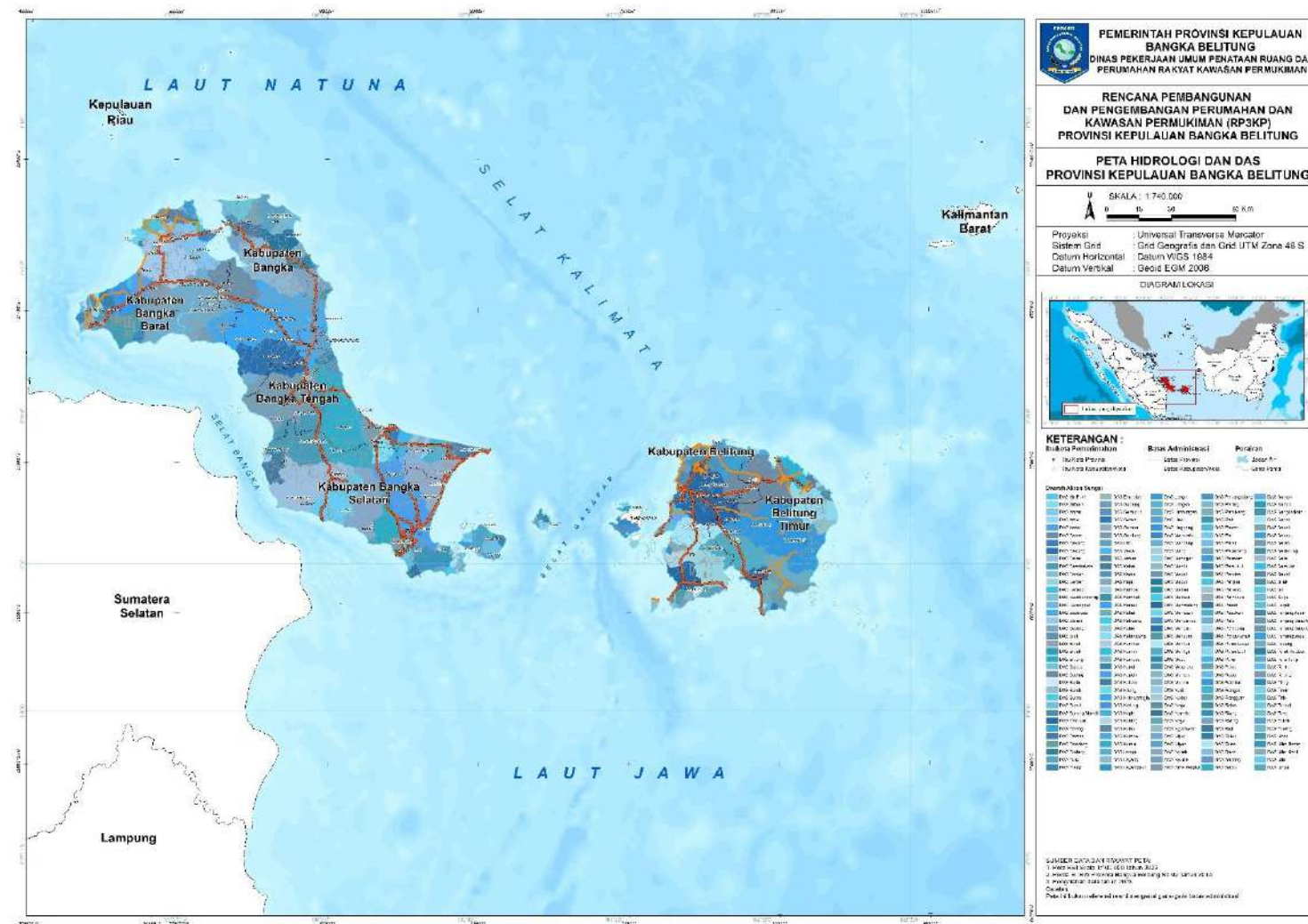
No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase (%)
26	DAS Buluh	952,66	0,06
27	DAS Buntu	1.541,17	0,09
28	DAS Bunut	6.891,74	0,41
29	DAS Burung Mandi	1.739,11	0,10
30	DAS Cerucuk	55.093,93	3,30
31	DAS Daeng	368,47	0,02
32	DAS Damar	8.138,12	0,49
33	DAS Dendang	1.959,72	0,12
34	DAS Diniang	7.257,18	0,43
35	DAS Duku	12.432,77	0,74
36	DAS Elang	1.409,55	0,08
37	DAS Empalak	535,85	0,03
38	DAS Gadung	3.676,58	0,22
39	DAS Gemuruh	3.153,81	0,19
40	DAS Getah	860,40	0,05
41	DAS Gumba	38.308,80	2,29
42	DAS Guntung	4.189,06	0,25
43	DAS Irat	665,28	0,04
44	DAS Jawa	223,52	0,01
45	DAS Jebus	6.852,15	0,41
46	DAS Kabal	10.375,16	0,62
47	DAS Kadur	4.146,72	0,25
48	DAS Kajut	320,73	0,02
49	DAS Kampa	44.497,06	2,66
50	DAS Kampak	812,58	0,05
51	DAS Kanau	491,15	0,03
52	DAS Kebal	6.964,52	0,42
53	DAS Kebyang	4.271,71	0,26
54	DAS Keladi	1.669,72	0,10
55	DAS Kelumpang	4.351,86	0,26
56	DAS Kemirai	417,52	0,02
57	DAS Kemiri	531,55	0,03
58	DAS Kemusa	406,76	0,02
59	DAS Kendi	514,41	0,03
60	DAS Kepoh	57.360,25	3,43
61	DAS Ketiau	5.235,24	0,31
62	DAS Kliung	742,99	0,04
63	DAS Kotawaringin	54.915,22	3,29
64	DAS Krating	1.187,77	0,07
65	DAS Kripit	933,89	0,06
66	DAS Kubing	8.483,26	0,51
67	DAS Kubu	3.356,08	0,20
68	DAS Kumbe	1.140,87	0,07

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase (%)
69	DAS Kurau	71.378,62	4,27
70	DAS Langir	886,40	0,05
71	DAS Layang	43.227,42	2,59
72	DAS Layanglaut	516,87	0,03
73	DAS Lengir	9.917,55	0,59
74	DAS Lengko	4.727,52	0,28
75	DAS Limbungan	15.401,01	0,92
76	DAS Linei	577,45	0,03
77	DAS Linggang	81.451,90	4,87
78	DAS Mamirah	3.646,92	0,22
79	DAS Mancang	85.652,67	5,13
80	DAS Mang	692,85	0,04
81	DAS Manggar	27.886,86	1,67
82	DAS Mantik	316,89	0,02
83	DAS Mapat	2.230,72	0,13
84	DAS Mapur	13.889,47	0,83
85	DAS Matras	530,91	0,03
86	DAS Melitau	955,06	0,06
87	DAS Membalong	13.729,01	0,82
88	DAS Mempari	4.837,65	0,29
89	DAS Mendanau	4.984,20	0,30
90	DAS Menduk	43.151,03	2,58
91	DAS Mensuci	2.521,43	0,15
92	DAS Mentiai	704,79	0,04
93	DAS Mentigi	1.838,09	0,11
94	DAS Mesu	4.008,68	0,24
95	DAS Metanau	1.021,66	0,06
96	DAS Muntok	3.440,44	0,21
97	DAS Munun	1.830,29	0,11
98	DAS Nadi	2.373,36	0,14
99	DAS Naduk	1.201,58	0,07
100	DAS Naga	527,56	0,03
101	DAS Namak	2.601,49	0,16
102	DAS Nayo	823,86	0,05
103	DAS Ngarawan	4.904,92	0,29
104	DAS Nijuk	1.756,94	0,11
105	DAS Nipah	1.241,73	0,07
106	DAS Nyireh	35.112,98	2,10
107	DAS Nyuruk	1.179,41	0,07
108	DAS Oma Tengka	1.910,52	0,11
109	DAS Padanglalang	2.077,07	0,12
110	DAS Pading	7.783,73	0,47
111	DAS Padukang	3.013,45	0,18

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase (%)
112	DAS Pait	381,80	0,02
113	DAS Pakem	530,12	0,03
114	DAS Par	1.148,07	0,07
115	DAS Parak	1.940,85	0,12
116	DAS Pelanceng	1.310,48	0,08
117	DAS Pelawan	2.612,56	0,16
118	DAS Pemukul	1.899,72	0,11
119	DAS Pendas	1.354,87	0,08
120	DAS Penjilin	1.328,71	0,08
121	DAS Perlang	2.019,22	0,12
122	DAS Permisan	426,63	0,03
123	DAS Pesak	7.411,86	0,44
124	DAS Pesukan	701,97	0,04
125	DAS Petal	3.065,54	0,18
126	DAS Pompong	1.797,97	0,11
127	DAS Pongokanak	1.139,08	0,07
128	DAS Pulau Lepar	7.041,74	0,42
129	DAS Pulau Liat	1.693,49	0,10
130	DAS Pulur	7.910,11	0,47
131	DAS Putat	941,66	0,06
132	DAS Rada	2.892,45	0,17
133	DAS Rambat	14.182,40	0,85
134	DAS Rangau	4.292,55	0,26
135	DAS Ranggam	315,28	0,02
136	DAS Reba	1.830,64	0,11
137	DAS Riang	1.967,67	0,12
138	DAS Riding	3.806,13	0,23
139	DAS Risi	3.880,55	0,23
140	DAS Ruku	556,42	0,03
141	DAS Rusa	641,78	0,04
142	DAS Saba	234,04	0,01
143	DAS Sabong	960,05	0,06
144	DAS Sagu	10.727,89	0,64
145	DAS Samak	3.116,52	0,19
146	DAS Sambu	2.673,98	0,16
147	DAS Sangkarikan	13.890,82	0,83
148	DAS Sapei	22.308,25	1,33
149	DAS Sekah	5.469,92	0,33
150	DAS Sekayu	8.930,48	0,53
151	DAS Selan	63.303,86	3,79
152	DAS Selindung	1.160,25	0,07
153	DAS Seliu	1.656,12	0,10
154	DAS Semulut	761,82	0,05

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase (%)
155	DAS Sepet	3.810,38	0,23
156	DAS Sijuk	9.876,38	0,59
157	DAS Sit	527,45	0,03
158	DAS Suge	3.303,27	0,20
159	DAS Tagak	2.273,46	0,14
160	DAS Tanjung Asem	2.477,87	0,15
161	DAS Tanjung Batu Air	12.321,53	0,74
162	DAS Tanjung Batu Itam	737,17	0,04
163	DAS Tanjungbinga	2.125,91	0,13
164	DAS Tapang	443,81	0,03
165	DAS Teluk Kelabat	1.119,02	0,07
166	DAS Terentang	4.319,68	0,26
167	DAS Teritip	491,73	0,03
168	DAS Terung	1.866,06	0,11
169	DAS Tiling	2.336,92	0,14
170	DAS Tirem	614,57	0,04
171	DAS Tiris	991,21	0,06
172	DAS Toboali	2.486,17	0,15
173	DAS Tokoi	1.957,02	0,12
174	DAS Tukak	410,28	0,02
175	DAS Tuwing	8.127,85	0,49
176	DAS Ubar	18.278,52	1,09
177	DAS Ulim Besar	901,45	0,05
178	DAS Ulim Kecil	2.598,04	0,16
179	DAS Ulin	32.278,25	1,93
180	DAS Ungu	32.647,69	1,95
	Grand Total	1.671.261,00	100,00

Sumber: BPDAS



Gambar 2.18 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)

2.2.2.3 Geologi

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari “Tin Mayor South East Asian Tin Belt” dengan tipe granit main range yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama K-Feldspar) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yang diperkirakan umurnya Trias (Sumber: Arsip PT. Koba Tin: Survey dan Geology Department, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan timah seperti Zircon ($ZrSiO_4$), Monazite ((Ce, La, Dy)PO₄ (ThSi)O₂), Hematite (Fe₂O₃), Pyrite (FeS₂), Ilmenite (FeTiO₃), dan Xenotime (YPO₄). Sedangkan secara geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (granite belt) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun. Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk tambang lainnya seperti pasir kuarsa (SiO₂), material Kaolin, dan bilitonite (dikenal dengan nama “satam”). Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya. Sedangkan Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca.

2.2.2.4 Hidrologi

Hasil kajian hidrologi menyatakan bahwa daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai

Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, dan Sungai Lenggang.

2.2.2.5 Klimatologi

Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Dari data BPS yang dirilis dari BMKG pada tahun 2012-2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 26,7-27,3°C dan curah hujan rata-rata bulanan antara 397-580 mm. Curah hujan maximum tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 577,3 mm di Belitung dan tahun 2012 sebesar 466,2 mm di Pangkalpinang. Sementara kelembabannya relatif tinggi dengan fluktuasi yang kecil. Di bulan Desember dan Januari, biasanya musim penghujan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, disertai angin kencang dan ombak laut cenderung meninggi.

Pada tahun 2021, Pulau Bangka berdasarkan data Stasiun Metereologi Kelas I Depati Amir memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 27,3°C dengan suhu maksimum 34,9°C dan suhu minimum 22,5°C. Curah hujan tergolong tinggi mencapai 2.073.3 mm dengan 196 hari hujan. Sedangkan Pulau Belitung, berdasarkan data Stasiun Meteorologi H.AS Hanandjoedin tercatat memiliki suhu rata-rata sebesar 27°C dengan suhu maksimum 35,8°C dan suhu minimum 20,6°C. Pulau Belitung memiliki total curah hujan lebih tinggi yakni 2.650 mm dengan jumlah hari hujan lebih sedikit yakni 143 hari.

2.2.2.6 Kondisi Rawan Bencana

Sejarah kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bencana alam lebih disebabkan oleh kondisi geografis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, ancaman gelombang ekstrem dan abrasi laut yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa. Potensi rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17 Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Lokasi Bencana	Jenis Bencana
1	Bangka	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
2	Bangka Tengah	Puting Beliung, Tanah Longsor, Karhutla
3	Bangka Selatan	Puting Beliung Dan Karhutla
4	Bangka Barat	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
5	Belitung	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
6	Belitung Timur	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
7	Pangkalpinang	Banjir, Puting Beliung, Karhutla

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Gerunggang (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Puding, Riau Silip, Mendo Barat (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Kecamatan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); dan Kecamatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur);
2. Kawasan rawan puting beliung terdapat di Kecamatan Taman Sari, Rangkui, Gabek, Gerunggang (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru dan Simpang Katis (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Simpang Teritip, dan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar (Kabupaten Belitung Timur); dan Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); dan
3. Kawasan rawan karhutlah tersebar di Kecamatan Pangkal Balam, Bukit Intan, Gerunggang, Girimaya, Gabek (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Sungailiat, Pemali, Puding Besar, Belinyu, Mendo Barat, Merawang, Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan, Sijuk, Badau, Membalong (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru, Simpang katis, Koba, Namang, Lubuk Besar (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Kelapa, Parittiga, Tempilang, Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar, Simpang Renggang, Damar, Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Kecamatan Pulau Besar, Toboali dan Tukak Sadai (Kabupaten Bangka Selatan); dan
4. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Lubuk besar (Kabupaten Bangka Tengah).

Pada tahun 2020 kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 4 (empat) potensi bencana dengan kejadian sebanyak 29 kejadian yaitu 5 banjir, 12 angin puting beliung, 3 tanah longsor dan 9 kebakaran hutan & lahan (karhutla). Dengan korban

meninggal dunia dan hilang akibat tanah longsor sebanyak 8 jiwa dan korban terdampak dan mengungsi akibat banjir sebanyak 95 jiwa, angin puting beliung sebanyak 77 jiwa sedangkan rumah terendam akibat banjir sebanyak 95 unit rumah, rusak berat akibat angin puting beliung 3 unit rumah, 23 unit rumah rusak sedang dan 51 unit rumah rusak ringan akibat angin puting beliung sedangkan untuk fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, peribadatan dan pendidikan tidak ada mengalami kerusakan.

1.11. Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.3.1 Jenis rumah

a. Data Rumah Komersial (Rumah Menengah Dan Mewah)

Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Rumah komersial biasanya dibangun oleh developer dengan fasad yang seragam, serta biasanya termasuk dalam model rumah cluster. Jenis hunian ini dibangun untuk masyarakat umum, di mana pembangunannya disesuaikan dengan supply dan demand dari konsumen.

Perumahan yang dibangun developer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 182 perumahan yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota. Perumahan terbanyak berada di Kota Pangkalpinang yaitu sekitar 94 perumahan, Kabupaten Bangka 39 perumahan, Kabupaten Bangka Tengah 19 perumahan, Kabupaten Bangka Selatan 4 perumahan, Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6 perumahan, Kabupaten Belitung sebanyak 18 perumahan dan Kabupaten Belitung Timur sebanyak 6 perumahan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Sebaran Rumah Komersial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Lokasi
1	Kota Pangkalpinang	PT Lima Bintang Sempurna	1. Bintang Samratulangi 3	Sinar Bulan Bukitintan Kota Pangkalpinang
		Bangka Damai Lestari, PT	2. Perumahan Damai Lestari 1	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
			3. Perumahan Damai Lestari Residence 2	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
			4. Perumahan Damai Lestari 6	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
			5. Perumahan Damai Lestari 10	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
			6. Damai Lestari Residence	Bacang Bukitintan Kota Pangkalpinang
		Bangka Jesstindo Lestari, PT	7. Perumahan Apple Residence	Bacang Bukitintan Kota Pangkalpinang
		Ciputra Sukses Property	8. Citraland Botanical City	Bacang Bukitintan Kota Pangkalpinang
		Gie Sukses Mandiri	9. Perumahan Braling Indah	Jerambah Gantung Gabek Kota Pangkalpinang
		Harmoni Citra Bangka	10. Villa Harmoni Residence	Ampui Pangkal Balam Kota Pangkalpinang
			11. Harmoni Residence	Jerambah Gantung Gabek Kota Pangkalpinang
		Madina Investama Sejahtera	12. Grand Gandaria	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang
		Prestige Land Properti, PT	13. Valeri Residence	Asam Rangkui Kota Pangkalpinang
		PT Artha Usaha Mandiri Indah	14. Artha Usaha Mandiri Indah	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
		PT Delano Jaya Properti	15. Delano Residence	Jerambah Gantung Gabek Kota Pangkalpinang
		PT Graha Madani Sukses Bersama	16. Madani Residence	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
		PT Pberlys Jaya Properti	17. Pesona Asroban Indah	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
		PT Stanley Properti Mandiri	18. Delima Bahagia	Air Itam Bukitintan Kota Pangkalpinang
			19. Dealova Bahagia	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang
		PT. Alexindo CiPTa Properti	20. Azzahra li	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
			21. Azzahra Residence	Bukitmerapin Gerunggang Kota Pangkalpinang
		PT. Angkasa Raya Mas	22. Taman Gandaria Mas 3	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
		PT. Anugerah Harapan Baru Regency	23. D'Rich Adyka Residence	Lontong Pancur Pangkal Balam Kota Pangkalpinang
		PT. Anugerah Karya Kontruksi	24. Paradise Residence 6	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
			25. Paradise Residence 7	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
			26. Paradise Residence 8	Jerambah Gantung Gabek Kota Pangkalpinang
		PT. Anugrah Diva Abadi	27. Diva Residence 2	Bukitmerapin Gerunggang Kota Pangkalpinang
		PT. Artistik Jaya	28. Artistik Residence	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
			29. Rivera Residence	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
		PT. Ayra Sriwijaya Mandiri	30. Ayra Sriwijaya Residence	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
			31. Ayra Sriwijaya Residence 2	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
			32. Ayra Sriwijaya Residence 3	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
		PT. Bangka Indo Karya	33. Matahari Residence 1	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang
			34. Matahari Residence 2	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
		PT. Bangka Indo Properti	35. Flamengo Residence 2	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang

		36. Flamengo Residence 3	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang
		37. Griya Intan Asri	Air Itam Bukitintan Kota Pangkalpinang
	PT. Bangka Raya Jaya	38. Taman Surya	Bukitmerapin Gerunggang Kota Pangkalpinang
	PT. Bapalindo Jaya Properti	39. The Zamrud Land	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
	PT. Elang Perkasa Properti	40. Griya Elang	Selindung Baru Gabek Kota Pangkalpinang
		41. Griya Elang 2	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
	PT. Elnov Langgeng Indah	42. Perumahan Alam Pinang Pura	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang
		43. Alam Kampak	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
		44. Kota Baru Residence	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang
	PT. Farisla Jaya Makmur	45. Villa Faris Jam'S Residence	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
	PT. Farrazy Putra Contraindo	46. Farras Residence	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
	PT. Genio Indo Jaya	47. Perumahan Genio City Residence 2	Gabek Dua Gabek Kota Pangkalpinang
	PT. Gibsi Hms Sejahtera Persada	48. Puri Arwana	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
	PT. Graha Karunia Perkasa	49. Paris Residence	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
		50. Monaco Residence	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
		51. Griya Pesona	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
	PT. Graha Papin Indah Property	52. Perumahan Grand Papink 4	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
	PT. Guna Mitra Prima Propertindo	53. Green Hill Residence	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
		54. Perumahan Green Hill 1	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
		55. Perumahan Green Hill 2	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
		56. Perumahan Sinar Mas	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
	PT. Karya Danish Fazila	57. Feiyaz Residence	Air Itam Bukitintan Kota Pangkalpinang
		58. Feiyaz Residence 2	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
	PT. Karya Teknik Konstruksi	59. Taman Jagung Residence 14	Jerambah Gantung Gabek Kota Pangkalpinang
		60. Taman Jagung Residence Icon 2	Taman Bunga Gerunggang Kota Pangkalpinang
		61. Taman Jagung Residence 6	Air Salemba Gabek Kota Pangkalpinang
		62. Taman Jagung Residence 3	Selindung Baru Gabek Kota Pangkalpinang
		63. Taman Jagung Residence (13) Icon	Taman Bunga Gerunggang Kota Pangkalpinang
		64. Taman Jagung Residence 12	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
		65. Taman Jagung Residence 10	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang
		66. Taman Jagung Residence 11	Jerambah Gantung Gabek Kota Pangkalpinang
	PT. Khazanah Babel Lestari	67. Garden Indah Residence 2	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang
		68. Garden Indah Residence 3	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang
	PT. Lega CiPTa Propertindo	69. Lega Vista 4	Jerambah Gantung Gabek Kota Pangkalpinang
	PT. Mad Koteng Putra Utama	70. Villa Sakinah Indah	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
	PT. Marlindo Bangun Persada	71. Perumahan Anjayo 12	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
	PT. Mega Saputra Persada	72. Bukit Baru Residence 4	Bukitmerapin Gerunggang Kota Pangkalpinang
		73. Berkah Mandiri	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang

			74. Mega Harmoni	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
		PT. Mentari Bersaudara Babel	75. Mentari Residence	Jerambah Gantung Gabek Kota Pangkalpinang
		PT. Peds Grup Properti	76. Green Villa Residence	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang
		PT. Plasma Jaya Perkasa	77. Nilam Permata Residence	Bacang Bukitintan Kota Pangkalpinang
		PT. Presly Donny Siregar	78. Tunas Jerambah Gantoeng	Jerambah Gantung Gabek Kota Pangkalpinang
		PT. Primasco Global Dwistama	79. Perum Green Pesona Selindung	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
		PT. Pulau Mas Adigraha	80. Permata Kulan	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
		PT. Pundimas	81. Perumahan Bukit Primer	Bukitmerapin Gerunggang Kota Pangkalpinang
		PT. Putra Limbang Jaya Propertindo	82. Panorama Zamrud Residence	Air Itam Bukitintan Kota Pangkalpinang
		PT. Radhi Utama Nusa	83. Bumi Asri Permai	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
		PT. Sumber Mas Pratama	84. Perumahan Pondok Indah 3	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
			85. Perumahan Pondok Indah 5	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
			86. Perumahan Pondok Indah 6	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
		PT. Timur Jaya Nugraha	87. Bumi Kampak Permai	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
		PT. Tjemara Mentari	88. Bhayangkara Residence	Sinar Bulan Bukitintan Kota Pangkalpinang
		PT.karya Putra Bangka Mandiri	89. Pasir Padi Residence	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
		PT.parahyangan Dwi Karya	90. Taman Manggis 1	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
			91. Taman Manggis 2	Bukitmerapin Gerunggang Kota Pangkalpinang
		Sukma Karya Abadi Properti	92. Rizky Residence	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
			93. Rizky Residence 2	Temberan Bukitintan Kota Pangkalpinang
		Tirta Loka, PT	94. Graha Arta	Jerambah Gantung Gabek Kota Pangkalpinang
2	Bangka	PT Lima Bintang Sempurna	1. Perumahan Bintang Samratulangi Resident	Sri Menanti Sungailiat Kabupaten Bangka
			2. Perumahan Damai Lestari 9	Kace Mendo Barat Kabupaten Bangka
		PT Delano Jaya Properti	3. Delano Residence 2	Kace Timur Mendo Barat Kabupaten Bangka
		PT Pberlys Jaya Properti	4. Falah Indah	Kace Timur Mendo Barat Kabupaten Bangka
		PT. Anugerah Harapan Baru Regency	5. D'Rich Adyka	Pagarawan Merawang Kabupaten Bangka
			6. D'Rich Arasel Residence	Pagarawan Merawang Kabupaten Bangka
		PT. Anugerah Sukses Bersaudara	7. Perumahan Anugerah Regency	Pagarawan Merawang Kabupaten Bangka
		PT. Aretha Kita	8. Perumahan Aretha Regency	Kudai Sungailiat Kabupaten Bangka
		PT. Banin Anshor Indonesia	9. Banin Al Anshor	Karya Makmur Pemali Kabupaten Bangka
		PT. Bestindo Properti	10. Griya Kenanga	Kenanga Sungailiat Kabupaten Bangka
		PT. Bumi Citra Lestari Propertindo	11. Ferza Berlian Residence	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
			12. Ferza Mutiara Residence	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang
			13. Villa Kayu Mas	Tua Tunu Gerunggang Kota Pangkalpinang
		PT. Busni Ipah Gema	14. Perumahan Tamara Dreamland 2	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
		PT. Cahaya Jaya Konstruksi	15. Cahaya Residence 15	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang

			16. Cahaya Residence	Sinar Bulan Bukitintan Kota Pangkalpinang
			17. Cahaya Residence 12	Jerambah Gantung Gabek Kota Pangkalpinang
			18. Cahaya Residence 13	Jerambah Gantung Gabek Kota Pangkalpinang
			19. Indah Residence	Air Kepala Tujuh Gerunggang Kota Pangkalpinang
		PT. Cahaya Viatindo Prima	20. Telaga Timur 3	Selindung Gabek Kota Pangkalpinang
		PT. Elang Perkasa Properti	21. Taman Elang V	Kudai Sungailiat Kabupaten Bangka
		PT. Gibsi Hms Sejahtera Persada	22. Pondok Arwana	Sri Menanti Sungailiat Kabupaten Bangka
			23. Griya Arwana	Kudai Sungailiat Kabupaten Bangka
			24. Perumahan Graha Arwana Residence II	Air Ruai Pemali Kabupaten Bangka
			25. Arwana Estate	Parit Padang Sungailiat Kabupaten Bangka
		PT. Graha Wiryana Sentana	26. Belinyu Residence 1	Air Jukung Belinyu Kabupaten Bangka
		PT. Karya Babel Makmur	27. Griya Makmur	Air Ruai Pemali Kabupaten Bangka
		PT. Manunggal Konstruksi Abadi	28. Permata Agung	Surya Timur Sungailiat Kabupaten Bangka
		PT. Mekar Sentosa Mandiri	29. Karya Makmur Residence	Karya Makmur Pemali Kabupaten Bangka
		PT. Putra Bangka Membangun	30. Puri Kenanga River View	Kenanga Sungailiat Kabupaten Bangka
		PT. Royal Lee Propertindo	31. Royal Gading Residence	Sri Menanti Sungailiat Kabupaten Bangka
			32. Sinar Bali Regency	Jelitik Sungailiat Kabupaten Bangka
		PT. Sinar Cahaya Mas Abadi	33. Lingga Jaya Residence	Air Ruai Pemali Kabupaten Bangka
			34. Lingga Jaya Residence II	Karya Makmur Pemali Kabupaten Bangka
		PT. Sukses Sumatera Karya	35. Perumahan Nurul Amanah	Kace Mendo Barat Kabupaten Bangka
		PT. Sungailiat Berkah Jaya Sentosa	36. Griya Kedaton 2	Bukit Betung Sungailiat Kabupaten Bangka
			37. Perumahan Griya Kedaton 3	Jelitik Sungailiat Kabupaten Bangka
		PT. Villa Makko Bakko Properti	38. Villa Ma'Ko	Air Asam Belinyu Kabupaten Bangka
		Syira Jaya Mandiri	39. Graha Kencana Mandiri 1	Kace Timur Mendo Barat Kabupaten Bangka
3	Bangka Tengah	Bangka Damai Lestari, PT	1. Perumahan Damai Lestari 3	Beluluk, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
			2. Perumahan Damai Lestari 5	Jeruk, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
			3. Perumahan Damai Lestari 7	Pedindang, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
			4. Perumahan Damai Lestari 3	Beluluk, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
			5. Perumahan Damai Lestari 8	Beluluk, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
			6. Perumahan Damai Lestari 11	Beluluk, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
			7. Perumahan Damai Lestari 12	Beluluk, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
		Koperasi Pegawai Negeri (kpn)	8. Mulia Asri Village	Padang Mulia, Koba Kabupaten Bangka Tengah
		Legian Jaya Bersaudara, PT	9. Grand Permata	Dul, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
		PT AfaciPTa Makmurwahana	10. Bukit Kejora Permai	Beluluk, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
				Padang Baru, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Bangun Insan CiPTa	11. Pesona Padang Baru	
		PT. Bukit Hijau Bandara	12. Perumahan Bukit Hijau	Dul, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah

		PT. Ecco Teguh Abadi	13. Umah Padang Baru Indah	Padang Baru, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Eka Tunggal Mandiri	14. Taman Pedindang Indah	Pedindang, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Graha Karunia Perkasa	15. Padang Baru Residence	Benteng, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
			16. Koba Green Residence	Koba, Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Griya Mulia Sukhitata	17. Griya Mulia Sukhitata	Kebintik, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Koba Mandiri Properti	18. Sinar Madani Residence	Padang Mulia, Koba Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Mega Mulia Babel	19. Perumahan Mulia Indah 2	Dul, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Putra Babel Perkasa	20. Pesona Mangkol Asri	Mangkol, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
			21. Pesona Mangkol Asri 2	Mangkol, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Tri Mulya Property	22. Meranti Koba Estate	Padang, Mulia Koba Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Karya Multi Karunia	23. Delano Residence 3	Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Maesa Bangun Sejahtera	24. Gading Baru Residence	Padang Baru, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Ogan Kencana Propertindo	25. Sampur Residence	Kebintik, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Panca Roban Santosa	26. Panca Graha Asri	Air Mesu Timur, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Minutei Indo Properti	27. Koba Mansion	Padang Mulia, Koba, Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Erfolg Mandiri Indonesia	28. Permata Mandiri Residence	Mangkol, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah
		Anugerah Griya Utama, PT	29. Perumahan Anggrek Sari	Terak, Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Tri Mulya Property	30. Meranti Koba Estate	Padang Mulia, Koba, Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Trimadya Prima Jaya	31. Permata Hijau Residence	Beluluk, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Senopati Jagad Lintang	32. Perumahan Senopati	Terak, Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah
		PT. Bangun Tama Raya	33. Anggrek Sari	Terak, Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah
4	Bangka Selatan	PT. Bangka Indo Properti	1. Parit Indah Permai	Gadung, Toboali Kabupaten Bangka Selatan
		PT. Maesa Bangun Sejahtera	2. Gading Permai 2	Gadung, Toboali Kabupaten Bangka Selatan
		PT. Marlindo Bangun Persada	3. Permata Muntai	Tanjungketapang, Toboali Kabupaten Bangka Selatan
		PT. Tri Asikiareka Bersama	4. Mahoni Residence	Teladan, Toboali Kabupaten Bangka Selatan
		PT. Maju Penuh Berkas	5. Azalea Garden Toboali	Gadung, Toboali Kabupaten Bangka Selatan
		PT. Raja Bumi Rejeki	6. Bumi Payung Residence	Payung, Kabupaten Bangka Selatan
		Selatan Anugerah Lestari, PT	7. Perumahan Angsana Green Residence	Toboali Kabupaten Bangka Selatan
5	Bangka Barat	Alvero Jaya Mandiri, PT	1. Alverogreen Residence	Tebing Kelapa Kabupaten Bangka Barat
		PT. Elnov Langgeng Indah	2. Bukit Mantan Indah '91	Air Gantang Parittiga Kabupaten Bangka Barat
		PT. Ikhlas Karya Abadi	3. Perumahan Muntok Permai	Belo Laut Mentok Kabupaten Bangka Barat
			4. Perumahan Muntok Permai II	Sungai Baru Mentok Kabupaten Bangka Barat
		PT. Mitra Gunadhya Mandiri	5. Muntok Residence	Belo Laut Mentok Kabupaten Bangka Barat
		PT. Nusa Dua Dunia	6. Perumahan Nusa Indah	Sungai Baru Mentok Kabupaten Bangka Barat

		PT. Rullytasari	7. Gita Mansion Parittiga	Kelabat, Parittiga Kabupaten Bangka Barat
		PT. Permata Gemilang Perkasa	8. Permata Gemilang Residence	Belo Laut, Mentok Kabupaten Bangka Barat
6	Belitung	Ade Zulizar Properti, PT	1. Sekip Jaya Residence	Air Merbau Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
		Pembangunan Belitung Kaya Raya	2. Vanilla Garden Residence	Aik Pelempang Jaya Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
		PT Jojo Grup Propertindo	3. Puri Kirana 1	Air Saga Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
			4. Puri Kirana 2	Air Merbau Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
		PT. Belitung Hijau Sejahtera	5. Perumahan Belitung Hijau 2	Pangkallalang Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
			6. Perumahan Belitung Hijau 3	Dukong Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
			7. Perumahan Belitung Hijau 4	Air Merbau Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
		PT. Bintang Propertyndo Perkasa	8. Lalang Asri	Pangkallalang Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
		PT. Cendrawasih Jaya Perkasa	9. Belitung Residence	Batu Itam Sijuk Kabupaten Belitung
		PT. Graha Amarta Perkasa	10. Murai Residence	Aik Rayak Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
		PT. Intan Pelangi Belitung	11. Pelangi Residence	Dukong Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
		PT. Surya Pagi Mandiri	12. Griya Emerald 77	Aik Pelempang Jaya Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
		PT. Tangguh Rimba Angkasa	13. Perumahan Satam Green Garden	Air Merbau Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
		PT. Triputra Pelangi Konstrindo	14. Angkasa Residence	Buluh Tumbang Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
		PT. Yuta Indah Sentosa	15. Perumahan Kebun Jeruk Residence	Air Merbau Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
		PT.mitra Jaya Belitung	16. Asiong Regency	Air Saga Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
			17. As Regency	Air Saga Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
		Putri Babel Properti Grup	18. Belitong Estate	Buluh Tumbang Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
7	Belitung Timur	PT. Dua Berlian Berjaya	1. Sunrise Garden Belitong	Padang Manggar Kabupaten Belitung Timur
		PT. Endrians Belitong Properti	2. Rasau Residence	Gantung Kabupaten Belitung Timur
		PT. Graha Amarta Perkasa	3. Gantoeng Residence	Gantung Kabupaten Belitung Timur
		PT. Lintang Budi Perkasa	4. Perumahan Istana Padang	Padang Manggar Kabupaten Belitung Timur
		PT. Wahana Harapan Bersinar	5. Perumahan Bersinar	Padang Manggar Kabupaten Belitung Timur
		PT. Mitra Jaya Belitung	6. Kampit Residence	Senyubuk Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur

Sumber: <https://pasarproperti.com/> dan <https://sikumbang.tapera.go.id/> Tahun 2023

b. Data Rumah Umum (Rumah Sederhana Luas Lantai <36 m²)

Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Luas minimal bangunan yaitu <36 m² atau dengan rata-rata luas rumah untuk setiap orang yaitu <7,2 m². Berdasarkan pertimbangan tersebut, jumlah rumah umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 21.681 unit rumah yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Jumlah Rumah Umum Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Umum (unit)
1	Bangka	2.944
2	Belitung	4.030
3	Bangka Selatan	4.306
4	Bangka Tengah	2.244
5	Bangka Barat	2.996
6	Belitung Timur	2.399
7	Kota Pangkal Pinang	2.762
Jumlah Total		21.681

Sumber: BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

c. Data Rumah Khusus

Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Data rumah khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari rumah susun baik untuk masyarakat sipil di Rusunawa Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang dan Rumah Susun untuk Anggota Polri di Jl. Sungaiselan dan Rumah Susun Mako Brimob.

d. Rumah Tradisional/Rumah Adat

Secara umum arsitektur rumah tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berciri Arsitektur Melayu seperti yang ditemukan di daerah-daerah sepanjang pesisir Sumatera dan Malaka. Di daerah ini dikenal ada tiga tipe yaitu Arsitektur Melayu Awal, Melayu Bubung Panjang dan Melayu Bubung Limas. Rumah Melayu Awal berupa rumah panggung kayu dengan material seperti kayu, bambu, rotan, akar pohon, daun-daun atau alang-alang yang tumbuh dan mudah diperoleh disekitar pemukiman. Bangunan Melayu Awal ini beratap tinggi di mana sebagian atapnya miring, memiliki beranda di muka, serta bukaan banyak yang berfungsi sebagai ventilasi.

Berikut penjelasan singkat mengenai Desain Bentuk Rumah Adat di Kepulauan Bangka Belitung:

1. Bentuk Rumah Panggung

Rumah melayu awal yang masih terbuat dari material alam, seperti kayu, bambu, rotan, akar pohon, daun-daun atau alang-alang yang ada serta tumbuh di sekitar area pemukiman penduduk. Desain Bentuk Rumah Panggung ini berdasarkan pada filosofi 9 tiang, karenanya setiap rumah adat ini memiliki 9 tiang. Rumah Adat Bangka Belitung terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang utama, loss dan dapur.

2. Bentuk Rumah Limas

Merupakan hasil adopsi dari rumah tradisional asal Sumatra Selatan. Provinsi Bangka Belitung dahulunya berasal dari Sumatera Selatan sehingga di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung memiliki rumah adat Limas juga. Ciri khas dari rumah adat Limas ini adalah atapnya yang berbentuk limas, rumah tradisional ini memiliki ketinggian lantai yang berbeda yang disebut Bengkilas. Perbedaan tinggi lantai ini menandakan derajat dari tamu yang memasuki ruangan tersebut. Lantai tertinggi dipergunakan untuk kepentingan keluarga seperti hajatan. Sedangkan para tamu biasanya diterima hanya diteras atau di lantai kedua.

3. Rumah Rakit

Penamaan rumah rakit sendiri berasal dari bentuk bangunan ini. Struktur bangunan dan rupa bangunan rumah adat Rakit ini menyerupai bentuk rakit yang lengkap. Hal ini juga menyesuaikan dengan lokasi pembangunan dari rumah adat ini. Banyak masyarakat yang memiliki rumah adat rakit ini meyakini bahwa sungai adalah sumber mata pencaharian dan sumber air. Sehingga sungai pun dianggap sebagai sumber kehidupan sehingga banyak yang akhirnya tinggal di dekat aliran sungai. Hal yang unik dari adanya rumah adat Rakit ini adalah rumah ini bukan hanya digunakan sebagai tempat tinggal terapung. Di sisi lain rumah ini juga digunakan sarana transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kebanyakan dari rumah adat Rakit selalu menetap dan menghadap ke arah daratan. Rumah adat Rakit diikat dengan tali yang dihubungkan dengan tonggak di tepian sungai dan disangga oleh beberapa tiang yang ditancapkan ke dasar sungai. Para pemilik rumah adat Rakit ini memiliki pedoman untuk membuat lantai rumah mereka tidak basah oleh air yang ada di bawahnya karena memang tujuannya untuk ditinggali sehingga sebisa mungkin agar bisa nyaman bagi para penghuninya.

Sebaran rumah adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 13 rumah, di Kabupaten Belitung 1 rumah dan di Kabupaten Belitung Timur 5 rumah.

2.3.2 Bentuk rumah

a. data rumah tunggal

Rumah tunggal adalah sebuah tempat tinggal dengan struktur berdiri sendiri, terpisah dari rumah lainnya, dan tidak berbagi dinding dengan rumah atau bangunan lain. Konsep rumah tunggal berdiri dibangun di atas tanah yang lebih besar dari struktur bangunannya sendiri. Kemudian, pemilik rumah biasanya menambahkan area di sekitar rumah untuk dijadikan halaman, taman hijau, maupun garasi. Rumah tunggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar berupa rumah swadaya dan rumah komersil dengan tipe kavling besar.



Gambar 2.19 Bentuk Rumah Tunggal di Kawasan Permukiman

b. data rumah deret

Pengertian rumah deret adalah beberapa tempat kediaman lengkap dimana satu atau lebih dari sisi bangunan induknya menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau tempat kediaman lain, tetapi masing-masing mempunyai persil sendiri. Rumah deret merupakan rumah yang sisinya saling berdempetan dan tidak memiliki ruang kosong maupun ruang terbuka diantara bangunannya. Rumah deret ini biasanya terdapat pada rumah-rumah yang berukuran kecil atau memiliki lahan yang terbatas. Rumah deret di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar berada di perumahan yang dibangun developer dan rumah-rumah swadaya.



Gambar 2.20 Rumah Deret di Perumahan Citraland

c. data rumah susun

Data rumah susun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari rumah susun baik untuk masyarakat sipil di Rusunawa Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang dan Rumah Susun untuk Anggota Polri di Jl. Sungaiselan dan Rumah Susun Mako Brimob.

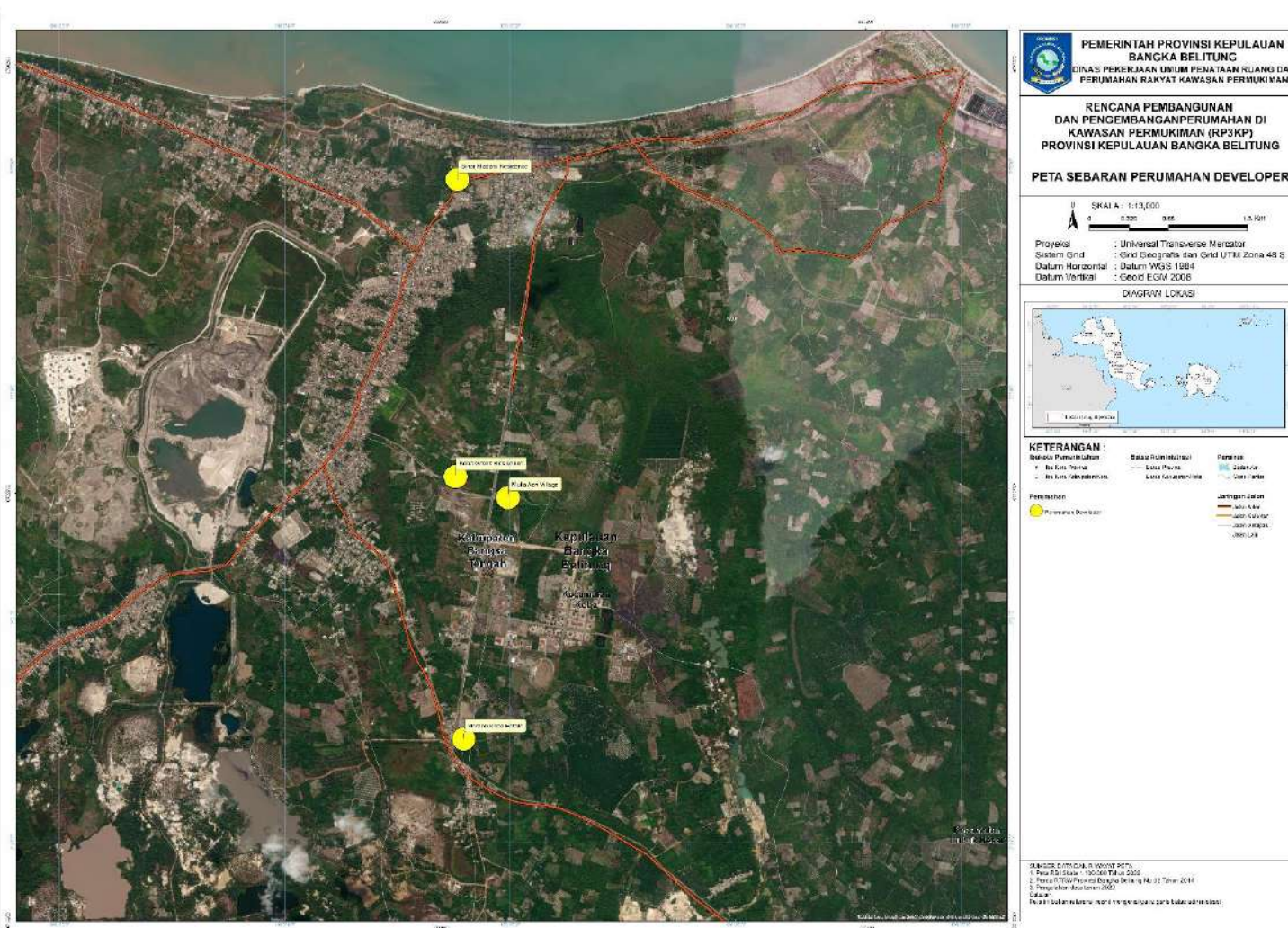


Gambar 2.21 Rumah Susun

2.3.3 Pola Sebaran

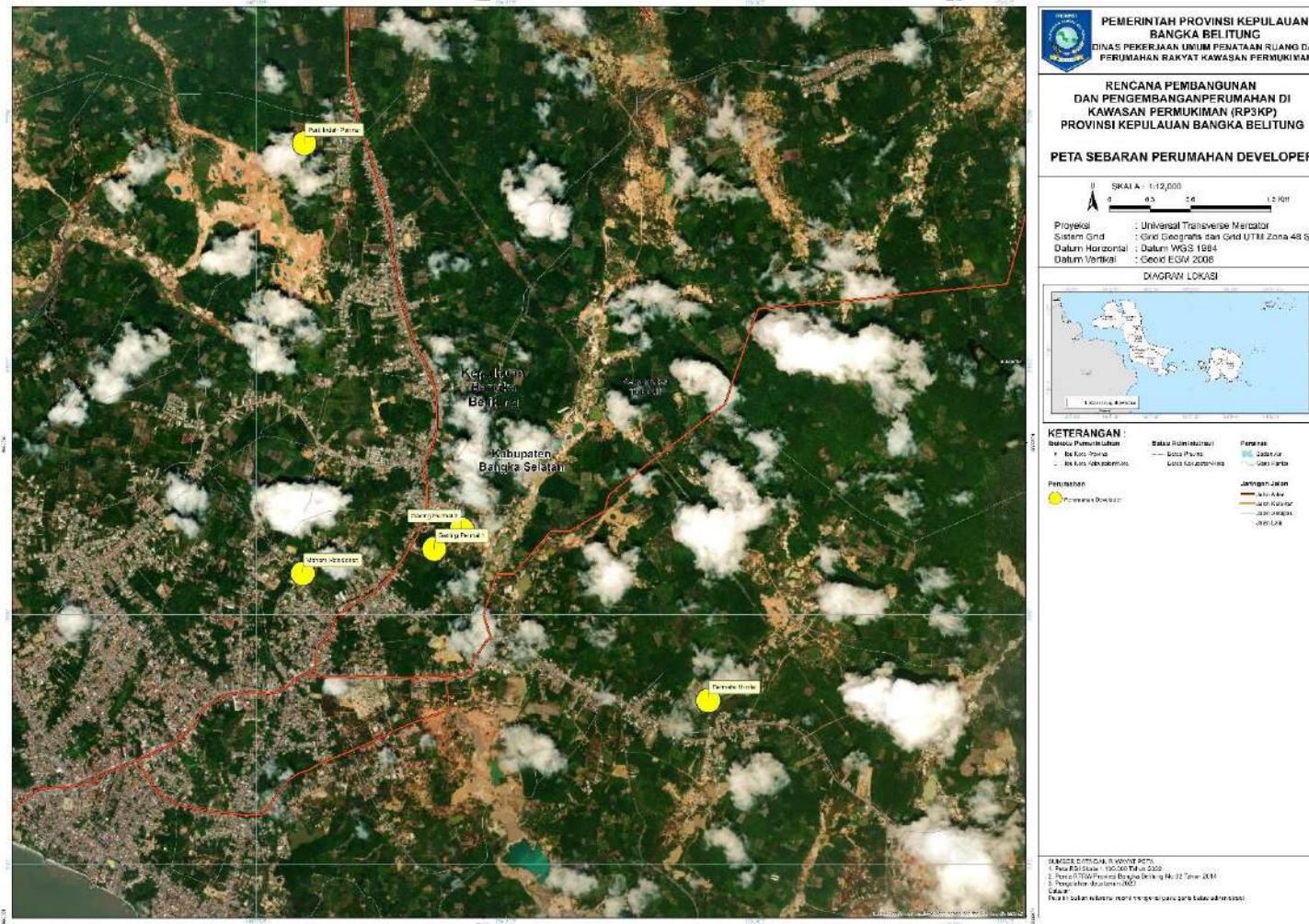
Sebaran perumahan yang dibangun developer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di masing-masing Kabupaten/Kota. Perumahan yang dibangun developer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 182 perumahan yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota. Perumahan terbanyak berada di Kota Pangkalpinang yaitu sekitar 94 perumahan, Kabupaten Bangka 39 perumahan, Kabupaten Bangka Tengah 19 perumahan, Kabupaten Bangka Selatan 4 perumahan, Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6 perumahan, Kabupaten Belitung sebanyak 18 perumahan dan Kabupaten Belitung Timur sebanyak 6 perumahan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar-gambar berikut.





F.

Gambar 2.23 Sebaran Perumahan Komersial di Kabupaten Bangka Tengah

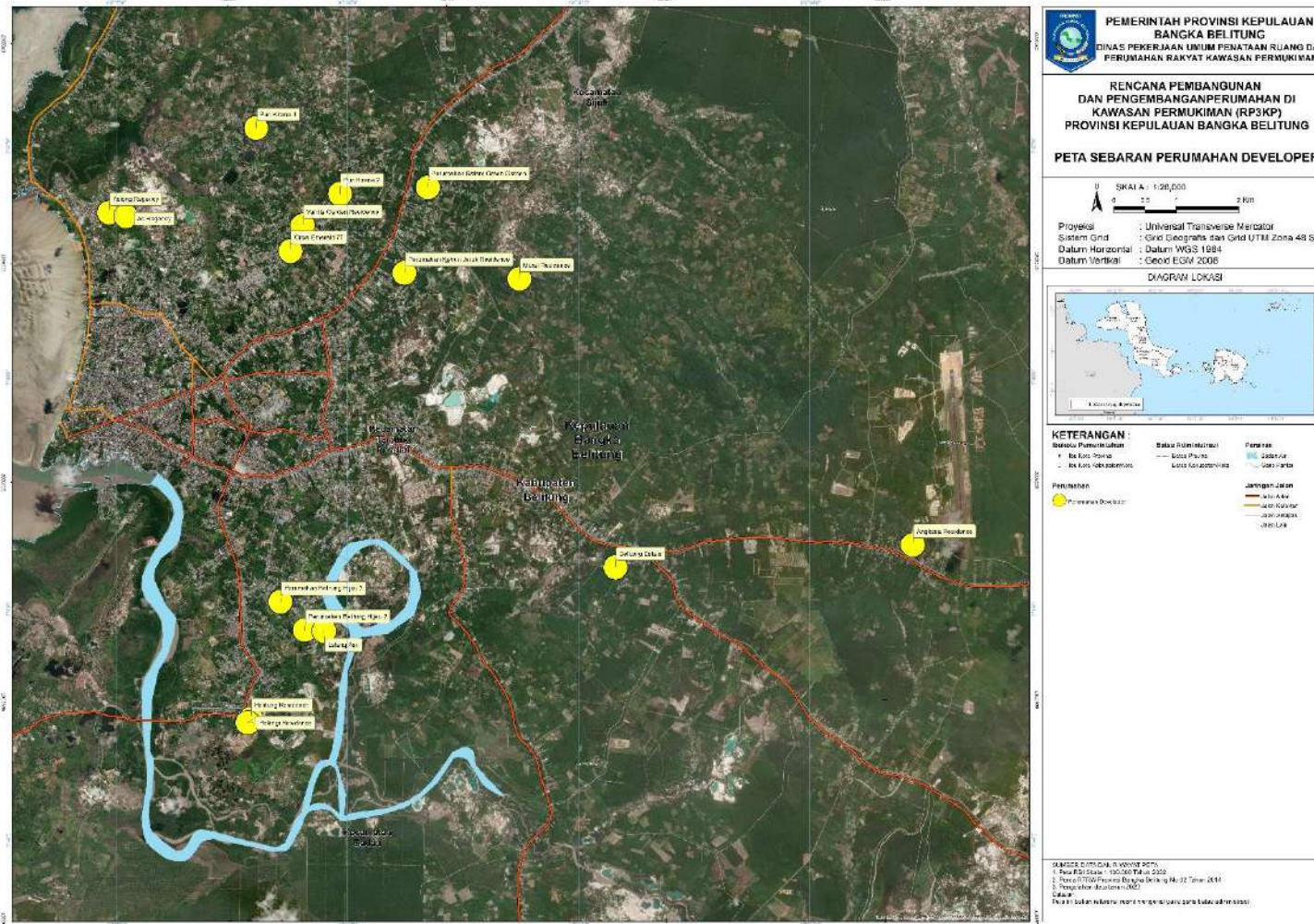


G.

Gambar 2.24 Sebaran Perumahan Komersial di Kabupaten Bangka Selatan



II - 108



I.

Gambar 2.26 Sebaran Perumahan Komersial di Kabupaten Belitung



II - 111

2.3.4 Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Setiap Kabupaten/Kota

a. rumah milik sendiri

Rumah dengan penguasaan bangunan milik sendiri yaitu Jika tempat tinggal tersebut pada waktu pendataan betul-betul sudah milik kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarganya. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri. Berdasarkan data BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah rumah milik sendiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 berjumlah 342.231 rumah meliputi Kabupaten Bangka berjumlah 89.795 rumah, Kabupaten Belitung berjumlah 52.740 rumah, Kabupaten Bangka selatan berjumlah 57.078 rumah, Kabupaten Bangka tengah berjumlah 53.529 rumah, Kabupaten Bangka barat berjumlah 56.959 rumah, Kabupaten Belitung timur berjumlah 40.184 rumah dan Kota pangkal pinang berjumlah 53.823 rumah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.19.

b. rumah sewa/kontrak

Rumah sewa/kontrak yaitu jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu. Jumlah rumah sewa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 15.369 rumah.

c. rumah bebas sewa

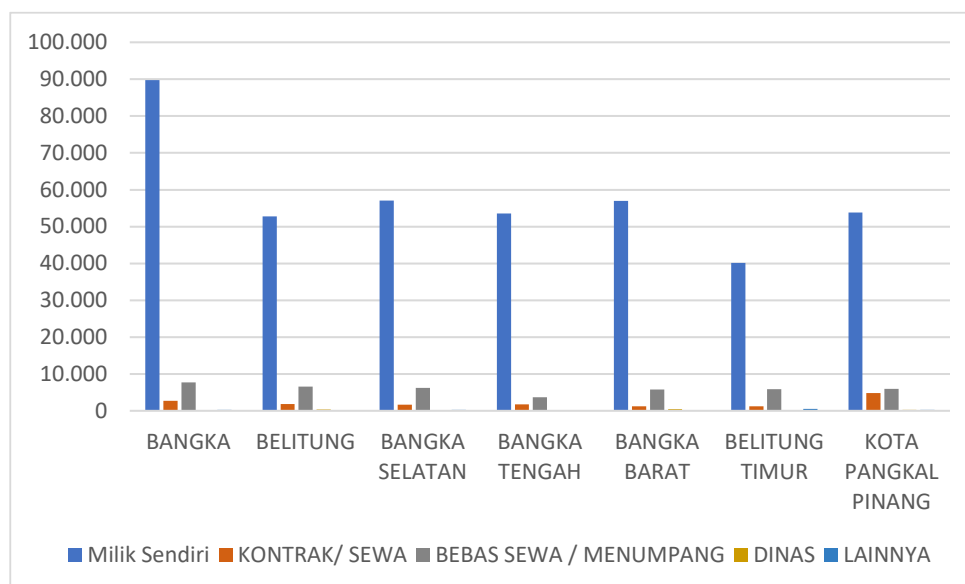
Rumah bebas sewa adalah Jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (famili/bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh keluarga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun. Jumlah rumah bebas sewa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 42.143 rumah.

Tabel 2.20 Jumlah Rumah Berdasarkan Kepemilikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa / Menumpang	Dinas	Lainnya
1	Bangka	89.795	2.711	7.768	205	302
2	Belitung	52.740	1.885	6.618	392	175
3	Bangka Selatan	57.078	1.681	6.260	150	287
4	Bangka Tengah	53.529	1.759	3.713	214	132
5	Bangka Barat	56.959	1.249	5.851	460	198
6	Belitung Timur	40.184	1.231	5.930	683	522
7	Kota Pangkal Pinang	53.823	4.853	6.003	323	322

No.	Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa / Menumpang	Dinas	Lainnya
	Prov. Kep. Bangka Belitung	404.108	15.369	42.143	2.427	1.938

Sumber: BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



Gambar 2.29 Grafik Jumlah Rumah Berdasarkan Kepemilikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

2.3.5 Jumlah dan sebaran backlog rumah setiap kab/kota

a. Berbasis kepemilikan

Masalah backlog merupakan salah satu isu utama dalam penyediaan perumahan di Kepulauan Bangka Belitung. Tingginya angka backlog perumahan terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah besarnya pertumbuhan jumlah penduduk, ketidakterjangkauan harga perumahan oleh masyarakat, harga lahan tinggi, dll. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 memiliki jumlah backlog sebesar 61.877 KK.

b. Berbasis penghunian

Backlog berbasis penghunian yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki hunian tetap dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Masalah RTLH juga merupakan salah satu isu utama dalam penyediaan perumahan di Indonesia. Masalah RTLH disebabkan oleh masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang sehat dan aman, sehingga masyarakat membangun rumahnya sendiri dengan bahan bangunan yang seadanya.

RTLH di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 tercatat sejumlah 2.287 Rumah Tangga.

2.3.6 Jumlah Dan Sebaran Rumah Tidak Layak Huni

sebagai data kondisi rumah yang tidak memenuhi syarat sebagai tempat tinggal baik dari sisi kesehatan, keamanan dan konstruksi. Jumlah RTLH di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 tercatat sejumlah 2.287 Rumah Tangga. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21 Sebaran Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Keselamatan Bangunan Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Keselamatan Bangunan												
		Jenis Atap Rumah Terluas					Jenis Dinding Rumah Terluas			Jenis Lantai Rumah Terluas				
		Asbes/seng	Kayu/sirap	Bambu	Jerami/ijuk/rumbia/daun-daunan	Lainnya	Kayu/papan	Bambu	Lainnya	Semen	Kayu/papan	Bambu	Tanah	Lainnya
1	Bangka	78.489	73	11	103	131	7.735	9	297	26.037	439	11	66	127
2	Bangka Selatan	50.427	82	6	82	51	11.123	4	102	19.612	1.378	2	69	40
3	Bangka Tengah	49.729	55	3	49	34	6.713	5	110	17.540	649	8	42	29
4	Bangka Barat	53.449	66	5	158	100	10.078	68	134	21.242	461	9	81	56
5	Belitung	51.843	28	1	31	26	6.165	9	159	15.845	657	2	16	206
6	Belitung Timur	39.526	33	1	13	131	4.287	1	150	14.160	672	2	28	26
7	Kota Pangkal Pinang	47.234	42	2	4	55	1.743	3	146	6.602	191	4	16	78
JUMLAH TOTAL		370.697	379	29	440	528	47.844	99	1.098	121.038	4.447	38	318	562

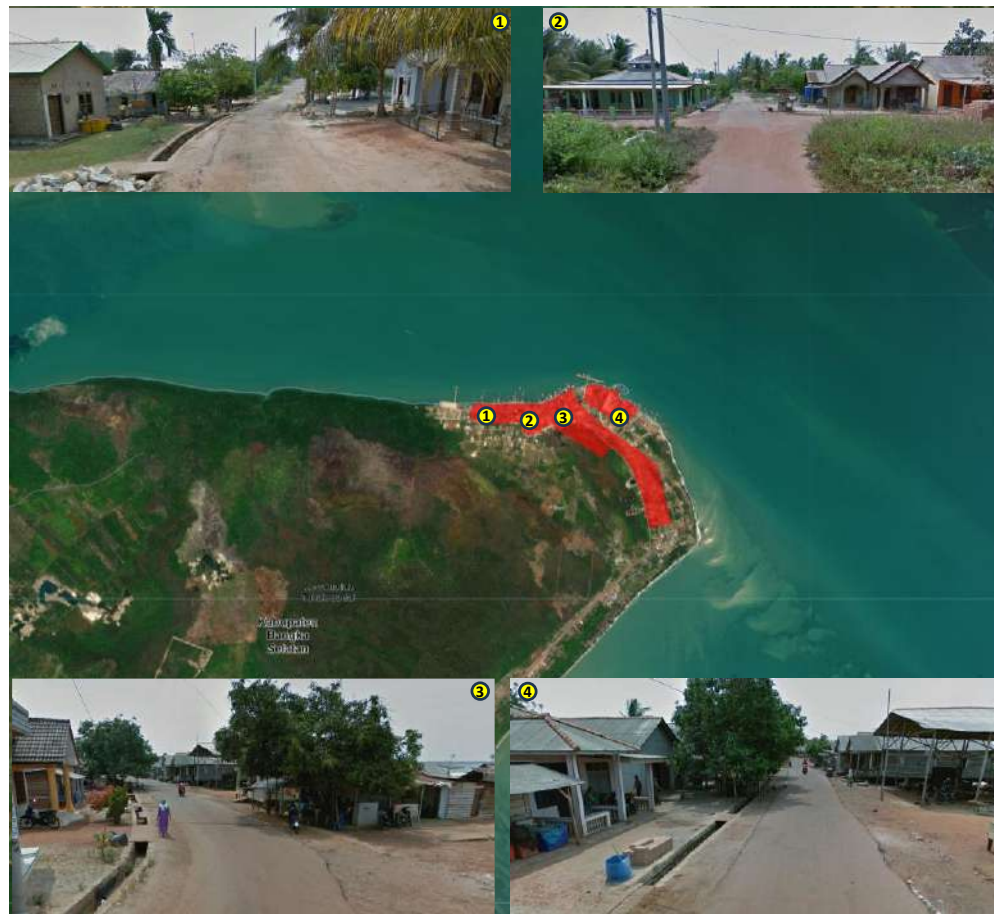
Sumber: BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

2.3.7 Perumahan Yang Berada Di Area Negative List

Kawasan Negative list adalah kawasan yang tidak diperuntukkan untuk lahan permukiman. Kawasan negative list terdiri atas dua bagian yaitu kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Kawasan Lindung adalah daerah yang memiliki fungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta nilai dari sejarah dan budaya, untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana. Permukiman yang berada di kawasan perlindungan setempat yaitu seluas 403,70 Ha, sedangkan permukiman yang ada di Kawasan Rawan Bencana yaitu seluas 1.584,97 Ha yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.29 sampai gambar 2.37.



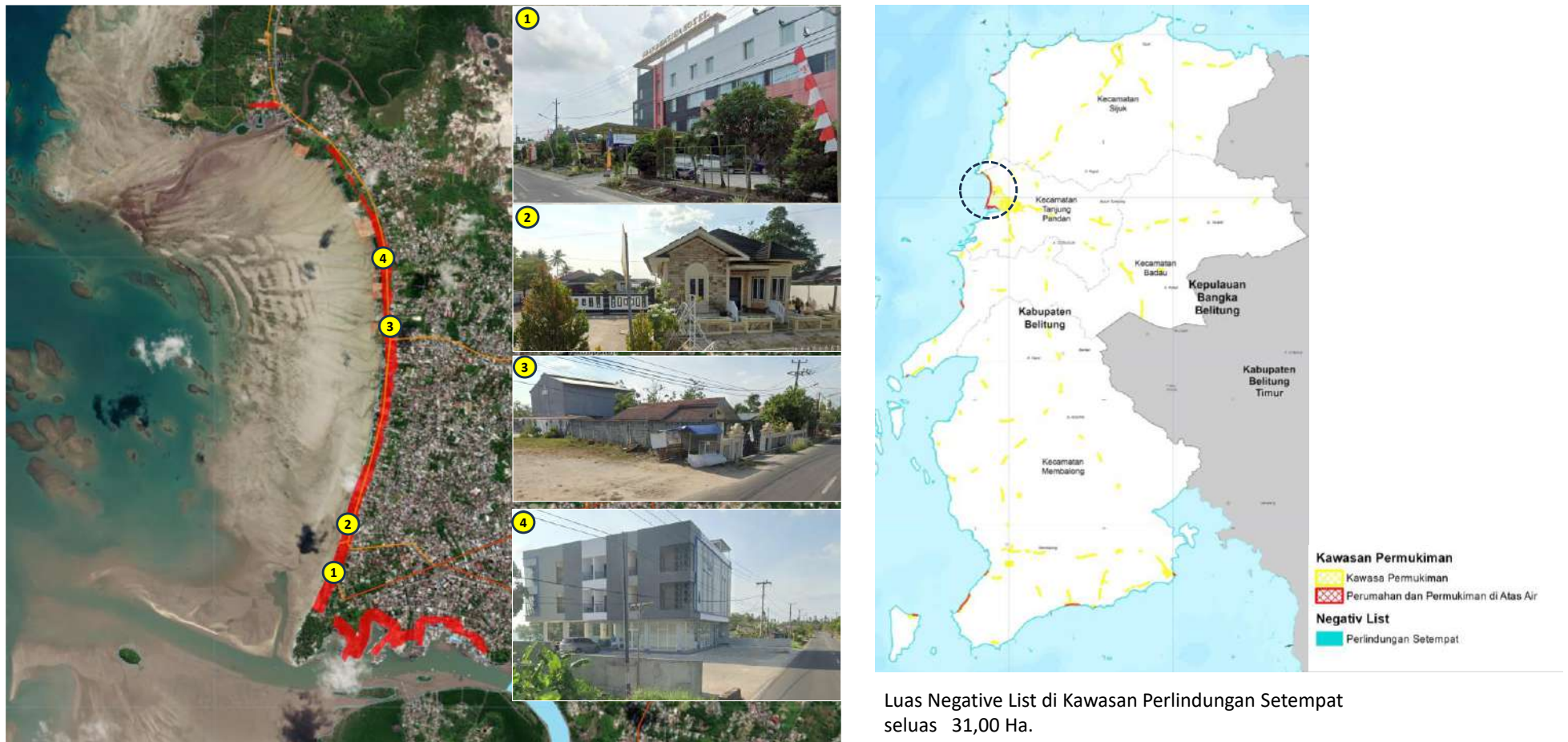
Gambar 2.30 Permukiman Di Perlindungan Setempat Di Kecamatan Pangkalbalam Pangkal Pinang



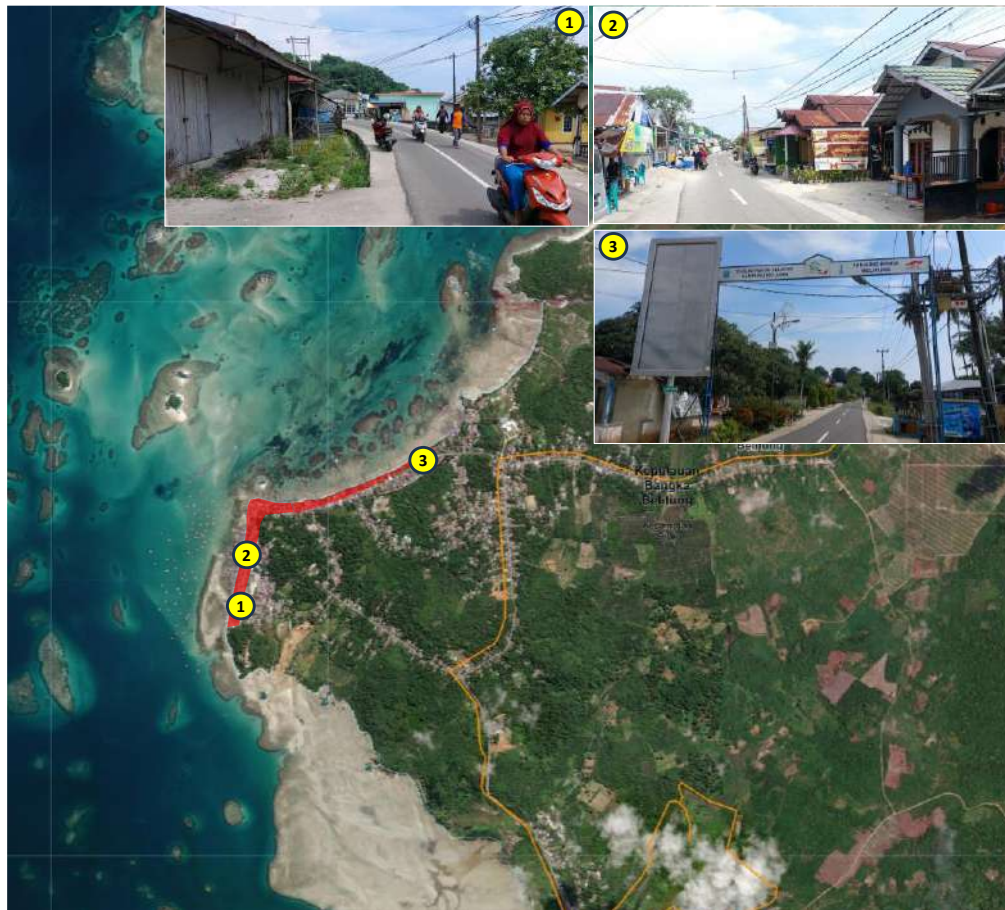
Gambar 2.31 Permukiman Di Sempadan Pantai Di Kecamatan Tukak Sadai Bangka Selatan



Gambar 2.32 Permukiman Di Sempadan Pantai Di Kecamatan Lepar Pongok Bangka Selatan

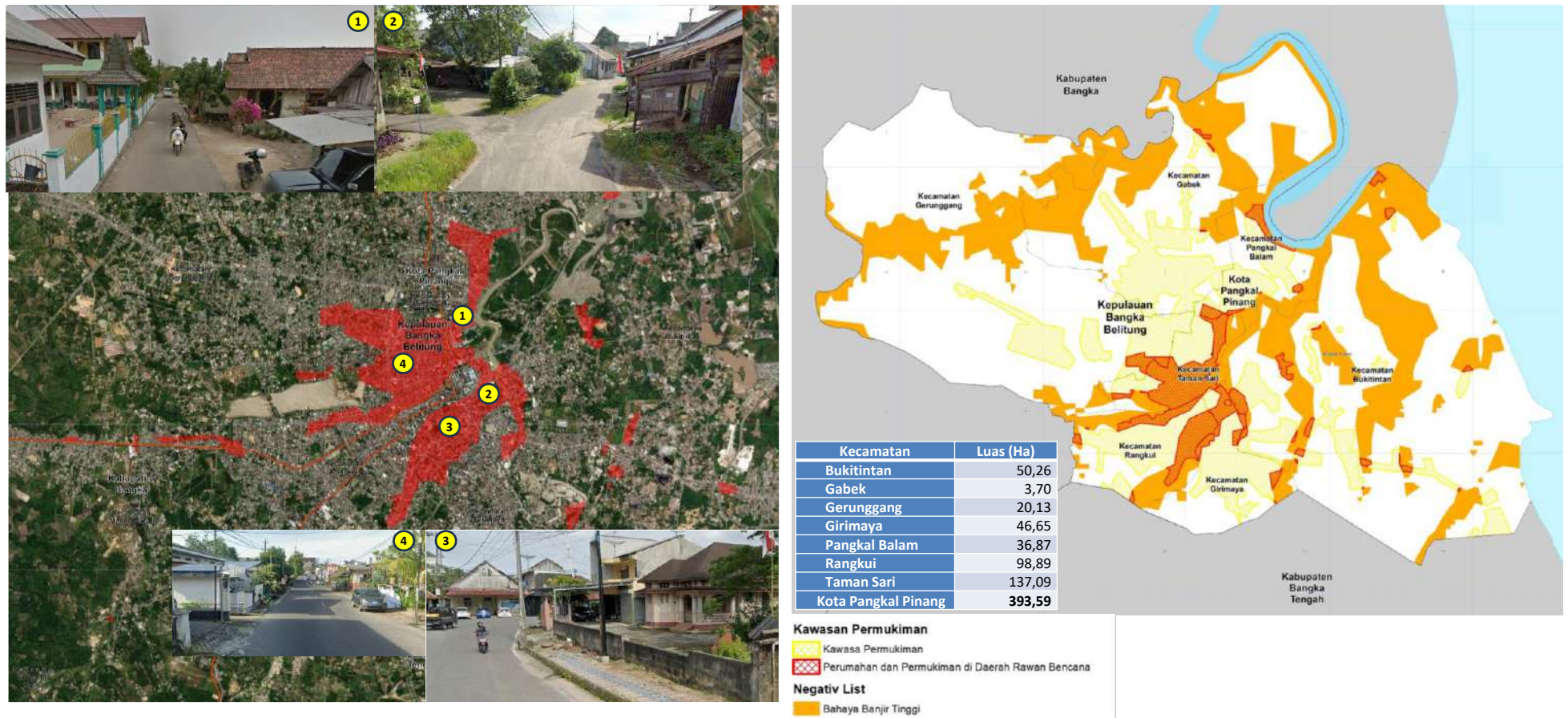


Gambar 2.33 Permukiman Di Sempadan Pantai Di Kecamatan Tanjung Pandan Belitung

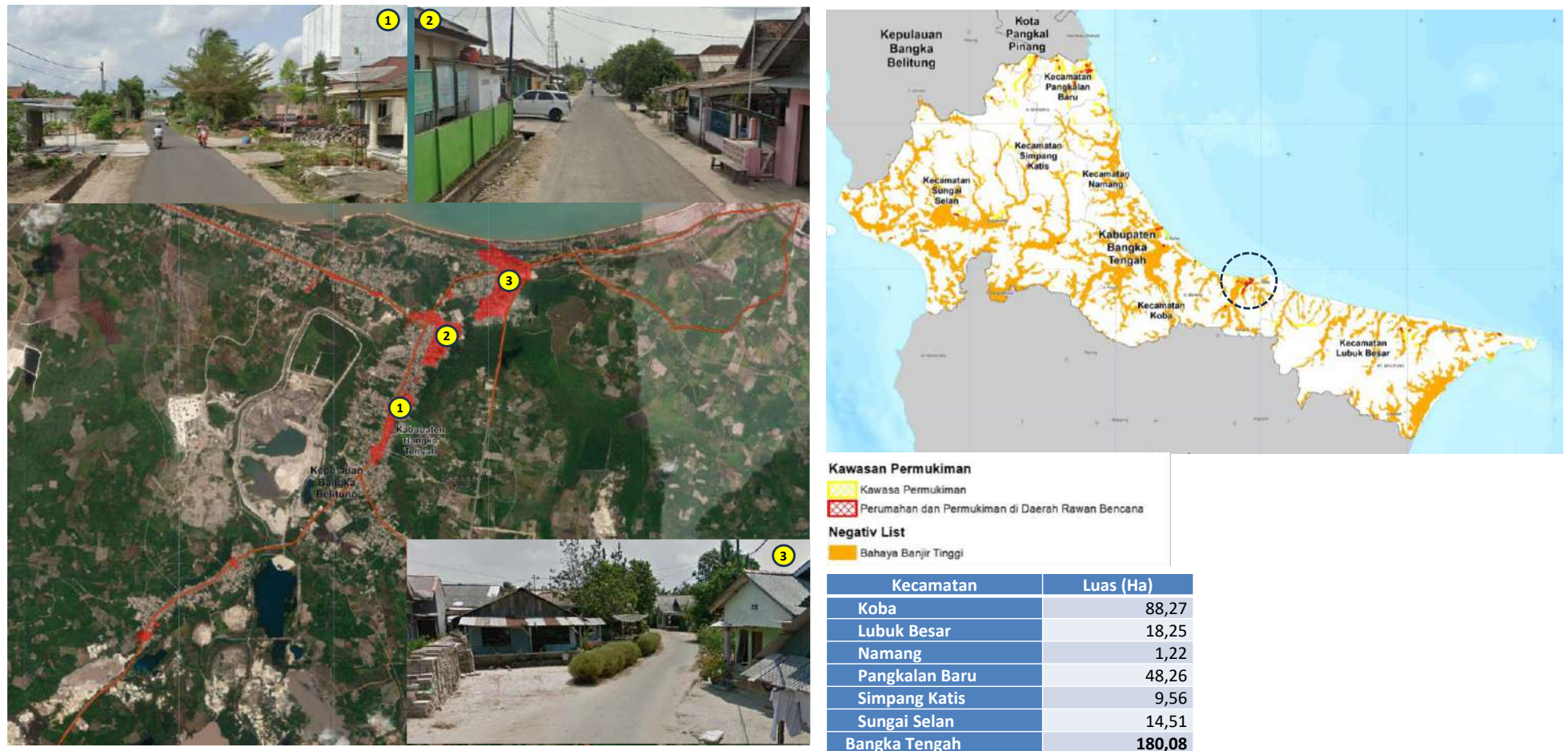


Luas Negative List di Kawasan Perlindungan Setempat
seluas 4,33 Ha.

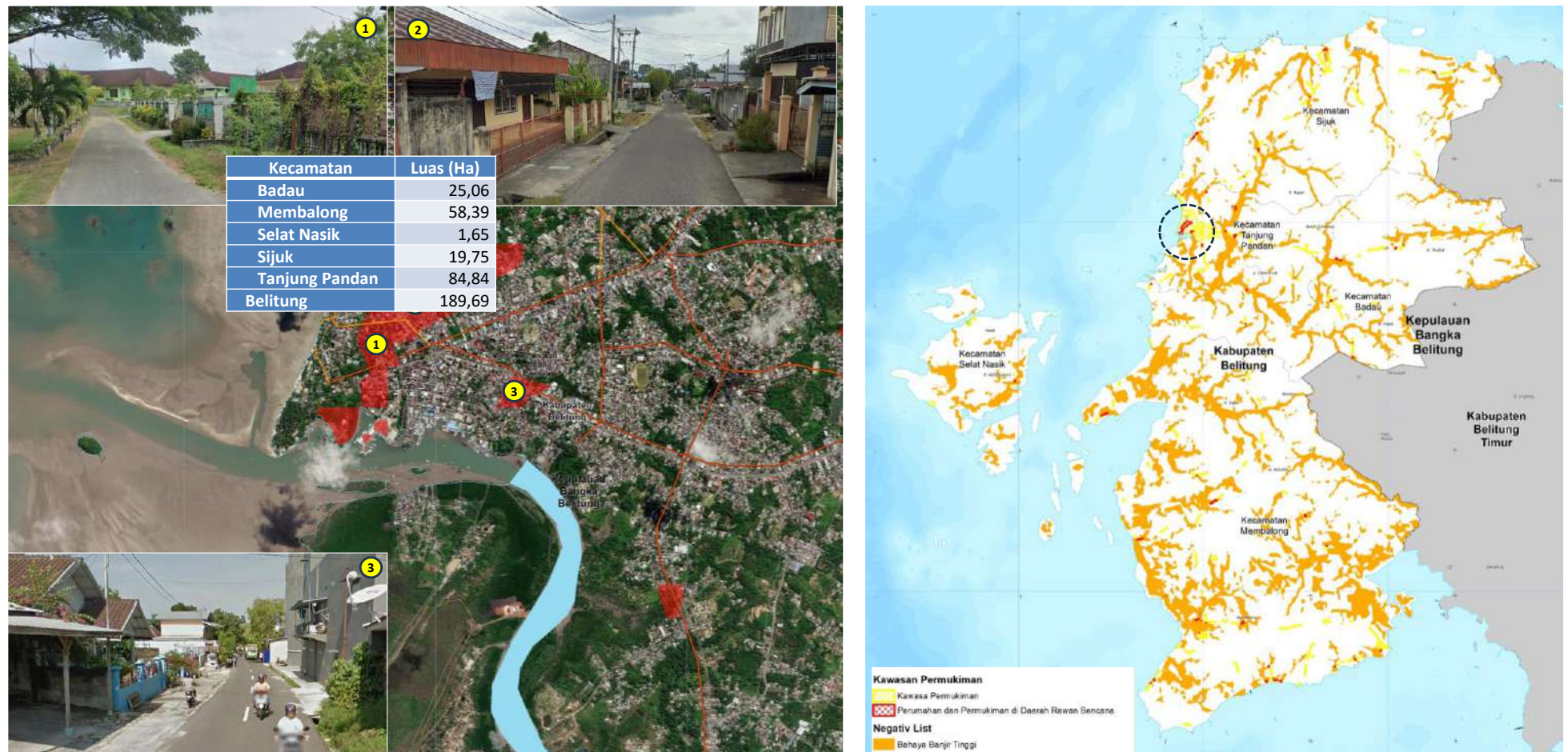
Gambar 2.34 Permukiman Di Sempadan Pantai Di Kecamatan Sijuk Belitung



Gambar 2.35 Permukiman Di Daerah Rawan Bencana di Kota Pangkal Pinang



Gambar 2.36 Permukiman di Daerah Rawan Bencana Di Kab. Bangka Tengah



Gambar 2.37 Permukiman Di Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Belitung

2.3.8 Kondisi Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Dalam KSP

Rencana Kawasan Strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sudut kepentingan ekonomi terdiri dari :

1. Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah
2. Kawasan terpadu Mandiri Batu Betumpang Kabupaten Bangka Selatan
3. Kawasan Minapolitan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan
4. Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik di Kabupaten Belitung
5. Kawasan Ekonomi Khusus Suge di Kabupaten Belitung
6. Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung
7. Kawasan Terpadu Mandiri Gantung di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur
8. Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK) di Kabupaten Belitung Timur
9. Kawasan Pelabuhan ASDP Manggar di Kabupaten Belitung Timur.

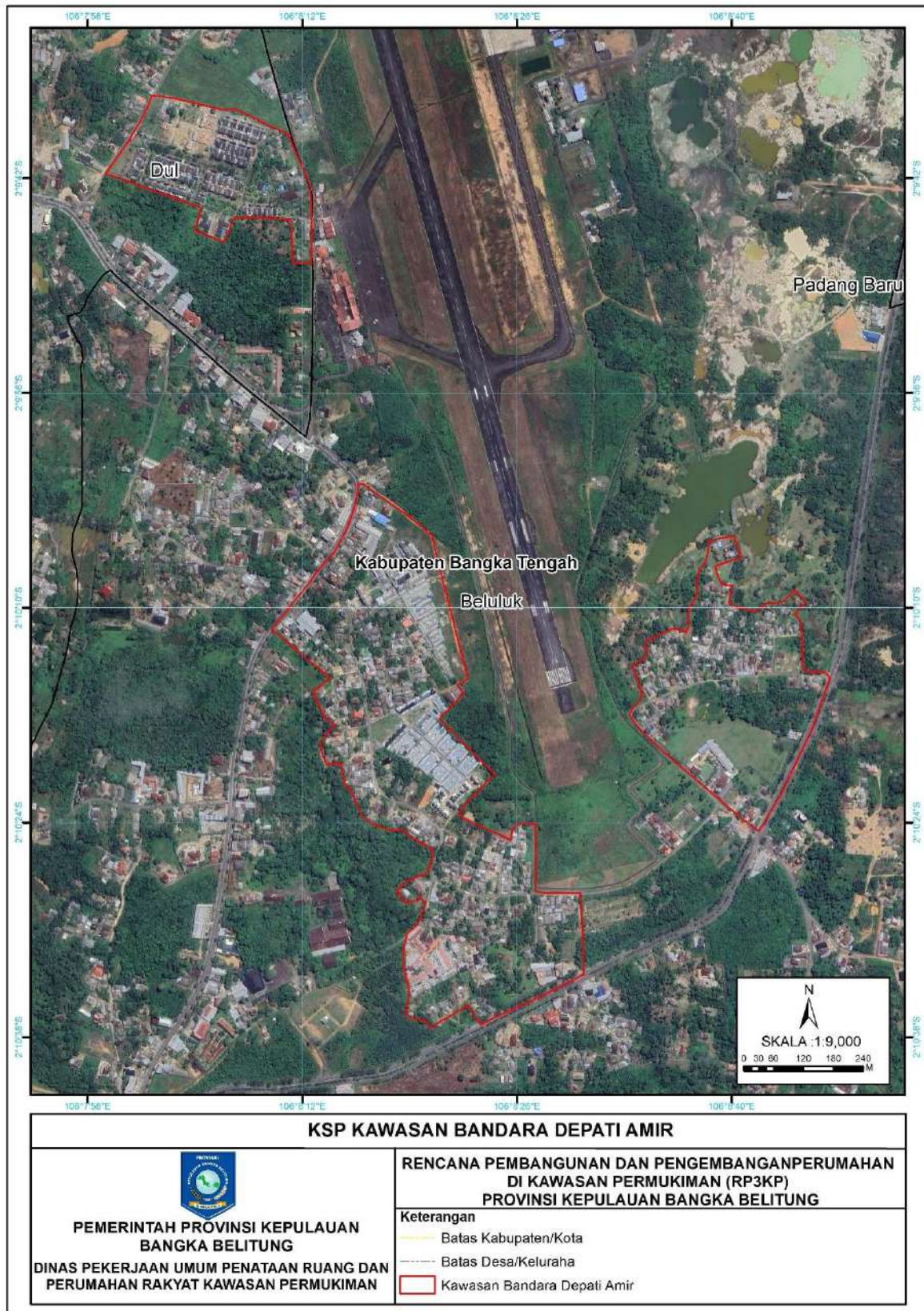
Adapun permukiman yang berada di dalam dan sekitar Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut.



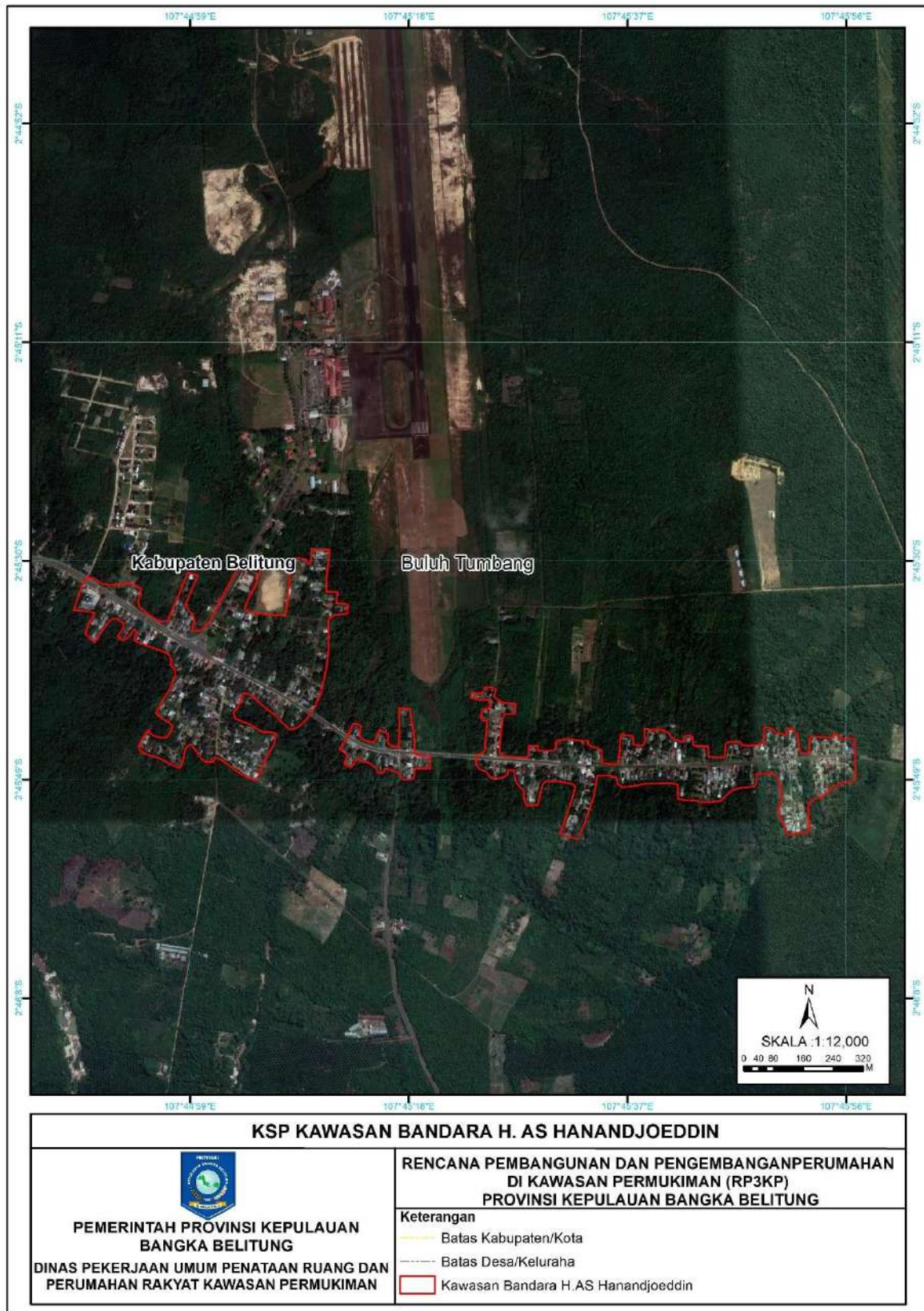
Gambar 2.38 Peta Kawasan Strategis Provinsi KIPT Muntok



Gambar 2.39 Peta Kawasan Strategis Provinsi Industri Air Kelik



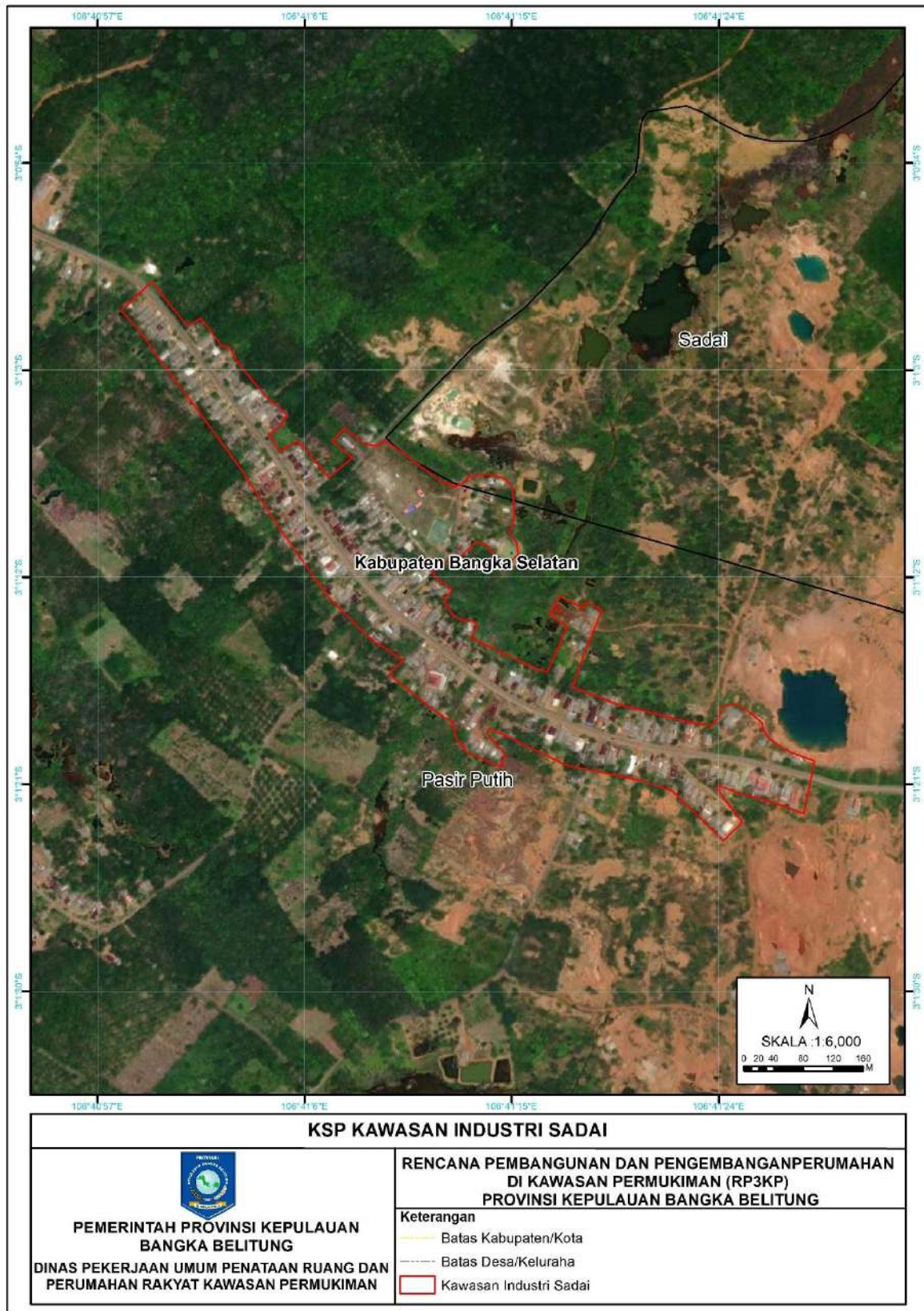
Gambar 2.40 Peta Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Bandara Depati Amir



Gambar 2.41 Peta Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Bandara HAS Hanandjoeddin



Gambar 2.42 Peta Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Dan Pelabuhan Teluk Kalebati



Gambar 2.43 Peta Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Sadai



Gambar 2.44 Peta Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Sadai



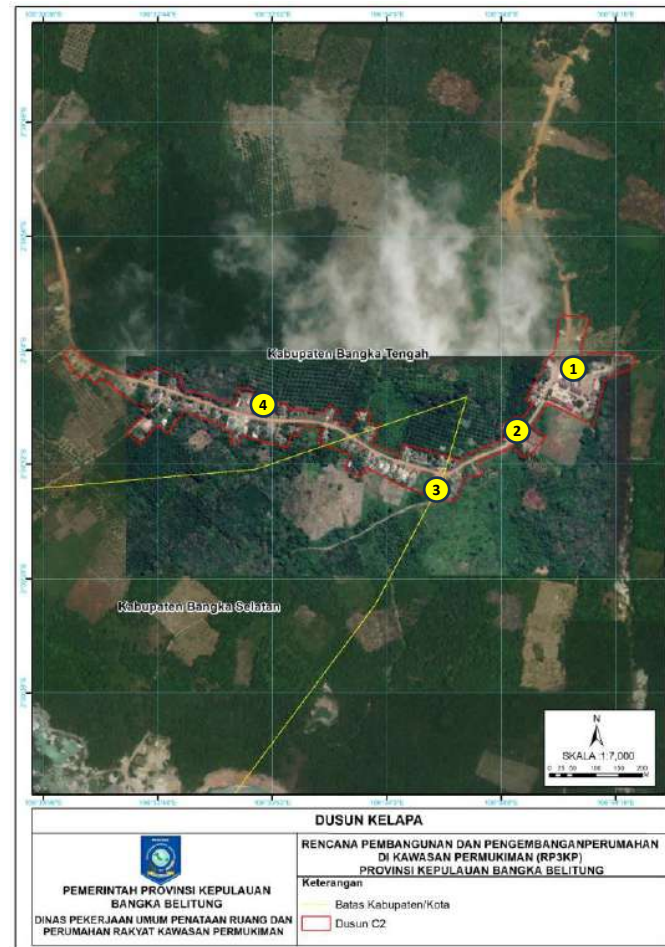
Gambar 2.45 Peta Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Terpadu Gantung



Gambar 2.46 Peta Kawasan Strategis Provinsi KIT Suge Dan Pelabuhan Tanjung Batu

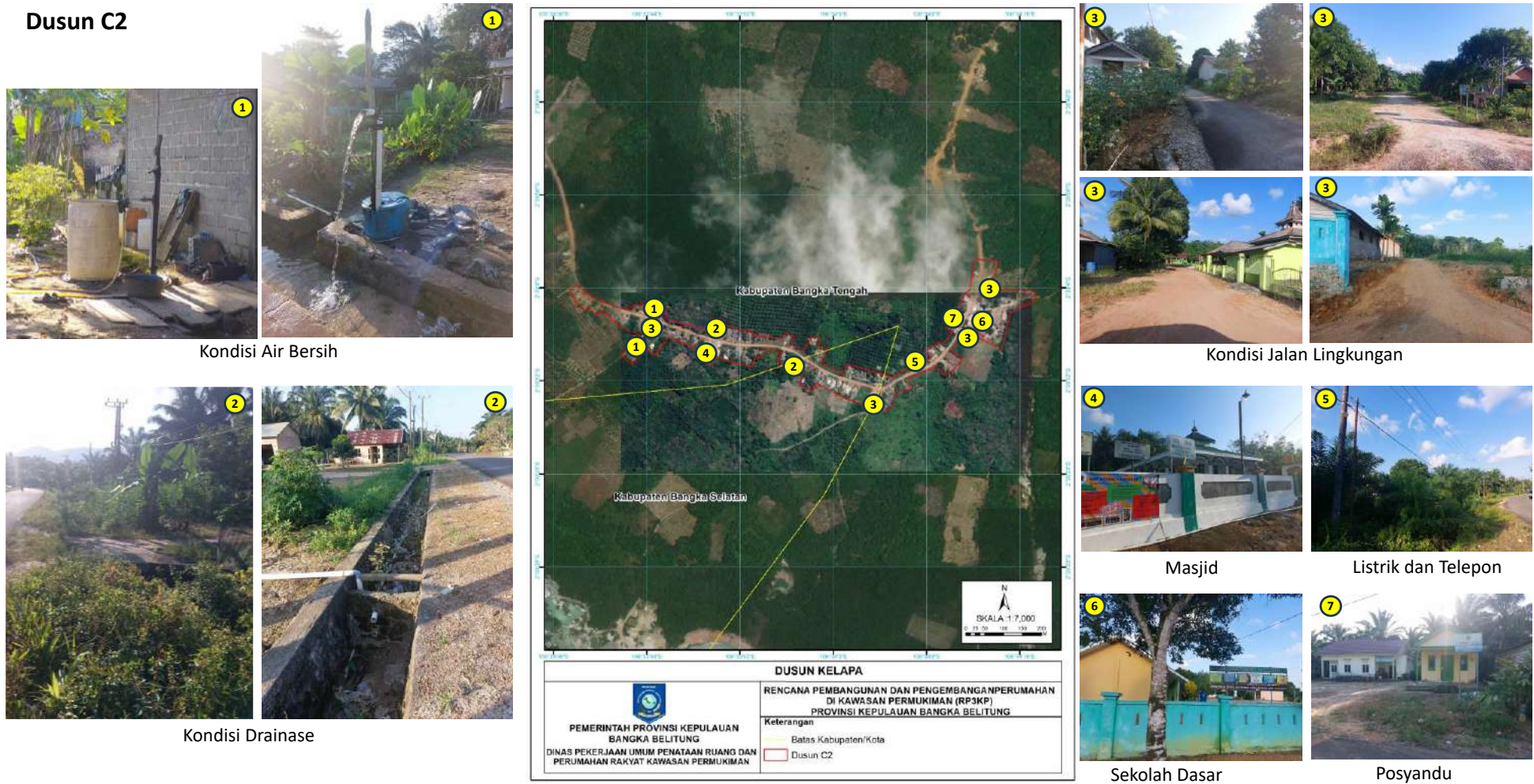
2.3.9 Kondisi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Dalam Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Dusun C2



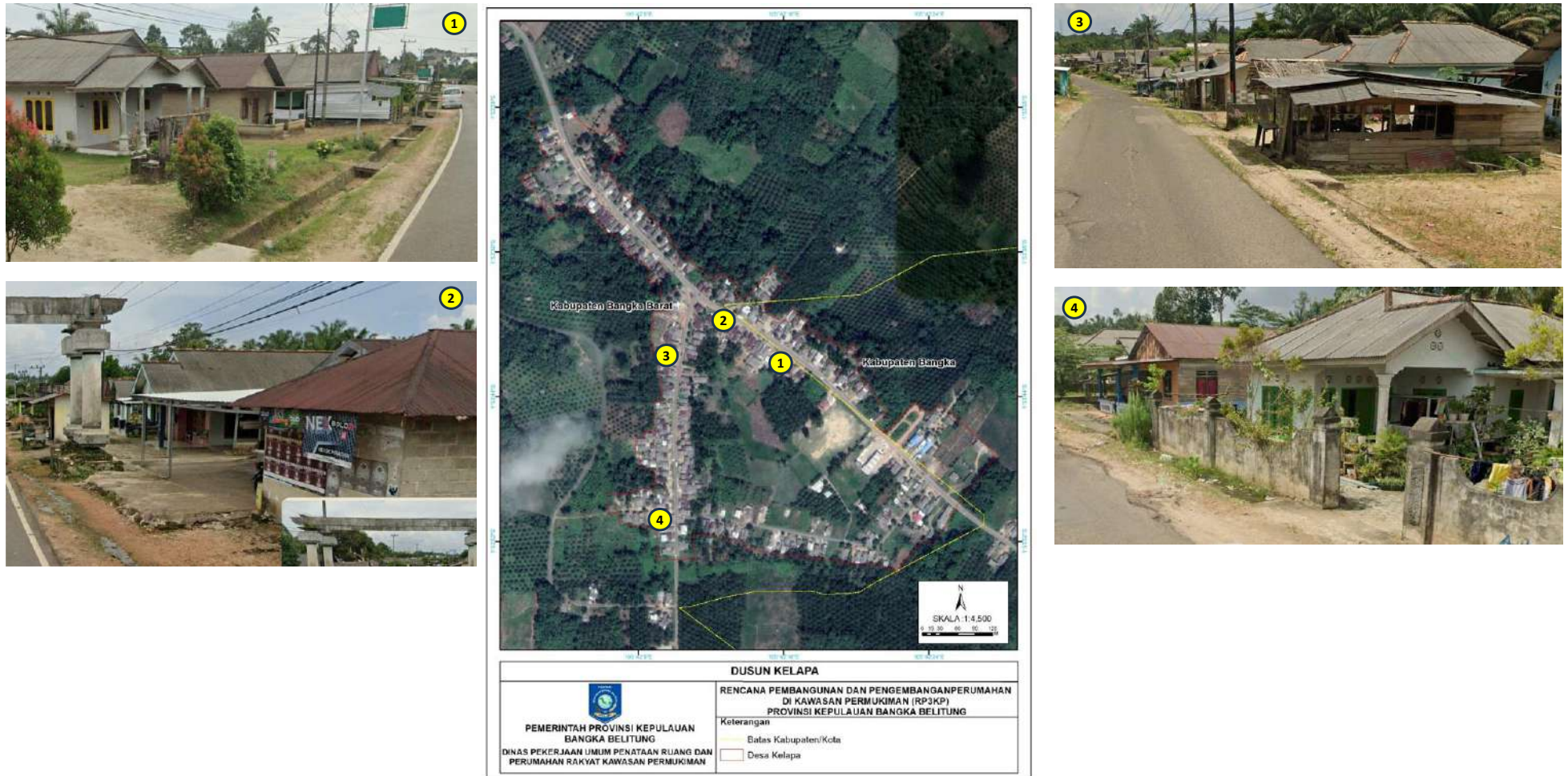
Gambar 2.47 Kondisi Perumahan Yang Ada di Lintas Batas Kabupaten Bangka Selatan – Kabupaten Bangka Tengah

Dusun C2

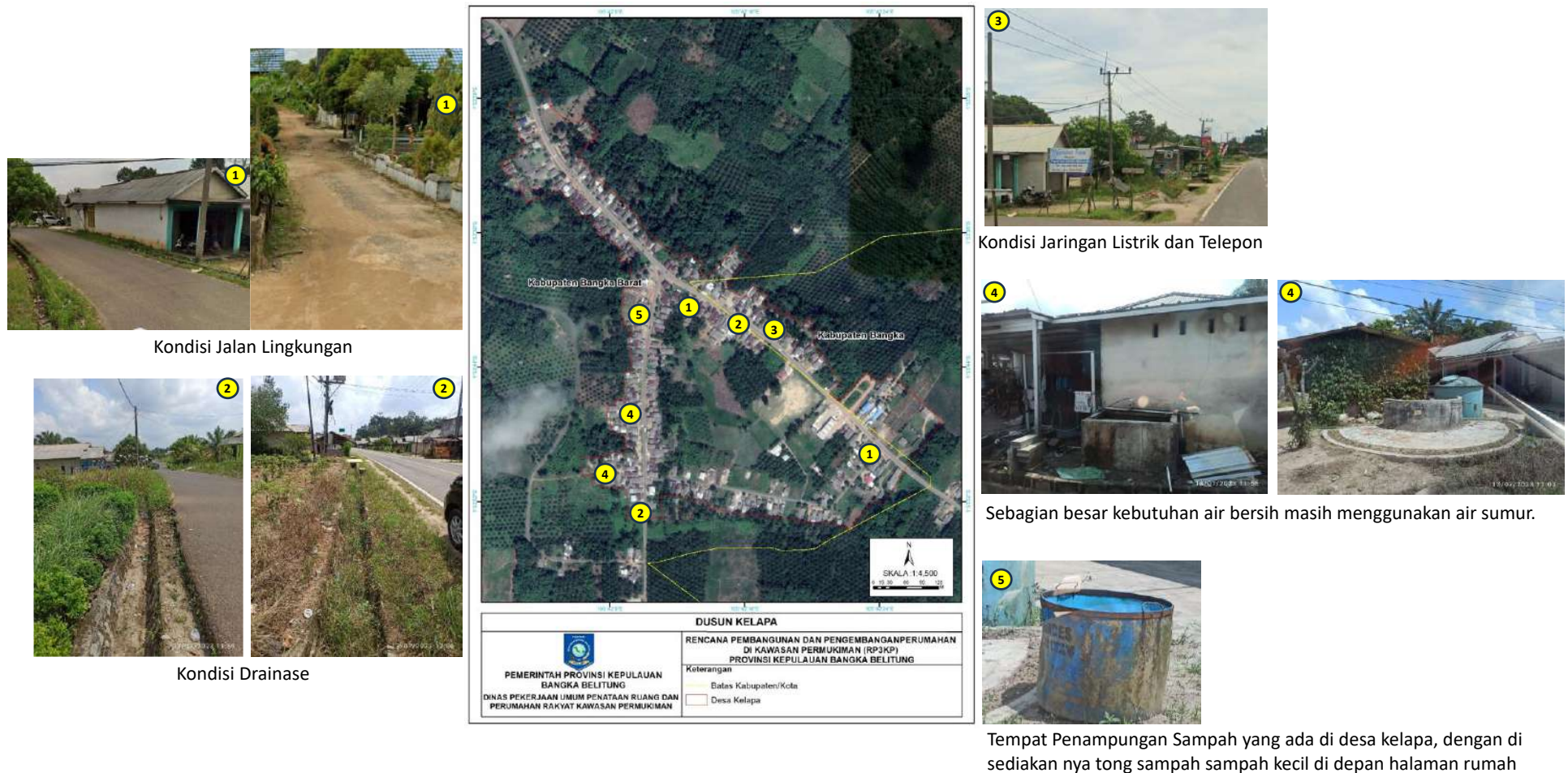


Gambar 2.48 Kondisi PSU Yang Ada di Lintas Batas Kabupaten Bangka Selatan – Kabupaten Bangka Tengah

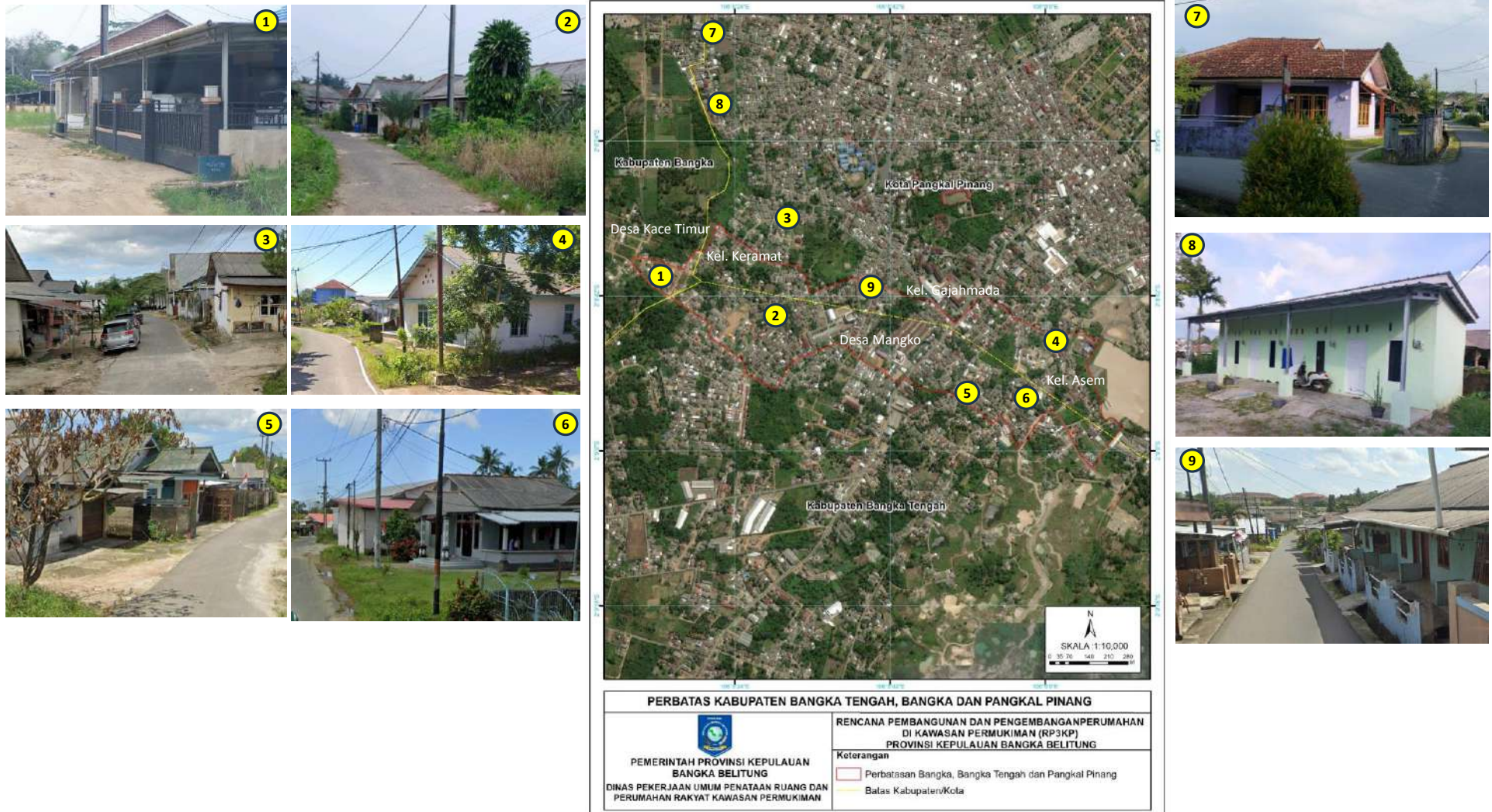
Desa Kelapa



Gambar 2.49 Kondisi Perumahan Yang Ada di Lintas Batas Kab. Bangka – Kab. Bangka Barat



Gambar 2.50 Kondisi PSU Yang Ada di Lintas Batas Kab. Bangka – Kab. Bangka Barat



Gambar 2.51 Kondisi Perumahan Yang Ada di Lintas Batas Kab. Bangka – Kab. Bangka Tengah - Kota Pangkalpinang



Gambar 2.52 Kondisi PSU Yang Ada di Lintas Batas Kab. Bangka – Kab. Bangka Tengah - Kota Pangkalpinang

2.3.10 Kondisi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh)

Hektar Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Hektar

Kawasan kumuh kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 125,14 Ha yang tersebar di 11 Kawasan yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.22 Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kab/Kota	Kawasan Kumuh Provinsi		Luas (Ha)
		Kecamatan	Kel/Desa	
1	Belitung	Tanjung Pandan	Parit	12,7
			Air Saga	10,29
2	Bangka Barat	Tempilang	Air Lintang	10
3	Bangka	Belinyu	Mantung	10,97
		Sungailiat	Sungailiat (Nelayan 2)	10,17
4	Belitung Timur	Gantung	Gantung (Trans Danau Nujau)	13,86
5	Pangkalpinang	Rangkui	Keramat (RT007-RW003)	12,5
		Rangkui	Parit Lalang (RT001-RW001)	10,3
			Parit Lalang (RT002-RW003)	12,5
6	Bangka Selatan	Lepar	Penutuk	10,32
		Kepulauan Pongok	Pongok	11,53
7	Bangka Tengah	Tidak Terdapat Kawasan Kumuh Provinsi		
JUMLAH				125,14

Sumber:

SK Kumuh Kabupaten Belitung Nomor 188.45/775/KEP/DPUPR/2020
 SK Kumuh Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.45/310.A/4.3.1.1/2020
 SK Kumuh Kabupaten Bangka Nomor 188.45/1335/DINPERKPP/2020
 SK Kumuh Kabupaten Belitung Timur Nomor 188.45-695 Tahun 2020
 SK Kumuh Kota Pangkalpinang Nomor 237/KEP/PERKIM/VII/2022
 SK Kumuh Kabupaten Bangka Selatan Nomor 188.45/19.d/DISPERKIM/2023
 SK Kumuh Kabupaten Bangka Tengah Nomor 188.45/152/DIPERKIMHUB/2022

2.3.11 Kondisi Eksisting PSU

A. Prasarana Jalan

Prasarana jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi Jalan arteri sepanjang 1.028,20 Km, Jalan Kolektor sepanjang 407,14 Km, Jalan Setapak sepanjang 3.445,17 Km dan Jalan Lain sepanjang 6.629,68 Km sehingga panjang jalan secara keseluruhan yaitu 11.510,20 Km. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Panjang Jalan Berdasarkan Fungsinya Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lain	Jalan Setapak	Total Panjang Jalan (Km)
Kabupaten Bangka	142,09	-	1.352,49	907,45	2.402,03
Kabupaten Bangka Barat	135,64	146,31	1.847,30	797,22	2.926,47
Kabupaten Bangka Selatan	221,66	-	935,96	1.026,89	2.184,52
Kabupaten Bangka Tengah	215,84	-	894,65	285,14	1.395,64
Kabupaten Belitung	203,68	121,71	834,72	136,87	1.296,98
Kabupaten Belitung Timur	96,36	139,12	552,21	264,56	1.052,24
Kota Pangkal Pinang	12,92	-	212,35	27,04	252,31
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	1.028,20	407,14	6.629,68	3.445,17	11.510,20

Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034



Gambar 2.53 Kondisi Transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

B. Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum terbangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 51 unit dengan total kapasitas terpasang sekitar 1.148 liter/detik. Potensi Pemanfaat SPAM Terbangun yaitu sekitar 195,136 sambungan rumah.

Tabel 2.24 SPAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Keterangan	Nilai	Satuan
Jumlah SPAM Terbangun	51	Unit
	1.148	Liter/detik
Potensi Pemanfaat SPAM Terbangun	195,136*	SR
Belum termanfaatkan	257	Liter/detik
	43,671*	SR

Sumber: Portal SIMSPAM, 2021



Sistem penyediaan air bersih dan atau air minum untuk masing-masing kabupaten adalah :

- Kabupaten Bangka; selain mengandalkan air baku dari sungai yang ada yaitu sungai Sungai Batu Rusa, Sungai Layang, Sungai Mapur, Sungai Jeruk dan Sungai Menduk juga mencoba untuk memanfaatkan air “kolong” yang merupakan tampungan air bekas galian pertambangan yang sudah tua. Sumber air kolong ini bila memenuhi baku mutu air minum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Kolong yang dimaksud adalah Kolong Pemali, Merawang dan Belinyu. Kolong air Pemali berumur puluhan tahun dan berada di wilayah Kecamatan Pemali, luas kolong seluruhnya lebih kurang 20 ha dengan kedalaman 20 -30 m dengan kondisi air jernih. Kolong Merawang berada di Kecamatan Merawang dengan luas kolong 10 ha dengan kedalaman rata rata 15 m, kondisi air kotor dikarenakan adanya kegiatan reklamasi. Kolong Pasir Merah merupakan sumber air PDAM Tirta Bangka cabang Belinyu dengan luas 15 ha dengan kedalaman rata rata 4 m.
- Kabupaten Bangka Barat; Sumberdaya air permukaan di Kabupaten Bangka Barat umumnya berasal dari air sungai yang melintasi semua daerah kecamatan dan jumlahnya sekitar 17 buah sungai. Sungai Pelangas yang melintasi Kecamatan Simpang Tritip merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Bangka Barat dengan panjang sekitar 170.000 meter. Sedangkan Sungai Tempilang di Kecamatan

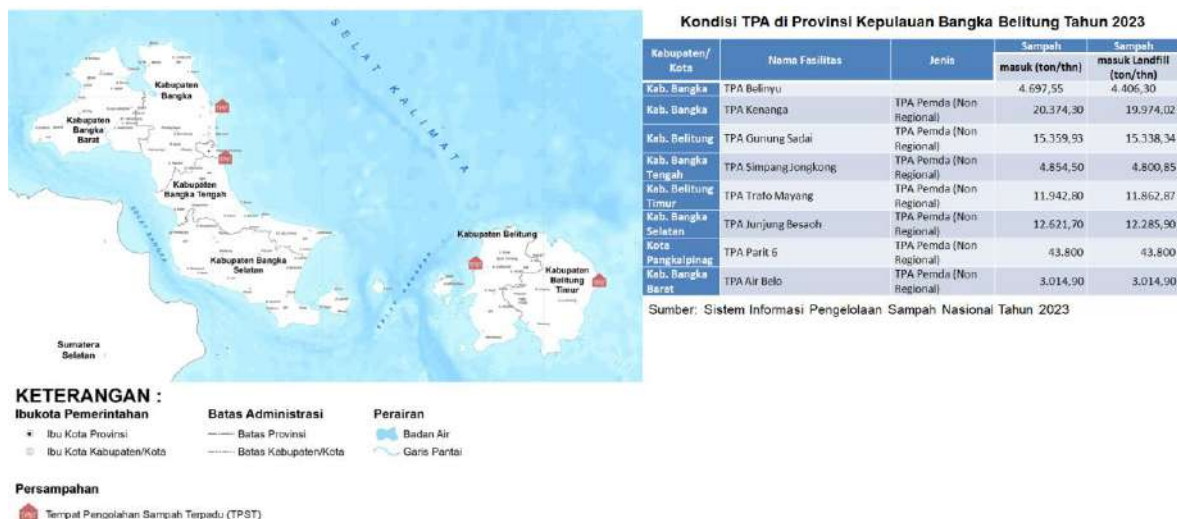
Tempilang adalah sungai yang paling pendek dengan panjang hanya sekitar 200 meter. Sedangkan potensi subutmberrydaya air yang berasal dari air tanah di daerah yang diidentikan dengan "kawasan timah" tentu pada saat ini potensinya yang cukup besar dari sisi kuantitas.

- c. Kabupaten Bangka Selatan; sumber air bersih diperoleh dari air permukaan yang bersumber dari Wilayah DAS yang terdapat di Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : DAS Bantel, terletak sebagian besar di Kelurahan Toboali dan di Kelurahan Tukak Kecamatan Toboali. DAS ini berupa hutan non mangrove seluas 5.940 Ha dan lahan terbuka 2.293 ha. DAS Kepoh, terletak bagian timur Kabupaten Bangka Selatan. DAS ini terdiri dari 9.455 ha hutan non mangrove, 5.454 ha lahan terbuka, 509 ha lahan terbuka recharge area (area imbuhan), 26 ha kolong recharge area. DAS Nyirih, terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari hutan non mangrove 42.040 ha, lahan terbuka 9.023 ha, lahan terbuka recharge area 1.641 ha. DAS Kurau, terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Bangka Selatan, DAS ini terdiri dari kawasan hutan non mangrove 23.224 ha, areal terbuka 10.217 ha lahan terbuka recharge area 3.110 ha dan kolong recharge area 285 ha. DAS Bangka Kota, terletak di sebelah barat wilayah Kabupaten Bangka Selatan, wilayah DAS ini hanya sebagian kecil saja yang masuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan. DAS ini terdiri dari Hutan non mangrove 24.935 ha, lahan terbuka recharge area 320 ha dan kolong recharge area 38 ha.
- d. Kabupaten Bangka Tengah; Sumber air di Kabupaten Bangka Tengah terdapat Air tanah, Sungai maupun Kolong (cekungan bekas tambang), seperti mata air di gunung Mangkol, aliran mata air di bukit Kejora di kecamatan Pangkalan Baru, dan Air Sadap di desa Perlang, Kecamatan Koba. Untuk sungai-sungai yang ada di kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Potensi cekungan bekas tambang timah atau yang sering disebut dengan kolong yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu alternatif sumber air baku dalam pemenuhan kebutuhan air. Dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah hanya 4 kecamatan yang memanfaatkan kolong sebagai salah satu sumber air baku. Ke empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Koba, Lubuk, Simpang Katis, Sungai Selan dan masing-masing kecamatan terdiri dari 2 kolong seperti yang dijelaskan pada sub bab diatas.
- e. Kota Pangkal Pinang; untuk sumber air baku Kota Pangkal Pinang memanfaatkan kolam atau waduk retensi Kacang Pedang. Kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang adalah kawasan yang terdiri atas daerah *cathment area* (daerah pengaliran)

seluas 46,90 km², waduk (kolam retensi) seluas 60 hektar untuk penumpukan/penampungan air sebanyak 3,4 juta m³ yang berfungsi antara lain sebagai pengendali banjir dan air genangan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Rangkui, sebagai sumber air baku bagi PDAM, tempat intake dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pedindang dengan kapasitas 500 meter perdetik atau setara dengan kapasitas 30.000 sambungan rumah.

- f. Kabupaten Belitung; air kolong merupakan sumber air baku instalasi pengelolaan air (IPA) PDAM Manggar di Dusun Pancur Desa Padang Manggar. Kedepan bebebrapa kolong lain yang telah dididentifikasi akan dikembangkan juga sebagai sumber air minum, Secara keseluruhan di Pulau Belitung sendiri terdapat 343 kolong dengan luas 677,14 hektar. Pada sisi lain dalam rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu direncanakan untuk memanfaatkan air laut sebagai air baku melalui proses saltinasi.
- g. Kabupaten Belitung Timur; sumber air bersih di kabupaten Belitung Timur juga mengandalkan Kolong (danau bekas tambang) yang terebar di setiap kecamatan. Namun kabupaten ini juga dilintasi oleh Sungai Lenggang yang berpotensi sebagai sumber air baku, baik untuk minum maupun kebutuhan industri.

C. Sistem Pengelolaan Persampahan



D. Sarana Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian

- Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara garis besar terbagi menjadi dua jenis berdasarkan statusnya, yaitu sarana pendidikan negeri dan swasta. Masing-masing sarana pendidikan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang sama dengan sarana pendidikan di Indonesia.

Jumlah sarana pendidikan SD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 mencapai 851 unit, SMP 275 unit, SMA/SMK 159 dan perguruan tinggi 11 unit. Untuk kondisi sarana pendidikan umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25 Banyaknya Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan			
		SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
A	Kabupaten Bangka	176	60	39	4
1	Mendo barat	34	12	7	1
2	Merawang	23	5	5	1
3	Puding Besar	11	6	3	
4	Sungailiat	34	13	12	2
5	Pemali	15	5	2	
6	Bakam	13	5	2	
7	Belinyu	28	9	6	
8	Riau Silip	18	5	2	
B	Kabupaten Bangka Tengah	105	35	20	-
1	Koba	20	7	4	
2	Lubuk Besar	19	4	2	
3	Pangkalan Baru	20	6	5	
4	Namang	10	4	2	
5	Sungai Selan	24	9	5	
6	Simpang Katis	12	5	2	
C	Kabupaten Bangka Selatan	101	44	23	-
1	Payung	14	6	2	
2	Pulau Besar	8	3	3	
3	Simpang Rimba	12	5	3	
4	Toboali	36	15	8	
5	Tukak Sadai	6	3	1	
6	Air Gegas	17	8	4	
7	Lepar Pongok	5	3	1	
8	Kepulauan Pongok	3	1	1	
D	Kabupaten Bangka Barat	142	48	25	-
1	Kelapa	28	7	3	
2	Tempilang	22	8	4	
3	Muntok	30	11	7	
4	Simpang Teritip	20	11	5	

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan			
		SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
5	Jebus	18	5	2	
6	Parittiga	24	6	4	
E	Kota Pangkal Pinang	100	32	21	4
1	Rangkui	17	5	6	
2	Bukit Intan	15	6	6	1
3	Girimaya	13	5	3	
4	Pangkalbalam	11	2	2	
5	Gabek	15	4	-	1
6	Tamansari	8	2	2	1
7	Gerunggang	21	8	2	1
F	Kabupaten Belitung	122	31	17	3
1	Membalong	31	6	1	
2	Tanjungpandan	45	15	11	3
3	Badau	17	3	1	
4	Sijuk	22	5	3	
5	Selat Nasik	7	2	1	
G	Kabupaten Belitung Timur	105	25	14	-
1	Dendang	10	2	1	
2	Simpang Pesak	10	2	1	
3	Gantung	20	5	2	
4	Simpang Renggang	8	2	1	
5	Manggar	31	7	6	
6	Damar	9	2	1	
7	Kelapa Kampit	17	5	2	
	Prov. Kep. Bangka Belitung	851	275	159	11

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2023

- Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Rumah Sakit berjumlah 23 unit, Puskesmas 64 unit, Puskesmas Pembantu 150 unit, Klinik Bersalin 3 unit dan Poliklinik 52 unit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.26 Banyaknya Sarana Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Sarana Kesehatan				
		Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik Bersalin	Poliklinik
A	Kabupaten Bangka	6	12	38	0	9
1	Mendo barat	0	2	7	0	1
2	Merawang	1	1	2	0	2
3	Puding Besar	1	1	5	0	0
4	Sungailiat	3	3	6	0	4
5	Pemali	0	1	2	0	0

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Sarana Kesehatan				
		Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik Bersalin	Poliklinik
6	Bakam	0	1	4	0	0
7	Belinyu	1	2	5	0	2
8	Riau Silip	0	1	7	0	0
B	Kabupaten Bangka Tengah	4	9	1	0	3
1	Koba	1	1	0	0	0
2	Lubuk Besar	0	2	0	0	0
3	Pangkalan Baru	2	2	1	0	2
4	Namang	1	1	0	0	0
5	Sungai Selan	0	2	0	0	0
6	Simpang Katis	0	1	0	0	1
C	Kabupaten Bangka Selatan	2	10	29	0	4
1	Payung	1	1	5	0	0
2	Pulau Besar	0	1	4	0	0
3	Simpang Rimba	0	1	5	0	1
4	Toboali	1	2	5	0	2
5	Tukak Sadai	0	1	0	0	0
6	Air Gegas	0	2	8	0	1
7	Lepar Pongok	0	1	2	0	0
8	Kepulauan Pongok	0	1	0	0	0
D	Kabupaten Bangka Barat	3	8	29	0	12
1	Kelapa	0	1	17	0	1
2	Tempilang	0	1	2	0	0
3	Muntok	2	1	2	0	9
4	Simpang Teritip	0	2	3	0	1
5	Jebus	0	1	2	0	0
6	Parittiga	1	2	3	0	1
E	Kota Pangkal Pinang	4	9	22	3	12
1	Rangkui	1	1	5	0	3
2	Bukit Intan	0	2	3	1	4
3	Girimaya	2	1	1	0	1
4	Pangkalbalam	0	1	4	0	1
5	Gabek	0	1	4	0	1
6	Tamansari	0	2	1	1	2
7	Gerunggang	1	1	4	1	0
F	Kabupaten Belitung	3	9	31	0	6
1	Membalong	0	2	10	0	1
2	Tanjungpandan	3	3	8	0	5
3	Badau	0	1	5	0	0
4	Sijuk	0	2	6	0	0
5	Selat Nasik		1	2	0	0
G	Kabupaten Belitung Timur	1	7	0	0	6
1	Dendang	0	1	0	0	1
2	Simpang Pesak	0	1	0	0	0
3	Gantung	0	1	0	0	0
4	Simpang Renggiang	0	1	0	0	0
5	Manggar	1	1	0	0	4
6	Damar	0	1	0	0	0

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Sarana Kesehatan				
		Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik Bersalin	Poliklinik
7	Kelapa Kampit	0	1	0	0	1
	Prov. Kep. Bangka Belitung	23	64	150	3	52

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2023

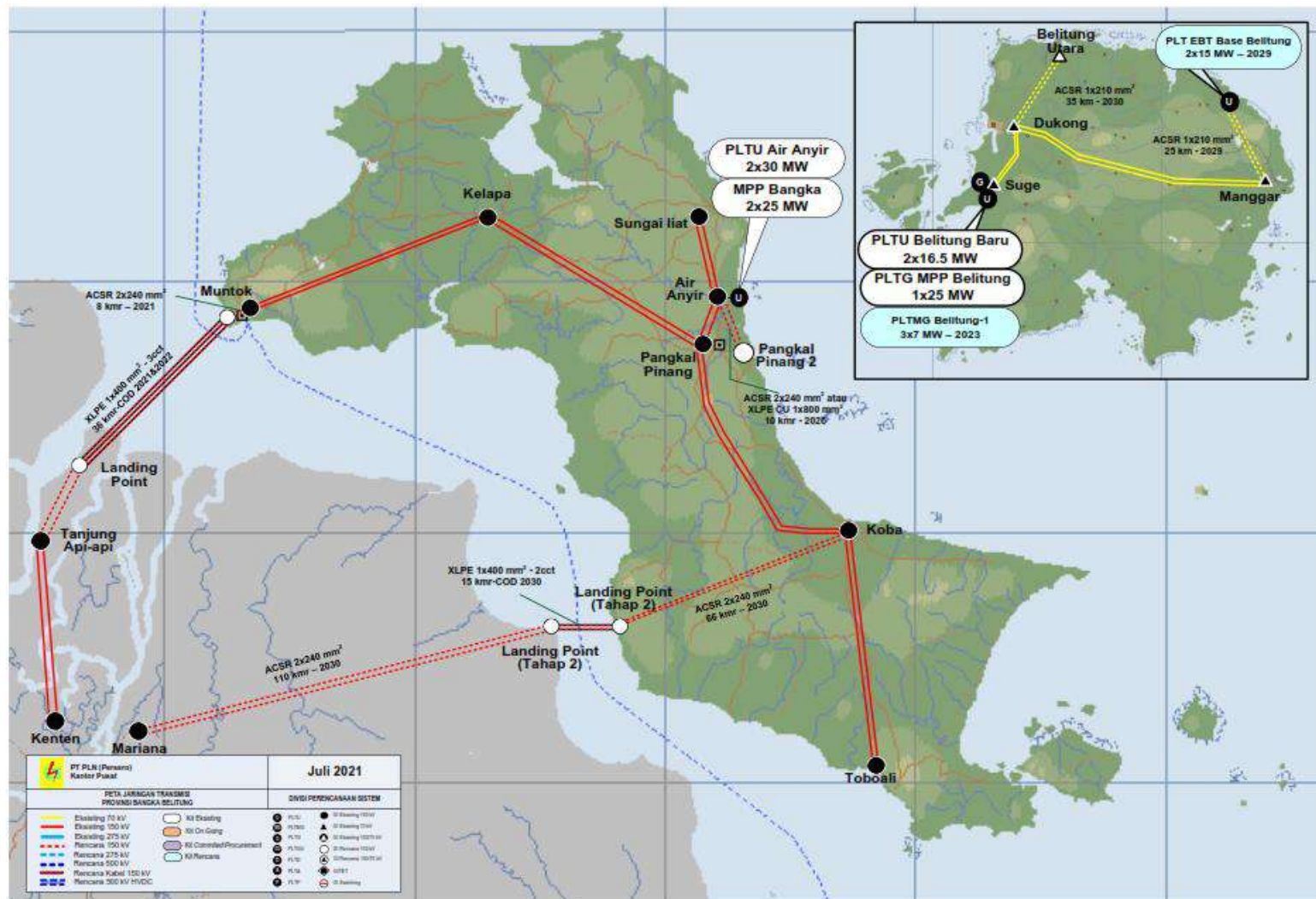
E. Jaringan Listrik

Jumlah pembangkit listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sekitar 86 unit yang berada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung dengan total kapasitas pembangkit sekitar 342,3 MW. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27 Kapasitas Pembangkit Eksisting

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLN					
PLTU	Bangka	2	60,0	44,0	44,0
	Belitung	2	33,0	29,7	29,7
PLTS	Bangka	2	0,2	0,2	0,2
	Belitung	2	0,1	0,0	0,0
PLTD	Bangka	46	90,0	58,0	58,0
	Belitung	17	30,0	17,5	17,5
Jumlah PLN		71	213,3	149,4	149,4
IPP					
PLTG	Bangka	2	50,0	50,0	50,0
	Belitung	1	25,0	25,0	25,0
PLTBM	Bangka	2	8,0	8,0	5,0
	Belitung	1	3,0	3,0	0,0
PLTBG	Bangka	2	3,2	3,2	3,2
	Belitung	1	1,8	1,8	1,8
Jumlah IPP		9	91,0	91,0	85,0
SEWA					
PLTD	Bangka	6	38,0	38,0	38,0
Jumlah SEWA		6	38,0	38,0	38,0
Jumlah		86	342,3	278,4	272,4

Sumber: RUPTL Tahun 2021-2031



Gambar 2.54 Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.3.12 Pembiayaan dan Kelembagaan

a. Pembiayaan

a.1. Sumber Pembiayaan Secara Umum

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sistem pembiayaan adalah sistem yang mengatur pengerahan, pemupukan, penyaluran, dan pemanfaatan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan dengan atau tanpa kemudahan dan/atau bantuan.

Pengembangan sistem pembiayaan meliputi:

1. lembaga pembiayaan;
2. pengerahan dan pemupukan dana;
3. pemanfaatan sumber biaya; dan
4. kemudahan atau bantuan pembiayaan.

Dalam hal lembaga pembiayaan pemerintah atau pemerintah daerah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Badan hukum pembiayaan bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam hal pembangunan dan pemilikan rumah umum dan swadaya, badan hukum pembiayaan wajib menjamin:

- a. ketersediaan dana murah jangka panjang;
- b. kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan; dan
- c. keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki, atau memiliki rumah.

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan perumahan dan dana lainnya khusus untuk perumahan bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pengerahan dan pemupukan dana meliputi:

1. Dana Masyarakat

Dana masyarakat adalah dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan di lembaga keuangan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Dana Tabungan Perumahan

Dana tabungan perumahan adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan. Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN untuk pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan. Yang dimaksud dengan “hasil investasi” adalah hasil investasi atas kelebihan likuiditas pada instrumen investasi yang aman, berupa deposito dan surat utang negara.

3. Dana Lainnya

Dana lainnya adalah dana yang sah sesuai peraturan perundangan, yang antara lain dapat berupa dana investor institusional (seperti perusahaan asuransi dan perusahaan pengelola dana pensiun) di pasar modal; dan dana APBN pos pembiayaan khusus untuk perumahan.

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bukan bank” adalah lembaga keuangan yang mengelola tabungan perumahan seperti Bapertarum-PNS (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS) dan tabungan perumahan untuk TNI/Polri.

a.2. Mekanisme Pembiayaan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditegaskan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Kemudian dalam pasal 39 dinyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara.

Pembangunan rumah khusus dan rumah negara dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman dari pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Beberapa rencana pembiayaan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan (Lampiran Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013).

2. Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah, dan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hibah dari pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya, yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 6 ayat 2).

3. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Yang dimaksud dengan resiko sosial tersebut adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 1 ayat 15 dan 16).

Pembiayaan yang dilakukan dengan APBD menyangkut:

1. Kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan PKP;
2. Kegiatan pembangunan PSU permukiman;

3. Kegiatan peningkatan kualitas hunian;
4. Kegiatan peningkatan kualitas SDM;
5. Kegiatan peningkatan ekonomi penunjang PKP.

a.3. Pembiayaan Dari Sumber Lain yang Sah

1) CSR

Pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman dapat berasal dari lembaga/stakeholder swasta. Sumber pembiayaan yang berasal dari swasta berupa CSR. CSR merupakan program dari suatu perusahaan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dalam bentuk kegiatan. Tanggung jawab sosial tersebut hanya ditujukan bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Tidak ada ketentuan besaran dana yang harus dialokasikan dan jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perseroan untuk tanggungjawab sosial tersebut, hal ini tergantung dari kebijakan Perseroan. Khusus untuk perusahaan milik negara (BUMN), tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dimana Program Bina Lingkungan dapat membiayai pembangunan infrastruktur pendukung perumahan dan permukiman. Pemanfaatan dana PKBL BUMN diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dapat langsung berkoordinasi dengan asosiasi perusahaan yang mempunyai kegiatan CSR di daerahnya masing-masing. Untuk mensosialisasi dan menawarkan program dan kegiatan pengembangan sanitasi kepada perusahaan penyelenggara CSR tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berinisiatif melaksanakan pertemuan/workshop dengan dibekali dokumen SSK/MPS, khususnya tabel rencana investasi (tabel program, kegiatan dan penganggaran). Didalam pertemuan/workshop tersebut diharapkan dapat dihasilkan komitmen atau kesepakatan dan tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka pengembangan/pembangunan sanitasi permukiman di wilayahnya, demikian juga penetapan di tataran implementasi, apakah pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintah Provinsi yang berfungsi sebagai fasilitator atau eksekutor.

Pembiayaan Melalui CSR dari pihak swasta ini menyaar pada wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

a) Memiliki asosiasi wilayah, infrastruktur dan kegiatan dengan pihak swasta. Secara eksplisif CSR ini difokuskan untuk pembiayaan perumahan dan permukiman di kawasan strategis ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b) Kawasan terdampak kegiatan industri.

2) KPBU (Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha)

Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2010 dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Kerjasama Pemerintah dan swasta dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa pemerintah (*solicited*) maupun swasta (*unsolicited*). Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang berdasarkan prakarsa swasta dilaksanakan dengan ketentuan sbb:

- a) Belum termasuk/terdaftar dalam rencana pokok (masterplan) di sektor terkait.
- b) Dapat secara teknis terintegrasi dengan rencana pokok dari sektor terkait.
- c) Secara ekonomi dan finansial dinilai layak.
- d) Tidak memerlukan dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal

3) Penghimpunan Dana Kelompok Masyarakat

Penghimpunan kelompok masyarakat merupakan upaya lain dalam rangka pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman dimasa yang akan datang, karena akan lebih mendekatkan kepada demand dan suplay dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan dan atau pemberdayaan kelompok masyarakat (komunitas) yang membutuhkan rumah dan selanjutnya dilakukan fasilitasi dengan sumber-sumber terkait dengan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman secara lebih rinci seperti penyediaan tanah, penyediaan rumah, penyediaan PSU dan mekanisme lain yang memungkinkan mengoptimalkan dana masyarakat yang sangat sedikit menjadi lebih berdaya guna.

a.4. Rencana Pembiayaan

Salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PKP adalah aspek pembiayaan. Pembangunan dan pengembangan PKP dapat terwujud dengan baik dan berkelanjutan ketika sumber dana atau sumber pembiayaan dapat terinventarisir sejak awal proses perencanaan dan dapat disediakan ketika dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatannya. Selain itu, pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan.

Pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PKP direncanakan dapat tersedia melalui:

1. APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
2. Kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)
4. Penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Sumber pembiayaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundangan.

b. Kelembagaan

Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kewenangan provinsi dilaksanakan melalui :

- a. Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- b. Pembentukan forum dan atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman
- c. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah
- d. Inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum
- e. Pengembangan jejaring pemangku kepentingan (stakeholders) bidang perumahan dan kawasan permukiman.

b.1. Perangkat Daerah

- 1) Perangkat Daerah Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam melaksanakan tanggung jawab, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Lembaga atau badan tersebut bertanggung jawab untuk:

- ✚ membangun rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara;
- ✚ menyediakan tanah bagi perumahan; dan
- ✚ melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.

Pasal 59 menyatakan penyelenggaraan kawasan permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi:

- ✚ hubungan antarkawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
- ✚ keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
- ✚ keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan
- ✚ keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
- ✚ keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
- ✚ keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; Dan
- ✚ lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan permukiman.

Jika dilihat dari kewenangannya, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam bidang koordinasi atau kerja sama antar daerah. Hal ini tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 58 bahwa arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan permukiman. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi pada aspek pengembangan perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran mengoordinasi pengembangan kawasan permukiman. Mengingat permasalahan kelembagaan PKP terkait adanya kurangnya koordinasi antar daerah terutama PKP di lintas daerah kabupaten/kota. Untuk itu, perlu dibentuk suatu badan/lembaga yang mampu mengelola dan mengoordinasi PKP pada lintas wilayah.

Badan/Lembaga yang melakukan tugas tersebut adalah perangkat daerah yang ditugaskan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan daerah terkait dengan pembentukan organisasi perangkat daerah.

2) Perangkat Daerah Pendukung Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan sektor yang memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi dengan sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perumahan dan kawasan permukiman berkaitan diantaranya dengan sektor

yang mengurus prasarana sarana, serta utilitas umumnya, kemudian secara tidak langsung berkaitan dengan sektor lain seperti perdagangan dan jasa, industri, dan sebagainya. Dalam konteks penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dalam hal ini bertanggung jawab terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya agar pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PKP dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Perangkat daerah lain yang ikut serta dalam membantu dan/atau tergabung dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
- d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- f. Dinas Sosial
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil
- h. Dinas Kesehatan
- i. Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
- j. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
- k. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
- l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- m. Dinas Kelautan Dan Perikanan

Tugas dan fungsi bidang perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

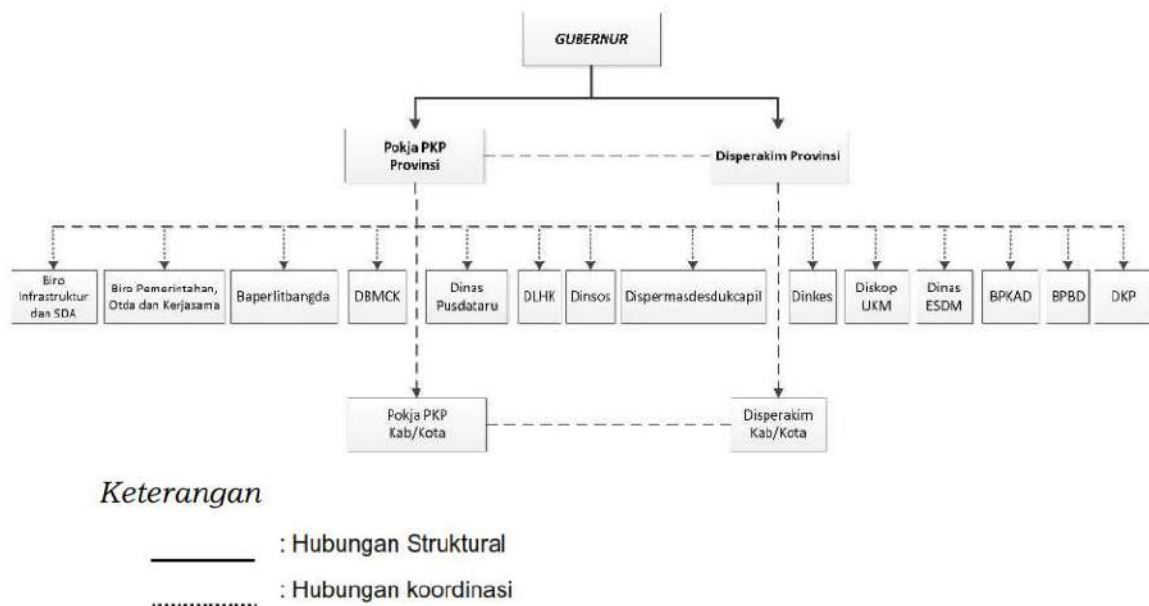
Tabel 2.28 Peran dan Fungsi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Dinas/Lembaga Daerah	Peran, Tugas, dan Fungsi
1	Sekretariat Daerah	
	Biro Infrastruktur dan SDA	• Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas daerah, dan pemantauan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, ketahanan pangan, kelautan perikanan, dan pertanian
	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	• Pengkoordinasian dan fasilitasi kerjasama antar daerah. • Pengkoordinasian, pengelolaan dan administrasi tanah milik pemerintah daerah.
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda)	• Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik • Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik • Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan dan kependudukan, infrastruktur dan pembangunan wilayah serta pelaksanaan statistik lingkup provinsi dan kab/kota • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan statistik
3	Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Tata Ruang (Bidang Penataan Ruang)	• Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Tata Ruang • Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanfaatan Ruang • Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	• Perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung

No.	Dinas/Lembaga Daerah	Peran, Tugas, dan Fungsi
		• Pengoordinasian kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung • Pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung • Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup • Penentuan daya tampung dan daya dukung lingkungan • Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan lingkungan hidup • Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi • Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi • Penanganan sampah di TPA/TPST regional
6	Dinas Sosial	• Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial • Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengembangan Kesejahteraan Sosial • Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
7	Dispermasdesdukcapil	• Perumusan kebijakan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan • Pelaksanaan kebijakan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan; • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi

No.	Dinas/Lembaga Daerah	Peran, Tugas, dan Fungsi
		kependudukan
8	Dinas Kesehatan	• Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; • Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan • Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota • Pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pengendalian kemitraan kesehatan dan promosi kesehatan, pembinaan dan pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengendalian sumber daya kesehatan
9	Dinas Koperasi dan UKM	• Perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan • Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran restrukturisasi dan pembiayaan • Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya
10	Dinas ESDM	• Perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan • Pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	• Penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan kas daerah, serta aset daerah • Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan kas daerah, serta aset daerah
12	BPBD	• Penanggulangan bencana provinsi • Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi • Penentuan wilayah rawan bencana
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	• Koordinasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah pesisir agar sesuai dengan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan

Untuk melihat hubungan sistem antar lembaga pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:



Gambar 2.55 Skema Hubungan antar Dinas/Lembaga (OPD) dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b.2. Kelompok Masyarakat

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Peran masyarakat dilakukan dengan memberikan masukan dalam:

- ✚ Proses perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian gagasan, data, serta informasi tertulis.
- ✚ Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya serta melakukan kerjasama dengan para pihak yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah
- ✚ Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman
- ✚ Pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman
- ✚ Pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui penyampaian data dan informasi

Masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memiliki kedudukan yang sangat strategis sekaligus mitra utama terwujudnya

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan system pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan peran masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- ✚ Inventarisasi kelompok masyarakat yang sudah ada dan kebutuhan akan pengembangan kelompok masyarakat dari kondisi yang ada
- ✚ Pembentukan kelompok masyarakat baru sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah dilakukan, termasuk didalamnya adalah pemberdayaan kelompok masyarakat tersebut menuju berbadan hukum
- ✚ Pemanfaatan kelompok masyarakat yang telah berbadan hukum sebagai kelompok prioritas penanganan untuk jangka pendek;
Keberadaan kelompok masyarakat inilah yang akan menjadi media pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dimasa yang akan datang.

b.3. Badan Usaha Milik Daerah

Berbagai kebutuhan badan atau lembaga khusus dalam pengelolaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk atau mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (BUMD PKP). BUMD Bidang PKP ini memiliki fungsi pada beberapa hal berikut :

- ✚ Badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman
- ✚ Menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan rumah yang masih sangat besar termasuk didalamnya penyediaan tanah bagi perumahan dan kawasan permukiman
- ✚ Badan/lembaga pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bukan bank termasuk dalam pengelolaan dana perumahan daerah.
- ✚ Membantu pemerintah daerah terkait hal-hal yang dalam pelaksanaannya sulit atau tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
- ✚ Lembaga seperti bank untuk memperjualbelikan pengembangan lahan untuk mendukung konsep TDR (*transfer of development right*) pada rencana penyediaan lahan PKP Kepulauan Bangka Belitung.

b.4. Forum dan/atau Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Forum dan atau Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) berfungsi untuk beberapa hal berikut :

- ✚ menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- ✚ membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- ✚ meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat; memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/atau
- ✚ melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Forum dan atau Pokja PKP, terdiri dari unsur:

- ✚ instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- ✚ asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- ✚ asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- ✚ asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- ✚ pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
- ✚ lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh Forum dan atau Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yaitu :

1. Rapat Koordinasi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
2. Rapat Penyusunan Rencana Kerja Organisasi
3. Foccus Group Discussion untuk permasalahan-permasalahan teknis yang dilaksanakan secara terstruktur dan atau sesuai dengan kebutuhan
4. Pengembangan system informasi berbasis internet sebagai sarana informasi dan komunikasi
5. Penyusunan Laporan Pembahasan, Laporan Hasil FGD, Laporan Tahunan Forum dan atau Pokja PKP ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan pembentukan sekretariat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

b.5. Pengembangan Jejaring Pemangku Kepentingan

Jejaring pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sangat penting untuk menjadi perhatian dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang ada. Jejaring ini akan berfungsi dalam beberapa hal berikut :

-  Sebagai forum berkumpulnya pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam kerangka penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik.
-  Menjadi embrio kepada terbentuknya Kerjasama lintas bidang, lintas sektor dan lintas masyarakat yaitu akademisi, bisnis, community (masyarakat) dan Pemerintah

Pengembangan jejaring pemangku kepentingan ini mencakup beberapa kelompok organisasi yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
2. Kelompok pengembang
3. Kelompok konsumen
4. Kelompok perencana perumahan dan kawasan permukiman
5. Kelompok perancang kawasan permukiman
6. Kelompok akademisi
7. Kelompok penyedia bahan/material
8. Kelompok lainnya yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Beberapa kegiatan Pengembangan Jejaring Pemangku Kepentingan ini dapat berupa Forum Resmi yang diacarakan bagi seluruh Pemangku Kepentingan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali untuk memberikan masukan kepada FORUM dan atau POKJA PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar menjadi agenda pembahasan POKJA PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengembangan jejaring pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepada solusi atas permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang berkeadilan.

b.6. Sertifikasi dan Registrasi

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal tersebut maka harus dilakukan

beberapa langkah sebagai berikut :

1. Koordinasi pelaksanaan kewenangan kepada kementerian terkait
2. Inventarisasi orang dan badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundangan tersebut
3. Penyiapan mekanisme sertifikasi dan registrasi yang meliputi :
 - Kajian terkait mekanisme sertifikasi dan registrasi
 - FGD dengan pihak-pihak terkait seperti asosiasi konsultan, asosiasi pengembang, akademisi, LPJK, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan
 - Perumusan Awal Mekanisme sertifikasi dan registrasi
4. Penyiapan kelembagaan sertifikasi dan registrasi dalam struktur organisasi perangkat daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman
5. Penyusunan Standar Operasional Pelayanan proses sertifikasi dan registrasi
6. Sosialisasi
7. Sertifikasi dan Registrasi
8. Pembinaan
9. Evaluasi dan Pengendalian

Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi diatur dengan Peraturan Gubernur dan atau disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

BAB 3

ANALISIS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Kajian Kebijakan

3.1.1 Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan

Pusat-pusat pelayanan pada wilayah provinsi merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi, yang dapat terdiri atas:

- PKN yang berada di wilayah provinsi;
- PKW yang berada di wilayah provinsi;
- PKSN yang berada di wilayah provinsi; dan
- PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Pusat-pusat di dalam struktur ruang wilayah provinsi memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat yang terdiri atas: PKN, PKW, dan PKSN yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;
- Memuat penetapan PKL;
- Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang wilayah provinsi serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan.
- Memuat pusat-pusat kegiatan selain yang dimaksud di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN (dengan notasi PKNp);

- b) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW (dengan notasi PKWp);
- c) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKNp hanya pusat kegiatan yang sudah berstatus PKW;
- d) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKWp hanya kotakota yang memenuhi persyaratan PKL; dan
- e) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan angka 2) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dan mengindikasikan program pembangunannya ke dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKN atau PKW.
- f) Pusat permukiman di dalam kawasan perkotaan metropolitan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai PKN dapat ditetapkan menjadi PKL dalam sistem pusat-pusat permukiman dalam struktur ruang wilayah provinsi sesuai dengan fungsi yang diemban dalam skala provinsi

Sistem permukiman untuk Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. PKNp Pangkalpinang, selain sebagai ibukota provinsi juga menjadi orientasi bagi seluruh wilayah perkotaan di Kepulauan Bangka Belitung
2. PKW Muntok, menjadi orientasi bagi PKL Kelapa di Kab. Bangka Barat, Sungai Liat dan Belinyu di Kab. Bangka;
3. PKW Tanjungpandan, menjadi orientasi bagi PKL Sijuk dan Membalong di Kab. Belitung; dan
4. PKW Manggar, menjadi orientasi bagi PKL Kelapa Kampit dan Gantung di Kab. Belitung Timur.

PKWp yang direncanakan untuk Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. PKWp Koba (Kabupaten Bangka Tengah)
2. PKWp Toboali (Kabupaten Bangka Selatan)

PKL yang direncanakan untuk Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. PKL Kelapa (Kabupaten Bangka Barat)
2. PKL Prittiga (Kabupaten Bangka Barat)
3. PKL Belinyu (Kabupaten Bangka)
4. PKL Sungailiat (Kabupaten Bangka)
5. PKL Sungai Selan (Kabupaten Bangka Tengah)
6. PKL Sijuk (Kabupaten Belitung)
7. PKL Membalong (Kabupaten Belitung)
8. PKL Badau (Kabupaten Belitung)
9. PKL Kelapa Kampit (Kabupaten Belitung Timur)
10. PKL Gantung (Kabupaten Belitung Timur)
11. PKL Puding Besar (Kabupaten Bangka)
12. PKL Pangkalanbaru (Kabupaten Bangka Tengah)
13. PKL Payung (Kabupaten Bangka Selatan)

14. PKL Selat Nasik (Kabupaten Belitung)

3.1.2 Analisis Arah Pengembangan PKP

Penggunaan lahan pada masing-masing daerah merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat terutama penggunaan lahan untuk pemukiman. Pemukiman merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat dalam kehidupannya, pemukiman yang baik akan menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Selain untuk pemukiman sebagai kebutuhan utama, lahan juga digunakan untuk membangun infrastruktur yang akan mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat akan cenderung memilih lokasi pemukiman pada wilayah yang dekat dengan daerah perkotaan karena daerah perkotaan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki lahan permukiman eksisting seluas 16.932,47 Ha yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota, sedangkan arahan rencana kawasan permukiman yang diamanatkan dalam Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah seluas 143.300,08 Ha sehingga ketersediaan pengembangan permukiman baru adalah seluas 126.367,61 Ha.

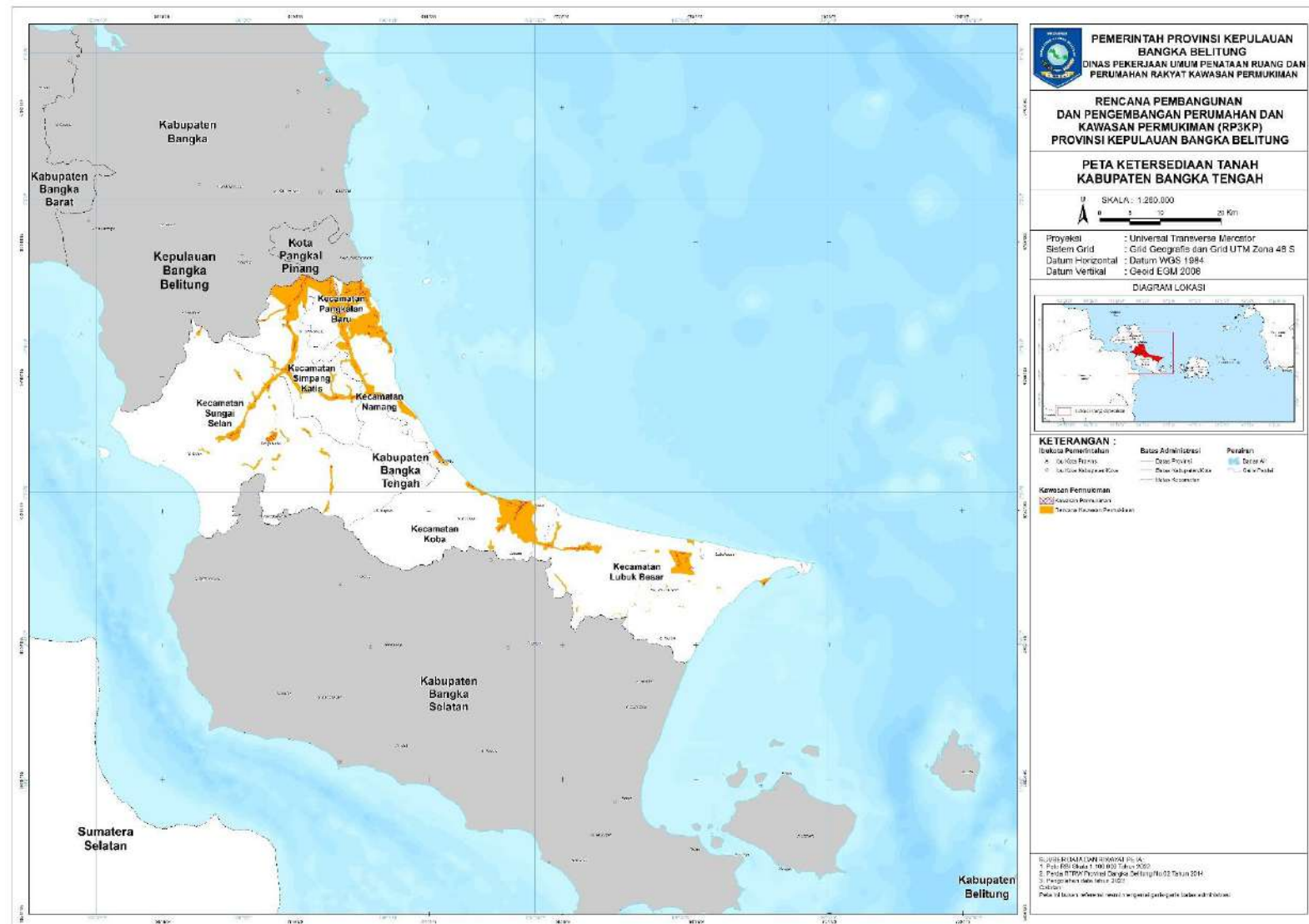
Tabel 3.1 Arah Pengembangan Kawasan Permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman Eksisting (Ha)	Luas Rencana Kawasan Permukiman (Ha)	Luas Ketersediaan Pengembangan Kawasan Permukiman Baru (Ha)
Bangka		3.710,54	34.526,80	30.816,26
	Mendo barat	288,84	6.035,32	5.746,47
	Merawang	339,03	6.353,29	6.014,26
	Puding Besar	99,11	1.723,51	1.624,40
	Sungailiat	1.628,65	7.922,48	6.293,83
	Pemali	229,75	3.882,84	3.653,09
	Bakam	173,31	1.554,38	1.381,07
	Belinyu	625,20	4.606,26	3.981,06
	Riau Silip	326,64	2.448,72	2.122,08
Bangka Tengah		1.626,01	22.157,47	20.531,46
	Koba	308,77	4.653,16	4.344,39
	Lubuk Besar	240,22	2.512,90	2.272,68
	Pangkalan Baru	539,06	5.656,59	5.117,52
	Namang	120,35	2.819,71	2.699,36
	Sungai Selan	209,26	2.407,44	2.198,18
	Simpang Katis	208,34	4.107,66	3.899,32
Bangka Selatan		1.830,07	18.872,42	17.042,35
	Payung	235,37	1.903,38	1.668,01
	Pulau Besar	71,22	1.858,34	1.787,13
	Simpang Rimba	116,43	1.590,02	1.473,59
	Toboali	681,89	6.859,71	6.177,82

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman Eksisting (Ha)	Luas Rencana Kawasan Permukiman (Ha)	Luas Ketersediaan Pengembangan Kawasan Permukiman Baru (Ha)
	Tukak Sadai	238,26	2.351,54	2.113,28
	Air Gegas	217,23	3.347,96	3.130,73
	Lepar Pongok	190,46	605,08	414,62
	Kepulauan Pongok	79,21	356,40	277,18
Bangka Barat		2.543,38	16.307,06	13.763,68
	Kelapa	317,89	2.802,72	2.484,83
	Tempilang	448,41	2.405,56	1.957,14
	Muntok	624,01	4.156,83	3.532,82
	Simpang Teritip	416,52	2.786,21	2.369,69
	Jebus	210,30	1.868,36	1.658,06
	Parittiga	526,25	2.287,38	1.761,14
Kota Pangkalpinang		1.952,78	8.556,85	6.604,07
	Rangkui	285,33	504,26	218,93
	Bukit Intan	337,46	2.217,08	1.879,62
	Girimaya	248,94	449,80	200,86
	Pangkalbalam	197,43	369,31	171,88
	Gabek	331,45	1.643,28	1.311,84
	Tamansari	241,84	319,15	77,31
	Gerunggang	310,33	3.053,97	2.743,65
Belitung		2.599,11	25.977,27	23.378,16
	Membalong	918,85	6.821,64	5.902,79
	Tanjungpandan	924,55	8.907,00	7.982,44
	Badau	311,16	4.375,29	4.064,14
	Sijuk	378,95	5.165,41	4.786,46
	Selat Nasik	65,60	707,92	642,32
Belitung Timur		2.670,57	16.902,20	14.231,63
	Dendang	241,00	1.535,42	1.294,42
	Simpang Pesak	218,04	2.113,16	1.895,12
	Gantung	509,80	3.698,25	3.188,46
	Simpang Renggiang	216,44	1.250,01	1.033,57
	Manggar	737,05	3.726,66	2.989,61
	Damar	329,00	2.335,51	2.006,51
	Kelapa Kampit	419,26	2.243,19	1.823,93
Provinsi Kep. Babel		16.932,47	143.300,08	126.367,61

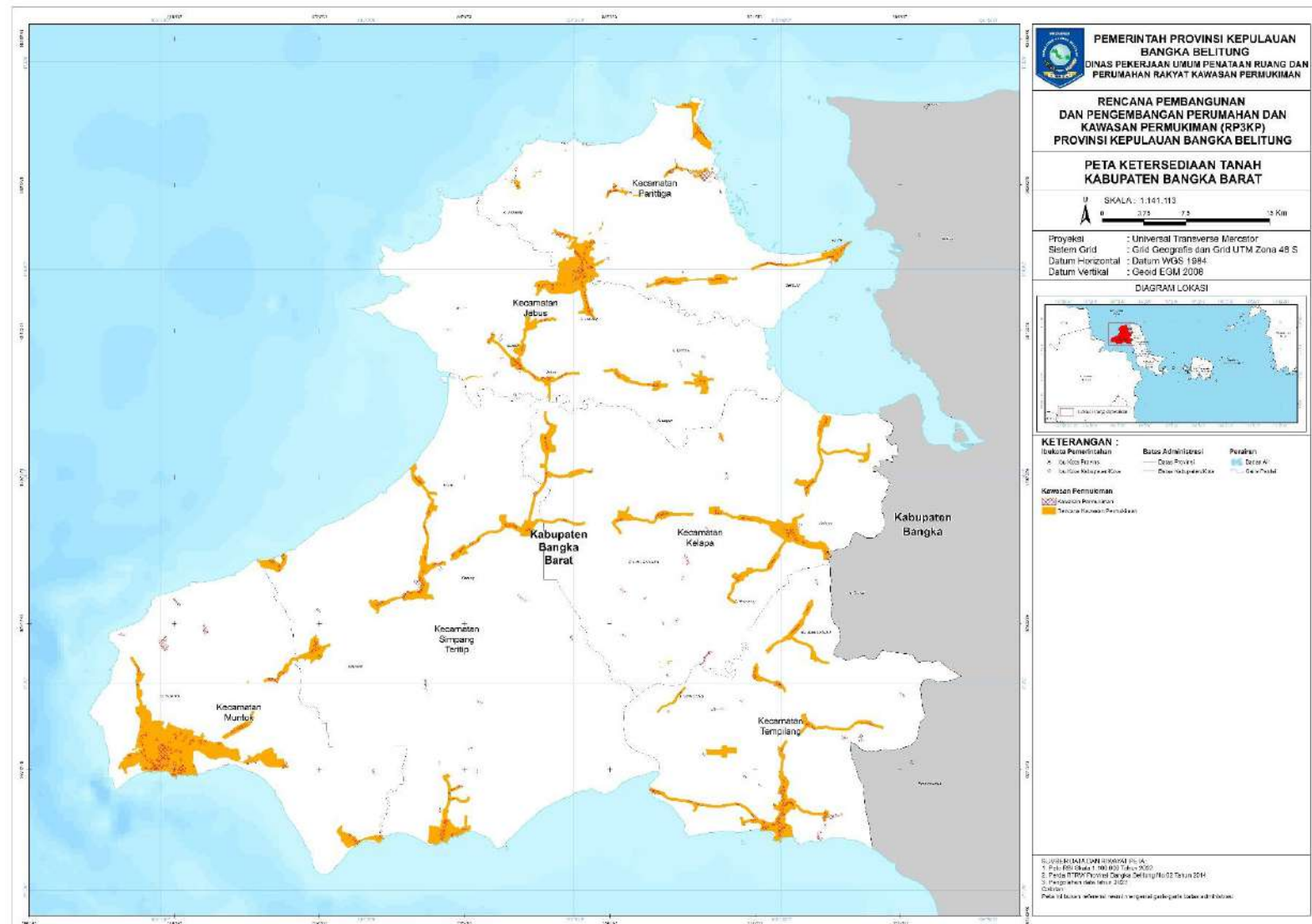
Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023





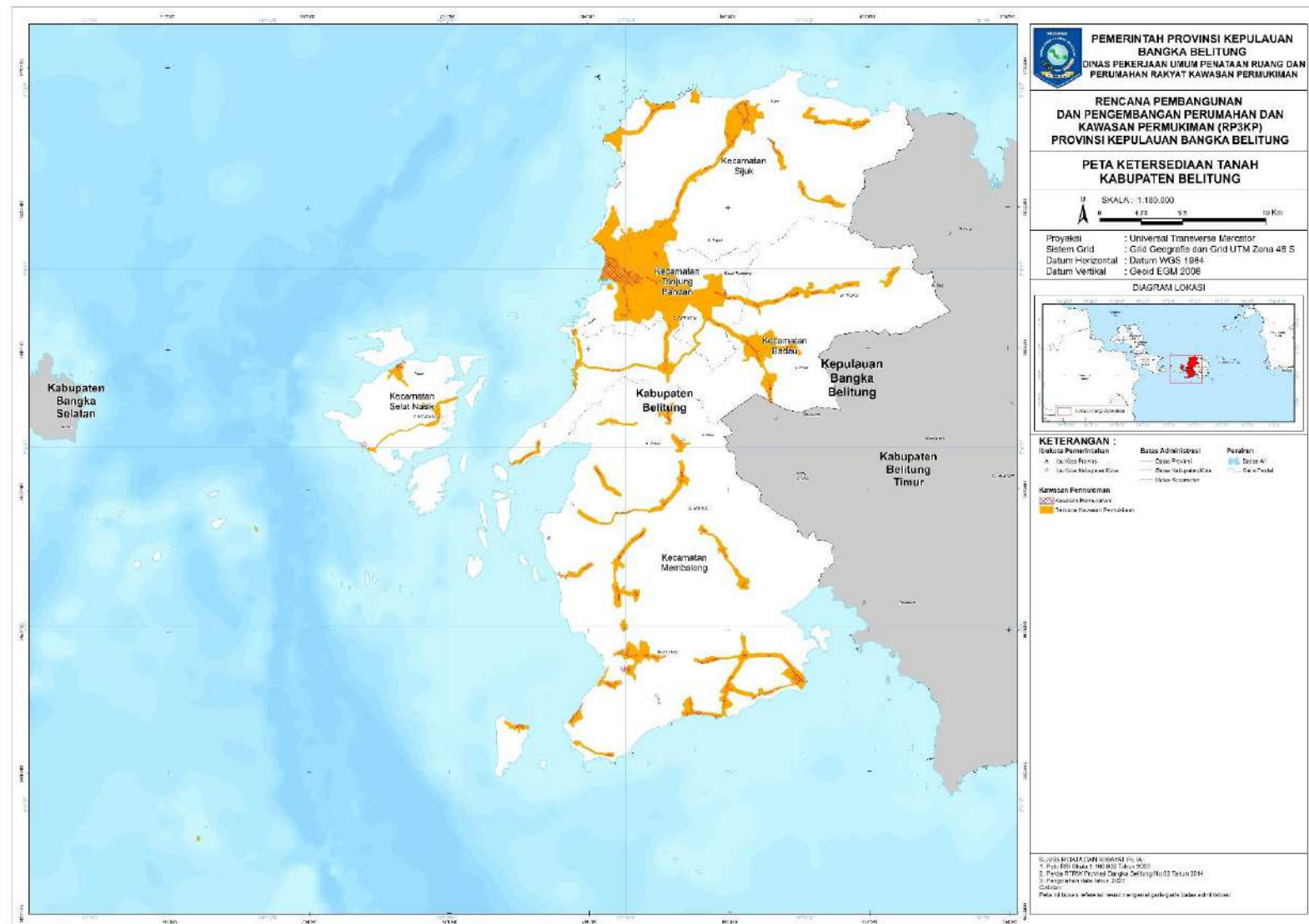
Gambar 3.2 Peta Analisis Pengembangan Permukiman Kabupaten Bangka Tengah





Gambar 3.4 Peta Analisis Pengembangan Permukiman Kabupaten Bangka Barat





Gambar 3.6 Peta Analisis Pengembangan Permukiman Kabupaten Belitung



3.2 Analisis Fisik Dasar

3.2.1 Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap kawasan permukiman, kawasan yang memiliki daya dukung yang baik untuk kawasan permukiman seluas 10.238,18 Ha (Prioritas V) sedangkan yang memiliki daya dukung yang tidak baik seluas 228,28 Ha (Prioritas I) artinya bahwa wilayah tersebut memiliki potensi daya dukung wilayah yang sangat besar untuk jasa penyedia, budaya, pendukung dan pengaturan. Berikut adalah hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terhadap kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 3.2 Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Terhadap Kawasan Permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas IV	Prioritas V	Grand Total
Bangka	3,13	715,69	746,18	201,36	2.041,50	3.707,86
Bangka Barat	15,08	535,14	415,25	252,49	1.312,09	2.530,05
Bangka Selatan	10,71	175,80	238,28	348,35	1.010,04	1.783,18
Bangka Tengah	5,46	197,90	124,53	213,99	1.084,16	1.626,04
Belitung	106,87	572,43	65,40	128,24	1.722,42	2.595,35
Belitung Timur	87,05	863,09	34,87	493,92	1.198,16	2.677,09
Kota Pangkal Pinang		7,73	64,58	10,67	1.869,80	1.952,78
Jumlah	228,28	3.067,78	1.689,09	1.649,03	10.238,18	16.872,35

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

3.2.2 Tipologi dan Jumlah Rumah Yang Dapat Ditampung

Berdasarkan arahan pengembangan kawasan permukiman, jumlah rumah yang dapat ditampung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 8.624.542 unit yang terdiri dari Rumah Mewah 995.139 unit, Rumah Menengah 2.653.705 unit dan Rumah Sederhana 4.975.697 unit dengan total luas lahan untuk rumah yaitu sekitar 71.650,04 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Daya Tampung Rumah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2043

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Rencana Kawasan Permukiman (Ha)	Luas Kawasan Permukiman (Ha)			Daya Tampung Rumah Rumah (Unit)			Jumlah Daya Tampung Rumah (unit)	Kebutuhan Lahan (Ha)			Total Luas Kebutuhan Rumah (Ha)
			Peru mahan (50%)	Fasilitas Umum (30%)	Jaringan Jalan dan Utilitas (20%)	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana		Rumah Mewah	Rumah Menengah	Rumah Sederhana	
A	Kabupaten Bangka	34.526,80	17.263,40	10358,04	6905,36	239.769	639.385	1.198.847	2.078.002	2.877,23	5.754,47	8.631,70	17.263,40
1	Mendo barat	6.035,32	3.017,66	1810,60	1207,06	41.912	111.765	209.560	363.237	502,94	1.005,89	1.508,83	3.017,66
2	Merawang	6.353,29	3.176,65	1905,99	1270,66	44.120	117.654	220.601	382.374	529,44	1.058,88	1.588,32	3.176,65
3	Puding Besar	1.723,51	861,75	517,05	344,70	11.969	31.917	59.844	103.730	143,63	287,25	430,88	861,75
4	Sungailiat	7.922,48	3.961,24	2376,74	1584,50	55.017	146.713	275.086	476.816	660,21	1.320,41	1.980,62	3.961,24
5	Pemali	3.882,84	1.941,42	1164,85	776,57	26.964	71.905	134.821	233.690	323,57	647,14	970,71	1.941,42
6	Bakam	1.554,38	777,19	466,31	310,88	10.794	28.785	53.971	93.550	129,53	259,06	388,59	777,19
7	Belinyu	4.606,26	2.303,13	1381,88	921,25	31.988	85.301	159.940	277.229	383,86	767,71	1.151,57	2.303,13
8	Riau Silip	2.448,72	1.224,36	734,62	489,74	17.005	45.347	85.025	147.377	204,06	408,12	612,18	1.224,36
B	Kabupaten Bangka Tengah	22.157,47	11.078,73	6647,24	4431,49	153.871	410.323	769.357	1.333.551	1.846,46	3.692,91	5.539,37	11.078,73
1	Koba	4.653,16	2.326,58	1395,95	930,63	32.314	86.170	161.568	280.051	387,76	775,53	1.163,29	2.326,58
2	Lubuk Besar	2.512,90	1.256,45	753,87	502,58	17.451	46.535	87.254	151.240	209,41	418,82	628,23	1.256,45
3	Pangkalan Baru	5.656,59	2.828,29	1696,98	1131,32	39.282	104.752	196.409	340.443	471,38	942,76	1.414,15	2.828,29
4	Namang	2.819,71	1.409,86	845,91	563,94	19.581	52.217	97.907	169.705	234,98	469,95	704,93	1.409,86
5	Sungai Selan	2.407,44	1.203,72	722,23	481,49	16.718	44.582	83.592	144.892	200,62	401,24	601,86	1.203,72
6	Simpang Katis	4.107,66	2.053,83	1232,30	821,53	28.525	76.068	142.627	247.220	342,30	684,61	1.026,91	2.053,83
C	Kabupaten Bangka Selatan	18.872,42	9.436,21	5661,73	3774,48	131.058	349.489	655.292	1.135.840	1.572,70	3.145,40	4.718,11	9.436,21
1	Payung	1.903,38	951,69	571,01	380,68	13.218	35.248	66.090	114.555	158,61	317,23	475,84	951,69

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Rencana Kawasan Permukiman (Ha)	Luas Kawasan Permukiman (Ha)			Daya Tampung Rumah Rumah (Unit)			Jumlah Daya Tampung Rumah (unit)	Kebutuhan Lahan (Ha)			Total Luas Kebutuhan Rumah (Ha)
			Peru mahan (50%)	Fasilitas Umum (30%)	Jaringan Jalan dan Utilitas (20%)	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana		Rumah Mewah	Rumah Menengah	Rumah Sederhana	
2	Pulau Besar	1.858,34	929,17	557,50	371,67	12.905	34.414	64.526	111.845	154,86	309,72	464,59	929,17
3	Simpang Rimba	1.590,02	795,01	477,01	318,00	11.042	29.445	55.209	95.696	132,50	265,00	397,50	795,01
4	Toboali	6.859,71	3.429,85	2057,91	1371,94	47.637	127.032	238.184	412.853	571,64	1.143,28	1.714,93	3.429,85
5	Tukak Sadai	2.351,54	1.175,77	705,46	470,31	16.330	43.547	81.651	141.528	195,96	391,92	587,88	1.175,77
6	Air Gegas	3.347,96	1.673,98	1004,39	669,59	23.250	61.999	116.248	201.497	279,00	557,99	836,99	1.673,98
7	Lepar Pongok	605,08	302,54	181,52	121,02	4.202	11.205	21.010	36.417	50,42	100,85	151,27	302,54
8	Kepulauan Pongok	356,40	178,20	106,92	71,28	2.475	6.600	12.375	21.450	29,70	59,40	89,10	178,20
D	Kabupaten Bangka Barat	16.307,06	8.153,53	4892,12	3261,41	113.243	301.983	566.217	981.443	1.358,92	2.717,84	4.076,76	8.153,53
1	Kelapa	2.802,72	1.401,36	840,82	560,54	19.463	51.902	97.317	168.682	233,56	467,12	700,68	1.401,36
2	Tempilang	2.405,56	1.202,78	721,67	481,11	16.705	44.547	83.526	144.779	200,46	400,93	601,39	1.202,78
3	Muntok	4.156,83	2.078,41	1247,05	831,37	28.867	76.978	144.334	250.180	346,40	692,80	1.039,21	2.078,41
4	Simpang Teritip	2.786,21	1.393,11	835,86	557,24	19.349	51.596	96.743	167.689	232,18	464,37	696,55	1.393,11
5	Jebus	1.868,36	934,18	560,51	373,67	12.975	34.599	64.874	112.447	155,70	311,39	467,09	934,18
6	Parittiga	2.287,38	1.143,69	686,22	457,48	15.885	42.359	79.423	137.667	190,62	381,23	571,85	1.143,69
E	Kota Pangkal Pinang	8.556,85	4.278,43	2567,06	1711,37	59.423	158.460	297.113	514.996	713,07	1.426,14	2.139,21	4.278,43
1	Rangkui	504,26	252,13	151,28	100,85	3.502	9.338	17.509	30.349	42,02	84,04	126,06	252,13
2	Bukit Intan	2.217,08	1.108,54	665,12	443,42	15.396	41.057	76.982	133.435	184,76	369,51	554,27	1.108,54
3	Girimaya	449,80	224,90	134,94	89,96	3.124	8.330	15.618	27.071	37,48	74,97	112,45	224,90
4	Pangkalbalam	369,31	184,66	110,79	73,86	2.565	6.839	12.823	22.227	30,78	61,55	92,33	184,66
5	Gabek	1.643,28	821,64	492,99	328,66	11.412	30.431	57.058	98.901	136,94	273,88	410,82	821,64

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Rencana Kawasan Permukiman (Ha)	Luas Kawasan Permukiman (Ha)			Daya Tampung Rumah Rumah (Unit)			Jumlah Daya Tampung Rumah (unit)	Kebutuhan Lahan (Ha)			Total Luas Kebutuhan Rumah (Ha)
			Peru mahan (50%)	Fasilitas Umum (30%)	Jaringan Jalan dan Utilitas (20%)	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana		Rumah Mewah	Rumah Menengah	Rumah Sederhana	
6	Tamansari	319,15	159,57	95,74	63,83	2.216	5.910	11.082	19.208	26,60	53,19	79,79	159,57
7	Gerunggung	3.053,97	1.526,99	916,19	610,79	21.208	56.555	106.041	183.804	254,50	509,00	763,49	1.526,99
F	Kabupaten Belitung	25.977,27	12.988,63	7793,18	5195,45	180.398	481.061	901.988	1.563.447	2.164,77	4.329,54	6.494,32	12.988,63
1	Membalong	6.821,64	3.410,82	2046,49	1364,33	47.373	126.327	236.863	410.562	568,47	1.136,94	1.705,41	3.410,82
2	Tanjungpandan	8.907,00	4.453,50	2672,10	1781,40	61.854	164.944	309.271	536.069	742,25	1.484,50	2.226,75	4.453,50
3	Badau	4.375,29	2.187,65	1312,59	875,06	30.384	81.024	151.920	263.328	364,61	729,22	1.093,82	2.187,65
4	Sijuk	5.165,41	2.582,71	1549,62	1033,08	35.871	95.656	179.355	310.881	430,45	860,90	1.291,35	2.582,71
5	Selat Nasik	707,92	353,96	212,38	141,58	4.916	13.110	24.581	42.606	58,99	117,99	176,98	353,96
G	Kabupaten Belitung Timur	16.902,20	8.451,10	5070,66	3380,44	117.376	313.004	586.882	1.017.262	1.408,52	2.817,03	4.225,55	8.451,10
1	Dendang	1.535,42	767,71	460,63	307,08	10.663	28.434	53.313	92.410	127,95	255,90	383,85	767,71
2	Simpang Pesak	2.113,16	1.056,58	633,95	422,63	14.675	39.133	73.374	127.181	176,10	352,19	528,29	1.056,58
3	Gantung	3.698,25	1.849,13	1109,48	739,65	25.682	68.486	128.412	222.580	308,19	616,38	924,56	1.849,13
4	Simpang Renggang	1.250,01	625,00	375,00	250,00	8.681	23.148	43.403	75.232	104,17	208,33	312,50	625,00
5	Manggar	3.726,66	1.863,33	1118,00	745,33	25.880	69.012	129.398	224.290	310,55	621,11	931,66	1.863,33
6	Damar	2.335,51	1.167,75	700,65	467,10	16.219	43.250	81.094	140.563	194,63	389,25	583,88	1.167,75
7	Kelapa Kampit	2.243,19	1.121,60	672,96	448,64	15.578	41.541	77.889	135.007	186,93	373,87	560,80	1.121,60
	Prov. Kep. Bangka Belitung	143.300,08	71.650,04	42.990,02	28.660,02	995.139	2.653.705	4.975.697	8.624.542	11.941,67	23.883,35	35.825,02	71.650,04

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

3.3 Analisis Aspek Sosial, Budaya, dan Kependudukan

3.3.1 Analisis karakteristik sosial kependudukan

A. Distribusi dan Proyeksi Kepadatan Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan cara penggambaran jumlah penduduk berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada asumsi komponen yang bekerja di dalamnya. Proyeksi memegang peranan penting dalam tujuannya sebagai sebuah sistem perencanaan di masa yang akan datang.

Berdasarkan data penduduk Tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1.494.999 jiwa, mengalami peningkatan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir yang cukup tinggi, ditandai dengan angka laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,87 %. Jumlah penduduk lima tahun terakhir menjadi dasar dalam memperkirakan tingkat perkembangan penduduk dimasa yang akan datang. Tingkat perkembangan jumlah penduduk merupakan indikasi utama untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai wadah dalam melaksanakan aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

Proyeksi penduduk dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk di masa mendatang dan menjadi bahan acuan dalam pengambilan keputusan dalam menganalisis tingkat kebutuhan fasilitas akan sarana dan prasarana perkotaan. Sehingga proses dan fase-fase sebagai bagian dari tahap perencanaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang ada.

Perhitungan proyeksi jumlah penduduk menggunakan metode geometric dengan rumus sebagai berikut :

$$P_n = P_o (1+r)^n$$

Keterangan : P_n : Jumlah penduduk pada tahun n
 P_o : Jumlah penduduk pada tahun 0
 1 : Konstanta
 r : Angka pertumbuhan penduduk
 n : Rentang Tahun

Hasil proyeksi penduduk diharapkan menjadi acuan dalam mengestimasi perkembangan penduduk pada masa mendatang untuk periode waktu antara Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2043. Untuk menghitung proyeksi penduduk, akan digunakan asumsi-asumsi data penduduk dasar yang digunakan adalah data Tahun 2022, dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun kedepan.

**Tabel 3.4 Proyeksi Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2024-2043**

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2024	2028	2033	2038	2043
Bangka		340.386	352.471	367.577	382.683	397.789
	Mendo barat	53.693	56.281	59.517	62.752	65.988

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2024	2028	2033	2038	2043
	Merawang	31.894	32.973	34.323	35.673	37.022
	Puding Besar	20.643	22.130	23.988	25.846	27.704
	Sungailiat	95.744	96.865	98.267	99.668	101.070
	Pemali	37.858	42.445	48.178	53.912	59.646
	Bakam	19.717	20.132	20.649	21.167	21.685
	Belinyu	51.746	52.352	53.110	53.867	54.625
	Riau Silip	29.092	29.293	29.545	29.797	30.049
Bangka Tengah		215.413	235.220	259.979	284.737	309.496
	Koba	47.255	53.076	60.352	67.628	74.904
	Lubuk Besar	34.527	39.218	45.081	50.945	56.809
	Pangkalan Baru	49.184	52.461	56.557	60.653	64.749
	Namang	18.451	20.566	23.211	25.856	28.500
	Sungai Selan	38.741	41.696	45.390	49.085	52.779
	Simpang Katis	27.256	28.203	29.387	30.571	31.755
Bangka Selatan		206.049	213.621	223.086	232.551	242.016
	Payung	21.694	22.409	23.303	24.196	25.090
	Pulau Besar	10.084	11.199	12.592	13.986	15.379
	Simpang Rimba	24.746	25.561	26.580	27.600	28.619
	Toboali	80.119	82.759	86.059	89.359	92.659
	Tukak Sadai	13.269	13.706	14.252	14.799	15.345
	Air Gegas	43.432	44.863	46.652	48.441	50.230
	Lepar Pongok	8.257	8.529	8.869	9.209	9.549
	Kepulauan Pongok	4.448	4.595	4.778	4.961	5.145
Bangka Barat		212.958	219.293	227.212	235.131	243.050
	Kelapa	36.215	37.719	39.599	41.479	43.359
	Tempilang	30.259	32.616	35.563	38.509	41.456
	Muntok	54.416	54.770	55.213	55.656	56.099
	Simpang Teritip	32.098	33.257	34.705	36.154	37.603
	Jebus	23.555	24.278	25.182	26.086	26.990
	Parittiga	36.417	36.654	36.950	37.246	37.543
Pangkalpinang		246.289	286.273	336.252	386.232	436.211
	Rangkui	38.495	41.554	45.378	49.202	53.026
	Bukit Intan	45.305	50.305	56.554	62.804	69.054
	Girimaya	19.547	21.100	23.042	24.984	26.925
	Pangkalbalam	23.052	23.306	23.623	23.940	24.257
	Gabek	42.504	55.010	70.642	86.274	101.906
	Tamansari	19.917	21.500	23.479	25.457	27.436
	Gerunggung	57.470	73.499	93.535	113.571	133.607
Belitung		187.621	190.200	193.425	196.650	199.874
	Membalong	27.522	27.647	27.803	27.959	28.114
	Tanjungpandan	106.555	108.730	111.449	114.167	116.885
	Badau	15.566	15.653	15.762	15.871	15.980

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2024	2028	2033	2038	2043
	Sijuk	32.157	32.324	32.532	32.741	32.949
	Selat Nasik	5.820	5.847	5.879	5.912	5.945
Belitung Timur		133.535	139.678	147.357	155.035	162.714
	Dendang	11.642	12.315	13.156	13.997	14.838
	Simpang Pesak	8.956	9.542	10.274	11.007	11.739
	Gantung	29.914	31.506	33.495	35.485	37.475
	Simpang Renggiang	7.875	8.193	8.591	8.989	9.387
	Manggar	40.748	41.852	43.232	44.611	45.991
	Damar	13.711	13.989	14.337	14.685	15.033
	Kelapa Kampit	20.688	22.280	24.271	26.261	28.252
Provinsi Kep. Babel		1.542.252	1.636.757	1.754.888	1.873.019	1.991.150

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

**Tabel 3.5 Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2024-2043**

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)				
		2024	2028	2033	2038	2043
Bangka						
	Mendo barat	186	195	206	217	228
	Merawang	94	97	101	105	109
	Puding Besar	208	223	242	261	280
	Sungailiat	59	59	60	61	62
	Pemali	165	185	210	235	260
	Bakam	114	116	119	122	125
	Belinyu	83	84	85	86	87
	Riau Silip	89	90	90	91	92
Bangka Tengah						
	Koba	153	172	195	219	243
	Lubuk Besar	144	163	188	212	236
	Pangkalan Baru	91	97	105	113	120
	Namang	153	171	193	215	237
	Sungai Selan	185	199	217	235	252
	Simpang Katis	131	135	141	147	152
Bangka Selatan						
	Payung	92	95	99	103	107
	Pulau Besar	142	157	177	196	216
	Simpang Rimba	213	220	228	237	246
	Toboali	117	121	126	131	136
	Tukak Sadai	56	58	60	62	64
	Air Gegas	200	207	215	223	231
	Lepar Pongok	43	45	47	48	50
	Kepulauan Pongok	56	58	60	63	65
Bangka Barat						
	Kelapa	114	119	125	130	136
	Tempilang	67	73	79	86	92

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)				
		2024	2028	2033	2038	2043
	Muntok	87	88	88	89	90
	Simpang Teritip	77	80	83	87	90
	Jebus	112	115	120	124	128
	Parittiga	69	70	70	71	71
Pangkalpinang						
	Rangkui	135	146	159	172	186
	Bukit Intan	134	149	168	186	205
	Girimaya	79	85	93	100	108
	Pangkalbalam	117	118	120	121	123
	Gabek	128	166	213	260	307
	Tamansari	82	89	97	105	113
	Gerunggung	185	237	301	366	
Belitung						
	Membalong	30	30	30	30	31
	Tanjungpandan	115	118	121	123	126
	Badau	50	50	51	51	51
	Sijuk	85	85	86	86	87
	Selat Nasik	89	89	90	90	91
Belitung Timur						
	Dendang	48	51	55	58	62
	Simpang Pesak	41	44	47	50	54
	Gantung	59	62	66	70	74
	Simpang Renggiang	36	38	40	42	43
	Manggar	55	57	59	61	62
	Damar	42	43	44	45	46
	Kelapa Kampit	49	53	58	63	67

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

B. Pola Pergerakan Penduduk

Pergerakan yang dilakukan oleh penduduk di suatu daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka akan melakukan pergerakan ke daerah yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan tersebut. Pergerakan penduduk dilakukan dengan berbagai alasan seperti motif ekonomi, sosial dan keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup. Akibatnya daerah maju menjadi daya tarik bagi penduduk daerah miskin sebagai tujuan migrasi untuk bekerja dan melakukan berbagai kegiatan sosial. Pembangunan sarana prasarana transportasi dan komunikasi membawa perubahan terhadap kegiatan manusia dalam hal kemudahan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya (pergerakan).

Pada umumnya penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja pada sektor perdagangan dan jasa yang berada di masing-masing ibukota Kabupaten dan Ibukota Provinsi serta bekerja pada sektor perikanan. Pola pergerakan penduduk di Pulau Bangka dan Pulau Belitung dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.6 Pola Pergerakan Penduduk di Pulau Bangka

	PKNp Pangkalpinang	PKW Muntok	PKWp Koba	PKWp Toboali	PKL Belinyu	PKL Puding Besar	PKL Sungai liat	PKL Kelapa	PKL Parit tiga	PKL Payung	PKL Pangkalan Baru	PKL Sungai Selan	PPK Bakam	PPK Mendo Barat	PPK Merawang	PPK Pemali	PPK Riau Silip	PPK Jebus	PPK Muntok	PPK Parit tiga	PPK Simpang Teritip	PPK Tempilang	PPK Pulau besar	PPK Simpang Rimba	PPK Tukak Sadai	PPK Lubuk Besar	PPK Namang	PPK Simpang Katis	PPK Giri maya	PPK Rangkui	PPK Taman Sari
PKNp Pangkalpinang		28.054	27.064	30.510	27.774	24.620	32.148	26.176	26.260	24.763	27.384	26.356	24.581	27.870	12.654	26.186	25.529	24.949	28.054	26.260	25.782	25.538	23.582	25.064	23.935	25.848	24.369	25.308	24.507	26.326	24.542
PKW Muntok	28.054		9.858	13.304	10.568	7.414	14.942	8.970	9.054	7.558	10.179	9.150	7.375	10.664	8.559	8.980	8.323	7.743	10.848	9.054	8.576	8.332	6.377	7.858	6.729	8.642	7.163	8.102	7.301	9.120	7.337
PKWp Koba	27.064	9.858		12.314	9.579	6.425	13.953	7.981	8.064	6.568	9.189	8.161	6.386	9.674	7.570	7.991	7.334	6.754	9.858	8.064	7.586	7.343	5.387	6.868	5.740	7.653	6.174	7.113	6.312	8.131	6.347
PKWp Toboali	30.510	13.304	12.314		13.024	9.870	17.398	11.426	11.510	10.014	12.635	11.606	9.831	13.120	11.015	11.436	10.779	10.199	13.304	11.510	11.032	10.788	8.833	10.314	9.185	11.098	9.619	10.558	9.757	11.576	9.793
PKL Belinyu	27.774	10.568	9.579	13.024		7.134	14.663	8.691	8.774	7.278	9.899	8.871	7.095	10.384	8.280	8.701	8.043	7.464	10.568	8.774	8.296	8.052	6.097	7.578	6.449	8.362	6.884	7.823	7.021	8.841	7.057
PKL Puding Besar	24.620	7.414	6.425	9.870	7.134		11.508	5.536	5.620	4.124	6.745	5.716	3.941	7.230	5.125	5.546	4.889	4.309	7.414	5.620	5.142	4.898	2.943	4.424	3.295	5.208	3.729	4.668	3.867	5.687	3.903
PKL Sungailiat	32.148	14.942	13.953	17.398	14.663	11.508		13.065	13.148	11.652	14.273	13.245	11.469	14.758	12.654	13.075	12.417	11.838	14.942	13.148	12.670	12.426	10.471	11.952	10.823	12.736	11.258	12.197	11.395	13.215	11.431
PKL Kelapa	26.176	8.970	7.981	11.426	8.691	5.536	13.065		7.176	5.680	8.301	7.273	5.497	8.786	6.682	7.103	6.445	5.866	8.970	7.176	6.698	6.454	4.499	5.980	4.851	6.764	5.286	6.225	5.423	7.243	5.459
PKL Parittiga	26.260	9.054	8.064	11.510	8.774	5.620	13.148	7.176		5.764	8.384	7.356	5.581	8.870	6.765	7.186	6.529	5.949	9.054	7.260	6.782	6.538	4.583	6.064	4.935	6.848	5.369	6.308	5.507	7.326	5.542
PKL Payung	24.763	7.558	6.568	10.014	7.278	4.124	11.652	5.680	5.764		6.888	5.860	4.085	7.374	5.269	5.690	5.033	4.453	7.558	5.764	5.286	5.042	3.086	4.568	3.439	5.352	3.873	4.812	4.011	5.830	4.046
PKL Pangkalan Baru	27.384	10.179	9.189	12.635	9.899	6.745	14.273	8.301	8.384	6.888		8.481	6.706	9.995	7.890	8.311	7.654	7.074	10.179	8.384	7.906	7.663	5.707	7.188	6.060	7.973	6.494	7.433	6.632	8.451	6.667
PKL Sungai Selan	26.356	9.150	8.161	11.606	8.871	5.716	13.245	7.273	7.356	5.860	8.481		5.677	8.966	6.862	7.283	6.625	6.046	9.150	7.356	6.878	6.634	4.679	6.160	5.031	6.944	5.466	6.405	5.603	7.423	5.639
PPK Bakam	24.581	7.375	6.386	9.831	7.095	3.941	11.469	5.497	5.581	4.085	6.706	5.677		7.191	5.086	5.507	4.850	4.270	7.375	5.581	5.103	4.859	2.904	4.385	3.256	5.169	3.690	4.629	3.828	5.648	3.864
PPK Mendo Barat	27.870	10.664	9.674	13.120	10.384	7.230	14.758	8.786	8.870	7.374	9.995	8.966	7.191		8.375	8.796	8.139	7.559	10.664	8.870	8.392	8.148	6.193	7.674	6.545	8.458	6.979	7.918	7.117	8.936	7.153
PPK Merawang	12.654	8.559	7.570	11.015	8.280	5.125	12.654	6.682	6.765	5.269	7.890	6.862	5.086	8.375		6.692	6.035	5.455	8.559	6.765	6.287	6.043	4.088	5.569	4.440	6.354	4.875	5.814	5.012	6.832	5.048
PPK Pemali	26.186	8.980	7.991	11.436	8.701	5.546	13.075	7.103	7.186	5.690	8.311	7.283	5.507	8.796	6.692		6.456	5.876	8.980	7.186	6.708	6.464	4.509	5.990	4.861	6.775	5.296	6.235	5.433	7.253	5.469
PPK Riau Silip	25.529	8.323	7.334	10.779	8.043	4.889	12.417	6.445	6.529	5.033	7.654	6.625	4.850	8.139	6.035	6.456		5.218	8.323	6.529	6.051	5.807	3.852	5.333	4.204	6.117	4.638	5.577	4.776	6.596	4.812
PPK Jebus	24.949	7.743	6.754	10.199	7.464	4.309	11.838	5.866	5.949	4.453	7.074	6.046	4.270	7.559	5.455	5.876	5.218		7.743	5.949	5.471	5.227	3.272	4.753	3.624	5.537	4.059	4.998	4.196	6.016	4.232
PPK Muntok	28.054	10.848	9.858	13.304	10.568	7.414	14.942	8.970	9.054	7.558	10.179	9.150	7.375	10.664	8.559	8.980	8.323	7.743		9.054	8.576	8.332	6.377	7.858	6.729	8.642	7.163	8.102	7.301	9.120	7.337
PPK Parittiga	26.260	9.054	8.064	11.510	8.774	5.620	13.148	7.176	7.260	5.764	8.384	7.356	5.581	8.870	6.765	7.186	6.529	5.949	9.054		6.782	6.538	4.583	6.064	4.935	6.848	5.369	6.308	5.507	7.326	5.542
PPK Simpang Teritip	25.782	8.576	7.586	11.032	8.296	5.142	12.670	6.698	6.782	5.286	7.906	6.878	5.103	8.392	6.287	6.708	6.051	5.471	8.576	6.782		6.060	4.105	5.586	4.457	6.370	4.891	5.830	5.029	6.848	5.064
PPK Tempilang	25.538	8.332	7.343	10.788	8.052	4.898	12.426	6.454	6.538	5.042	7.663	6.634	4.859	8.148	6.043	6.464	5.807	5.227	8.332	6.538	6.060		3.861	5.342	4.213	6.126	4.647	5.586	4.785	6.605	4.821
PPK Pulaubesar	23.582	6.377	5.387	8.833	6.097	2.943	10.471	4.499	4.583	3.086	5.707	4.679	2.904	6.193	4.088	4.509	3.852	3.272	6.377	4.583	4.105	3.861		3.387	2.258	4.171	2.692	3.631	2.830	4.649	2.865
PPK Simpang Rimba	25.064	7.858	6.868	10.314	7.578	4.424	11.952	5.980	6.064	4.568	7.188	6.160	4.385	7.674	5.569	5.990	5.333	4.753	7.858	6.064	5.586	5.342	3.387		3.739	5.652	4.173	5.112	4.311	6.130	4.346
PPK Tukak Sadai	23.935	6.729	5.740	9.185	6.449	3.295	10.823	4.851	4.935	3.439	6.060	5.031	3.256	6.545	4.440	4.861	4.204	3.624	6.729	4.935	4.457	4.213	2.258	3.739		4.523	3.044	3.983	3.182	5.002	3.218
PPK Lubuk Besar	25.848	8.642	7.653	11.098	8.362	5.208	12.736	6.764	6.848	5.352	7.973	6.944	5.169	8.458	6.354	6.775	6.117	5.537	8.642	6.848	6.370	6.126	4.171	5.652	4.523		4.957	5.896	5.095	6.915	5.131
PPK Namang	24.369	7.163	6.174	9.619	6.884	3.729	11.258	5.286	5.369	3.873	6.494	5.466	3.690	6.979	4.875	5.296	4.638	4.059	7.163	5.369	4.891	4.647	2.692	4.173	3.044	4.957		4.418	3.616	5.436	3.652
PPK Simpang Katis	25.308	8.102	7.113	10.558	7.823	4.668	12.197	6.225	6.308	4.812	7.433	6.405	4.629	7.918	5.814	6.235	5.577	4.998	8.102	6.308	5.830	5.586	3.631	5.112	3.983	5.896	4.418		4.555	6.375	4.591
PPK Girimaya	24.507	7.301	6.312	9.757	7.021	3.867	11.395	5.423	5.507	4.011	6.632	5.603	3.828	7.117	5.012	5.433	4.776	4.196	7.301	5.507	5.029	4.785	2.830	4.311	3.182	5.095	3.616	4.555		5.574	3.790
PPK Rangkui	26.326	9.120	8.131	11.576	8.841	5.687	13.215	7.243	7.326	5.830	8.451	7.423	5.648	8.936	6.832	7.253	6.596	6.016	9.120	7.326	6.848	6.605	4.649	6.130	5.002	6.915	5.436	6.375	5.574		5.609
PPK Taman Sari	24.542	7.337	6.347	9.793	7.057	3.903	11.431	5.459	5.542	4.046	6.667	5.639	3.864	7.153	5.048	5.469	4.812	4.232	7.337	5.542	5.064	4.821	2.865	4.346	3.218	5.131	3.652	4.591	3.790	5.609	

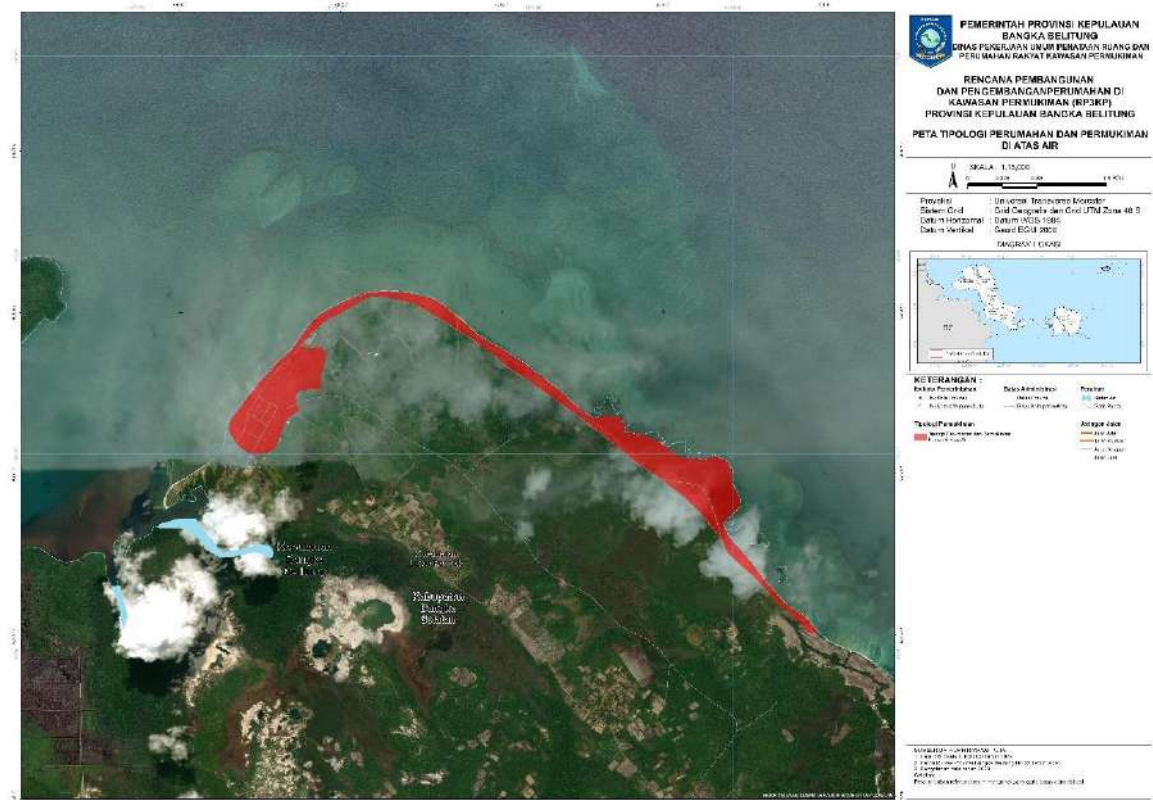
Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

Tabel 3.7 Pola Pergerakan Penduduk di Pulau Belitung

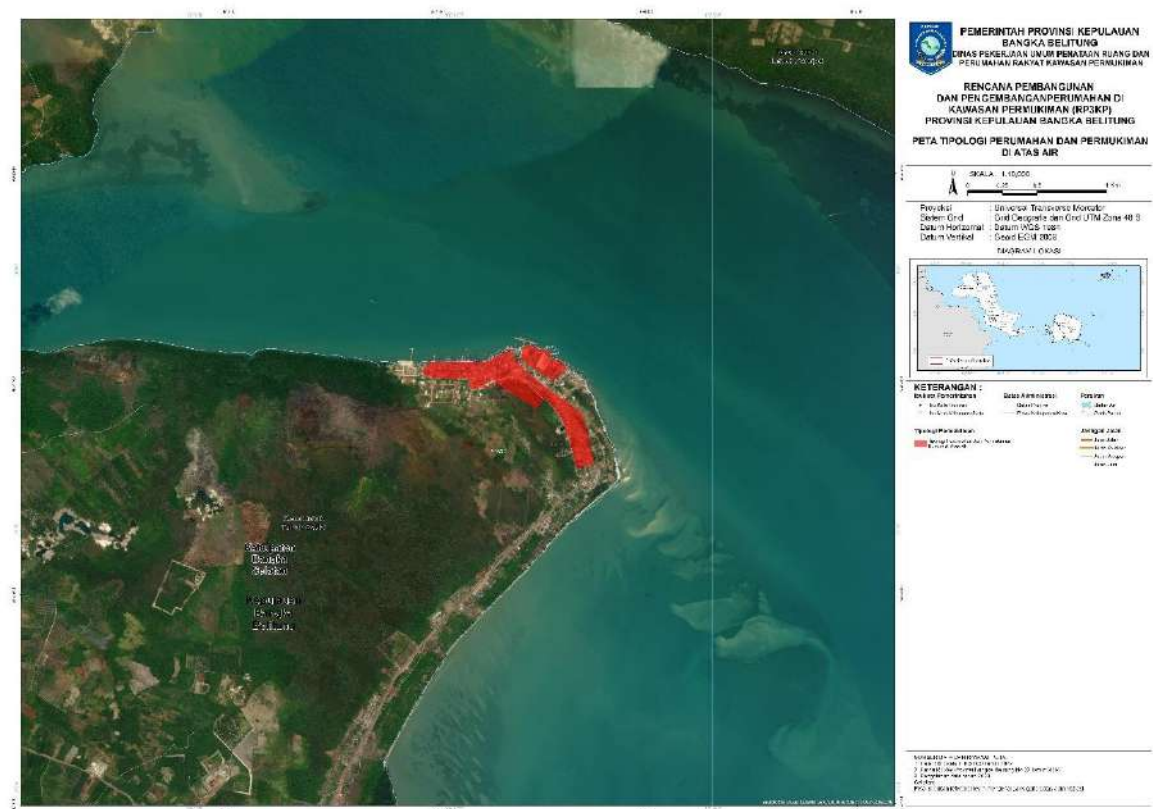
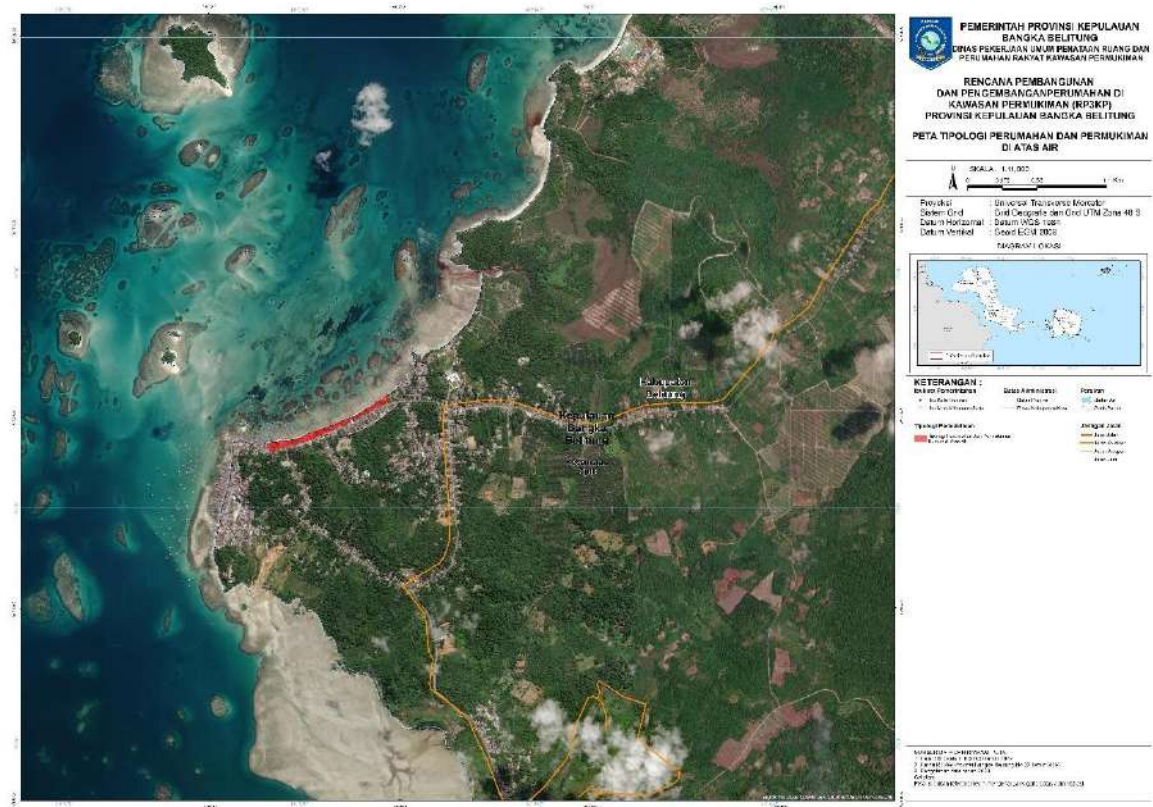
	PKW Tanjung Pandan	PKW Manggar	PKL Badau	PKL Membalong	PKL Selat Nasik	PKL Sijuk	PKL Gantung	PKL Kelapa Kampit	PPK Badau	PPK Membalong	PPK Selat Nasik	PPK Sijuk	PPK Tanjung Pandan	PPK Damar	PPK Kelapa Kampit	PPK Simpang Pesak	PPK Simpang Renggiang
PKW Tanjung Pandan		14.566	12.099	13.293	11.128	13.754	13.459	12.536	12.099	13.293	11.128	13.754	21.094	11.904	12.536	11.413	11.318
PKW Manggar	14.566		5.572	6.766	4.600	7.227	6.931	6.009	5.572	6.766	4.600	7.227	14.566	5.377	6.009	4.886	4.791
PKL Badau	12.099	5.572		4.298	2.133	4.760	4.464	3.541	3.104	4.298	2.133	4.760	12.099	2.909	3.541	2.419	2.324
PKL Membalong	13.293	6.766	4.298		3.327	5.953	5.658	4.735	4.298	5.492	3.327	5.953	13.293	4.103	4.735	3.612	3.518
PKL Selat Nasik	11.128	4.600	2.133	3.327		3.788	3.493	2.570	2.133	3.327	1.161	3.788	11.128	1.938	2.570	1.447	1.352
PKL Sijuk	13.754	7.227	4.760	5.953	3.788		6.119	5.197	4.760	5.953	3.788	6.415	13.754	4.565	5.197	4.074	3.979
PKL Gantung	13.459	6.931	4.464	5.658	3.493	6.119		4.901	4.464	5.658	3.493	6.119	13.459	4.269	4.901	3.778	3.683
PKL Kelapa Kampit	12.536	6.009	3.541	4.735	2.570	5.197	4.901		3.541	4.735	2.570	5.197	12.536	3.346	3.978	2.856	2.761
PPK Badau	12.099	5.572	3.104	4.298	2.133	4.760	4.464	3.541		3.327	5.953	13.293	4.103	4.735	3.612	3.518	2.746
PPK Membalong	13.293	6.766	4.298	5.492	3.327	5.953	5.658	4.735	3.327		3.788	11.128	1.938	2.570	1.447	1.352	581
PPK Selat Nasik	11.128	4.600	2.133	3.327	1.161	3.788	3.493	2.570	5.953	3.788		13.754	4.565	5.197	4.074	3.979	3.207
PPK Sijuk	13.754	7.227	4.760	5.953	3.788	6.415	6.119	5.197	13.293	11.128	13.754		11.904	12.536	11.413	11.318	10.547
PPK Tanjung Pandan	21.094	14.566	12.099	13.293	11.128	13.754	13.459	12.536	4.103	1.938	4.565	11.904		3.346	2.224	2.129	1.357
PPK Damar	11.904	5.377	2.909	4.103	1.938	4.565	4.269	3.346	4.735	2.570	5.197	12.536	3.346		2.856	2.761	1.989
PPK Kelapa Kampit	12.536	6.009	3.541	4.735	2.570	5.197	4.901	3.978	3.612	1.447	4.074	11.413	2.224	2.856		1.638	866
PPK Simpang Pesak	11.413	4.886	2.419	3.612	1.447	4.074	3.778	2.856	3.518	1.352	3.979	11.318	2.129	2.761	1.638		772
PPK Simpang Renggiang	11.318	4.791	2.324	3.518	1.352	3.979	3.683	2.761	2.746	581	3.207	10.547	1.357	1.989	866	772	



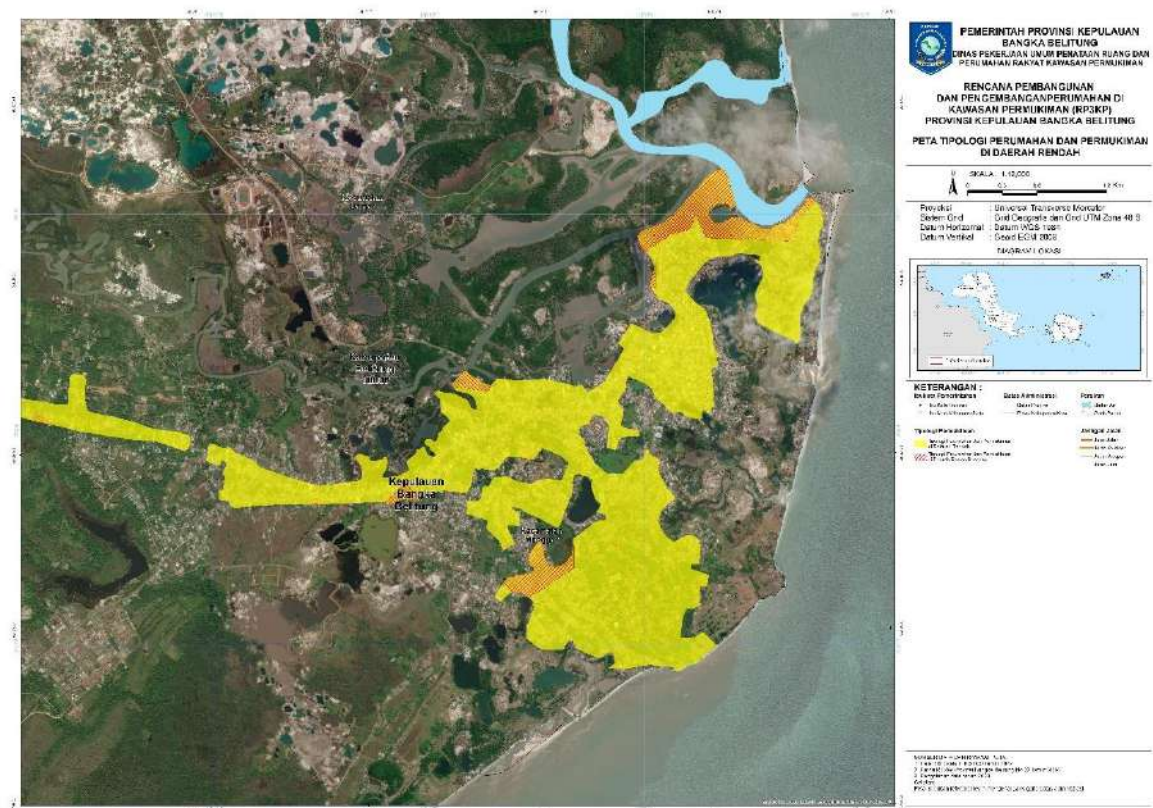




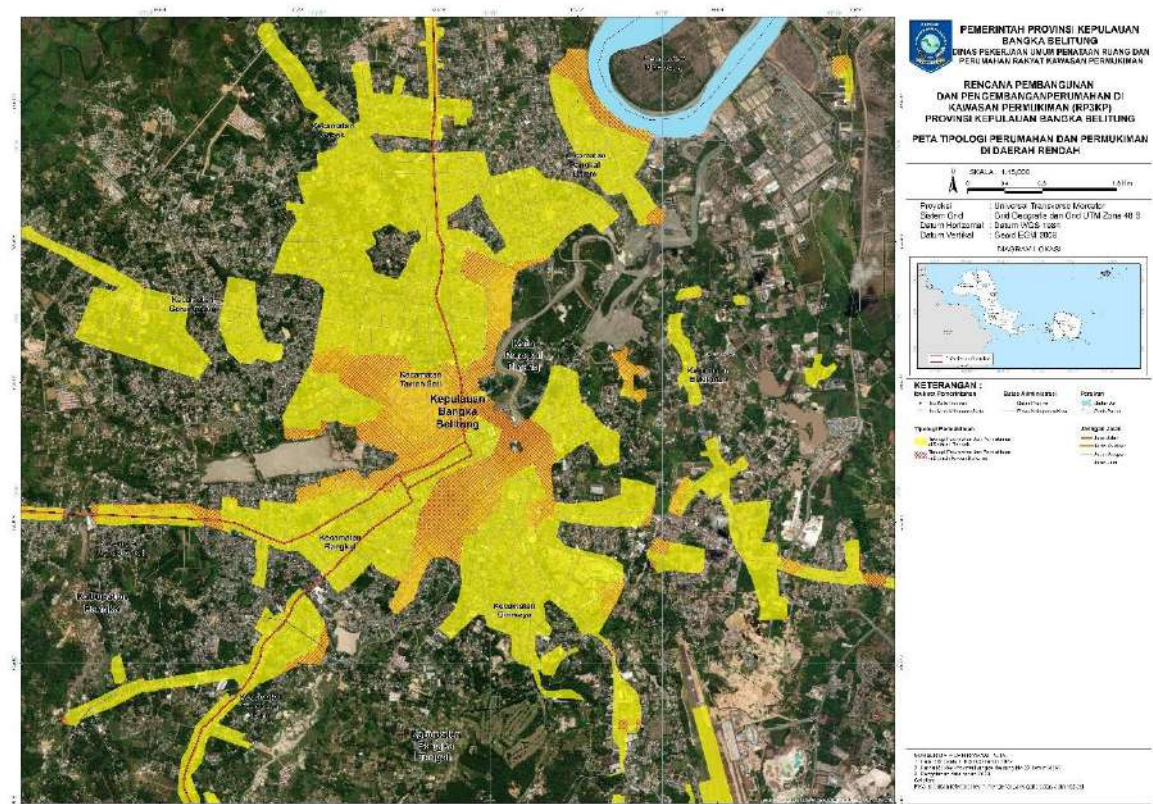
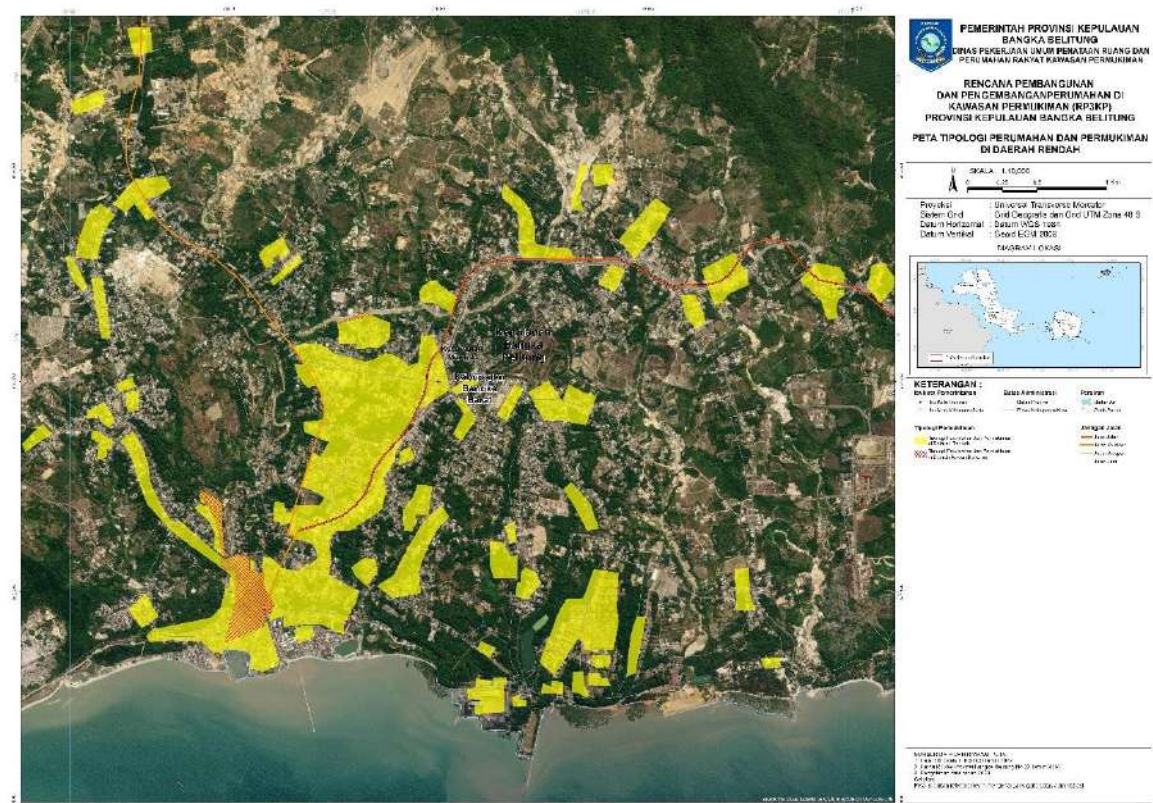
Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

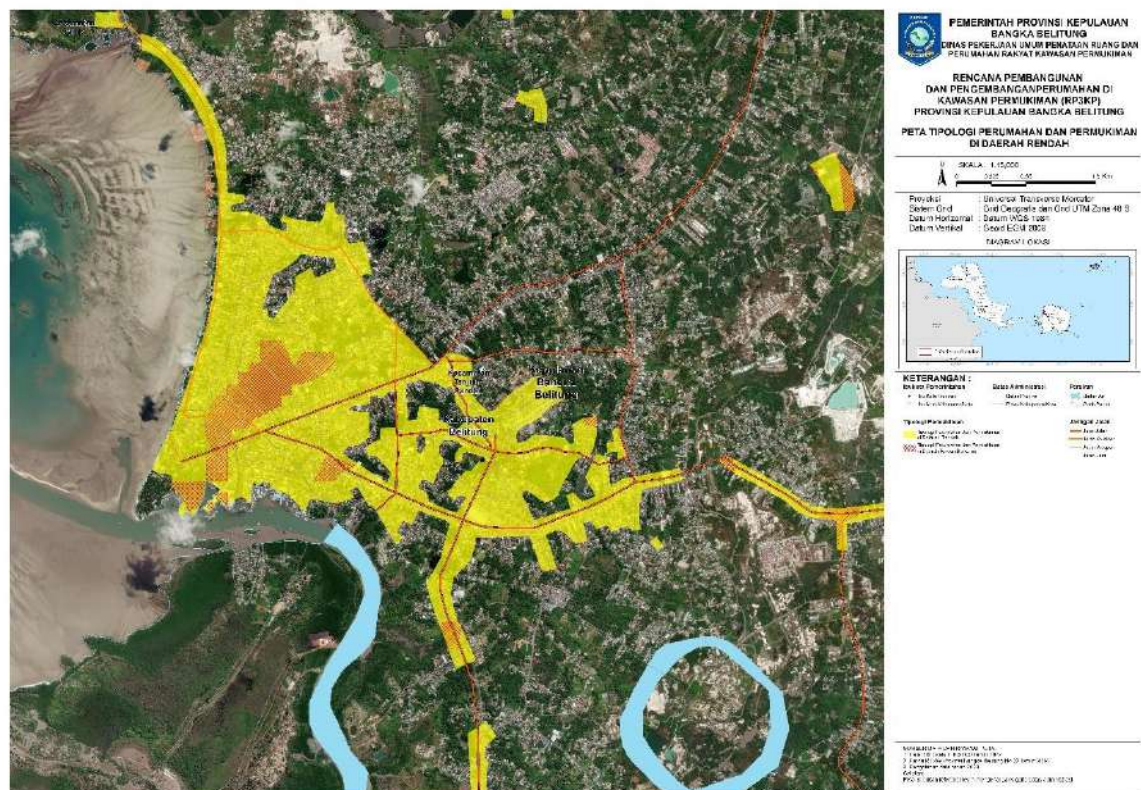
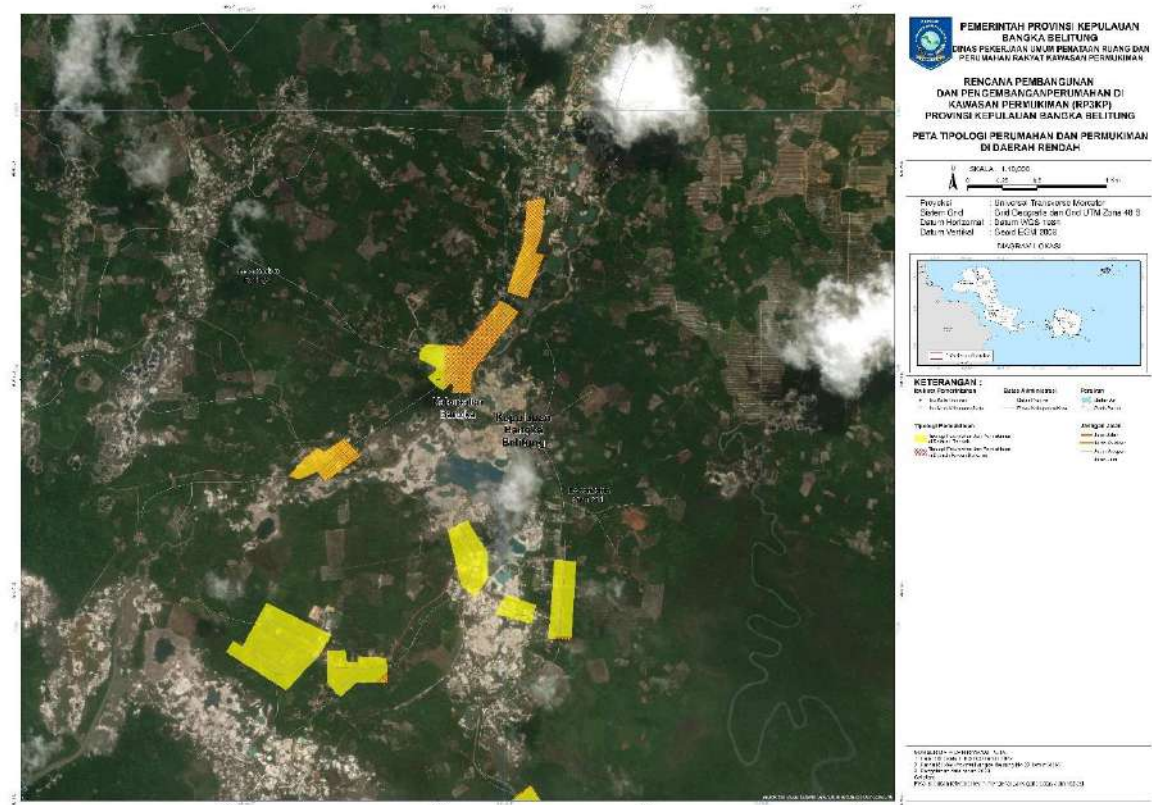


*Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

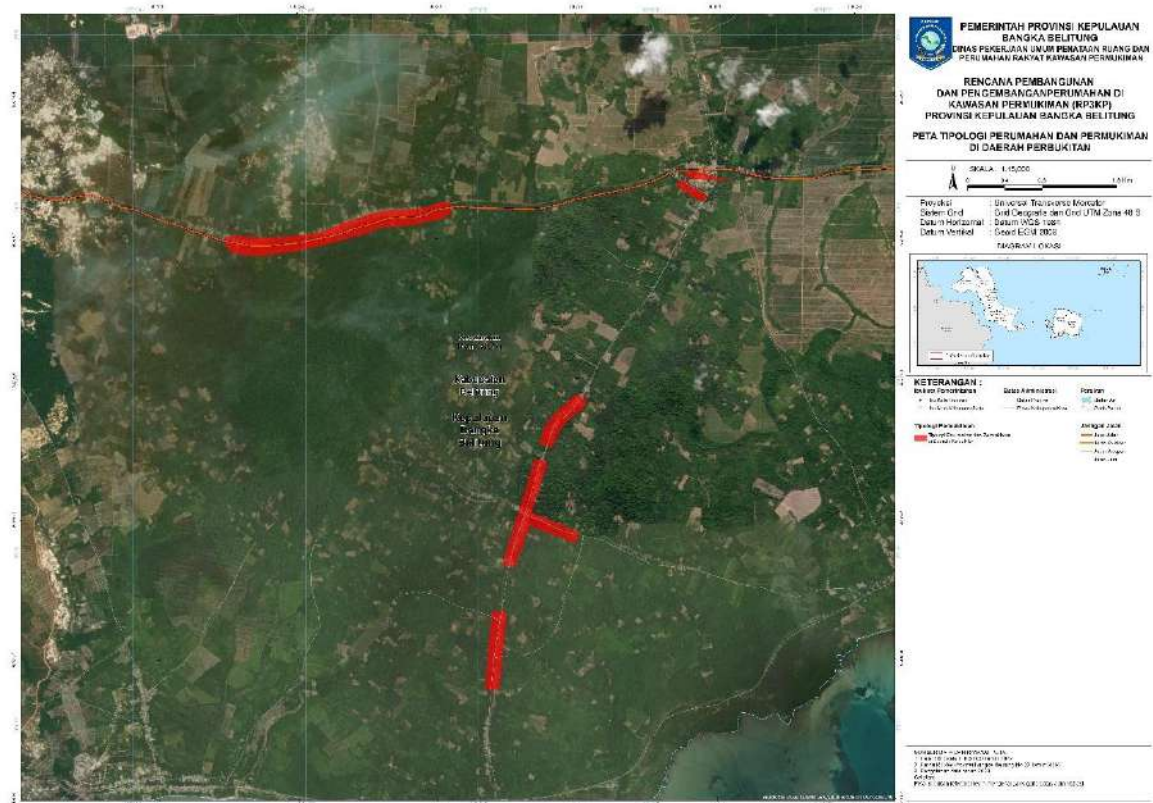


Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

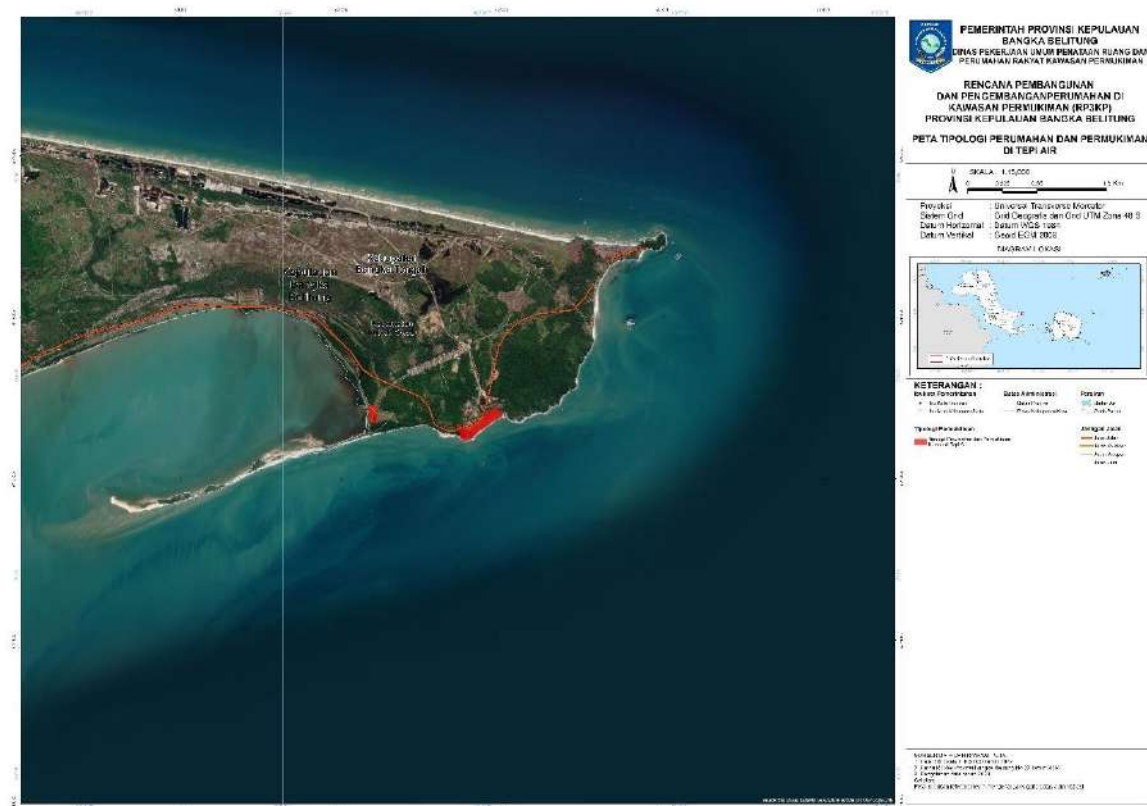
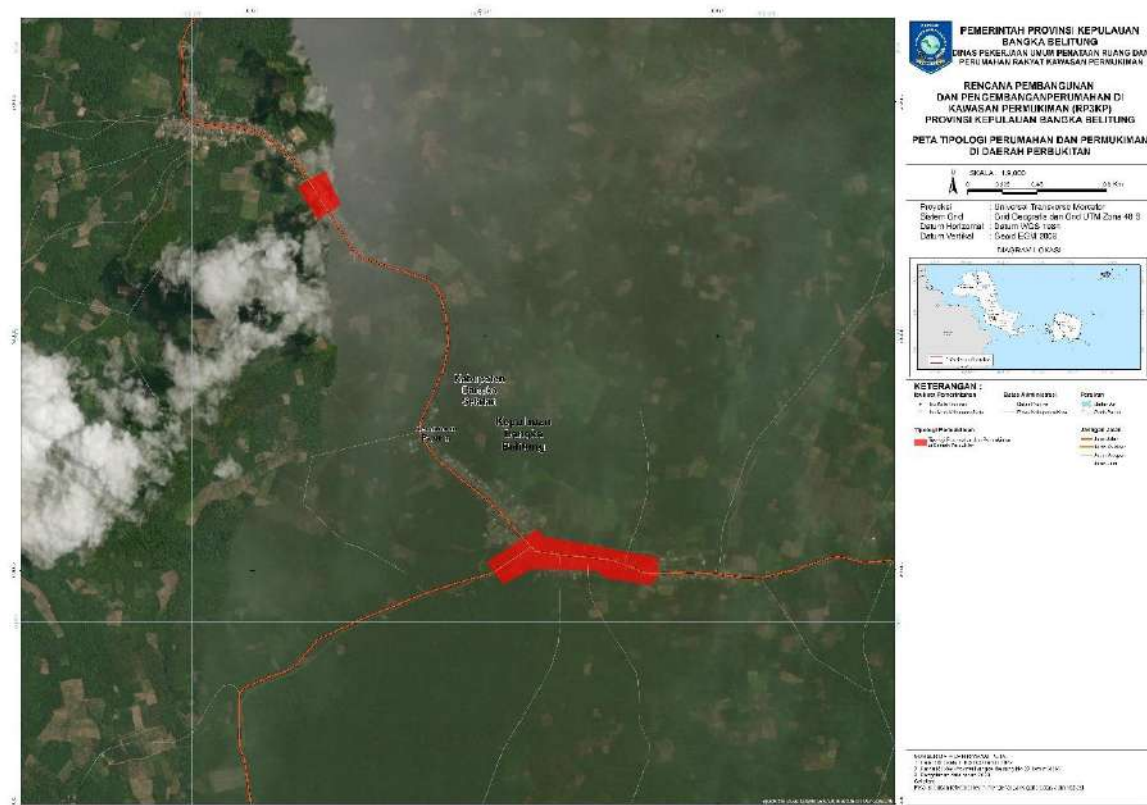




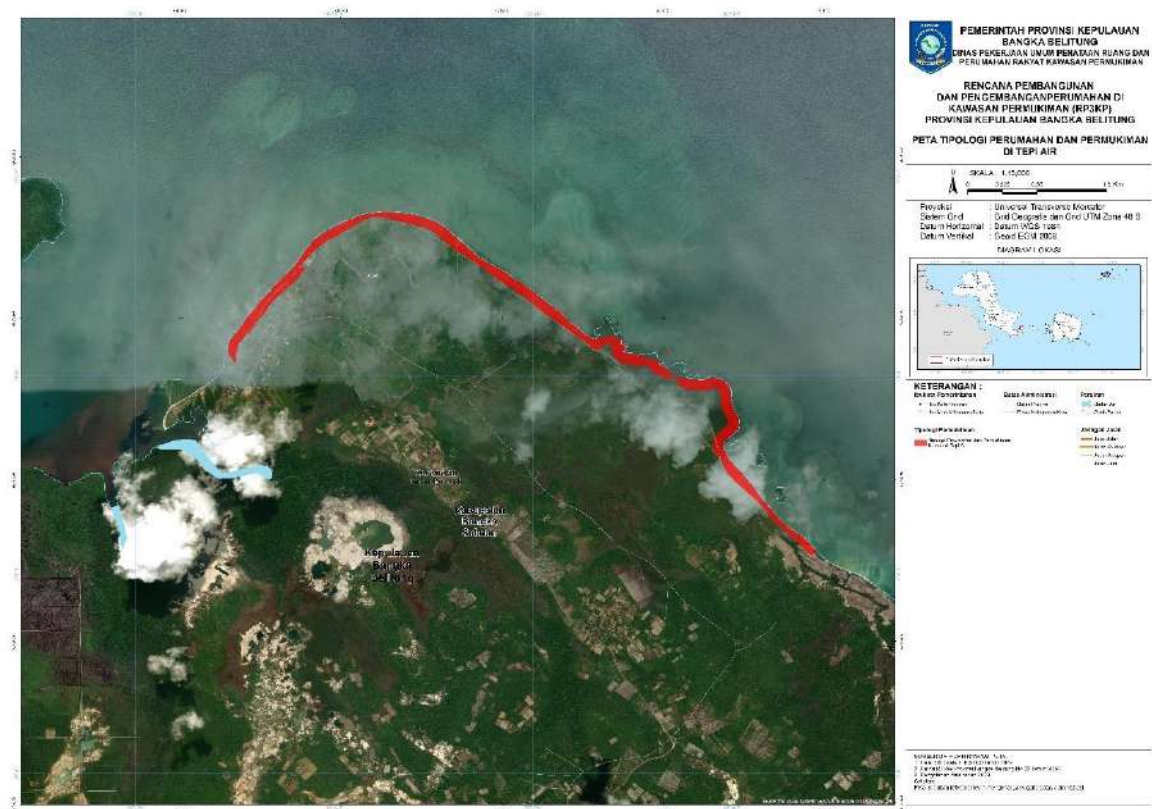
Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



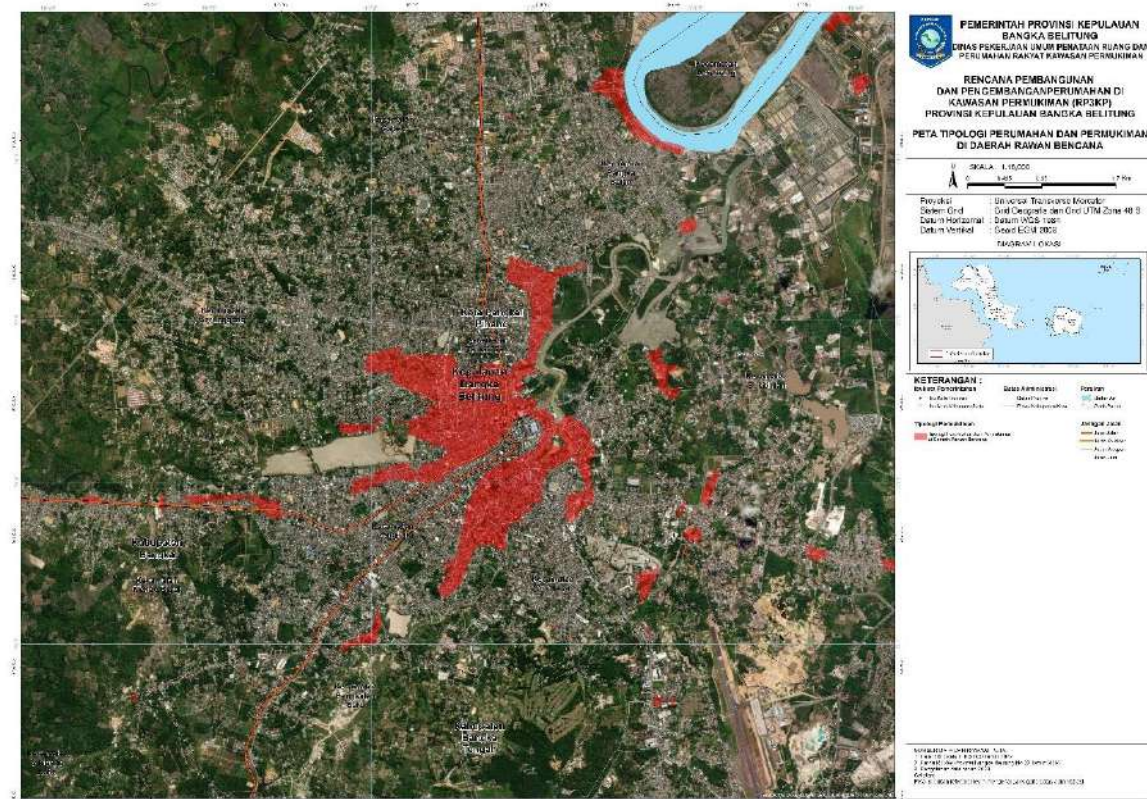
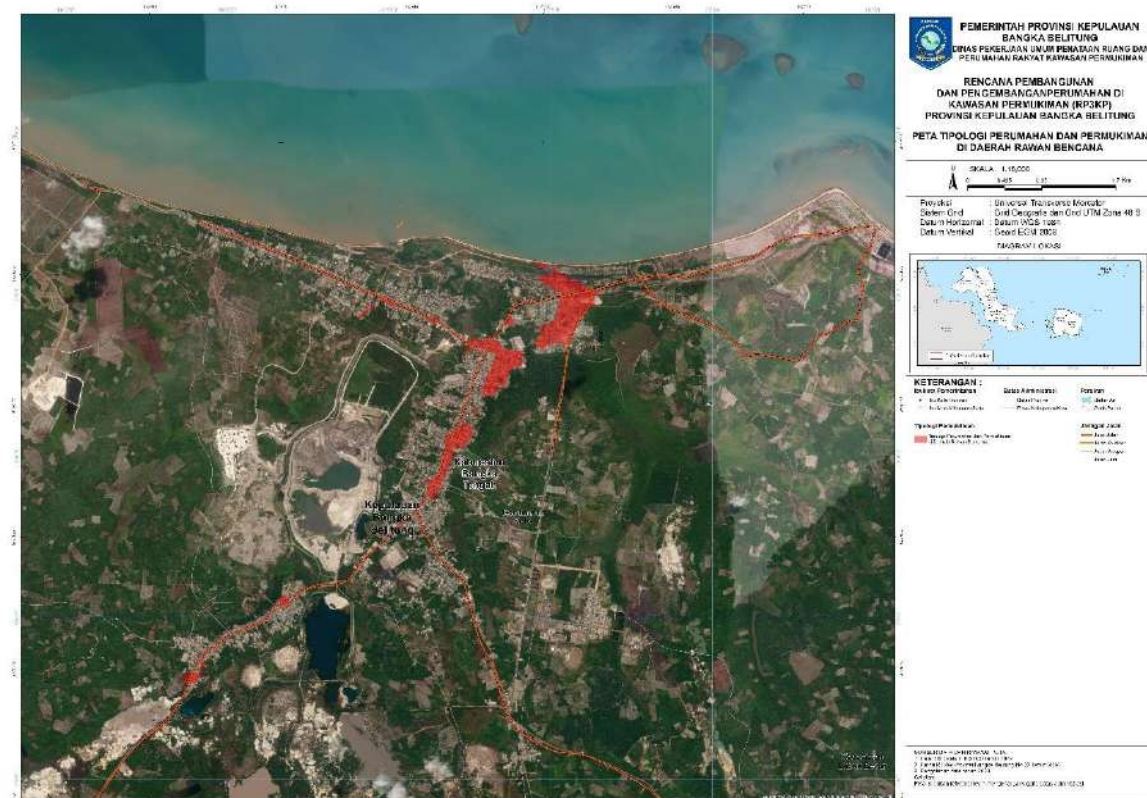
Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

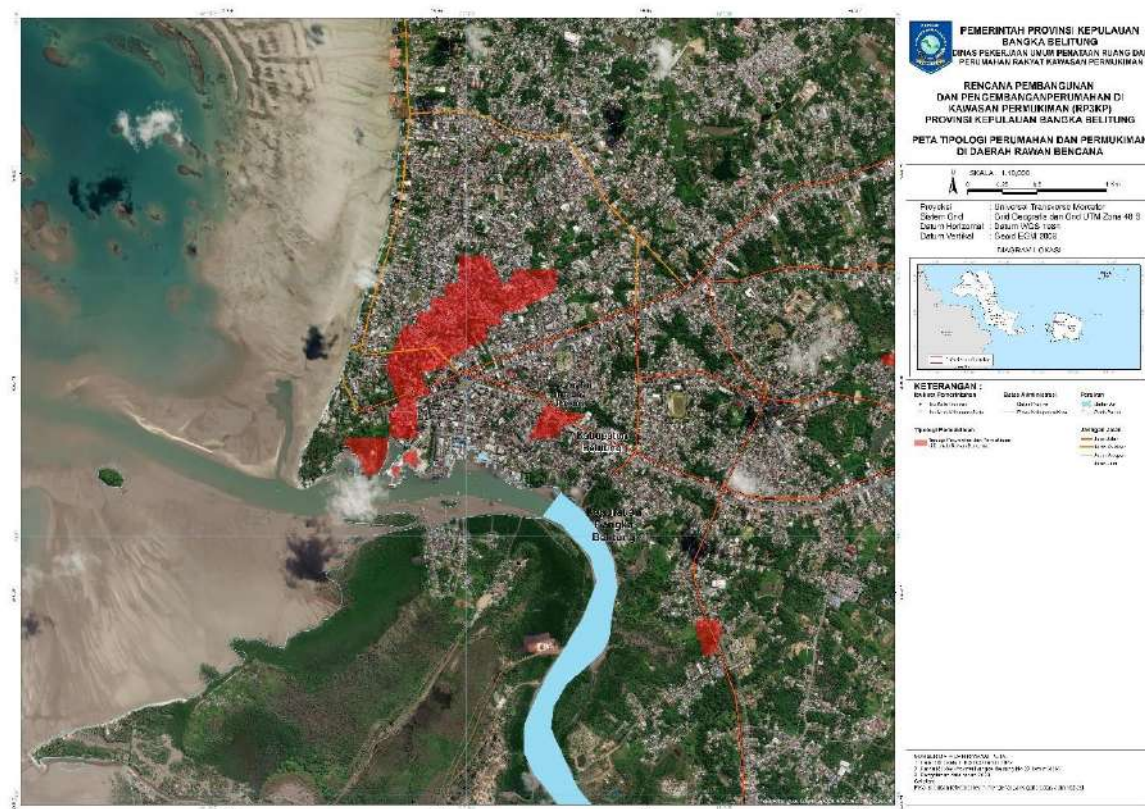


*Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*



Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





3.3.3 Analisis Potensi Pasar Perumahan

Kebutuhan akan perumahan terus bertambah seiring dengan pertambahan penduduk yang sangat pesat. Kenaikan harga rumah saat ini sangat dipengaruhi oleh harga tanah yang tinggi terutama di daerah-daerah yang dinilai ekonomisnya tinggi, misalkan di daerah perkotaan.

Pesatnya perkembangan penduduk sangat berpengaruh dalam pembangunan perumahan oleh pelaku pembangunan. Pelaku Pembangunan perumahan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan dan permukiman. Beberapa pelaku pembangunan perumahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. Pemerintah
2. Developer
3. REI
4. APPERSI
5. Perbankan
6. Masyarakat/perorangan

Kebutuhan akan rumah pada masyarakat yang belum memiliki rumah merupakan salah satu potensi pasar rumah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini tidak sedikit warga yang menghuni rumahnya dengan sistem kontrak/sewa, numpang/bebas sewa dan di rumah dinas.

Tabel 3.8 Potensi Pasar Rumah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Rumah (unit)
-----	----------------	----------------------

1	Bangka	10.986
2	Bangka Selatan	9.070
3	Bangka Tengah	8.378
4	Bangka Barat	5.818
5	Belitung	7.758
6	Belitung Timur	8.366
7	Kota Pangkal Pinang	11.501
JUMLAH TOTAL		61.877

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Tabel 3.9 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2043

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)															
		Tahun 2028				Tahun 2033				Tahun 2038				Tahun 2043			
		Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah
A	Kabupaten Bangka	11.749	23.498	35.247	70.494	12.253	24.505	36.758	73.515	12.756	25.512	38.268	76.537	13.260	26.519	39.779	79.558
1	Mendo barat	1.876	3.752	5.628	11.256	1.984	3.968	5.952	11.903	2.092	4.183	6.275	12.550	2.200	4.399	6.599	13.198
2	Merawang	1.099	2.198	3.297	6.595	1.144	2.288	3.432	6.865	1.189	2.378	3.567	7.135	1.234	2.468	3.702	7.404
3	Puding Besar	738	1.475	2.213	4.426	800	1.599	2.399	4.798	862	1.723	2.585	5.169	923	1.847	2.770	5.541
4	Sungailiat	3.229	6.458	9.686	19.373	3.276	6.551	9.827	19.653	3.322	6.645	9.967	19.934	3.369	6.738	10.107	20.214
5	Pemali	1.415	2.830	4.244	8.489	1.606	3.212	4.818	9.636	1.797	3.594	5.391	10.782	1.988	3.976	5.965	11.929
6	Bakam	671	1.342	2.013	4.026	688	1.377	2.065	4.130	706	1.411	2.117	4.233	723	1.446	2.169	4.337
7	Belinyu	1.745	3.490	5.235	10.470	1.770	3.541	5.311	10.622	1.796	3.591	5.387	10.773	1.821	3.642	5.462	10.925
8	Riau Silip	976	1.953	2.929	5.859	985	1.970	2.954	5.909	993	1.986	2.980	5.959	1.002	2.003	3.005	6.010
B	Kabupaten Bangka Tengah	7.841	15.681	23.522	47.044	8.666	17.332	25.998	51.996	9.491	18.982	28.474	56.947	10.317	20.633	30.950	61.899
1	Koba	1.769	3.538	5.308	10.615	2.012	4.023	6.035	12.070	2.254	4.509	6.763	13.526	2.497	4.994	7.490	14.981
2	Lubuk Besar	1.307	2.615	3.922	7.844	1.503	3.005	4.508	9.016	1.698	3.396	5.095	10.189	1.894	3.787	5.681	11.362
3	Pangkalan Baru	1.749	3.497	5.246	10.492	1.885	3.770	5.656	11.311	2.022	4.044	6.065	12.131	2.158	4.317	6.475	12.950
4	Namang	686	1.371	2.057	4.113	774	1.547	2.321	4.642	862	1.724	2.586	5.171	950	1.900	2.850	5.700
5	Sungai Selan	1.390	2.780	4.170	8.339	1.513	3.026	4.539	9.078	1.636	3.272	4.908	9.817	1.759	3.519	5.278	10.556
6	Simpang Katis	940	1.880	2.820	5.641	980	1.959	2.939	5.877	1.019	2.038	3.057	6.114	1.058	2.117	3.175	6.351
C	Kabupaten Bangka Selatan	7.121	14.241	21.362	42.724	7.436	14.872	22.309	44.617	7.752	15.503	23.255	46.510	8.067	16.134	24.202	48.403
1	Payung	747	1.494	2.241	4.482	777	1.554	2.330	4.661	807	1.613	2.420	4.839	836	1.673	2.509	5.018
2	Pulau Besar	373	747	1.120	2.240	420	839	1.259	2.518	466	932	1.399	2.797	513	1.025	1.538	3.076
3	Simpang Rimba	852	1.704	2.556	5.112	886	1.772	2.658	5.316	920	1.840	2.760	5.520	954	1.908	2.862	5.724
4	Toboali	2.759	5.517	8.276	16.552	2.869	5.737	8.606	17.212	2.979	5.957	8.936	17.872	3.089	6.177	9.266	18.532
5	Tukak Sadai	457	914	1.371	2.741	475	950	1.425	2.850	493	987	1.480	2.960	512	1.023	1.535	3.069
6	Air Gegas	1.495	2.991	4.486	8.973	1.555	3.110	4.665	9.330	1.615	3.229	4.844	9.688	1.674	3.349	5.023	10.046
7	Lepar Pongok	284	569	853	1.706	296	591	887	1.774	307	614	921	1.842	318	637	955	1.910
8	Kepulauan Pongok	153	306	459	919	159	319	478	956	165	331	496	992	171	343	514	1.029

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)															
		Tahun 2028				Tahun 2033				Tahun 2038				Tahun 2043			
		Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah
D	Kabupaten Bangka Barat	7.310	14.620	21.929	43.859	7.574	15.147	22.721	45.442	7.838	15.675	23.513	47.026	8.102	16.203	24.305	48.610
1	Kelapa	1.257	2.515	3.772	7.544	1.320	2.640	3.960	7.920	1.383	2.765	4.148	8.296	1.445	2.891	4.336	8.672
2	Tempilang	1.087	2.174	3.262	6.523	1.185	2.371	3.556	7.113	1.284	2.567	3.851	7.702	1.382	2.764	4.146	8.291
3	Muntok	1.826	3.651	5.477	10.954	1.840	3.681	5.521	11.043	1.855	3.710	5.566	11.131	1.870	3.740	5.610	11.220
4	Simpang Teritip	1.109	2.217	3.326	6.651	1.157	2.314	3.471	6.941	1.205	2.410	3.615	7.231	1.253	2.507	3.760	7.521
5	Jebus	809	1.619	2.428	4.856	839	1.679	2.518	5.036	870	1.739	2.609	5.217	900	1.799	2.699	5.398
6	Parittiga	1.222	2.444	3.665	7.331	1.232	2.463	3.695	7.390	1.242	2.483	3.725	7.449	1.251	2.503	3.754	7.509
E	Kota Pangkal Pinang	9.542	19.085	28.627	57.255	11.208	22.417	33.625	67.250	12.874	25.749	38.623	77.246	14.540	29.081	43.621	87.242
1	Rangkui	1.385	2.770	4.155	8.311	1.513	3.025	4.538	9.076	1.640	3.280	4.920	9.840	1.768	3.535	5.303	10.605
2	Bukit Intan	1.677	3.354	5.030	10.061	1.885	3.770	5.655	11.311	2.093	4.187	6.280	12.561	2.302	4.604	6.905	13.811
3	Girimaya	703	1.407	2.110	4.220	768	1.536	2.304	4.608	833	1.666	2.498	4.997	898	1.795	2.693	5.385
4	Pangkalbalam	777	1.554	2.331	4.661	787	1.575	2.362	4.725	798	1.596	2.394	4.788	809	1.617	2.426	4.851
5	Gabek	1.834	3.667	5.501	11.002	2.355	4.709	7.064	14.128	2.876	5.752	8.627	17.255	3.397	6.794	10.191	20.381
6	Tamansari	717	1.433	2.150	4.300	783	1.565	2.348	4.696	849	1.697	2.546	5.091	915	1.829	2.744	5.487
7	Gerunggang	2.450	4.900	7.350	14.700	3.118	6.236	9.353	18.707	3.786	7.571	11.357	22.714	4.454	8.907	13.361	26.721
F	Kabupaten Belitung	6.340	12.680	19.020	38.040	6.448	12.895	19.343	38.685	6.555	13.110	19.665	39.330	6.662	13.325	19.987	39.975
1	Membalong	922	1.843	2.765	5.529	927	1.854	2.780	5.561	932	1.864	2.796	5.592	937	1.874	2.811	5.623
2	Tanjungpandan	3.624	7.249	10.873	21.746	3.715	7.430	11.145	22.290	3.806	7.611	11.417	22.833	3.896	7.792	11.689	23.377
3	Badau	522	1.044	1.565	3.131	525	1.051	1.576	3.152	529	1.058	1.587	3.174	533	1.065	1.598	3.196
4	Sijuk	1.077	2.155	3.232	6.465	1.084	2.169	3.253	6.506	1.091	2.183	3.274	6.548	1.098	2.197	3.295	6.590
5	Selat Nasik	195	390	585	1.169	196	392	588	1.176	197	394	591	1.182	198	396	595	1.189
G	Kabupaten Belitung Timur	4.656	9.312	13.968	27.936	4.912	9.824	14.736	29.471	5.168	10.336	15.504	31.007	5.424	10.848	16.271	32.543
1	Dendang	411	821	1.232	2.463	439	877	1.316	2.631	467	933	1.400	2.799	495	989	1.484	2.968
2	Simpang Pesak	318	636	954	1.908	342	685	1.027	2.055	367	734	1.101	2.201	391	783	1.174	2.348
3	Gantung	1.050	2.100	3.151	6.301	1.117	2.233	3.350	6.699	1.183	2.366	3.549	7.097	1.249	2.498	3.747	7.495

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)															
		Tahun 2028				Tahun 2033				Tahun 2038				Tahun 2043			
		Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah
4	Simpang Renggang	273	546	819	1.639	286	573	859	1.718	300	599	899	1.798	313	626	939	1.877
5	Manggar	1.395	2.790	4.185	8.370	1.441	2.882	4.323	8.646	1.487	2.974	4.461	8.922	1.533	3.066	4.599	9.198
6	Damar	466	933	1.399	2.798	478	956	1.434	2.867	490	979	1.469	2.937	501	1.002	1.503	3.007
7	Kelapa Kampit	743	1.485	2.228	4.456	809	1.618	2.427	4.854	875	1.751	2.626	5.252	942	1.883	2.825	5.650
	Prov. Kep. Bangka Belitung	54.559	109.117	163.676	327.351	58.496	116.993	175.489	350.978	62.434	124.868	187.302	374.604	66.372	132.743	199.115	398.230

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Tabel 3.10Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Rumah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2043

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Rumah (Ha)															
		Tahun 2028				Tahun 2033				Tahun 2038				Tahun 2043			
		Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah
A	Kabupaten Bangka	704,94	939,92	704,94	2.349,81	735,15	980,21	735,15	2.450,51	765,37	1.020,49	765,37	2.551,22	795,58	1.060,77	795,58	2.651,9
1	Mendo barat	112,56	150,08	112,56	375,21	119,03	158,71	119,03	396,78	125,50	167,34	125,50	418,35	131,98	175,97	131,98	439,9
2	Merawang	65,95	87,93	65,95	219,82	68,65	91,53	68,65	228,82	71,35	95,13	71,35	237,82	74,04	98,73	74,04	246,8
3	Puding Besar	44,26	59,01	44,26	147,53	47,98	63,97	47,98	159,92	51,69	68,92	51,69	172,31	55,41	73,88	55,41	184,7
4	Sungailiat	193,73	258,31	193,73	645,77	196,53	262,04	196,53	655,11	199,34	265,78	199,34	664,46	202,14	269,52	202,14	673,8
5	Pemali	84,89	113,19	84,89	282,96	96,36	128,48	96,36	321,19	107,82	143,77	107,82	359,41	119,29	159,06	119,29	397,6
6	Bakam	40,26	53,68	40,26	134,21	41,30	55,07	41,30	137,66	42,33	56,45	42,33	141,12	43,37	57,83	43,37	144,5
7	Belinyu	104,70	139,61	104,70	349,01	106,22	141,63	106,22	354,06	107,73	143,65	107,73	359,11	109,25	145,67	109,25	364,1
8	Riau Silip	58,59	78,12	58,59	195,29	59,09	78,79	59,09	196,97	59,59	79,46	59,59	198,65	60,10	80,13	60,10	200,3
B	Kabupaten Bangka Tengah	470,44	627,25	470,44	1.568,13	519,96	693,28	519,96	1.733,19	569,47	759,30	569,47	1.898,25	618,99	825,32	618,99	2.063,3
1	Koba	106,15	141,54	106,15	353,84	120,70	160,94	120,70	402,35	135,26	180,34	135,26	450,85	149,81	199,74	149,81	499,3
2	Lubuk Besar	78,44	104,58	78,44	261,45	90,16	120,22	90,16	300,54	101,89	135,85	101,89	339,63	113,62	151,49	113,62	378,7

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Rumah (Ha)															
		Tahun 2028				Tahun 2033				Tahun 2038				Tahun 2043			
		Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah
3	Pangkalan Baru	104,92	139,90	104,92	349,74	113,11	150,82	113,11	377,05	121,31	161,74	121,31	404,35	129,50	172,66	129,50	431,66
4	Namang	41,13	54,84	41,13	137,11	46,42	61,90	46,42	154,74	51,71	68,95	51,71	172,37	57,00	76,00	57,00	190,00
5	Sungai Selan	83,39	111,19	83,39	277,97	90,78	121,04	90,78	302,60	98,17	130,89	98,17	327,23	105,56	140,74	105,56	351,86
6	Simpang Katis	56,41	75,21	56,41	188,02	58,77	78,36	58,77	195,91	61,14	81,52	61,14	203,80	63,51	84,68	63,51	211,70
C	Kabupaten Bangka Selatan	427,24	569,66	427,24	1.424,14	446,17	594,90	446,17	1.487,24	465,10	620,14	465,10	1.550,34	484,03	645,38	484,03	1.613,44
1	Payung	44,82	59,76	44,82	149,40	46,61	62,14	46,61	155,35	48,39	64,52	48,39	161,31	50,18	66,91	50,18	167,27
2	Pulau Besar	22,40	29,86	22,40	74,66	25,18	33,58	25,18	83,95	27,97	37,30	27,97	93,24	30,76	41,01	30,76	102,53
3	Simpang Rimba	51,12	68,16	51,12	170,41	53,16	70,88	53,16	177,20	55,20	73,60	55,20	184,00	57,24	76,32	57,24	190,76
4	Toboali	165,52	220,69	165,52	551,73	172,12	229,49	172,12	573,73	178,72	238,29	178,72	595,73	185,32	247,09	185,32	617,73
5	Tukak Sadai	27,41	36,55	27,41	91,37	28,50	38,01	28,50	95,02	29,60	39,46	29,60	98,66	30,69	40,92	30,69	102,30
6	Air Gegas	89,73	119,63	89,73	299,08	93,30	124,40	93,30	311,01	96,88	129,17	96,88	322,94	100,46	133,95	100,46	334,87
7	Lepar Pongok	17,06	22,74	17,06	56,86	17,74	23,65	17,74	59,13	18,42	24,56	18,42	61,40	19,10	25,47	19,10	63,67
8	Kepulauan Pongok	9,19	12,25	9,19	30,63	9,56	12,74	9,56	31,85	9,92	13,23	9,92	33,08	10,29	13,72	10,29	34,30
D	Kabupaten Bangka Barat	438,59	584,78	438,59	1.461,96	454,42	605,90	454,42	1.514,75	470,26	627,02	470,26	1.567,54	486,10	648,13	486,10	1.620,33
1	Kelapa	75,44	100,58	75,44	251,46	79,20	105,60	79,20	263,99	82,96	110,61	82,96	276,53	86,72	115,63	86,72	289,05
2	Tempilang	65,23	86,98	65,23	217,44	71,13	94,83	71,13	237,08	77,02	102,69	77,02	256,73	82,91	110,55	82,91	276,35
3	Muntok	109,54	146,05	109,54	365,14	110,43	147,24	110,43	368,09	111,31	148,42	111,31	371,04	112,20	149,60	112,20	373,99
4	Simpang Teritip	66,51	88,68	66,51	221,71	69,41	92,55	69,41	231,37	72,31	96,41	72,31	241,03	75,21	100,27	75,21	250,69
5	Jebus	48,56	64,74	48,56	161,85	50,36	67,15	50,36	167,88	52,17	69,56	52,17	173,91	53,98	71,97	53,98	179,93
6	Parittiga	73,31	97,74	73,31	244,36	73,90	98,53	73,90	246,33	74,49	99,32	74,49	248,31	75,09	100,11	75,09	250,29
E	Kota Pangkal Pinang	572,55	763,39	572,55	1.908,48	672,50	896,67	672,50	2.241,68	772,46	1.029,95	772,46	2.574,88	872,42	1.163,23	872,42	2.908,07
1	Rangkui	83,11	110,81	83,11	277,02	90,76	121,01	90,76	302,52	98,40	131,20	98,40	328,01	106,05	141,40	106,05	353,55
2	Bukit Intan	100,61	134,15	100,61	335,36	113,11	150,81	113,11	377,03	125,61	167,48	125,61	418,69	138,11	184,14	138,11	460,36
3	Girimaya	42,20	56,27	42,20	140,67	46,08	61,44	46,08	153,61	49,97	66,62	49,97	166,56	53,85	71,80	53,85	179,55
4	Pangkalbalam	46,61	62,15	46,61	155,37	47,25	62,99	47,25	157,49	47,88	63,84	47,88	159,60	48,51	64,69	48,51	161,74

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Rumah (Ha)															
		Tahun 2028				Tahun 2033				Tahun 2038				Tahun 2043			
		Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah	Rumah Mewah	Rumah Mene ngah	Rumah Seder hana	Jumlah
5	Gabek	110,02	146,69	110,02	366,73	141,28	188,38	141,28	470,95	172,55	230,06	172,55	575,16	203,81	271,75	203,81	679,3
6	Tamansari	43,00	57,33	43,00	143,34	46,96	62,61	46,96	156,53	50,91	67,89	50,91	169,72	54,87	73,16	54,87	182,9
7	Gerunggang	147,00	196,00	147,00	489,99	187,07	249,43	187,07	623,57	227,14	302,86	227,14	757,14	267,21	356,29	267,21	890,7
F	Kabupaten Belitung	380,40	507,20	380,40	1.268,00	386,85	515,80	386,85	1.289,50	393,30	524,40	393,30	1.311,00	399,75	533,00	399,75	1.332,4
1	Membalong	55,29	73,73	55,29	184,31	55,61	74,14	55,61	185,35	55,92	74,56	55,92	186,39	56,23	74,97	56,23	187,4
2	Tanjungpandan	217,46	289,95	217,46	724,87	222,90	297,20	222,90	742,99	228,33	304,45	228,33	761,11	233,77	311,69	233,77	779,2
3	Badau	31,31	41,74	31,31	104,35	31,52	42,03	31,52	105,08	31,74	42,32	31,74	105,80	31,96	42,61	31,96	106,5
4	Sijuk	64,65	86,20	64,65	215,49	65,06	86,75	65,06	216,88	65,48	87,31	65,48	218,27	65,90	87,86	65,90	219,6
5	Selat Nasik	11,69	15,59	11,69	38,98	11,76	15,68	11,76	39,20	11,82	15,77	11,82	39,42	11,89	15,85	11,89	39,6
G	Kabupaten Belitung Timur	279,36	372,47	279,36	931,18	294,71	392,95	294,71	982,38	310,07	413,43	310,07	1.033,57	325,43	433,90	325,43	1.084,7
1	Dendang	24,63	32,84	24,63	82,10	26,31	35,08	26,31	87,71	27,99	37,33	27,99	93,31	29,68	39,57	29,68	98,9
2	Simpang Pesak	19,08	25,44	19,08	63,61	20,55	27,40	20,55	68,49	22,01	29,35	22,01	73,38	23,48	31,30	23,48	78,2
3	Gantung	63,01	84,02	63,01	210,04	66,99	89,32	66,99	223,30	70,97	94,63	70,97	236,57	74,95	99,93	74,95	249,8
4	Simpang Renggang	16,39	21,85	16,39	54,62	17,18	22,91	17,18	57,27	17,98	23,97	17,98	59,93	18,77	25,03	18,77	62,5
5	Manggar	83,70	111,60	83,70	279,01	86,46	115,28	86,46	288,21	89,22	118,96	89,22	297,41	91,98	122,64	91,98	306,6
6	Damar	27,98	37,31	27,98	93,26	28,67	38,23	28,67	95,58	29,37	39,16	29,37	97,90	30,07	40,09	30,07	100,2
7	Kelapa Kampit	44,56	59,41	44,56	148,54	48,54	64,72	48,54	161,81	52,52	70,03	52,52	175,07	56,50	75,34	56,50	188,3
	Prov. Kep. Bangka Belitung	3.273,51	4.364,68	3.273,51	10.911,71	3.509,78	4.679,70	3.509,78	11.699,25	3.746,04	4.994,72	3.746,04	12.486,79	3.982,30	5.309,73	3.982,30	13.274,3

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

3.4 Analisis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

3.4.1 Analisis Kinerja PSU

Untuk menilai kinerja PSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dengan menghitung seberapa besar tingkat pelayanan PSU terhadap penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sarana pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sangat merata di masing-masing kecamatan namun tingkat pelayanannya belum terpenuhi. Berikut adalah tingkat pelayanan sarana pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 3.11 Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan				Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan (%)			
		SD	SM P	SMA / SMK	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA/ SMK	Perguruan Tinggi
A	Kabupaten Bangka	176	60	39	4	84,22	86,14	55,99	83,75
1	Mendo barat	34	12	7	1	103,82	109,93	64,12	
2	Merawang	23	5	5	1	117,37	76,55	76,55	
3	Puding Besar	11	6	3		88,44	144,72	72,36	
4	Sungailiat	34	13	12	2	57,15	65,56	60,52	
5	Pemali	15	5	2		67,48	67,48	26,99	
6	Bakam	13	5	2		106,61	123,01	49,21	
7	Belinyu	28	9	6		87,09	83,98	55,98	
8	Riau Silip	18	5	2		99,34	82,78	33,11	
B	Kabupaten Bangka Tengah	105	35	20	-	81,75	81,75	46,71	-
1	Koba	20	7	4		72,16	75,77	43,30	
2	Lubuk Besar	19	4	2		94,47	59,66	29,83	
3	Pangkalan Baru	20	6	5		67,30	60,57	50,48	
4	Namang	10	4	2		91,99	110,39	55,19	
5	Sungai Selan	24	9	5		103,05	115,93	64,41	
6	Simpang Katis	12	5	2		71,69	89,61	35,84	
C	Kabupaten Bangka Selatan	101	44	23	-	79,90	104,42	54,58	-
1	Payung	14	6	2		104,98	134,98	44,99	
2	Pulau Besar	8	3	3		134,35	151,15	151,15	
3	Simpang Rimba	12	5	3		78,89	98,61	59,17	
4	Toboali	36	15	8		73,10	91,37	48,73	
5	Tukak Sadai	6	3	1		73,56	110,34	36,78	
6	Air Gegas	17	8	4		63,68	89,90	44,95	

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan				Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan (%)			
		SD	SMP	SMA / SMK	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA / SMK	Perguruan Tinggi
7	Lepar Pongok	5	3	1		98,51	177,3 ₂	59,11	
8	Kepulauan Pongok	3	1	1		109,7 ₁	109,7 ₁	109,7 ₁	
D	Kabupaten Bangka Barat	142	48	25	-	108,30	109,82	57,20	-
1	Kelapa	28	7	3		126,3 ₃	94,75	40,61	
2	Tempilang	22	8	4		121,0 ₅	132,0 ₅	66,02	
3	Muntok	30	11	7		88,50	97,35	61,95	
4	Simpang Teritip	20	11	5		101,5 ₃	167,5 ₂	76,15	
5	Jebus	18	5	2		124,1 ₈	103,4 ₈	41,39	
6	Parittiga	24	6	4		105,7 ₉	79,34	52,90	
E	Kota Pangkal Pinang	100	32	21	4	70,70	67,88	44,54	123,73
1	Rangkui	17	5	6		73,58	64,93	77,91	
2	Bukit Intan	15	6	6	1	56,07	67,28	67,28	
3	Girimaya	13	5	3		110,8 ₂	127,8 ₆	76,72	
4	Pangkalbalam	11	2	2		76,77	41,88	41,88	
5	Gabek	15	4	-	1	66,21	52,96	-	
6	Tamansari	8	2	2	1	66,92	50,19	50,19	
7	Gerunggang	21	8	2	1	67,94	77,65	19,41	
F	Kabupaten Belitung	122	31	17	3	104,76	79,86	43,79	112,70
1	Membalong	31	6	1		180,6 ₃	104,8 ₈	17,48	
2	Tanjungpandan	45	15	11	3	68,27	68,27	50,06	
3	Badau	17	3	1		175,2 ₄	92,77	30,92	
4	Sijuk	22	5	3		109,7 ₅	74,83	44,90	
5	Selat Nasik	7	2	1		192,8 ₇	165,3 ₂	82,66	
G	Kabupaten Belitung Timur	105	25	14	-	128,77	91,98	51,51	-
1	Dendang	10	2	1		141,5 ₂	84,91	42,46	
2	Simpang Pesak	10	2	1		184,6 ₉	110,8 ₂	55,41	
3	Gantung	20	5	2		109,9 ₀	82,42	32,97	

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan				Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan (%)			
		SD	SM P	SMA / SMK	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA/ SMK	Perguruan Tinggi
4	Simpang Renggang	8	2	1		165,89	124,42	62,21	
5	Manggar	31	7	6		123,40	83,59	71,65	
6	Damar	9	2	1		106,10	70,73	35,37	
7	Kelapa Kampit	17	5	2		136,74	120,65	48,26	
	Prov. Kep. Bangka Belitung	851	275	159	11	91,08	88,29	51,05	51,51

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Tingkat pelayanan sarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12Tingkat Pelayanan Sarana Kesehatan Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jumlah Sarana Kesehatan					Tingkat Pelayanan Sarana Kesehatan (%)				
		Rumah Sakit	Puskes mas	Puskesmas Pembantu	Klinik Bersalin	Poliklinik	Rumah Sakit	Puskes mas	Puskesmas Pembantu	Klinik Bersalin	Poliklinik
A	Kabupaten Bangka	6	12	38	0	9	430,69	430,69	340,97	-	323,02
1	Mendo barat	0	2	7	0	1		458,02	400,77	-	229,01
2	Merawang	1	1	2	0	2		382,73	191,36	-	765,45
3	Puding Besar	1	1	5	0	0		603,02	753,77	-	-
4	Sungailiat	3	3	6	0	4		378,22	189,11	-	504,29
5	Pemali	0	1	2	0	0		337,42	168,71	-	-
6	Bakam	0	1	4	0	0		615,07	615,07	-	-
7	Belinyu	1	2	5	0	2		466,54	291,58	-	466,54
8	Riau Silip	0	1	7	0	0		413,92	724,36	-	-
B	Kabupaten Bangka Tengah	4	9	1	0	3	467,13	525,52	14,60	-	175,17
1	Koba	1	1	0	0	0		270,61	-	-	-
2	Lubuk Besar	0	2	0	0	0		745,78	-	-	-
3	Pangkalan Baru	2	2	1	0	2		504,77	63,10	-	504,77
4	Namang	1	1	0	0	0		689,93	-	-	-
5	Sungai Selan	0	2	0	0	0		644,07	-	-	-
6	Simpang Katis	0	1	0	0	1		448,06	-	-	448,06
C	Kabupaten Bangka Selatan	2	10	29	0	4	237,31	593,29	430,13	-	237,31
1	Payung	1	1	5	0	0		562,40	703,00	-	-
2	Pulau Besar	0	1	4	0	0		1.259,58	1.259,58	-	-
3	Simpang Rimba	0	1	5	0	1		493,06	616,32	-	493,06
4	Toboali	1	2	5	0	2		304,57	190,36	-	304,57
5	Tukak Sadai	0	1	0	0	0		919,54	-	-	-
6	Air Gegas	0	2	8	0	1		561,85	561,85	-	280,93
7	Lepar Pongok	0	1	2	0	0		1.477,65	738,83	-	-
8	Kepulauan Pongok	0	1	0	0	0		2.742,86	-	-	-

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jumlah Sarana Kesehatan					Tingkat Pelayanan Sarana Kesehatan (%)				
		Rumah Sakit	Puskes mas	Puskesmas Pembantu	Klinik Bersalin	Poliklinik	Rumah Sakit	Puskes mas	Puskesmas Pembantu	Klinik Bersalin	Poliklinik
D	Kabupaten Bangka Barat	3	8	29	0	12	343,20	457,60	414,70	-	686,40
1	Kelapa	0	1	17	0	1		338,38	1.438,12	-	338,38
2	Tempilang	0	1	2	0	0		412,65	206,33	-	-
3	Muntok	2	1	2	0	9		221,24	110,62	-	1.991,19
4	Simpang Teritip	0	2	3	0	1		761,47	285,55	-	380,73
5	Jebus	0	1	2	0	0		517,40	258,70	-	-
6	Parittiga	1	2	3	0	1		661,19	247,95	-	330,60
E	Kota Pangkal Pinang	4	9	22	3	12	424,22	477,25	291,65	39,77	636,33
1	Rangkui	1	1	5	0	3		324,63	405,79	-	973,89
2	Bukit Intan	0	2	3	1	4		560,68	210,26	70,09	1.121,36
3	Girimaya	2	1	1	0	1		639,32	159,83	-	639,32
4	Pangkalbalam	0	1	4	0	1		523,45	523,45	-	523,45
5	Gabek	0	1	4	0	1		331,03	331,03	-	331,03
6	Tamansari	0	2	1	1	2		1.254,84	156,85	156,85	1.254,84
7	Gerunggang	1	1	4	1	0		242,64	242,64	60,66	-
F	Kabupaten Belitung	3	9	31	0	6	386,41	579,61	499,11	-	386,41
1	Membalong	0	2	10	0	1		874,00	1.092,50	-	437,00
2	Tanjungpandan	3	3	8	0	5		341,34	227,56	-	568,89
3	Badau	0	1	5	0	0		773,10	966,37	-	-
4	Sijuk	0	2	6	0	0		748,27	561,20	-	-
5	Selat Nasik		1	2	0	0		2.066,47	1.033,24	-	-
G	Kabupaten Belitung Timur	1	7	0	0	6	183,96	643,86	-	-	551,88
1	Dendang	0	1	0	0	1		1.061,38	-	-	1.061,38
2	Simpang Pesak	0	1	0	0	0		1.385,20	-	-	-
3	Gantung	0	1	0	0	0		412,12	-	-	-
4	Simpang Renggiang	0	1	0	0	0		1.555,21	-	-	-
5	Manggar	1	1	0	0	4		298,54	-	-	1.194,15
6	Damar	0	1	0	0	0		884,17	-	-	-
7	Kelapa Kampit	0	1	0	0	1		603,26	-	-	603,26

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jumlah Sarana Kesehatan					Tingkat Pelayanan Sarana Kesehatan (%)				
		Rumah Sakit	Puskes mas	Puskesmas Pembantu	Klinik Bersalin	Poliklinik	Rumah Sakit	Puskes mas	Puskesmas Pembantu	Klinik Bersalin	Poliklinik
	Prov. Kep. Bangka Belitung	23	64	150	3	52	369,23	513,71	301,00	6	417,39

3.4.2 Analisis Kebutuhan PSU

1) Sarana Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Perhitungan proyeksi jumlah fasilitas pendidikan dilakukan untuk mengetahui apakah fasilitas pendidikan yang tersedia di kawasan perencanaan dari segi jumlah sudah mencukupi untuk jangka waktu yang akan datang atau harus ada penambahan jumlah fasilitas pendidikan, serta menentukan berapa banyak jumlah yang harus ditambah. Untuk memproyeksikan kebutuhan jumlah fasilitas pendidikan dan luas lahan fasilitas pendidikan dihitung menggunakan standar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan, yaitu :

- Fasilitas pendidikan Taman Kanak-kanak dengan standar jumlah penduduk pendukung sebesar 1.250 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 200 m²/unit.
- Fasilitas pendidikan Sekolah Dasar dengan standar jumlah penduduk pendukung sebesar 1.600 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 2.000 m²/unit.
- Fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah penduduk pendukung sebesar 4.800 jiwa/unit dengan luas lahan 9.000 m²/unit.
- Fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas serta sederajat dengan jumlah penduduk pendukung sebesar 4.800 jiwa/unit dengan luas lahan 12.500 m²/unit.

Berdasarkan standar kebutuhan fasilitas pendidikan diatas, maka proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Analisa Kebutuhan Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Standar

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Analisis Kebutuhan Jumlah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Standar (unit)											
		Tahun 2028				Tahun 2033				Tahun 2038			
		SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
A	Kabupaten Bangka	220	73	73	5	230	77	77	5	239	80	80	6
1	Mendo barat	35	12	12		37	12	12		39	13	13	
2	Merawang	21	7	7		21	7	7		22	7	7	
3	Puding Besar	14	5	5		15	5	5		16	5	5	
4	Sungailiat	61	20	20		61	20	20		62	21	21	
5	Pemali	27	9	9		30	10	10		34	11	11	
6	Bakam	13	4	4		13	4	4		13	4	4	
7	Belinyu	33	11	11		33	11	11		34	11	11	
8	Riau Silip	18	6	6		18	6	6		19	6	6	
B	Kabupaten Bangka Tengah	147	49	49	3	162	54	54	4	178	59	59	4
1	Koba	33	11	11		38	13	13		42	14	14	
2	Lubuk Besar	25	8	8		28	9	9		32	11	11	
3	Pangkalan Baru	33	11	11		35	12	12		38	13	13	
4	Namang	13	4	4		15	5	5		16	5	5	
5	Sungai Selan	26	9	9		28	9	9		31	10	10	
6	Simpang Katis	18	6	6		18	6	6		19	6	6	
C	Kabupaten Bangka Selatan	134	45	45	3	139	46	46	3	145	48	48	3
1	Payung	14	5	5		15	5	5		15	5	5	
2	Pulau Besar	7	2	2		8	3	3		9	3	3	
3	Simpang Rimba	16	5	5		17	6	6		17	6	6	
4	Toboali	52	17	17		54	18	18		56	19	19	
5	Tukak Sadai	9	3	3		9	3	3		9	3	3	
6	Air Gegas	28	9	9		29	10	10		30	10	10	
7	Lepar Pongok	5	2	2		6	2	2		6	2	2	
8	Kepulauan Pongok	3	1	1		3	1	1		3	1	1	
D	Kabupaten Bangka Barat	137	46	46	3	142	47	47	3	147	49	49	3
1	Kelapa	24	8	8		25	8	8		26	9	9	
2	Tempilang	20	7	7		22	7	7		24	8	8	
3	Muntok	34	11	11		35	12	12		35	12	12	
4	Simpang Teritip	21	7	7		22	7	7		23	8	8	
5	Jebus	15	5	5		16	5	5		16	5	5	
6	Parittiga	23	8	8		23	8	8		23	8	8	
E	Kota Pangkal Pinang	179	60	60	4	210	70	70	5	241	80	80	6
1	Rangkui	26	9	9		28	9	9		31	10	10	
2	Bukit Intan	31	10	10		35	12	12		39	13	13	
3	Girimaya	13	4	4		14	5	5		16	5	5	
4	Pangkalbalam	15	5	5		15	5	5		15	5	5	
5	Gabek	34	11	11		44	15	15		54	18	18	
6	Tamansari	13	4	4		15	5	5		16	5	5	
7	Gerunggang	46	15	15		58	19	19		71	24	24	
F	Kabupaten Belitung	119	40	40	3	121	40	40	3	123	41	41	3
1	Membalong	17	6	6		17	6	6		17	6	6	
2	Tanjungpandan	68	23	23		70	23	23		71	24	24	
3	Badau	10	3	3		10	3	3		10	3	3	
4	Sujuk	20	7	7		20	7	7		20	7	7	
5	Selat Nasik	4	1	1		4	1	1		4	1	1	
G	Kabupaten Belitung Timur	87	29	29	2	92	31	31	2	97	32	32	2
1	Dandang	8	3	3		8	3	3		9	3	3	
2	Simpang Pesak	6	2	2		6	2	2		7	2	2	
3	Gantung	20	7	7		21	7	7		22	7	7	
4	Simpang Renggang	5	2	2		5	2	2		6	2	2	
5	Manggar	26	9	9		27	9	9		28	9	9	
6	Damar	9	3	3		9	3	3		9	3	3	
7	Kelapa Kampit	14	5	5		15	5	5		16	5	5	
	Prov. Kep. Bangka Belitung	1.023	342	342	23	1.096	365	365	25	1.170	389	389	27

Tabel 3.14 Analisa Kebutuhan Tambahan Sarana Pendidikan

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Analisis Kebutuhan Tambahan Fasilitas Pendidikan (unit)															
		Tahun 2028				Tahun 2033				Tahun 2038				Tahun 2043			
		SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
A	Kabupaten Bangka	44	13	34		54	17	38		63	20	41		73	23	44	
1	Mendo barat	1	-	-	5	3	-	-	5	5	1	6	7	7	2	-	7
2	Merawang	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	-	-	3	-	3
3	Puding Besar	3	-	-	2	4	-	-	2	5	-	2	6	-	-	-	3
4	Sungailiat	27	7	-	8	27	7	-	8	28	8	9	29	8	-	-	9
5	Pemali	12	4	-	7	15	5	-	8	19	6	9	22	7	-	-	10
6	Bakam	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	3
7	Belinyu	5	2	-	5	5	2	-	5	6	2	5	6	2	-	-	5
8	Riau Sili	-	1	-	4	-	1	-	4	1	1	4	1	1	-	-	4
B	Kabupaten Bangka Tengah	42	14	29		57	19	34		73	24	39		88	29	44	
1	Koba	13	4	-	7	18	6	-	9	22	7	10	27	9	-	-	12
2	Lubuk Besar	6	4	-	6	9	5	-	7	13	7	9	17	8	-	-	10
3	Pangkalan Baru	13	5	-	6	15	6	-	7	18	7	8	20	7	-	-	8
4	Namang	3	-	-	2	5	1	-	3	6	1	3	8	2	-	-	4
5	Sungai Selan	2	-	-	4	4	-	-	4	7	1	5	9	2	-	-	6
6	Simpang Katis	6	1	-	4	6	1	-	4	7	1	4	8	2	-	-	5
C	Kabupaten Bangka Selatan	33	-	22		38	2	23		44	4	25		50	6	27	
1	Payung	-	-	-	3	1	-	-	3	1	-	3	2	-	-	-	3
2	Pulau Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
3	Simpang Rimba	4	-	-	2	5	1	-	3	5	1	3	6	1	-	-	3
4	Toboali	16	2	-	9	18	3	-	10	20	4	11	22	4	-	-	11
5	Tukak Sadai	3	-	-	2	3	-	-	2	3	-	2	4	-	-	-	2
6	Air Gegas	11	1	-	5	12	2	-	6	13	2	6	14	2	-	-	6
7	Lepar Pongok	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1
8	Kepulauan Pongok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Kabupaten Bangka Barat	-	-	21		-	-	22		-	-	24		-	-	26	
1	Kelapa	-	1	-	5	-	1	-	5	-	2	6	-	2	-	-	6
2	Tempilang	-	-	-	3	-	-	-	3	2	-	4	4	1	-	-	5
3	Muntok	4	-	-	4	5	1	-	5	5	1	5	5	1	-	-	5
4	Simpang Teritip	1	-	-	2	2	-	-	2	3	-	3	4	-	-	-	3
5	Jebus	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	3	-	1	-	-	4
6	Paritiga	-	2	-	4	-	2	-	4	-	2	4	-	2	-	-	4
E	Kota Pangkal Pinang	79	28	39		110	38	49		141	48	59		173	59	70	
1	Rangkui	9	4	-	3	11	4	-	3	14	5	4	16	6	-	-	5
2	Bukit Intan	16	4	-	4	20	6	-	6	24	7	7	28	8	-	-	8
3	Girimaya	-	-	-	1	1	-	-	2	3	-	2	4	1	-	-	3
4	Pangkalbalam	4	3	-	3	4	3	-	3	4	3	3	4	3	-	-	3
5	Gabek	19	7	-	11	29	11	-	15	39	14	18	49	17	-	-	21
6	Tamansari	5	2	-	2	7	3	-	3	8	3	3	9	4	-	-	4
7	Gerunggang	25	7	-	13	37	11	-	17	50	16	22	63	20	-	-	26
F	Kabupaten Belitung	-	9	23		-	9	23		-	10	24		-	11	25	
1	Membalong	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	5
2	Tanjungpandan	23	8	-	12	25	8	-	12	26	9	13	28	9	-	-	13
3	Badau	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2
4	Sujuk	-	2	-	4	-	2	-	4	-	2	4	-	2	-	-	4
5	Selat Nasik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G	Kabupaten Belitung Timur	-	4	15		-	6	17		-	7	18		-	9	20	
1	Dendang	-	1	-	2	-	1	-	2	-	1	2	-	1	-	-	2
2	Simpang Pesak	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Gantung	-	2	-	5	1	2	-	5	2	2	5	3	3	-	-	6
4	Simpang Renggang	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
5	Manggar	-	2	-	3	-	2	-	3	-	2	3	-	3	-	-	4
6	Damar	-	1	-	2	-	1	-	2	-	1	2	-	1	-	-	2
7	Kelapa Kampit	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	3	1	1	-	-	4
	Prov. Kep. Bangka Belitung	198	68	183	12	259	91	206	14	321	113	230	16	384	137	256	16

Tabel 3.15 Analisa Kebutuhan Luas Lahan Sarana Pendidikan

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Analisis Kebutuhan Luas Lahan Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Standar (Ha)															
		Tahun 2028				Tahun 2033				Tahun 2038				Tahun 2043			
		SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
A	Kabupaten Bangka	8,80	11,70	42,50	1,00	10,80	15,30	47,50	1,00	12,60	18,00	51,25	2,00	14,60	20,70	55,00	2,00
1	Merendo Barat	0,20	-	6,25		0,60	-	6,25		1,00	0,90	7,50		1,40	1,80	8,75	
2	Merawang	-	1,80	2,50		-	1,80	2,50		-	1,80	2,50		-	2,70	3,75	
3	Puding Besar	0,60	-	2,50		0,80	-	2,50		1,00	-	2,50		1,20	-	3,75	
4	Sungailiat	5,40	6,30	10,00		5,40	6,30	10,00		5,60	7,20	11,25		5,80	7,20	11,25	
5	Pemali	2,40	3,60	8,75		3,00	4,50	10,00		3,80	5,40	11,25		4,40	6,30	12,50	
6	Bakam	-	-	2,50		-	-	2,50		-	-	2,50		0,20	-	3,75	
7	Belinyu	1,00	1,80	6,25		1,00	1,80	6,25		1,20	1,80	6,25		1,20	1,80	6,25	
8	Riau Selip	-	0,90	5,00		-	0,90	5,00		0,20	0,90	5,00		0,20	0,90	5,00	
B	Kabupaten Bangka Tengah	8,40	12,60	36,25	3,00	11,40	17,10	42,50	4,00	14,60	21,60	48,75	4,00	17,60	26,10	55,00	4,00
1	Koba	2,60	3,60	8,75		3,60	5,40	11,25		4,40	6,30	12,50		5,40	8,10	15,00	
2	Lubuk Besar	1,20	3,60	7,50		1,80	4,50	8,75		2,60	6,30	11,25		3,40	7,20	12,50	
3	Pangkalan Baru	2,60	4,50	7,50		3,00	5,40	8,75		3,60	6,30	10,00		4,00	6,30	10,00	
4	Namang	0,60	-	2,50		1,00	0,90	3,75		1,20	0,90	3,75		1,60	1,80	5,00	
5	Sungai Selan	0,40	-	5,00		0,80	-	5,00		1,40	0,90	6,25		1,80	1,80	7,50	
6	Simpang Katis	1,20	0,90	5,00		1,20	0,90	5,00		1,40	0,90	5,00		1,60	1,80	6,25	
C	Kabupaten Bangka Selatan	6,60	-	27,50	3,00	7,60	1,80	28,75	3,00	8,80	3,60	31,25	3,00	10,00	5,40	33,75	3,00
1	Payung	-	-	3,75		0,20	-	3,75		0,20	-	3,75		0,40	-	3,75	
2	Pulau Besar	-	-	-		-	-	-		0,20	-	-		0,40	-	-	
3	Simpang Rimba	0,80	-	2,50		1,00	0,90	3,75		1,00	0,90	3,75		1,20	0,90	3,75	
4	Toboali	3,20	1,80	11,25		3,60	2,70	12,50		4,00	3,60	13,75		4,40	3,60	13,75	
5	Tukak Sadai	0,60	-	2,50		0,60	-	2,50		0,60	-	2,50		0,80	-	2,50	
6	Air Gegas	2,20	0,90	6,25		2,40	1,80	7,50		2,60	1,80	7,50		2,80	1,80	7,50	
7	Lepar Pongok	-	-	1,25		0,20	-	1,25		0,20	-	1,25		0,20	-	1,25	
8	Kepulauan Pongok	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
D	Kabupaten Bangka Barat	-	-	26,25	3,00	-	-	27,50	3,00	-	-	30,00	3,00	-	-	32,50	3,00
1	Kelapa	-	0,90	6,25		-	0,90	6,25		-	1,80	7,50		-	1,80	7,50	
2	Tempilang	-	-	3,75		-	-	3,75		0,40	-	5,00		0,80	0,90	6,25	
3	Muntok	0,80	-	5,00		1,00	0,90	6,25		1,00	0,90	6,25		1,00	0,90	6,25	
4	Simpang Teritip	0,20	-	2,50		0,40	-	2,50		0,60	-	3,75		0,80	-	3,75	
5	Jebus	-	-	3,75		-	-	3,75		-	-	3,75		-	0,90	5,00	
6	Paritiga	-	1,80	5,00		-	1,80	5,00		-	1,80	5,00		-	1,80	5,00	
E	Kota Pangkal Pinang	15,80	25,20	48,75	0,00	22,00	34,20	61,25	1,00	28,20	43,20	73,75	2,00	34,60	53,10	87,50	2,00
1	Rangkui	1,80	3,60	3,75		2,20	3,60	3,75		2,80	4,50	5,00		3,20	5,40	6,25	
2	Bukit Intan	3,20	3,60	5,00		4,00	5,40	7,50		4,80	6,30	8,75		5,60	7,20	10,00	
3	Girimaya	-	-	1,25		0,20	-	2,50		0,60	-	2,50		0,80	0,90	3,75	
4	Pangkalbalam	0,80	2,70	3,75		0,80	2,70	3,75		0,80	2,70	3,75		0,80	2,70	3,75	
5	Gabek	3,80	6,30	13,75		5,80	9,90	18,75		7,80	12,60	22,50		9,80	15,30	26,25	
6	Tamansari	1,00	1,80	2,50		1,40	2,70	3,75		1,60	2,70	3,75		1,80	3,60	5,00	
7	Gerunggang	5,00	6,30	16,25		7,40	9,90	21,25		10,00	14,40	27,50		12,60	18,00	32,50	
F	Kabupaten Belitung	-	8,10	28,75	0,00	-	8,10	28,75	0,00	-	9,00	30,00	0,00	-	9,90	31,25	0,00
1	Membalong	-	-	6,25		-	-	6,25		-	-	6,25		-	-	6,25	
2	Tanjungpandan	4,60	7,20	15,00		5,00	7,20	15,00		5,20	8,10	16,25		5,60	8,10	16,25	
3	Badau	-	-	2,50		-	-	2,50		-	-	2,50		-	-	2,50	
4	Sujuk	-	1,80	5,00		-	1,80	5,00		-	1,80	5,00		-	1,80	5,00	
5	Selat Nasik	-	-	-		-	-	-		-	0,90	-		-	-	-	
G	Kabupaten Belitung Timur	-	3,60	18,75	2,00	-	5,40	21,25	2,00	-	6,30	22,50	2,00	-	8,10	25,00	2,00
1	Dendang	-	0,90	2,50		-	0,90	2,50		-	0,90	2,50		-	0,90	2,50	
2	Simpang Pesak	-	-	1,25		-	-	1,25		-	-	1,25		-	-	1,25	
3	Gantung	-	1,80	6,25		0,20	1,80	6,25		0,40	1,80	6,25		0,60	2,70	7,50	
4	Simpang Renggang	-	-	1,25		-	-	1,25		-	-	1,25		-	-	1,25	
5	Manggar	-	1,80	3,75		-	1,80	3,75		-	1,80	3,75		-	2,70	5,00	
6	Damar	-	0,90	2,50		-	0,90	2,50		-	0,90	2,50		-	0,90	2,50	
7	Kelapa Kampit	-	-	3,75		-	-	3,75		-	-	3,75		0,20	0,90	5,00	
	Prov. Kep. Bangka Belitung	39,60	61,20	228,75	12,00	51,80	81,90	257,50	14,00	64,20	101,70	287,50	16,00	76,80	123,30	320,00	16,00

2) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan pada jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dalam mengukur tingkat pelayanan eksisting sarana kesehatan, digunakan adalah SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan di Perkotaan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.16 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan

Jenis Sarana		Posyandu	Balai Pengobatan Warga	BKIA/ Klinik Bersalin	Pustu dan BP Lingkungan	Puskesmas dan BP	Tempat Praktek Dokter	Apotek/ Rumah Obat
Jumlah penduduk pedukung (jiwa)		1.250	2.500	30.000	30.000	120.000	5.000	30.000
Kebutuhan Per Satuan Sarana	Luas Lantai Min (m2)	36	150		150	420	18	120
	Luas Lahan Maks (m2)	60	300	1.500	150	420	18	120
Standard (m2/ jiwa)		0,048	0,12	0,1	0,006	0,008	-	0,025
Kriteria	Radius pencapaian (m)	500	1.000	4.000	15.000	3.000	1.500	1.500
	Lokasi dan penyelesaian	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum				
Keterangan		Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/ rumah	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan	Dapat bersatu dengan rumah tangga/ tempat usaha/ apotk	

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan di Perkotaan

Adapun Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Analisis Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Standar

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Analisis Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Standar (unit)																			
		Tahun 2028					Tahun 2033					Tahun 2038					Tahun 2043				
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BKIA/ Klinik Bersalin	Poliklinik	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BKIA/ Klinik Bersalin	Poliklinik	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BKIA/ Klinik Bersalin	Poliklinik	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BKIA/ Klinik Bersalin	Poliklinik
A	Kabupaten Bangka	1	8	12	12	1	2	8	13	13	1	2	8	13	13	2	2	8	13	13	2
1	Mendo barat		1	2	2	0		1	2	2	0		1	2	2	1		1	2	2	1
2	Merawang		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
3	Puding Besar		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
4	Sungailiat		1	3	3	1		1	3	3	1		1	3	3	1		1	3	3	1
5	Pemali		1	1	1	0		1	2	2	0		1	2	2	0		1	2	2	0
6	Bakam		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
7	Belinyu		1	2	2	0		1	2	2	0		1	2	2	0		1	2	2	0
8	Riau Sili		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
B	Kabupaten Bangka Tengah	1	6	8	8	0	1	6	10	10	1	1	6	10	10	2	1	6	10	10	2
1	Koba		1	2	2	0		1	2	2	1		1	2	2	1		1	2	2	1
2	Lubuk Besar		1	1	1	0		1	2	2	0		1	2	2	0		1	2	2	0
3	Pangkalan Baru		1	2	2	0		1	2	2	0		1	2	2	1		1	2	2	1
4	Namang		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
5	Sungai Selan		1	1	1	0		1	2	2	0		1	2	2	0		1	2	2	0
6	Simpang Katis		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
C	Kabupaten Bangka Selatan	1	8	6	6	1	1	8	7	7	1	1	8	7	7	1	1	8	9	9	1
1	Payung		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
2	Pulau Besar		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0		1	1	1	0
3	Simpang Rimba		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
4	Toboali		1	3	3	1		1	3	3	1		1	3	3	1		1	3	3	1
5	Tukak Sadai		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0		1	1	1	0
6	Air Gegas		1	1	1	0		1	2	2	0		1	2	2	0		1	2	2	0
7	Lepar Pongok		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0
8	Kepulauan Pongok		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0
D	Kabupaten Bangka Barat	1	6	7	7	0	1	6	7	7	0	1	6	7	7	0	1	6	7	7	0
1	Kelapa		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
2	Tempilang		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
3	Muntok		1	2	2	0		1	2	2	0		1	2	2	0		1	2	2	0
4	Simpang Teritip		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
5	Jebus		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
6	Paritiga		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
E	Kota Pangkal Pinang	1	7	10	10	1	1	7	12	12	2	2	7	14	14	3	2	7	14	14	3
1	Rangkui		1	1	1	0		1	2	2	0		1	2	2	0		1	2	2	0
2	Bukit Intan		1	2	2	0		1	2	2	0		1	2	2	1		1	2	2	1
3	Girimaya		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
4	Pangkalbalam		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
5	Gabek		1	2	2	0		1	2	2	1		1	3	3	1		1	3	3	1
6	Tamansari		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
7	Gerunggang		1	2	2	1		1	3	3	1		1	4	4	1		1	4	4	1
F	Kabupaten Belitung	1	5	7	7	1	1	5	7	7	1	1	5	7	7	1	1	5	7	7	1
1	Membalong		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
2	Tanjungpandan		1	4	4	1		1	4	4	1		1	4	4	1		1	4	4	1
3	Badau		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
4	Sijuk		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
5	Selat Nasik		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0
G	Kabupaten Belitung Timur	1	7	3	3	0	1	7	3	3	0	1	7	3	3	0	1	7	5	5	0
1	Dendang		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0
2	Simpang Pesak		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0
3	Gantung		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
4	Simpang Renggang		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0
5	Manggar		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	2	2	0
6	Damar		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0		1	1	1	0
7	Kelapa Kampit		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0		1	1	1	0
	Prov. Kep. Bangka Belitung	7	47	53	53	4	8	47	59	59	6	9	47	61	61	9	9	47	65	65	9

Tabel 3.18 Analisis Kebutuhan Tambahan Fasilitas Kesehatan

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Analisis Kebutuhan Tambahan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Standar (unit)																				
		Tahun 2028					Tahun 2033					Tahun 2038					Tahun 2043					
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BKIA/ Klinik Bersalin	Poliklinik	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BKIA/ Klinik Bersalin	Poliklinik	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BKIA/ Klinik Bersalin	Poliklinik	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BKIA/ Klinik Bersalin	Poliklinik	
A	Kabupaten Bangka	0	0	0	12	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13	0	
1	Mendo barat		0	0	2	0		0	0	2	0		0	0	2	0		0	0	2	0	
2	Merawang		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
3	Puding Besar		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
4	Sungailiat		0	0	3	0		0	0	3	0		0	0	3	0		0	0	3	0	
5	Pemali		0	0	1	0		0	0	2	0		0	0	2	0		0	0	2	0	
6	Bakam		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
7	Belinyu		0	0	2	0		0	0	2	0		0	0	2	0		0	0	2	0	
8	Riau Sili	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0					
B	Kabupaten Bangka Tengah	0	0	7	8	0	0	0	9	10	0	0	0	9	10	0	0	0	9	10	0	
1	Koba		0	2	2	0		0	2	2	1		0	2	2	1		0	2	2	1	
2	Lubuk Besar		0	1	1	0		0	2	2	0		0	2	2	0		0	2	2	0	
3	Pangkalan Baru		0	1	2	0		0	1	2	0		0	1	2	0		0	1	2	0	
4	Namang		0	1	1	0		0	1	1	0		0	1	1	0		0	1	1	0	
5	Sungai Selan		0	1	1	0		0	2	2	0		0	2	2	0		0	2	2	0	
6	Simpang Katis	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0					
C	Kabupaten Bangka Selatan	0	0	0	6	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	9	0	
1	Payung		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
2	Pulau Besar		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	1	0
3	Simpang Rimba		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
4	Toboali		0	0	3	0		0	0	3	0		0	0	3	0		0	0	3	0	
5	Tukak Sadai		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	1	1	0
6	Air Gegas		0	0	1	0		0	0	2	0		0	0	2	0		0	0	2	0	
7	Lepar Pongok		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
8	Kepulauan Pongok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D	Kabupaten Bangka Barat	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	
1	Kelapa		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
2	Tempilang		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
3	Muntok		0	0	2	0		0	0	2	0		0	0	2	0		0	0	2	0	
4	Simpang Teritip		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
5	Jebus		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
6	Paritiga	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0					
E	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	7	1	0	0	0	9	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	
1	Rangkui		0	0	1	0		0	0	2	0		0	0	2	0		0	0	2	0	
2	Bukit Intan		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
3	Girimaya		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
4	Pangkalbalam		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
5	Gabek		0	0	2	0		0	0	2	0		0	0	3	0		0	0	3	0	
6	Tamansari		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
7	Gerunggang	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	3	1	0	0	3	1					
F	Kabupaten Belitung	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	
1	Membalong		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
2	Tanjungpandan		0	0	4	0		0	0	4	0		0	0	4	0		0	0	4	0	
3	Badau		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
4	Sijuk		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
5	Selat Nasik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
G	Kabupaten Belitung Timur	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	5	5	0	
1	Dendang		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2	Simpang Pesak		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
3	Gantung		0	1	1	0		0	1	1	0		0	1	1	0		0	1	1	0	
4	Simpang Renggang		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
5	Manggar		0	1	1	0		0	1	1	0		0	1	1	0		0	2	2	0	
6	Damar		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	1	1	0	
7	Kelapa Kampit	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0					
	Prov. Kep. Bangka Belitung	0	0	10	50	1	0	0	12	56	0	0	0	12	58	0	0	0	14	62	0	

Tabel 3.19 Analisis Kebutuhan Lahan Fasilitas Kesehatan

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Analisis Kebutuhan Luas Lahan Fasilitas Kesehatan (Ha)														
		Tahun 2028					Tahun 2033					Tahun 2038				
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BKIA/ Klinik Bersalin	Poliklinik	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BKIA/ Klinik Bersalin	Poliklinik	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BKIA/ Klinik Bersalin	Poliklinik
A	Kabupaten Bangka		-	-	1,92	-		-	-	2,08	-		-	-	2,08	-
1	Mendo barat		-	-	0,32	-		-	-	0,32	-		-	-	0,32	-
2	Merawang		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
3	Puding Besar		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
4	Sungailiat		-	-	0,48	-		-	-	0,48	-		-	-	0,48	-
5	Pemali		-	-	0,16	-		-	-	0,32	-		-	-	0,32	-
6	Bakam		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
7	Belinyu		-	-	0,32	-		-	-	0,32	-		-	-	0,32	-
8	Riau Sili		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
B	Kabupaten Bangka Tengah		-	0,84	1,28	-		-	1,08	1,60	-		-	1,08	1,60	-
1	Koba		-	0,24	0,32	-		-	0,24	0,32	0,01		-	0,24	0,32	0,01
2	Lubuk Besar		-	0,12	0,16	-		-	0,24	0,32	-		-	0,24	0,32	-
3	Pangkalan Baru		-	0,12	0,32	-		-	0,12	0,32	-		-	0,12	0,32	-
4	Namang		-	0,12	0,16	-		-	0,12	0,16	-		-	0,12	0,16	-
5	Sungai Selan		-	0,12	0,16	-		-	0,24	0,32	-		-	0,24	0,32	-
6	Simpang Katis		-	0,12	0,16	-		-	0,12	0,16	-		-	0,12	0,16	-
C	Kabupaten Bangka Selatan		-	-	0,96	-		-	-	1,12	-		-	-	1,44	-
1	Payung		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
2	Pulau Besar		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	0,16	-
3	Simpang Rimba		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
4	Toboali		-	-	0,48	-		-	-	0,48	-		-	-	0,48	-
5	Tukak Sadai		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	0,12	0,16
6	Air Gegas		-	-	0,16	-		-	-	0,32	-		-	-	0,32	-
7	Lepar Pongok		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
8	Kepulauan Pongok		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
D	Kabupaten Bangka Barat		-	-	1,12	-		-	-	1,12	-		-	-	1,12	-
1	Kelapa		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
2	Tempilang		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
3	Muntok		-	-	0,32	-		-	-	0,32	-		-	-	0,32	-
4	Simpang Teritip		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
5	Jebus		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
6	Paritiga		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
E	Kota Pangkal Pinang		-	-	1,12	0,01		-	-	1,44	-		-	-	1,76	-
1	Rangkui		-	-	0,16	-		-	-	0,32	-		-	-	0,32	-
2	Bukit Intan		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
3	Girimaya		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
4	Pangkalbalam		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
5	Gabek		-	-	0,32	-		-	-	0,32	-		-	-	0,48	-
6	Tamansari		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
7	Gerunggang		-	-	0,16	0,01		-	-	0,32	0,01		-	-	0,48	0,01
F	Kabupaten Belitung		-	-	1,12	-		-	-	1,12	-		-	-	1,12	-
1	Membalong		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
2	Tanjungpandan		-	-	0,64	-		-	-	0,64	-		-	-	0,64	-
3	Badau		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
4	Siluk		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-		-	-	0,16	-
5	Selat Nasik		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
G	Kabupaten Belitung Timur		-	0,36	0,48	-		-	0,36	0,48	-		-	0,36	0,48	-
1	Dendang		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
2	Simpang Pesak		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
3	Gantung		-	0,12	0,16	-		-	0,12	0,16	-		-	0,12	0,16	-
4	Simpang Renggiang		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
5	Manggar		-	0,12	0,16	-		-	0,12	0,16	-		-	0,12	0,16	-
6	Demer		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
7	Kelapa Kampit		-	0,12	0,16	-		-	0,12	0,16	-		-	0,12	0,16	-
	Prov. Kep. Bangka Belitung	-	-	1,20	8,00	0,01	-	-	1,44	8,96	-	-	-	1,44	9,28	-

3) Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mayoritas beragama Islam, saat ini sarana peribadatan musholla/mesjid telah tersebar hampir di seluruh kelurahan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan di Perkotaan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.20 Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan

Jenis Sarana		Musholla/ Langgar	Masjid Warga	Masjid Lingkungan (Kelurahan)	Masjid Kecamatan	Sarana Ibadah Lainnya
Jumlah penduduk pedukung (jiwa)		250	2,500	30,000	120,000	Tergantung sistem kekerabatan/ hirarki lembaga
Kebutuhan Per Satuan Sarana	Luas Lantai Min (m ²)	45	300	1,800	3,600	Tergantung kebiasaan setempat
	Luas Lahan Maks (m ²)	100	800	3,600	5,400	Tergantung kebiasaan setempat
Standard (m ² / jiwa)		0.36	0.24	0.12	0.03	-
Kriteria	Radius pencapaian (m)	100	1,000			-
	Lokasi dan penyelesaian					-

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan di Perkotaan

Adapun Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024– 2044 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21 Analisis Kebutuhan Fasilitas Peribadatan Berdasarkan Standar

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Analisis Kebutuhan Jumlah Fasilitas Peribadatan Berdasarkan Standar (unit)															
		Tahun 2028				Tahun 2033				Tahun 2038				Tahun 2043			
		Tempat Ibadah Skala RT	Tempat Ibadah Skala RW	Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan	Tempat Ibadah Skala RT	Tempat Ibadah Skala RW	Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan	Tempat Ibadah Skala RT	Tempat Ibadah Skala RW	Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan	Tempat Ibadah Skala RT	Tempat Ibadah Skala RW	Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan
A	Kabupaten Bangka	1398	141	81	8	1470	147	1470	8	1531	153	81	8	1591	159	81	8
1	Mendo barat	223	22	15	1	238	24	238	1	251	25	15	1	264	26	15	1
2	Merawang	131	13	10	1	137	14	137	1	143	14	10	1	148	15	10	1
3	Puding Besar	87	9	7	1	96	10	96	1	103	10	7	1	111	11	7	1
4	Sungailiat	386	39	13	1	393	39	393	1	399	40	13	1	404	40	13	1
5	Pemali	165	17	6	1	193	19	193	1	216	22	6	1	239	24	6	1
6	Bakam	80	8	9	1	83	8	83	1	85	8	9	1	87	9	9	1
7	Belinyu	209	21	12	1	212	21	212	1	215	22	12	1	218	22	12	1
8	Riau Sili	117	12	9	1	118	12	118	1	119	12	9	1	120	12	9	1
B	Kabupaten Bangka Tengah	921	92	63	6	1040	104	1040	6	1139	113	63	6	1238	124	63	6
1	Koba	206	21	11	1	241	24	241	1	271	27	11	1	300	30	11	1
2	Lubuk Besar	152	15	9	1	180	18	180	1	204	20	9	1	227	23	9	1
3	Pangkalan Baru	207	21	12	1	226	23	226	1	243	24	12	1	259	26	12	1
4	Namang	80	8	8	1	93	9	93	1	103	10	8	1	114	11	8	1
5	Sungai Selan	164	16	13	1	182	18	182	1	196	20	13	1	211	21	13	1
6	Simpang Katis	112	11	10	1	118	12	118	1	122	12	10	1	127	13	10	1
C	Kabupaten Bangka Selatan	846	84	53	8	891	90	891	8	930	94	53	8	968	96	53	8
1	Payung	89	9	9	1	93	9	93	1	97	10	9	1	100	10	9	1
2	Pulau Besar	44	4	5	1	50	5	50	1	56	6	5	1	62	6	5	1
3	Simpang Rimba	101	10	7	1	106	11	106	1	110	11	7	1	114	11	7	1
4	Tobaik	328	33	11	1	344	34	344	1	357	36	11	1	371	37	11	1
5	Tukak Sadai	54	5	5	1	57	6	57	1	59	6	5	1	61	6	5	1
6	Air Gegas	178	18	10	1	187	19	187	1	194	19	10	1	201	20	10	1
7	Lepar Pongok	34	3	4	1	35	4	35	1	37	4	4	1	38	4	4	1
8	Kepulauan Pongok	18	2	2	1	19	2	19	1	20	2	2	1	21	2	2	1
D	Kabupaten Bangka Barat	870	88	66	6	909	91	909	6	941	93	66	6	971	97	66	6
1	Kelapa	149	15	14	1	158	16	158	1	166	17	14	1	173	17	14	1
2	Tempilang	128	13	9	1	142	14	142	1	154	15	9	1	166	17	9	1
3	Muntok	219	22	9	1	221	22	221	1	223	22	9	1	224	22	9	1
4	Simpang Teritip	132	13	13	1	139	14	139	1	145	14	13	1	150	15	13	1
5	Jebus	96	10	11	1	101	10	101	1	104	10	11	1	108	11	11	1
6	Parittiga	146	15	10	1	148	15	148	1	149	15	10	1	150	15	10	1
E	Kota Pangkal Pinang	1105	110	42	7	1345	133	1345	7	1545	155	42	7	1745	175	42	7
1	Rangkui	163	16	8	1	182	18	182	1	197	20	8	1	212	21	8	1
2	Bukit Intan	196	20	7	1	226	23	226	1	251	25	7	1	276	28	7	1
3	Girimaya	83	8	5	1	92	9	92	1	100	10	5	1	108	11	5	1
4	Pangkalbalam	93	9	5	1	94	9	94	1	96	10	5	1	97	10	5	1
5	Gabek	208	21	6	1	283	28	283	1	345	35	6	1	408	41	6	1
6	Tamansari	84	8	5	1	94	9	94	1	102	10	5	1	110	11	5	1
7	Gerunggang	278	28	6	1	374	37	374	1	454	45	6	1	534	53	6	1
F	Kabupaten Belitung	758	75	49	5	774	77	774	5	787	78	49	5	800	79	49	5
1	Memalang	110	11	12	1	111	11	111	1	112	11	12	1	112	11	12	1
2	Tanjungpandan	433	43	16	1	446	45	446	1	457	46	16	1	468	47	16	1
3	Badau	63	6	7	1	63	6	63	1	63	6	7	1	64	6	7	1
4	Sujuk	129	13	10	1	130	13	130	1	131	13	10	1	132	13	10	1
5	Selat Nasik	23	2	4	1	24	2	24	1	24	2	4	1	24	2	4	1
G	Kabupaten Belitung Timur	553	56	39	7	589	58	589	7	620	63	39	7	651	65	39	7
1	Dendang	49	5	4	1	53	5	53	1	56	6	4	1	59	6	4	1
2	Simpang Pesak	38	4	4	1	41	4	41	1	44	4	4	1	47	5	4	1
3	Gantung	124	12	7	1	134	13	134	1	142	14	7	1	150	15	7	1
4	Simpang Renggang	32	3	4	1	34	3	34	1	36	4	4	1	38	4	4	1
5	Manggar	166	17	9	1	173	17	173	1	178	18	9	1	184	18	9	1
6	Damar	56	6	5	1	57	6	57	1	59	6	5	1	60	6	5	1
7	Kelapa Kampit	88	9	6	1	97	10	97	1	105	11	6	1	113	11	6	1
	Prov. Kep. Bangka Belitung	6451	646	393	47	7018	700	7018	47	7493	749	393	47	7964	795	393	47

Tabel 3.22 Analisis Kebutuhan Tambahan Fasilitas Peribadatan

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Analisis Kebutuhan Luas Lahan Fasilitas Peribadatan Berdasarkan Standar (ha)														Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan
		Tahun 2028				Tahun 2033				Tahun 2038					Tahun 2043		
		Tempat Ibadah Skala RT	Tempat Ibadah Skala RW	Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan	Tempat Ibadah Skala RT	Tempat Ibadah Skala RW	Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan	Tempat Ibadah Skala RT	Tempat Ibadah Skala RW	Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan	Tempat Ibadah Skala RT	Tempat Ibadah Skala RW	Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan
A	Kabupaten Bangka	6,29	4,23	15	2,88	6,62	4,41	265	2,88	6,89	4,59	15	2,88	7,16	4,77	15	2,88
1	Mendo barat	1,00	0,66	3	0,36	1,07	0,72	43	0,36	1,13	0,75	3	0,36	1,19	0,78	3	0,36
2	Merawang	0,59	0,39	2	0,36	0,62	0,42	25	0,36	0,64	0,42	2	0,36	0,67	0,45	2	0,36
3	Puding Besar	0,39	0,27	1	0,36	0,43	0,3	17	0,36	0,46	0,3	1	0,36	0,50	0,33	1	0,36
4	Sungailiat	1,74	1,17	2	0,36	1,77	1,17	71	0,36	1,80	1,2	2	0,36	1,82	1,2	2	0,36
5	Pemali	0,74	0,51	1	0,36	0,87	0,57	35	0,36	0,97	0,66	1	0,36	1,08	0,72	1	0,36
6	Bakam	0,36	0,24	2	0,36	0,37	0,24	15	0,36	0,38	0,24	2	0,36	0,39	0,27	2	0,36
7	Belinyu	0,94	0,63	2	0,36	0,95	0,63	38	0,36	0,97	0,66	2	0,36	0,98	0,66	2	0,36
8	Riau Sili	0,53	0,36	2	0,36	0,53	0,36	21	0,36	0,54	0,36	2	0,36	0,54	0,36	2	0,36
B	Kabupaten Bangka Tengah	4,14	2,76	11	2,16	4,68	3,12	187	2,16	5,13	3,39	11	2,16	5,57	3,72	11	2,16
1	Koba	0,93	0,63	2	0,36	1,08	0,72	43	0,36	1,22	0,81	2	0,36	1,35	0,9	2	0,36
2	Lubuk Besar	0,68	0,45	2	0,36	0,81	0,54	32	0,36	0,92	0,6	2	0,36	1,02	0,69	2	0,36
3	Pangkalan Baru	0,93	0,63	2	0,36	1,02	0,69	41	0,36	1,09	0,72	2	0,36	1,17	0,78	2	0,36
4	Namang	0,36	0,24	1	0,36	0,42	0,27	17	0,36	0,46	0,3	1	0,36	0,51	0,33	1	0,36
5	Sungai Selan	0,74	0,48	2	0,36	0,82	0,54	33	0,36	0,88	0,6	2	0,36	0,95	0,63	2	0,36
6	Simpang Katis	0,50	0,33	2	0,36	0,53	0,36	21	0,36	0,55	0,36	2	0,36	0,57	0,39	2	0,36
C	Kabupaten Bangka Selatan	3,81	2,52	10	2,88	4,01	2,7	160	2,88	4,19	2,82	10	2,88	4,36	2,88	10	2,88
1	Payung	0,40	0,27	2	0,36	0,42	0,27	17	0,36	0,44	0,3	2	0,36	0,45	0,3	2	0,36
2	Pulau Besar	0,20	0,12	1	0,36	0,23	0,15	9	0,36	0,25	0,18	1	0,36	0,28	0,18	1	0,36
3	Simpang Rimba	0,45	0,3	1	0,36	0,48	0,33	19	0,36	0,50	0,33	1	0,36	0,51	0,33	1	0,36
4	Toboali	1,48	0,99	2	0,36	1,55	1,02	62	0,36	1,61	1,08	2	0,36	1,67	1,11	2	0,36
5	Tukak Sadai	0,24	0,15	1	0,36	0,26	0,18	10	0,36	0,27	0,18	1	0,36	0,27	0,18	1	0,36
6	Air Gegas	0,80	0,54	2	0,36	0,84	0,57	34	0,36	0,87	0,57	2	0,36	0,90	0,6	2	0,36
7	Lepar Pongok	0,15	0,09	1	0,36	0,16	0,12	6	0,36	0,17	0,12	1	0,36	0,17	0,12	1	0,36
8	Kepulauan Pongok	0,08	0,06	0	0,36	0,09	0,06	3	0,36	0,09	0,06	0	0,36	0,09	0,06	0	0,36
D	Kabupaten Bangka Barat	3,92	2,64	12	2,16	4,09	2,73	164	2,16	4,23	2,79	12	2,16	4,37	2,91	12	2,16
1	Kelapa	0,67	0,45	3	0,36	0,71	0,48	28	0,36	0,75	0,51	3	0,36	0,78	0,51	3	0,36
2	Tempilang	0,58	0,39	2	0,36	0,64	0,42	26	0,36	0,69	0,45	2	0,36	0,75	0,51	2	0,36
3	Muntok	0,99	0,66	2	0,36	0,99	0,66	40	0,36	1,00	0,66	2	0,36	1,01	0,66	2	0,36
4	Simpang Teritip	0,59	0,39	2	0,36	0,63	0,42	25	0,36	0,65	0,42	2	0,36	0,68	0,45	2	0,36
5	Jebus	0,43	0,3	2	0,36	0,45	0,3	18	0,36	0,47	0,3	2	0,36	0,49	0,33	2	0,36
6	Parittiga	0,66	0,45	2	0,36	0,67	0,45	27	0,36	0,67	0,45	2	0,36	0,68	0,45	2	0,36
E	Kota Pangkal Pinang	4,97	3,3	8	2,52	6,05	3,99	242	2,52	6,95	4,65	8	2,52	7,85	5,25	8	2,52
1	Rangkui	0,73	0,48	1	0,36	0,82	0,54	33	0,36	0,89	0,6	1	0,36	0,95	0,63	1	0,36
2	Bukit Intan	0,88	0,6	1	0,36	1,02	0,69	41	0,36	1,13	0,75	1	0,36	1,24	0,84	1	0,36
3	Girimaya	0,37	0,24	1	0,36	0,41	0,27	17	0,36	0,45	0,3	1	0,36	0,49	0,33	1	0,36
4	Pangkalbalam	0,42	0,27	1	0,36	0,42	0,27	17	0,36	0,43	0,3	1	0,36	0,44	0,3	1	0,36
5	Gabek	0,94	0,63	1	0,36	1,27	0,84	51	0,36	1,55	1,05	1	0,36	1,84	1,23	1	0,36
6	Tamansari	0,38	0,24	1	0,36	0,42	0,27	17	0,36	0,46	0,3	1	0,36	0,50	0,33	1	0,36
7	Gerunggang	1,25	0,84	1	0,36	1,68	1,11	67	0,36	2,04	1,35	1	0,36	2,40	1,59	1	0,36
F	Kabupaten Belitung	3,41	2,25	9	1,80	3,48	2,31	139	1,80	3,54	2,34	9	1,80	3,60	2,37	9	1,80
1	Membalong	0,50	0,33	2	0,36	0,50	0,33	20	0,36	0,50	0,33	2	0,36	0,50	0,33	2	0,36
2	Tanjungpandan	1,95	1,29	3	0,36	2,01	1,35	80	0,36	2,06	1,38	3	0,36	2,11	1,41	3	0,36
3	Badau	0,28	0,18	1	0,36	0,28	0,18	11	0,36	0,28	0,18	1	0,36	0,29	0,18	1	0,36
4	Sijuk	0,58	0,39	2	0,36	0,59	0,39	23	0,36	0,59	0,39	2	0,36	0,59	0,39	2	0,36
5	Selat Nasik	0,10	0,06	1	0,36	0,11	0,06	4	0,36	0,11	0,06	1	0,36	0,11	0,06	1	0,36
G	Kabupaten Belitung Timur	2,49	1,68	7	2,52	2,65	1,74	106	2,52	2,79	1,89	7	2,52	2,93	1,95	7	2,52
1	Dendang	0,22	0,15	1	0,36	0,24	0,15	10	0,36	0,25	0,18	1	0,36	0,27	0,18	1	0,36
2	Simpang Pesak	0,17	0,12	1	0,36	0,18	0,12	7	0,36	0,20	0,12	1	0,36	0,21	0,15	1	0,36
3	Gantung	0,56	0,36	1	0,36	0,60	0,39	24	0,36	0,64	0,42	1	0,36	0,68	0,45	1	0,36
4	Simpang Renggang	0,14	0,09	1	0,36	0,15	0,09	6	0,36	0,16	0,12	1	0,36	0,17	0,12	1	0,36
5	Manggar	0,75	0,51	2	0,36	0,78	0,51	31	0,36	0,80	0,54	2	0,36	0,83	0,54	2	0,36
6	Damar	0,25	0,18	1	0,36	0,26	0,18	10	0,36	0,27	0,18	1	0,36	0,27	0,18	1	0,36
7	Kelapa Kampit	0,40	0,27	1	0,36	0,44	0,3	17	0,36	0,47	0,33	1	0,36	0,51	0,33	1	0,36
	Prov. Kep. Bangka Belitung	29,03	19,38	70,74	16,92	31,58	21,00	1.263,24	16,92	33,72	22,47	70,74	16,92	35,84	23,85	70,74	16,92

Tabel 3.23 Analisis Kebutuhan Lahan Fasilitas Peribadatan

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Analisis Kebutuhan Luas Lahan Fasilitas Peribadatan Berdasarkan Standar (ha)															
		Tahun 2028				Tahun 2033				Tahun 2038				Tahun 2043			
		Tempat Ibadah Skala RT	Tempat Ibadah Skala RW	Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan	Tempat Ibadah Skala RT	Tempat Ibadah Skala RW	Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan	Tempat Ibadah Skala RT	Tempat Ibadah Skala RW	Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan	Tempat Ibadah Skala RT	Tempat Ibadah Skala RW	Tempat Ibadah Skala Desa/kelurahan	Tempat Ibadah Skala Kecamatan
A	Kabupaten Bangka	6,29	4,23	15	2,88	6,62	4,41	265	2,88	6,89	4,59	15	2,88	7,16	4,77	15	2,88
1	Mendo barat	1,00	0,66	3	0,36	1,07	0,72	43	0,36	1,13	0,75	3	0,36	1,19	0,78	3	0,36
2	Merawang	0,59	0,39	2	0,36	0,62	0,42	25	0,36	0,64	0,42	2	0,36	0,67	0,45	2	0,36
3	Puding Besar	0,39	0,27	1	0,36	0,43	0,3	17	0,36	0,46	0,3	1	0,36	0,50	0,33	1	0,36
4	Sungailiat	1,74	1,17	2	0,36	1,77	1,17	71	0,36	1,80	1,2	2	0,36	1,82	1,2	2	0,36
5	Pemali	0,74	0,51	1	0,36	0,87	0,57	35	0,36	0,97	0,66	1	0,36	1,08	0,72	1	0,36
6	Bakam	0,36	0,24	2	0,36	0,37	0,24	15	0,36	0,38	0,24	2	0,36	0,39	0,27	2	0,36
7	Belinyu	0,94	0,63	2	0,36	0,95	0,63	38	0,36	0,97	0,66	2	0,36	0,98	0,66	2	0,36
8	Riau Sili	0,53	0,36	2	0,36	0,53	0,36	21	0,36	0,54	0,36	2	0,36	0,54	0,36	2	0,36
B	Kabupaten Bangka Tengah	4,14	2,76	11	2,16	4,68	3,12	187	2,16	5,13	3,39	11	2,16	5,57	3,72	11	2,16
1	Koba	0,93	0,63	2	0,36	1,08	0,72	43	0,36	1,22	0,81	2	0,36	1,35	0,9	2	0,36
2	Lubuk Besar	0,68	0,45	2	0,36	0,81	0,54	32	0,36	0,92	0,6	2	0,36	1,02	0,69	2	0,36
3	Pangkalan Baru	0,93	0,63	2	0,36	1,02	0,69	41	0,36	1,09	0,72	2	0,36	1,17	0,78	2	0,36
4	Namang	0,36	0,24	1	0,36	0,42	0,27	17	0,36	0,46	0,3	1	0,36	0,51	0,33	1	0,36
5	Sungai Selan	0,74	0,48	2	0,36	0,82	0,54	33	0,36	0,88	0,6	2	0,36	0,95	0,63	2	0,36
6	Simpang Katis	0,50	0,33	2	0,36	0,53	0,36	21	0,36	0,55	0,36	2	0,36	0,57	0,39	2	0,36
C	Kabupaten Bangka Selatan	3,81	2,52	10	2,88	4,01	2,7	160	2,88	4,19	2,82	10	2,88	4,36	2,88	10	2,88
1	Payung	0,40	0,27	2	0,36	0,42	0,27	17	0,36	0,44	0,3	2	0,36	0,45	0,3	2	0,36
2	Pulau Besar	0,20	0,12	1	0,36	0,23	0,15	9	0,36	0,25	0,18	1	0,36	0,28	0,18	1	0,36
3	Simpang Rimba	0,45	0,3	1	0,36	0,48	0,33	19	0,36	0,50	0,33	1	0,36	0,51	0,33	1	0,36
4	Toboali	1,48	0,99	2	0,36	1,55	1,02	62	0,36	1,61	1,08	2	0,36	1,67	1,11	2	0,36
5	Tukak Sadai	0,24	0,15	1	0,36	0,26	0,18	10	0,36	0,27	0,18	1	0,36	0,27	0,18	1	0,36
6	Air Gegas	0,80	0,54	2	0,36	0,84	0,57	34	0,36	0,87	0,57	2	0,36	0,90	0,6	2	0,36
7	Lepar Pongok	0,15	0,09	1	0,36	0,16	0,12	6	0,36	0,17	0,12	1	0,36	0,17	0,12	1	0,36
8	Kepulauan Pongok	0,08	0,06	0	0,36	0,09	0,06	3	0,36	0,09	0,06	0	0,36	0,09	0,06	0	0,36
D	Kabupaten Bangka Barat	3,92	2,64	12	2,16	4,09	2,73	164	2,16	4,23	2,79	12	2,16	4,37	2,91	12	2,16
1	Kelapa	0,67	0,45	3	0,36	0,71	0,48	28	0,36	0,75	0,51	3	0,36	0,78	0,51	3	0,36
2	Tempilang	0,58	0,39	2	0,36	0,64	0,42	26	0,36	0,69	0,45	2	0,36	0,75	0,51	2	0,36
3	Muntok	0,99	0,66	2	0,36	0,99	0,66	40	0,36	1,00	0,66	2	0,36	1,01	0,66	2	0,36
4	Simpang Teritip	0,59	0,39	2	0,36	0,63	0,42	25	0,36	0,65	0,42	2	0,36	0,68	0,45	2	0,36
5	Jebus	0,43	0,3	2	0,36	0,45	0,3	18	0,36	0,47	0,3	2	0,36	0,49	0,33	2	0,36
6	Paritiga	0,66	0,45	2	0,36	0,67	0,45	27	0,36	0,67	0,45	2	0,36	0,68	0,45	2	0,36
E	Kota Pangkal Pinang	4,97	3,3	8	2,52	6,05	3,99	242	2,52	6,95	4,65	8	2,52	7,85	5,25	8	2,52
1	Rangkui	0,73	0,48	1	0,36	0,82	0,54	33	0,36	0,89	0,6	1	0,36	0,95	0,63	1	0,36
2	Bukit Intan	0,88	0,6	1	0,36	1,02	0,69	41	0,36	1,13	0,75	1	0,36	1,24	0,84	1	0,36
3	Girimaya	0,37	0,24	1	0,36	0,41	0,27	17	0,36	0,45	0,3	1	0,36	0,49	0,33	1	0,36
4	Pangkalbalam	0,42	0,27	1	0,36	0,42	0,27	17	0,36	0,43	0,3	1	0,36	0,44	0,3	1	0,36
5	Gabek	0,94	0,63	1	0,36	1,27	0,84	51	0,36	1,55	1,05	1	0,36	1,84	1,23	1	0,36
6	Tamansari	0,38	0,24	1	0,36	0,42	0,27	17	0,36	0,46	0,3	1	0,36	0,50	0,33	1	0,36
7	Gerunggang	1,25	0,84	1	0,36	1,68	1,11	67	0,36	2,04	1,35	1	0,36	2,40	1,59	1	0,36
F	Kabupaten Belitung	3,41	2,25	9	1,80	3,48	2,31	139	1,80	3,54	2,34	9	1,80	3,60	2,37	9	1,80
1	Memalong	0,50	0,33	2	0,36	0,50	0,33	20	0,36	0,50	0,33	2	0,36	0,50	0,33	2	0,36
2	Tanjungpandan	1,95	1,29	3	0,36	2,01	1,35	80	0,36	2,06	1,38	3	0,36	2,11	1,41	3	0,36
3	Badau	0,28	0,18	1	0,36	0,28	0,18	11	0,36	0,28	0,18	1	0,36	0,29	0,18	1	0,36
4	Siujuk	0,58	0,39	2	0,36	0,59	0,39	23	0,36	0,59	0,39	2	0,36	0,59	0,39	2	0,36
5	Selat Nasik	0,10	0,06	1	0,36	0,11	0,06	4	0,36	0,11	0,06	1	0,36	0,11	0,06	1	0,36
G	Kabupaten Belitung Timur	2,49	1,68	7	2,52	2,65	1,74	106	2,52	2,79	1,89	7	2,52	2,93	1,95	7	2,52
1	Dendang	0,22	0,15	1	0,36	0,24	0,15	10	0,36	0,25	0,18	1	0,36	0,27	0,18	1	0,36
2	Simpang Pesak	0,17	0,12	1	0,36	0,18	0,12	7	0,36	0,20	0,12	1	0,36	0,21	0,15	1	0,36
3	Gantung	0,56	0,36	1	0,36	0,60	0,39	24	0,36	0,64	0,42	1	0,36	0,68	0,45	1	0,36
4	Simpang Renggiang	0,14	0,09	1	0,36	0,15	0,09	6	0,36	0,16	0,12	1	0,36	0,17	0,12	1	0,36
5	Manggar	0,75	0,51	2	0,36	0,78	0,51	31	0,36	0,80	0,54	2	0,36	0,83	0,54	2	0,36
6	Damar	0,25	0,18	1	0,36	0,26	0,18	10	0,36	0,27	0,18	1	0,36	0,27	0,18	1	0,36
7	Kelapa Kampit	0,40	0,27	1	0,36	0,44	0,3	17	0,36	0,47	0,33	1	0,36	0,51	0,33	1	0,36
	Prov. Kep. Bangka Belitung	29,03	19,38	70,74	16,92	31,58	21,00	1.263,24	16,92	33,72	22,47	70,74	16,92	35,84	23,85	70,74	16,92

4) Sarana Perdagangan dan Jasa

Ketersediaan fasilitas perdagangan dan jasa di wilayah perencanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari pasar, toko, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Perhitungan proyeksi jumlah fasilitas perdagangan dan jasa dilakukan untuk mengetahui apakah fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia di wilayah perencanaan dari segi jumlah sudah mencukupi untuk jangka waktu yang akan datang atau harus ada penambahan jumlah fasilitas perdagangan dan jasa menentukan berapa banyak jumlah yang harus ditambah. Untuk menentukan/memproyeksikan kebutuhan jumlah fasilitas perdagangan dan jasa dihitung dengan menggunakan standar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 3.24 Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa

Jenis Sarana		Toko/ Warung	Pertokoan	Pusat Pertokoan dan Pasar Lingkungan	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (Toko, Pasar, Bank dan Kantor)
Jumlah penduduk pendukung (jiwa)		250	6,000	30,000	120,000
Kebutuhan Per Satuan Sarana	Luas Lantai Min (m2)	50	1,200	13,500	36,000
	Luas Lahan Maks (m2)	100	3,000	10,000	36,000
Standard (m2/ jiwa)		0.4	0.5	0.33	0.3
Kriteria	Radius pencapaian (m)	300	2,000		
	Lokasi dan penyelesaian	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain	Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40 %. Dapat berbentuk P&D	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Terletak di jalan. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Adapun standar luas lahan untuk tiap-tiap fasilitas Perdagangan dan Jasa adalah:

1. Toko/kios dengan standar jumlah penduduk pendukung sebesar 250 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 100 m2/unit.
2. Pertokoan dengan jumlah penduduk pendukung sebesar 6.000 jiwa/unit dengan luas lahan 3.000 m2/unit.
3. Pusat pertokoan dan pasar lingkungan dengan jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit dengan luas lahan 13.500 m2/unit.
4. Pusat perbelanjaan dan niaga (toko, pasar, bank, kantor) dengan standar jumlah penduduk pendukung sebesar 120.000 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 36.000 m2/unit.

Berdasarkan standar diatas, maka proyeksi kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 3.25 Analisis Kebutuhan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Standar

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Proyeksi Jumlah Fasilitas Perdagangan (unit)																															
		Tahun 2028								Tahun 2033								Tahun 2038								Tahun 2043							
		Pusat Perbelanjaan	Pasar	Pertokoan	Warung	Bank	Losmen	Hotel	Koperasi	Pusat Perbelanjaan	Pasar	Pertokoan	Warung	Bank	Losmen	Hotel	Koperasi	Pusat Perbelanjaan	Pasar	Pertokoan	Warung	Bank	Losmen	Hotel	Koperasi	Pusat Perbelanjaan	Pasar	Pertokoan	Warung	Bank	Losmen	Hotel	Koperasi
A	Kabupaten Bangka	1	12	351	1410	30	4	1	55	1	13	368	1470	30	4	1	56	2	13	384	1531	30	4	2	58	2	13	399	1591	33	4	2	61
	1 Mendo Barat	0	2	56	225	5	1	0	9	0	2	60	235	5	1	0	9	1	2	63	251	5	1	1	10	1	2	66	244	5	1	1	10
	2 Merawang	0	1	33	132	3	0	0	5	0	1	34	137	3	0	0	5	0	1	36	143	3	0	0	5	0	1	37	148	3	0	0	6
	3 Puding Besar	0	1	22	89	2	0	0	3	0	1	24	96	2	0	0	4	0	1	26	103	2	0	0	4	0	1	28	111	2	0	0	4
	4 Sungailiat	1	3	97	387	8	1	1	15	1	3	98	393	8	1	1	15	1	3	100	399	8	1	1	15	1	3	101	404	8	1	1	16
	5 Penail	0	1	42	170	4	1	0	7	0	2	48	193	4	1	0	7	0	2	54	216	4	1	0	8	0	2	60	238	5	1	0	9
	6 Bakam	0	1	20	81	2	0	0	3	0	1	21	83	2	0	0	3	0	1	21	85	2	0	0	3	0	1	22	87	2	0	0	3
	7 Belinyu	0	2	52	209	4	1	0	8	0	2	53	212	4	1	0	8	0	2	54	215	4	1	0	8	0	2	55	218	5	1	0	8
	8 Rawa Sipit	0	1	29	117	2	0	0	5	0	1	30	119	2	0	0	5	0	1	30	119	2	0	0	5	0	1	30	120	3	0	0	5
B	Kabupaten Bangka Tengah	0	8	235	941	18	4	0	35	1	10	259	1040	22	4	1	41	2	10	286	1139	24	4	2	44	2	10	311	1238	25	4	2	48
	1 Kota	0	2	53	212	4	1	0	8	1	2	60	241	5	1	1	9	1	2	68	271	6	1	1	10	1	2	75	300	6	1	1	12
	2 Lubuk Besar	0	1	39	157	3	1	0	6	0	2	45	180	4	1	0	7	0	2	51	204	4	1	0	8	0	2	57	227	5	1	0	9
	3 Pangkalan Baru	0	2	52	210	4	1	0	8	0	2	57	226	5	1	0	9	1	2	61	243	5	1	1	9	1	2	65	259	5	1	1	10
	4 Namang	0	1	21	82	2	0	0	3	0	1	23	93	2	0	0	4	0	1	26	103	2	0	0	4	0	1	29	114	2	0	0	4
	5 Sungai Selat	0	1	42	167	3	1	0	6	0	2	45	182	4	1	0	7	0	2	49	196	4	1	0	8	0	2	53	211	4	1	0	8
	6 Senoaya Kalis	0	1	28	113	2	0	0	4	0	1	29	118	2	0	0	5	0	1	31	122	3	0	0	5	0	1	32	127	3	0	0	5
C	Kabupaten Bangka Selatan	1	6	215	854	18	2	1	33	1	7	224	891	18	2	1	34	1	7	232	930	18	2	1	35	1	9	242	968	19	2	1	36
	1 Pajum	0	1	22	90	2	0	0	3	0	1	23	93	2	0	0	4	0	1	24	97	2	0	0	4	0	1	25	100	2	0	0	4
	2 Pulau Besar	0	0	11	45	1	0	0	2	0	0	13	50	1	0	0	2	0	0	14	56	1	0	0	2	0	1	15	62	1	0	0	2
	3 Simpang Rimba	0	1	26	102	2	0	0	4	0	1	27	106	2	0	0	4	0	1	28	110	2	0	0	4	0	1	29	114	2	0	0	4
	4 Toboali	1	3	83	331	7	1	1	13	1	3	86	344	7	1	1	13	1	3	89	357	7	1	1	14	1	3	93	371	8	1	1	14
	5 Tukak Sidal	0	0	14	55	1	0	0	2	0	0	14	57	1	0	0	2	0	0	15	59	1	0	0	2	0	0	15	61	1	0	0	2
	6 Air Gegas	0	1	45	179	4	1	0	7	0	2	47	187	4	1	0	7	0	2	48	194	4	1	0	7	0	2	50	201	4	1	0	8
	7 Lepar Porapak	0	0	9	34	1	0	0	1	0	0	9	35	1	0	0	1	0	0	9	37	1	0	0	1	0	0	10	38	1	0	0	1
	8 Kepulauan Porapak	0	0	5	18	0	0	0	1	0	0	5	19	0	0	0	1	0	0	5	20	0	0	0	1	0	0	5	21	0	0	0	1
D	Kabupaten Bangka Barat	0	7	220	877	19	2	0	34	0	7	228	909	19	2	0	34	0	7	235	941	19	3	0	37	0	7	243	971	20	5	0	38
	1 Kelapa	0	1	38	151	3	1	0	6	0	1	40	159	3	1	0	6	0	1	41	166	3	1	0	6	0	1	43	173	4	1	0	7
	2 Tempelan	0	1	33	130	3	0	0	5	0	1	36	142	3	0	0	5	0	1	39	154	3	1	0	5	0	1	41	166	3	1	0	6
	3 Muarok	0	1	55	8	221	3	0	8	0	2	56	223	5	1	0	8	0	2	56	224	5	1	0	8	0	2	56	224	5	1	0	9
	4 Simpang Tempit	0	1	33	133	3	0	0	5	0	1	35	139	3	0	0	5	0	1	36	145	3	0	0	5	0	1	38	150	3	1	0	6
	5 Jakus	0	1	24	97	2	0	0	4	0	1	25	101	2	0	0	4	0	1	26	104	2	0	0	4	0	1	27	108	2	0	0	4
	6 Paitiga	0	1	37	147	3	0	0	6	0	1	37	148	3	0	0	6	0	1	37	149	3	0	0	6	0	1	38	150	3	1	0	6
E	Kota Pangkal Pinang	1	10	286	1144	24	4	1	43	2	12	337	1345	29	4	2	53	3	14	386	1545	31	5	3	60	3	14	436	1745	35	5	3	68
	1 Rangsau	0	1	42	166	3	1	0	6	0	2	45	182	4	1	0	7	0	2	49	197	4	1	0	8	0	2	53	212	4	1	0	8
	2 Bukit Intan	0	2	50	201	4	1	0	8	0	2	57	228	5	1	0	9	1	2	63	251	5	1	1	10	2	1	69	276	5	1	1	11
	3 Glimaya	0	1	21	84	2	0	0	3	0	1	23	92	2	0	0	4	0	1	25	100	2	0	0	4	0	1	27	108	2	0	0	4
	4 Pangkalbalam	0	1	23	93	2	0	0	4	0	1	24	94	2	0	0	4	0	1	24	96	2	0	0	4	0	1	24	97	2	0	0	4
	5 Galak	0	2	55	220	5	1	0	8	1	2	71	283	6	1	1	11	1	3	86	345	7	1	1	13	1	3	102	408	8	1	1	15
	6 Tanjarsari	0	1	22	86	2	0	0	3	0	1	23	94	2	0	0	4	0	1	25	102	2	0	0	4	0	1	27	110	2	0	0	4
	7 Genuwang	1	2	73	294	6	1	1	11	1	3	84	374	8	1	1	14	1	4	114	454	9	2	1	17	1	4	134	534	11	2	1	21
F	Kabupaten Belitung	1	7	191	761	15	1	1	29	1	7	194	774	15	1	1	29	1	7	197	787	16	2	1	30	1	7	200	800	16	2	1	30
	1 Membalong	0	1	28	111	2	0	0	4	0	1	28	111	2	0	0	4	0	1	28	112	2	0	0	4	0	1	28	112	2	0	0	4
	2 Tanjungandan	1	4	109	435	9	1	1	17	1	4	111	446	9	1	1	17	1	4	114	457	10	2	1	18	1	4	117	468	10	2	1	18
	3 Badau	0	1	16	63	1	0	0	2	0	1	16	63	1	0	0	2	0	1	16	63	1	0	0	2	0	1	16	64	1	0	0	2
	4 Suk	0	1	32	129	3	0	0	5	0	1	33	130	3	0	0	5	0	1	33	131	3	0	0	5	0	1	33	132	3	0	0	5
	5 Selat Naisik	0	0	6	23	0	0	0	1	0	0	6	24	0	0	0	1	0	0	6	24	0	0	0	1	0	0	6	24	0	0	0	1
G	Kabupaten Belitung Timur	0	3	140	568	12	1	0	20	0	3	146	589	13	1	0	23	0	3	155	620	13	1	0	23	0	3	162	651	13	1	0	24
	1 Dedindang	0	0	12	49	0	0	0	2	0	0	13	53	1	0	0	2	0	0	14	56	1	0	0	2	0	0	15	59	1	0	0	2
	2 Simpang Pesisir	0	0	10	38	1	0	0	1	0	0	10	41	1	0	0	2	0	0	11	44	1	0	0	2	0	0	12	47	1	0	0	2
	3 Gantung	0	1	32	126	3	0	0	5	0	1	33	134	3	0	0	5	0	1	35	142	3	0	0	5	0	1	37	150	3	0	0	6
	4 Simpang Renggang	0	0	8	33																												

Tabel 3.26 Analisis Kebutuhan Lahan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Fasilitas Perdagangan dan Jasa																																
		Tahun 2028												Tahun 2033																				
		Pusat Perbelanjaan	Pasar	Pertokoan	Warung	Bank	Losmen	Hotel	Koperasi	Pusat Perbelanjaan	Pasar	Pertokoan	Warung	Bank	Losmen	Hotel	Koperasi	Pusat Perbelanjaan	Pasar	Pertokoan	Warung	Bank	Losmen	Hotel	Koperasi									
A	Kabupaten Bangka	3,60	16,20	42,12	28,20	3,60	1,20	1,20	35,75	3,60	17,55	44,16	29,40	3,60	1,20	1,20	36,40	7,20	17,55	46,08	30,62	3,60	1,20	2,40	37,70	7,20	17,55	47,88	31,82	3,96	1,20	2,40	39,65	
	Mendo Barat	-	-	5,72	4,50	0,60	-	-	5,85	-	2,70	7,20	4,76	0,60	0,30	-	5,85	3,60	2,70	7,56	5,02	0,60	0,30	-	1,20	5,50	-	-	-	-	1,20	5,90		
	Merawang	-	-	1,35	2,64	0,36	-	-	3,25	-	1,35	4,08	2,74	0,36	-	-	3,25	-	1,35	4,32	2,86	0,36	-	-	-	3,25	-	-	-	-	3,25	3,80		
	Puding Besar	-	-	1,35	2,64	1,78	0,24	-	1,95	-	1,35	2,88	1,92	0,24	-	-	2,60	-	1,35	3,12	2,06	0,24	-	-	-	2,60	-	-	-	-	2,60	2,60		
	Sungailiat	3,60	4,05	11,64	7,74	0,96	0,30	1,20	9,75	3,60	4,05	11,76	7,85	0,96	0,30	1,20	9,75	3,60	4,05	12,00	7,98	0,96	0,30	1,20	9,75	3,60	4,05	12,12	8,08	0,96	0,30	1,20	9,75	
	Pemali	-	-	1,35	5,04	3,40	0,48	0,30	-	4,55	-	2,70	5,76	3,86	0,48	0,30	-	4,55	-	2,70	6,48	4,32	0,48	0,30	-	5,20	-	-	2,70	7,20	4,78	0,60	0,30	5,85
	Bakam	-	-	1,35	2,40	1,62	0,24	-	1,95	-	1,35	2,52	1,66	0,24	-	-	1,95	-	1,35	2,52	1,70	0,24	-	-	-	1,95	-	-	1,35	2,64	1,74	0,24	-	1,95
	Belimu	-	-	2,70	6,24	4,18	0,48	0,30	-	5,20	-	2,70	6,36	4,24	0,48	0,30	-	5,20	-	2,70	6,48	4,30	0,48	0,30	-	5,20	-	-	2,70	6,60	4,60	0,30	5,20	
	Riau Sili	-	-	1,35	3,48	2,34	0,24	-	3,25	-	1,35	3,60	2,36	0,24	-	-	3,25	-	1,35	3,60	2,38	0,24	-	-	-	3,25	-	-	1,35	3,60	2,40	0,36	3,60	
B	Kabupaten Bangka Tengah	-	10,80	28,20	18,82	2,16	1,20	-	22,75	3,60	13,50	31,08	20,80	2,64	1,20	1,20	26,65	7,20	13,50	34,32	22,78	2,88	1,20	2,40	28,60	7,20	13,50	37,32	24,76	3,00	1,20	2,40	31,20	
	Koba	-	-	2,70	6,36	4,24	0,48	0,30	-	5,20	3,60	2,70	7,20	4,82	0,60	0,30	1,20	5,85	3,60	2,70	8,16	5,42	0,72	0,30	1,20	6,50	3,60	2,70	9,00	6,00	0,72	0,30	1,20	7,80
	Lubuk Besar	-	-	1,35	4,68	3,14	0,36	0,30	-	3,80	-	2,70	5,40	3,60	0,48	0,30	-	4,35	-	2,70	5,88	4,02	0,48	0,30	-	5,20	-	-	2,70	6,84	4,54	0,48	0,30	5,20
	Pangkalan Baru	-	-	2,70	6,24	4,20	0,48	0,30	-	5,20	-	2,70	6,84	4,52	0,60	0,30	-	5,85	3,60	2,70	7,32	4,86	0,60	0,30	1,20	5,85	3,60	2,70	7,80	5,16	0,60	0,30	1,20	6,50
	Namang	-	-	1,35	2,52	1,64	0,24	-	1,95	-	1,35	2,76	1,86	0,24	-	-	2,60	-	1,35	3,12	2,06	0,24	-	-	-	2,60	-	-	1,35	3,48	2,28	0,24	-	2,60
	Sungai Selat	-	-	1,35	5,04	3,34	0,36	0,30	-	3,80	-	2,70	5,40	3,64	0,48	0,30	-	4,35	-	2,70	5,88	3,92	0,48	0,30	-	5,20	-	-	2,70	6,36	4,22	0,48	0,30	5,20
	Simpang Kalis	-	-	1,35	3,36	2,36	0,24	-	2,60	-	1,35	3,48	2,36	0,24	-	-	3,25	-	1,35	3,72	2,44	0,36	-	-	-	3,25	-	-	1,35	3,84	2,54	0,36	3,25	
C	Kabupaten Bangka Selatan	3,60	8,10	25,80	17,08	2,16	0,60	1,20	21,45	3,60	9,45	26,88	17,82	2,16	0,60	1,20	22,10	3,60	9,45	27,84	18,60	2,16	0,60	1,20	22,75	3,60	12,15	29,04	19,36	2,28	0,60	1,20	23,40	
	Paku	-	1,35	2,64	1,80	0,24	-	-	1,95	-	1,35	2,76	1,86	0,24	-	-	2,60	-	1,35	2,88	1,94	0,24	-	-	-	2,60	-	-	1,35	3,00	2,00	0,24	-	2,60
	Paku Besar	-	-	1,32	0,90	0,12	-	-	1,30	-	-	1,56	1,00	0,12	-	-	1,30	-	1,35	1,68	1,12	0,12	-	-	-	1,30	-	-	1,35	1,80	1,24	0,12	-	1,30
	Simpang Rimba	-	-	1,35	3,12	2,04	0,24	-	2,60	-	1,35	3,24	2,12	0,24	-	-	2,60	-	1,35	3,36	2,20	0,24	-	-	-	2,60	-	-	1,35	3,48	2,28	0,24	-	2,60
	Toboli	3,60	4,05	9,96	6,62	0,84	0,30	1,20	8,45	3,60	4,05	10,32	6,88	0,84	0,30	1,20	8,45	3,60	4,05	10,68	7,14	0,84	0,30	1,20	9,10	3,60	4,05	11,16	7,42	0,96	0,30	1,20	9,10	
	Tukak Seder	-	-	1,68	1,10	0,12	-	-	1,30	-	-	1,68	1,14	0,12	-	-	1,30	-	1,35	1,80	1,18	0,12	-	-	-	1,30	-	-	1,35	1,80	1,22	0,12	-	1,30
	Air Gegas	-	1,35	5,40	3,58	0,48	0,30	-	4,55	-	2,70	5,64	3,74	0,48	0,30	-	4,55	-	2,70	5,76	3,88	0,48	0,30	-	-	4,55	-	-	2,70	6,00	4,02	0,48	0,30	5,20
	Lupit Poropok	-	-	1,08	0,68	0,12	-	-	0,65	-	-	1,08	0,70	0,12	-	-	0,65	-	-	1,08	0,74	0,12	-	-	-	0,65	-	-	1,08	0,76	0,12	-	0,65	
	Kondusan Poropok	-	-	0,60	0,36	-	-	-	0,65	-	-	0,60	0,36	-	-	-	0,65	-	-	0,60	0,40	-	-	-	-	0,65	-	-	0,60	0,42	0,36	0,30	0,65	
D	Kabupaten Bangka Barat	-	9,45	26,40	17,54	2,28	0,60	-	22,10	-	9,45	27,36	18,18	2,28	0,60	-	22,10	-	9,45	28,20	18,82	2,28	0,90	-	24,05	-	9,45	29,16	19,42	2,40	1,50	-	24,70	
	Kelapa	-	1,35	4,56	3,02	0,36	0,30	-	3,90	-	1,35	4,80	3,16	0,36	0,30	-	3,90	-	1,35	4,92	3,32	0,36	0,30	-	3,90	-	1,35	5,16	3,46	0,48	0,30	4,55		
	Templang	-	1,35	3,96	2,80	0,36	-	-	3,25	-	1,35	4,32	2,84	0,36	-	-	3,25	-	1,35	4,68	3,06	0,36	-	-	-	3,25	-	-	1,35	4,92	3,36	0,36	3,90	
	Murok	-	2,70	6,60	4,38	0,60	0,30	-	5,20	-	2,70	6,60	4,42	0,60	0,30	-	5,20	-	2,70	6,72	4,46	0,60	0,30	-	5,85	-	2,70	6,72	4,46	0,60	0,30	5,85		
	Simpang Terti	-	1,35	3,96	2,66	0,36	-	-	3,25	-	1,35	4,20	2,78	0,36	-	-	3,25	-	1,35	4,32	2,90	0,36	-	-	-	3,90	-	1,35	4,56	3,00	0,36	0,30	3,90	
	Jakus	-	1,35	2,88	1,94	0,24	-	-	2,60	-	1,35	3,00	2,02	0,24	-	-	2,60	-	1,35	3,12	2,08	0,24	-	-	-	2,60	-	-	1,35	3,24	2,16	0,24	2,60	
	Pattiga	-	1,35	4,44	2,94	0,36	-	-	3,90	-	1,35	4,44	2,96	0,36	-	-	3,90	-	1,35	4,44	2,98	0,36	-	-	-	3,90	-	1,35	4,44	2,98	0,36	0,30	3,90	
E	Kota Pangkal Pinang	3,60	13,50	34,32	22,88	2,88	1,20	1,20	27,95	7,20	16,20	40,44	26,90	3,48	1,20	2,40	34,45	10,80	18,90	46,32	30,90	3,72	1,50	3,60	39,00	10,80	18,90	52,32	34,90	4,20	1,50	3,60	44,20	
	Rangh	-	1,35	5,04	3,32	0,36	0,30	-	3,90	-	2,70	5,40	3,64	0,48	0,30	-	4,55	-	2,70	5,88	3,94	0,48	0,30	-	5,20	-	2,70	6,36	4,24	0,48	0,30	5,20	6,50	
	Bukit Intan	-	2,70	6,00	4,02	0,48	0,30	-	5,20	-	2,70	6,84	4,52	0,60	0,30	-	5,85	3,60	2,70	7,56	5,02	0,60	0,30	1,20	6,50	3,60	2,70	8,28	5,60	0,60	0,30	1,20	7,15	
	Grinaya	-	1,35	2,52	1,68	0,24	-	-	1,95	-	1,35	2,76	1,84	0,24	-	-	2,60	-	1,35	3,00	2,00	0,24	-	-	-	2,60	-	-	1,35	3,24	2,16	0,24	2,60	
	Pangkalbalam	-	1,35	2,76	1,86	0,24	-	-	2,60	-	1,35	2,88	1,88	0,24	-	-	2,60	-	1,35	2,88	1,92	0,24	-	-	-	2,60	-	-	1,35	2,88	1,94	0,24	-	2,60
	Gabek	2,70	6,60	16,40	10,60	0,60	0,30	-	5,20	3,60	2,70	8,52	5,66	0,72	0,30	1,20	7,15	3,60	4,05	10,32	6,90	0,84	0,30	1,20	8,45	3,60	4,05	12,24	8,16	0,84	0,30	1,20	9,60	
	Tamersani	-	1,35	2,64	1,72	0,24	-	-	1,95	-	1,35	2,76	1,88	0,24	-	-	2,60	-	1,35	3,00	2,04	0,24	-	-	-	2,60	-	-	1,35	3,24	2,20	0,24	2,60	
	Gerunggang	3,60	2,70	8,76	5,88	0,72	0,30	1,20	7,15	3,60	4,05	11,28	7,48	0,96	0,30	1,20	9,10	3,60	5,40	13,68	9,08	1,08	0,60	1,20	11,05	3,60	5,40	16,08	10,68	1,32	0,60	1,20	13,65	
F	Kabupaten Belitung	3,60	9,45	22,80	15,22	1,80	0,30	1,20	18,85	3,60	9,45	23,28	15,40	1,80	0,30	1,20	18,85	3,60	9,45	23,64	15,74	1,82	0,60	1,20	19,50	3								

5) Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

Ruang Terbuka (RT) terdiri atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang-ruang di dalam kota dimana unsur hijau (vegetasi) yang alami dan sifat ruang terbuka lebih dominan. Pelaksanaan pengembangan RTH dilakukan dengan pengisian tumbuhan pada ruang terbuka, baik secara alami ataupun dengan tanaman budidaya, seperti tanaman komoditi pertanian dalam arti luas, pertamanan, dan sebagainya. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008, ruang terbuka hijau didefinisikan sebagai area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Non Hijau: (Pedoman RTH) ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Pentingnya peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) perlu diatur dalam Pedoman Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan (PERMEN PU no 5/PRT/M/2008) pasal 28 Paragraf 5 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 31, ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH maupun RTNH, minimal pada suatu wilayah kota/kawasan perkotaan adalah 30%, dengan asumsi 20% harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan 10% disediakan oleh swasta atau masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, sarana ruang terbuka baik ruang terbuka hijau maupun non hijau di Kabupaten Purwakarta baik secara kuantitas dan kualitas masih sangat mencukupi minimal 30% ruang terbuka hijau. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, standar pelayanan minimal sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27 Standar Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan (Jiwa)	Tipe RTH	Luas Minimal/ Unit (M2)	Luas Minimal/ Kapita (M2)	Lokasi
1	250	Taman RT	250	1,0	di tengah lingkungan RT
2	2.500	Taman RW	1.250	0,5	di pusat kegiatan RW
3	30.000	Taman Kelurahan	9.000	0,3	dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kelurahan
4	120.000	Taman Kecamatan	24.000	0,2	dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	tersebar
5	480.000	Taman Kota	144.000	0,3	di pusat wilayah/ kota
		Hutan Kota	disesuaikan	4,0	di dalam/ kawasan pinggiran
		untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	disesuaikan dengan kebutuhan

Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan

Tabel 3.28Kebutuhan Fasilitas Ruang Terbuka, Taman Dan Lapangan Olahraga Berdasarkan Standar

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Tahun 2028						Tahun 2033						Tahun 2038						Tahun 2043					
		Taman RT	Taman RW	Taman Kelurahan*	Taman Kecamatan**	Pemukaman***	Taman Kota	Taman RT	Taman RW	Taman Kelurahan*	Taman Kecamatan**	Pemukaman***	Taman Kota	Taman RT	Taman RW	Taman Kelurahan*	Taman Kecamatan**	Pemukaman***	Taman Kota	Taman RT	Taman RW	Taman Kelurahan*	Taman Kecamatan**	Pemukaman***	Taman Kota
A	Kabupaten Bangka	1.410	142	81	8	81	3	1.470	147	81	8	81	3	1.531	153	81	8	81	3	1.591	159	81	8	81	3
1	Mendo barat	225	23	15	1	15	0	238	24	15	1	15	0	251	25	15	1	15	0	264	26	15	1	15	0
2	Merawang	132	13	10	1	10	0	137	14	10	1	10	0	143	14	10	1	10	0	148	15	10	1	10	0
3	Puding Besar	89	9	7	1	7	1	95	10	7	1	7	1	103	10	7	1	7	1	111	11	7	1	7	1
4	Sungailiat	387	39	13	1	13	1	393	39	13	1	13	1	399	40	13	1	13	1	404	40	13	1	13	1
5	Pemali	170	17	6	1	6	0	193	19	6	1	6	0	216	22	6	1	6	0	239	24	6	1	6	0
6	Bakam	81	8	9	1	9	0	83	8	9	1	9	0	85	8	9	1	9	0	87	9	9	1	9	0
7	Belitru	209	21	12	1	12	1	212	21	12	1	12	1	215	22	12	1	12	1	218	22	12	1	12	1
8	Riau Sili	117	12	9	1	9	0	118	12	9	1	9	0	119	12	9	1	9	0	120	12	9	1	9	0
B	Kabupaten Bangka Tengah	941	94	63	6	63	3	1.040	104	63	6	63	3	1.139	113	63	6	63	3	1.238	124	63	6	63	3
1	Koba	212	21	11	1	11	1	241	24	11	1	11	1	271	27	11	1	11	1	300	30	11	1	11	1
2	Lubuk Besar	157	16	9	1	9	0	180	18	9	1	9	0	204	20	9	1	9	0	227	23	9	1	9	0
3	Pangkalan Baru	210	21	12	1	12	1	226	23	12	1	12	1	243	24	12	1	12	1	259	26	12	1	12	1
4	Nanang	82	8	8	1	8	0	83	9	8	1	8	0	103	10	8	1	8	0	114	11	8	1	8	0
5	Sungai Selan	167	17	13	1	13	1	182	18	13	1	13	1	196	20	13	1	13	1	211	21	13	1	13	1
6	Simpang Katis	113	11	10	1	10	0	118	12	10	1	10	0	122	12	10	1	10	0	127	13	10	1	10	0
C	Kabupaten Bangka Selatan	854	84	53	8	53	2	891	90	53	8	53	2	930	94	53	8	53	2	968	96	53	8	53	2
1	Payung	90	9	5	1	5	1	93	9	5	1	5	1	97	10	5	1	5	1	100	10	5	1	5	1
2	Pulau Besar	45	4	5	1	5	0	50	5	5	1	5	0	56	6	5	1	5	0	62	6	5	1	5	0
3	Simpang Rimba	102	10	7	1	7	0	106	11	7	1	7	0	110	11	7	1	7	0	114	11	7	1	7	0
4	Toboali	331	33	11	1	11	1	344	34	11	1	11	1	357	36	11	1	11	1	371	37	11	1	11	1
5	Tukak Sadai	55	5	5	1	5	0	57	6	5	1	5	0	59	6	5	1	5	0	61	6	5	1	5	0
6	Air Gegas	179	18	10	1	10	0	187	19	10	1	10	0	194	19	10	1	10	0	201	20	10	1	10	0
7	Lepar Pongok	34	3	4	1	4	1	35	4	4	1	4	1	37	4	4	1	4	1	38	4	4	1	4	1
8	Kepulauan Pongok	18	2	2	1	2	0	19	2	2	1	2	0	20	2	2	1	2	0	21	2	2	1	2	0
D	Kabupaten Bangka Barat	877	88	66	6	66	3	909	91	66	6	66	3	941	93	66	6	66	3	971	97	66	6	66	3
1	Kelapa	151	15	14	1	14	1	158	16	14	1	14	1	166	17	14	1	14	1	173	17	14	1	14	1
2	Tempiang	130	13	9	1	9	0	142	14	9	1	9	0	154	15	9	1	9	0	166	17	9	1	9	0
3	Muntok	219	22	9	1	9	1	221	22	9	1	9	1	223	22	9	1	9	1	224	22	9	1	9	1
4	Simpang Teritip	133	13	13	1	13	0	139	14	13	1	13	0	145	14	13	1	13	0	150	15	13	1	13	0
5	Jebus	97	10	11	1	11	0	101	10	11	1	11	0	104	10	11	1	11	0	108	11	11	1	11	0
6	Paritiga	147	15	10	1	10	1	148	15	10	1	10	1	149	15	10	1	10	1	150	15	10	1	10	1
E	Kota Pangkal Pinang	1.144	114	42	7	42	1	1.345	133	42	7	42	1	1.546	155	42	7	42	1	1.745	175	42	7	42	1
1	Rangkul	166	17	8	1	8	0	182	18	8	1	8	0	197	20	8	1	8	0	212	21	8	1	8	0
2	Bukit Intan	201	20	7	1	7	0	226	23	7	1	7	0	251	25	7	1	7	0	276	28	7	1	7	0
3	Girimaya	84	8	5	1	5	1	92	9	5	1	5	1	100	10	5	1	5	1	108	11	5	1	5	1
4	Pangkalbalam	93	9	5	1	5	0	94	9	5	1	5	0	96	10	5	1	5	0	97	10	5	1	5	0
5	Gabek	220	22	6	1	6	0	263	26	6	1	6	0	345	35	6	1	6	0	408	41	6	1	6	0
6	Tanansari	86	9	5	1	5	0	94	9	5	1	5	0	102	10	5	1	5	0	110	11	5	1	5	0
7	Gerunggang	294	29	6	1	6	0	374	37	6	1	6	0	454	45	6	1	6	0	534	53	6	1	6	0
F	Kabupaten Belitung	761	75	49	5	49	1	774	77	49	5	49	1	787	78	49	5	49	1	800	79	49	5	49	1
1	Membalong	111	11	12	1	12	0	111	11	12	1	12	0	112	11	12	1	12	0	112	11	12	1	12	0
2	Tanjungpandan	435	43	16	1	16	1	446	45	16	1	16	1	457	46	16	1	16	1	468	47	16	1	16	1
3	Badau	63	6	7	1	7	0	63	6	7	1	7	0	63	6	7	1	7	0	64	6	7	1	7	0
4	Siluk	139	13	10	1	10	0	130	13	10	1	10	0	131	13	10	1	10	0	132	13	10	1	10	0
5	Selat Nasik	23	2	4	1	4	0	24	2	4	1	4	0	24	2	4	1	4	0	24	2	4	1	4	0
G	Kabupaten Belitung Timur	558	57	39	7	39	1	589	58	39	7	39	1	620	63	39	7	39	1	651	65	39	7	39	1
1	Dendang	49	5	4	1	4	0	53	5	4	1	4	0	56	6	4	1	4	0	59	6	4	1	4	0
2	Simpang Pesak	38	4	4	1	4	0	41	4	4	1	4	0	44	4	4	1	4	0	47	5	4	1	4	0
3	Gatung	139	13	7	1	7	0	134	13	7	1	7	0	142	14	7	1	7	0	150	15	7	1	7	0
4	Simpang Renggang	33	3	4	1	4	0	34	3	4	1	4	0	36	4	4	1	4	0	38	4	4	1	4	0
5	Manggar	167	17	9	1	9	1	173	17	9	1	9	1	178	18	9	1	9	1	184	18	9	1	9	1
6	Damar	56	6	5	1	5	0	57	6	5	1	5	0	59	6	5	1	5	0	60	6	5	1	5	0
7	Kelapa Kampit	89	9	6	1	6	0	97	10	6	1	6	0	105	11	6	1	6	0	113	11	6	1	6	0
	Prov. Kep. Bangka Belitung	6.545	654	393	47	393	14	7.018	700	393	47	393	14	7.493	749	393	47	393	14	7.964	795	393	47	393	14

Tabel 3.29Kebutuhan Lahan Sarana Ruang Terbuka, Taman Dan Lapangan Olahraga

	No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Tahun 2028						Tahun 2033						Tahun 2038						Tahun 2043					
			Taman RT	Taman RW	Taman Kelurahan	Taman Kecamatan	Pemukaman	Taman Kota	Taman RT	Taman RW	Taman Kelurahan	Taman Kecamatan	Pemukaman	Taman Kota	Taman RT	Taman RW	Taman Kelurahan	Taman Kecamatan	Pemukaman	Taman Kota	Taman RT	Taman RW	Taman Kelurahan	Taman Kecamatan	Pemukaman	Taman Kota
A		Kabupaten Bangka	35,25	17,75	72,90	19,20	42,30	0,08	36,75	18,38	72,90	19,20	44,11	0,08	38,28	19,13	72,90	19,20	45,92	0,08	39,78	19,88	72,90	19,20	47,73	0,08
	1	Mendo barat	5,63	2,88	13,50	2,40	6,75	-	5,95	3,00	13,50	2,40	7,14	-	6,28	3,13	13,50	2,40	7,53	-	6,60	3,25	13,50	2,40	7,92	-
	2	Merawang	3,30	1,63	9,00	2,40	3,96	-	3,43	1,75	9,00	2,40	4,12	-	3,58	1,75	9,00	2,40	4,28	-	3,70	1,88	9,00	2,40	4,44	-
	3	Puding Besar	2,23	1,13	6,30	2,40	2,66	0,03	2,40	1,25	6,30	2,40	2,88	0,03	2,58	1,25	6,30	2,40	3,10	0,03	2,78	1,38	6,30	2,40	3,32	0,03
	4	Sungailiat	9,68	4,88	11,70	2,40	11,62	0,03	9,83	4,88	11,70	2,40	11,79	0,03	9,98	5,00	11,70	2,40	11,96	0,03	10,10	5,00	11,70	2,40	12,13	0,03
	5	Pemali	4,25	2,13	5,40	2,40	5,09	-	4,83	2,38	5,40	2,40	5,78	-	5,40	2,75	5,40	2,40	6,47	-	5,98	3,00	5,40	2,40	7,16	-
	6	Bakam	2,03	1,00	8,10	2,40	2,42	-	2,08	1,00	8,10	2,40	2,48	-	2,13	1,00	8,10	2,40	2,54	-	2,18	1,13	8,10	2,40	2,60	-
	7	Belinyu	5,23	2,63	10,80	2,40	6,28	0,03	5,30	2,63	10,80	2,40	6,37	0,03	5,38	2,75	10,80	2,40	6,46	0,03	5,45	2,75	10,80	2,40	6,55	0,03
	8	Relau Selo	2,93	1,50	8,10	2,40	3,52	-	2,95	1,50	8,10	2,40	3,55	-	2,98	1,50	8,10	2,40	3,58	-	3,00	1,50	8,10	2,40	3,61	-
B		Kabupaten Bangka Tengah	23,53	11,75	56,70	14,40	28,23	0,08	26,00	13,00	56,70	14,40	31,20	0,08	28,48	14,13	56,70	14,40	34,17	0,08	30,95	15,50	56,70	14,40	37,14	0,08
	1	Koba	5,30	2,63	9,90	2,40	6,37	0,03	6,03	3,00	9,90	2,40	7,24	0,03	6,78	3,38	9,90	2,40	8,12	0,03	7,50	3,75	9,90	2,40	8,99	0,03
	2	Lubuk Besar	3,93	2,00	8,10	2,40	4,71	-	4,50	2,25	8,10	2,40	5,41	-	5,10	2,50	8,10	2,40	6,11	-	5,68	2,88	8,10	2,40	6,82	-
	3	Pangkalan Baru	5,25	2,63	10,80	2,40	6,30	0,03	5,05	2,88	10,80	2,40	6,79	0,03	6,08	3,00	10,80	2,40	7,28	0,03	6,48	3,25	10,80	2,40	7,77	0,03
	4	Namang	2,05	1,00	7,20	2,40	2,47	-	2,33	1,13	7,20	2,40	2,79	-	2,58	1,25	7,20	2,40	3,10	-	2,85	1,38	7,20	2,40	3,42	-
	5	Sungai Selan	4,18	2,13	11,70	2,40	5,00	0,03	4,55	2,25	11,70	2,40	5,45	0,03	4,90	2,50	11,70	2,40	5,89	0,03	5,28	2,63	11,70	2,40	6,33	0,03
	6	Simpang Katis	2,83	1,38	9,00	2,40	3,38	-	2,95	1,50	9,00	2,40	3,53	-	3,05	1,50	9,00	2,40	3,67	-	3,18	1,63	9,00	2,40	3,81	-
C		Kabupaten Bangka Selatan	21,35	10,50	47,70	19,20	25,63	0,05	22,28	11,25	47,70	19,20	26,77	0,05	23,25	11,75	47,70	19,20	27,91	0,05	24,20	12,00	47,70	19,20	29,04	0,05
	1	Payung	2,25	1,13	8,10	2,40	2,69	0,03	2,33	1,13	8,10	2,40	2,80	0,03	2,43	1,25	8,10	2,40	2,90	0,03	2,50	1,25	8,10	2,40	3,01	0,03
	2	Paku Besar	1,13	0,50	4,50	2,40	1,34	-	1,25	0,63	4,50	2,40	1,51	-	1,40	0,75	4,50	2,40	1,68	-	1,55	0,75	4,50	2,40	1,85	-
	3	Simpang Rimba	2,55	1,25	6,30	2,40	3,07	-	2,65	1,38	6,30	2,40	3,19	-	2,75	1,38	6,30	2,40	3,31	-	2,85	1,38	6,30	2,40	3,43	-
	4	Tobaoli	8,28	4,13	9,90	2,40	9,93	0,03	8,60	4,25	9,90	2,40	10,33	0,03	8,93	4,50	9,90	2,40	10,72	0,03	9,28	4,63	9,90	2,40	11,12	0,03
	5	Tukad Sadai	1,38	0,63	4,50	2,40	1,64	-	1,43	0,75	4,50	2,40	1,71	-	1,48	0,75	4,50	2,40	1,78	-	1,53	0,75	4,50	2,40	1,84	-
	6	Air Gegas	4,48	2,25	9,00	2,40	5,38	-	4,68	2,38	9,00	2,40	5,60	-	4,85	2,38	9,00	2,40	5,81	-	5,03	2,50	9,00	2,40	6,03	-
	7	Lupar Pongok	0,85	0,38	3,60	2,40	1,02	-	0,88	0,50	3,60	2,40	1,06	-	0,93	0,50	3,60	2,40	1,11	-	0,95	0,50	3,60	2,40	1,15	-
	8	Kepulauan Pongok	0,45	0,25	1,80	2,40	0,55	-	0,48	0,25	1,80	2,40	0,57	-	0,50	0,25	1,80	2,40	0,60	-	0,53	0,25	1,80	2,40	0,62	-
D		Kabupaten Bangka Barat	21,93	11,00	59,40	14,40	26,32	0,08	22,73	11,38	59,40	14,40	27,27	0,08	23,53	11,63	59,40	14,40	28,22	0,08	24,28	12,13	59,40	14,40	29,17	0,08
	1	Kelapa	3,78	1,88	12,60	2,40	4,53	0,03	3,95	2,00	12,60	2,40	4,75	0,03	4,15	2,13	12,60	2,40	4,98	0,03	4,33	2,13	12,60	2,40	5,20	0,03
	2	Tempilang	3,25	1,63	8,10	2,40	3,91	-	3,55	1,75	8,10	2,40	4,27	-	3,85	1,88	8,10	2,40	4,62	-	4,15	2,13	8,10	2,40	4,97	-
	3	Muruk	5,48	2,75	8,10	2,40	6,57	0,03	5,53	2,75	8,10	2,40	6,63	0,03	5,58	2,75	8,10	2,40	6,68	0,03	5,60	2,75	8,10	2,40	6,73	0,03
	4	Simpang Teritip	3,33	1,63	11,70	2,40	3,99	-	3,48	1,75	11,70	2,40	4,16	-	3,63	1,75	11,70	2,40	4,34	-	3,75	1,88	11,70	2,40	4,51	-
	5	Jebus	2,43	1,25	9,90	2,40	2,91	-	2,53	1,25	9,90	2,40	3,02	-	2,60	1,25	9,90	2,40	3,13	-	2,70	1,38	9,90	2,40	3,24	-
	6	Paritlaga	3,68	1,88	9,00	2,40	4,40	0,03	3,70	1,88	9,00	2,40	4,43	0,03	3,73	1,88	9,00	2,40	4,47	0,03	3,75	1,88	9,00	2,40	4,51	0,03
E		Kota Pangkal Pinang	28,60	14,25	37,80	16,80	34,35	0,03	33,63	16,63	37,80	16,80	40,35	0,03	38,63	19,38	37,80	16,80	46,35	0,03	43,63	21,88	37,80	16,80	52,35	0,03
	1	Rangku	4,15	2,13	7,20	2,40	4,99	-	4,55	2,25	7,20	2,40	5,45	-	4,93	2,50	7,20	2,40	5,90	-	5,30	2,63	7,20	2,40	6,36	-
	2	Bukit Irtan	5,03	2,50	6,30	2,40	6,04	-	5,05	2,88	6,30	2,40	6,79	-	6,28	3,13	6,30	2,40	7,54	-	6,90	3,50	6,30	2,40	8,29	-
	3	Girimaya	2,10	1,00	4,50	2,40	2,53	0,03	2,30	1,13	4,50	2,40	2,77	0,03	2,50	1,25	4,50	2,40	3,00	0,03	2,70	1,38	4,50	2,40	3,23	0,03
	4	Pangkalbalam	2,33	1,13	4,50	2,40	2,80	-	2,35	1,13	4,50	2,40	2,83	-	2,40	1,25	4,50	2,40	2,87	-	2,43	1,25	4,50	2,40	2,91	-
	5	Gabek	5,50	2,75	5,40	2,40	6,60	-	7,08	3,50	5,40	2,40	8,48	-	8,63	4,38	5,40	2,40	10,35	-	10,20	5,13	5,40	2,40	12,23	-
	6	Tamansari	2,15	1,13	4,50	2,40	2,58	-	2,35	1,13	4,50	2,40	2,82	-	2,55	1,25	4,50	2,40	3,05	-	2,75	1,38	4,50	2,40	3,29	-
	7	Gerunggang	7,35	3,63	5,40	2,40	8,82	-	9,35	4,63	5,40	2,40	11,22	-	11,35	5,63	5,40	2,40	13,63	-	13,35	6,63	5,40	2,40	16,03	-
F		Kabupaten Belitung	19,03	9,38	44,10	12,00	22,82	0,03	19,35	9,63	44,10	12,00	23,21	0,03	19,68	9,75	44,10	12,00	23,60	0,03	20,00	9,88	44,10	12,00	23,98	0,03
	1	Membalang	2,78	1,38	10,80	2,40	3,32	-	2,78	1,38	10,80	2,40	3,34	-	2,80	1,38	10,80	2,40	3,36	-	2,80	1,38	10,80	2,40	3,37	-
	2	Tanjungpandan	10,88	5,38	14,40	2,40	13,05	0,03	11,15	5,63	14,40	2,40	13,37	0,03	11,43	5,75	14,40	2,40	13,70	0,03	11,70	5,88	14,40	2,40	14,03	0,03
	3	Badiau	1,58	0,75	6,30	2,40	1,88	-	1,58	0,75	6,30	2,40	1,89	-	1,58	0,75	6,30	2,40	1,90	-	1,60	0,75	6,30	2,40	1,92	-
	4	Sujuk	3,23	1,63	9,00	2,40	3,88	-	3,25	1,63	9,00	2,40	3,90	-	3,28	1,63	9,00	2,40	3,93	-	3,30	1,63	9,00	2,40	3,95	-
	5	Selat Nasik	0,58	0,25	3,60	2,40	0,70	-	0,60	0,25	3,60	2,40	0,71	-	0,60	0,25	3,60	2,40	0,71	-	0,60	0,25	3,60	2,40	0,71	-
G		Kabupaten Belitung Timur	13,95	7,13	35,10	16,80	16,76	0,03	14,73	7,25	35,10	16,80	17,68	0,03	15,50	7,88										

6) Transportasi



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Badan Air
- Garis Pantai

Tingkat Aksesibilitas

- Rendah
- Sedang
- Tinggi
- Sangat Tinggi

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

7) Air Bersih

Tingkat Aksesibilitas Menurut Kecamatan di Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota/Kecamatan	Panjang Jalan (Km)	Luas Kecamatan (Km2)	Indeks Aksesibilitas	Kategori
Kabupaten Bangka	2.402,03	3.016,85	0,80	Rendah
Kecamatan Bakam	343,31	449,29	0,76	Rendah
Kecamatan Belinyu	443,00	549,51	0,81	Rendah
Kecamatan Mendo Barat	360,85	643,22	0,56	Rendah
Kecamatan Merawang	275,13	217,63	1,26	Sedang
Kecamatan Pemali	212,76	148,02	1,44	Sedang
Kecamatan Puding Besar	191,05	312,15	0,61	Rendah
Kecamatan Riau Sili	314,57	558,19	0,56	Rendah
Kecamatan Sungailiat	261,36	138,84	1,88	Sedang
Kabupaten Bangka Barat	2.926,47	2.851,41	1,03	Rendah
Kecamatan Jebus	357,83	389,35	0,92	Rendah
Kecamatan Kelapa	429,85	585,27	0,73	Rendah
Kecamatan Muntok	458,16	371,50	1,23	Rendah
Kecamatan Paritiga	339,93	326,93	1,04	Rendah
Kecamatan Simpang Teritip	842,32	799,24	1,07	Rendah
Kecamatan Tempilang	498,38	399,12	1,28	Sedang
Kabupaten Bangka Selatan	2.184,52	3.598,23	0,61	Rendah
Kecamatan Air Gegas	704,75	1.037,62	0,68	Rendah
Kecamatan Kepulauan Pongok	14,38	48,62	0,30	Rendah
Kecamatan Lepar Pongok	134,18	231,87	0,58	Rendah
Kecamatan Payung	319,46	483,99	0,66	Rendah
Kecamatan Pulaubesar	111,52	299,96	0,37	Rendah
Kecamatan Simpang Rimba	206,77	503,77	0,41	Rendah
Kecamatan Toboali	603,42	846,40	0,71	Rendah
Kecamatan Tukak Sadai	90,04	146,01	0,62	Rendah
Kabupaten Bangka Tengah	1.395,64	2.259,99	0,62	Rendah
Kecamatan Koba	226,64	377,97	0,60	Rendah
Kecamatan Lubuk Besar	446,26	543,06	0,82	Rendah
Kecamatan Namang	88,56	199,34	0,44	Rendah
Kecamatan Pangkalan Baru	166,14	106,54	1,56	Sedang
Kecamatan Simpang Katis	160,96	231,34	0,70	Rendah
Kecamatan Sungai Selan	307,08	801,74	0,38	Rendah
Kabupaten Belitung	1.296,98	2.270,71	0,57	Rendah
Kecamatan Badau	188,58	479,69	0,39	Rendah
Kecamatan Membalong	554,97	941,33	0,59	Rendah
Kecamatan Selat Nasik	43,47	171,32	0,25	Rendah
Kecamatan Sijuk	310,77	496,34	0,63	Rendah
Kecamatan Tanjung Pandan	199,19	182,03	1,09	Rendah
Kabupaten Belitung Timur	1.052,24	2.588,40	0,41	Rendah
Kecamatan Damar	111,78	224,28	0,50	Rendah
Kecamatan Dendang	208,49	412,26	0,51	Rendah
Kecamatan Gantung	330,43	591,54	0,56	Rendah
Kecamatan Kelapa Kampit	147,76	530,42	0,28	Rendah
Kecamatan Manggar	64,54	211,63	0,30	Rendah
Kecamatan Simpang Pesak	93,99	243,69	0,39	Rendah
Kecamatan Simpang Renggang	95,25	374,59	0,25	Rendah
Kota Pangkal Pinang	252,31	104,54	2,41	Tinggi
Kecamatan Bukitintan	75,87	35,53	2,14	Tinggi
Kecamatan Gabek	42,79	20,40	2,10	Tinggi
Kecamatan Gerunggang	40,59	31,15	1,30	Sedang
Kecamatan Girimaya	23,34	4,50	5,19	Sangat Tinggi
Kecamatan Pangkal Balam	27,65	4,72	5,85	Sangat Tinggi
Kecamatan Rangku	25,38	5,04	5,03	Sangat Tinggi
Kecamatan Taman Sari	16,70	3,19	5,23	Sangat Tinggi
Grand Total	11.510,20	16.690,13	0,69	

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2023

ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH TAHUN 2043									
No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (ltr/Hr)	Konsumsi Unit Hidran (30% dari SR)	Konsumsi Unit Non Domestik (Ltr/Har)	Kehilangan Air (30 %)	Faktor Hari Maksimum (1,25 * harian)	Faktor jam Puncak (1,75 * hari maksimal)	Jumlah Total (Ltr/Hr)	Jumlah Total (Ltr/detik)
A	Kabupaten Bangka	42.961.174	12.888.352	6.444.176	18.688.111	23.360.139	40.880.243	145.222.195	1.681
1	Mendo barat	7.126.654	2.137.996	1.068.998	3.100.095	3.875.118	6.781.457	24.090.318	278.82
2	Merawang	3.998.401	1.199.520	599.760	1.739.305	2.174.131	3.804.729	13.515.847	156.43
3	Puding Besar	2.992.065	897.619	448.810	1.301.548	1.626.935	2.847.137	10.114.114	117.06
4	Sungailiat	10.915.560	3.274.668	1.637.334	4.748.268	5.935.336	10.386.837	36.898.003	427.06
5	Pemali	6.441.766	1.932.530	966.265	2.802.168	3.502.710	6.129.743	21.775.182	252.03
6	Bakam	2.342.014	702.604	351.302	1.018.776	1.273.470	2.228.573	7.916.739	91.63
7	Belinyu	5.899.469	1.769.841	884.920	2.566.269	3.207.836	5.613.713	19.942.048	230.81
8	Riau Siliu	3.245.246	973.574	486.787	1.411.682	1.764.602	3.088.054	10.969.945	126.97
B	Kabupaten Bangka Tengah	33.425.523	10.027.657	5.013.828	14.540.102	18.175.128	31.806.474	112.988.713	1.308
1	Koba	8.089.625	2.426.887	1.213.444	3.518.987	4.398.733	7.697.784	27.345.460	316.50
2	Lubuk Besar	6.135.365	1.840.610	920.305	2.668.884	3.336.105	5.838.183	20.739.451	240.04
3	Pangkalan Baru	6.992.871	2.097.861	1.048.931	3.041.899	3.802.373	6.654.153	23.638.088	273.59
4	Namang	3.078.019	923.406	461.703	1.338.938	1.673.673	2.928.928	10.404.667	120.42
5	Sungai Selan	5.700.141	1.710.042	855.021	2.479.562	3.099.452	5.424.041	19.268.259	223.01
6	Simpang Katis	3.429.502	1.028.851	514.425	1.491.833	1.864.792	3.263.385	11.592.788	134.18
C	Kabupaten Bangka Selatan	26.137.777	7.841.333	3.920.667	11.369.933	14.212.416	24.871.728	88.353.853	1.023
1	Payung	2.709.728	812.918	406.459	1.178.732	1.473.415	2.578.475	9.159.727	106.02
2	Pulau Besar	1.660.947	498.284	249.142	722.512	903.140	1.580.495	5.614.520	64.98
3	Simpang Rimba	3.090.845	927.253	463.627	1.344.518	1.680.647	2.941.132	10.448.022	120.93
4	Toboali	10.007.210	3.002.163	1.501.082	4.353.137	5.441.421	9.522.486	33.827.498	391.52
5	Tukak Sadai	1.657.307	497.192	248.596	720.928	901.160	1.577.031	5.602.214	64.84
6	Air Gegas	5.424.790	1.627.437	813.718	2.359.783	2.949.729	5.162.026	18.337.484	212.24
7	Lepar Pongok	1.031.340	309.402	154.701	448.633	560.791	981.384	3.486.251	40.35
8	Kepulauan Pongok	555.610	166.683	83.342	241.691	302.113	528.698	1.878.137	21.74
D	Kabupaten Bangka Barat	26.249.360	7.874.808	3.937.404	11.418.472	14.273.090	24.977.907	88.731.041	1.027
1	Kelapa	4.682.823	1.404.847	702.423	2.037.028	2.546.285	4.455.999	15.829.406	183.21
2	Tempilang	4.477.222	1.343.167	671.583	1.947.592	2.434.489	4.260.356	15.134.409	175.17
3	Muntok	6.058.666	1.817.600	908.800	2.635.520	3.294.400	5.765.199	20.480.184	237.04
4	Simpang Teritip	4.061.132	1.218.340	609.170	1.766.592	2.208.241	3.864.421	13.727.895	158.89
5	Jebus	2.914.917	874.475	437.238	1.267.989	1.584.986	2.773.726	9.853.331	114.04
6	Paritiga	4.054.600	1.216.380	608.190	1.763.751	2.204.689	3.858.205	13.705.815	158.63
E	Kota Pangkal Pinang	47.110.840	14.133.252	7.066.626	20.493.216	25.616.519	44.828.909	159.249.362	1.843
1	Rangkui	5.726.767	1.718.030	859.015	2.491.144	3.113.930	5.449.377	19.358.262	224.05
2	Bukit Intan	7.457.819	2.237.346	1.118.673	3.244.151	4.055.189	7.096.581	25.209.760	291.78
3	Girimaya	2.907.924	872.377	436.189	1.264.947	1.581.184	2.767.072	9.829.692	113.77
4	Pangkalbalam	2.619.772	785.932	392.966	1.139.601	1.424.501	2.492.877	8.855.648	102.50
5	Gabek	11.005.871	3.301.761	1.650.881	4.787.554	5.984.442	10.472.774	37.203.284	430.59
6	Tamansari	2.963.077	888.923	444.462	1.288.939	1.611.173	2.819.553	10.016.127	115.93
7	Gerunggang	14.429.609	4.328.883	2.164.441	6.276.880	7.846.100	13.730.675	48.776.589	564.54
F	Kabupaten Belitung	21.586.417	6.475.925	3.237.963	9.390.092	11.737.614	20.540.825	72.968.837	845
1	Membalong	3.036.356	910.907	455.453	1.320.815	1.651.018	2.889.282	10.263.831	118.79
2	Tanjungpandan	12.623.631	3.787.089	1.893.545	5.491.280	6.864.100	12.012.174	42.671.819	493.89
3	Badau	1.725.807	517.742	258.871	750.726	938.407	1.642.213	5.833.766	67.52
4	Sijuk	3.558.522	1.067.557	533.778	1.547.957	1.934.946	3.386.156	12.028.916	139.22
5	Selat Nasik	642.102	192.631	96.315	279.314	349.143	611.000	2.170.505	25.12
G	Kabupaten Belitung Timur	17.573.149	5.271.945	2.635.972	7.644.320	9.555.400	16.721.950	59.402.736	688
1	Dendang	1.602.505	480.752	240.376	697.090	871.362	1.524.884	5.416.969	62.70
2	Simpang Pesak	1.267.813	380.344	190.172	551.499	689.373	1.206.403	4.285.604	49.60
3	Gantung	4.047.285	1.214.186	607.093	1.760.569	2.200.711	3.851.245	13.681.088	158.35
4	Simpang Renggiang	1.013.745	304.124	152.062	440.979	551.224	964.642	3.426.775	39.66
5	Manggar	4.967.054	1.490.116	745.058	2.160.668	2.700.836	4.726.462	16.790.195	194.33
6	Damar	1.623.584	487.075	243.538	706.259	882.824	1.544.942	5.488.222	63.52
7	Kelapa Kampit	3.051.162	915.349	457.674	1.327.256	1.659.070	2.903.372	10.313.883	119.37
	Prov. Kep. Bangka Belitung	215.044.242	64.513.272	32.256.636	93.544.245	116.930.306	204.628.036	726.916.738	8.413

8) Energi Listrik

ANALISIS KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK TAHUN 2043														
No	Kabupaten /Kota/ Kecamatan	Proyeksi Penduduk (jiwa)	Jumlah KK (asumsi 1 KK = 5 jiwa)	Asumsi Jumlah Rumah			Kebutuhan Domestik				Kebutuhan Domestik (30 %)	Kebutuhan Penerangan Jalan (10 %)	Kebutuhan Listrik	
				Rumah tipe besar	Rumah tipe sedang	Rumah tipe kecil	Rumah tipe besar (2200 watt)	Rumah tipe sedang (1300 watt)	Rumah tipe kecil (900 watt)	Total Kebutuhan Domestik			watt	KW
A	Kabupaten Bangka	397.789	79.558	13.260	26.519	39.779	29.171.168	34.475.017	35.800.979	99.447.163	29.834.149	12.928.131	12.928.131	12.928.131
1	Mendo barat	65.988	13.198	2200	4.399	6.599	4.839.086	5.718.920	5.938.878	16.496.885	4.949.065	2.144.594,99	2.144.595	2.144.595
2	Merawang	37.022	7.404	1234	2.468	3.702	2.714.964	3.208.594	3.332.001	9.255.559	2.776.668	1.203.222,67	1.203.223	1.203.223
3	Puding Besar	27.704	5.541	923	1.847	2.770	2.031.649	2.401.040	2.493.387	6.926.076	2.077.823	900.389,86	900.390	900.390
4	Sungailiat	101.070	20.214	3369	6.738	10.107	7.411.800	8.759.400	9.096.300	25.267.499	7.580.250	3.284.774,93	3.284.775	3.284.775
5	Pemali	59.646	11.929	1988	3.976	5.965	4.374.039	5.169.318	5.368.138	14.911.495	4.473.448	1.938.494,35	1.938.494	1.938.494
6	Bakam	21.685	4.337	723	1.446	2.169	1.590.256	1.879.394	1.951.678	5.421.328	1.626.399	704.772,70	704.773	704.773
7	Belinyu	54.625	10.925	1821	3.642	5.462	4.005.812	4.734.142	4.916.224	13.656.178	4.096.853	1.775.303,12	1.775.303	1.775.303
8	Riau Siliu	30.049	6.010	1002	2.003	3.005	2.203.562	2.604.210	2.704.371	7.512.143	2.253.643	976.578,59	976.579	976.579
B	Kabupaten Bangka Tengah	309.496	61.899	10.317	20.633	30.950	22.696.343	26.822.951	27.854.602	77.373.896	23.212.169	10.058.606	10.058.606	10.058.606
1	Koba	74.904	14.981	2497	4.994	7.490	5.492.955	6.491.674	6.741.354	18.725.983	5.617.795	2.434.377,81	2.434.378	2.434.378
2	Lubuk Besar	56.809	11.362	1894	3.787	5.681	4.165.989	4.923.441	5.112.804	14.202.234	4.260.670	1.846.290,39	1.846.290	1.846.290
3	Pangkalan Baru	64.749	12.950	2158	4.317	6.475	4.748.245	5.611.563	5.827.392	16.187.201	4.856.160	2.104.336,07	2.104.336	2.104.336
4	Namang	28.500	5.700	950	1.900	2.850	2.090.013	2.470.016	2.565.016	7.125.045	2.137.513	926.255,83	926.256	926.256
5	Sungai Selan	52.779	10.556	1759	3.519	5.278	3.870.466	4.574.188	4.750.118	13.194.772	3.958.432	1.715.320,35	1.715.320	1.715.320
6	Simpang Katis	31.755	6.351	1058	2.117	3.175	2.328.674	2.752.069	2.857.918	7.938.662	2.381.598	1.032.026,00	1.032.026	1.032.026
C	Kabupaten Bangka Selatan	242.016	48.403	8.067	16.134	24.202	17.747.873	20.974.759	21.781.481	60.504.113	18.151.234	7.865.535	7.865.535	7.866.535
1	Payung	25.090	5.018	836	1.673	2.509	1.839.939	2.174.473	2.258.107	6.272.518	1.881.755	815.427,37	815.427	815.427
2	Pulau Besar	15.379	3.076	513	1.025	1.538	1.127.804	1.332.859	1.384.123	3.844.785	1.153.436	499.822,05	499.822	499.822
3	Simpang Rimba	28.619	5.724	954	1.908	2.862	2.098.722	2.480.308	2.575.704	7.154.734	2.146.420	930.115,36	930.115	930.115
4	Toboali	92.659	18.532	3089	6.177	9.266	6.795.019	8.030.477	8.339.342	23.164.839	6.949.452	3.011.429,04	3.011.429	3.011.429
5	Tukak Sadai	15.345	3.069	512	1.023	1.535	1.125.332	1.329.937	1.381.089	3.836.358	1.150.907	498.726,49	498.726	498.726
6	Air Gegas	50.230	10.046	1674	3.349	5.023	3.683.499	4.353.226	4.520.658	12.557.383	3.767.215	1.632.459,84	1.632.460	1.632.460
7	Lepar Pongok	9.549	1.910	318	637	955	700.293	827.618	859.450	2.387.361	716.208	310.356,92	310.357	310.357
8	Kepulauan Pongok	5.145	1.029	171	343	514	377.266	445.860	463.009	1.286.135	385.841	167.197,58	167.198	167.200
D	Kabupaten Bangka Barat	243.050	48.610	8.102	16.203	24.305	17.823.640	21.064.302	21.874.467	60.762.409	18.228.723	7.899.113	7.899.113	7.899.113
1	Kelapa	43.359	8.672	1445	2.891	4.336	3.179.695	3.757.821	3.902.353	10.839.869	3.251.961	1.409.182,95	1.409.183	1.409.183
2	Tempilang	41.456	8.291	1382	2.764	4.146	3.040.089	3.592.832	3.731.018	10.363.940	3.109.182	1.347.312,14	1.347.312	1.347.312
3	Muntok	56.099	11.220	1870	3.740	5.610	4.113.909	4.861.892	5.048.888	14.024.689	4.207.407	1.823.209,63	1.823.210	1.823.210
4	Simpang Teritip	37.603	7.521	1253	2.507	3.760	2.757.559	3.258.933	3.384.277	9.400.769	2.820.231	1.222.099,93	1.222.100	1.222.100
5	Jebus	26.990	5.398	900	1.799	2.699	1.979.265	2.339.131	2.429.098	6.747.494	2.024.248	877.174,19	877.174	877.174
6	Parittiga	37.543	7.509	1251	2.503	3.754	2.753.123	3.253.691	3.378.833	9.385.648	2.815.694	1.220.134,28	1.220.134	1.220.134
E	Kota Pangkal Pinang	436.211	87.242	14.540	29.081	43.621	31.988.842	37.804.995	39.259.034	109.052.871	32.715.861	14.176.873	14.176.873	14.177.873
1	Rangkui	53.026	10.605	1768	3.535	5.303	3.888.546	4.595.554	4.772.306	13.256.405	3.976.922	1.723.332,68	1.723.333	1.723.333
2	Bukit Intan	69.054	13.811	2302	4.604	6.905	5.063.951	5.984.670	6.214.849	17.263.471	5.179.041	2.244.251,18	2.244.251	2.244.251
3	Girimaya	26.925	5.385	898	1.795	2.693	1.974.516	2.333.519	2.423.270	6.731.306	2.019.392	875.069,78	875.070	875.070
4	Pangkalbalam	24.257	4.851	809	1.617	2.426	1.778.857	2.102.286	2.183.143	6.064.287	1.819.286	788.357,29	788.357	788.357
5	Gabek	101.906	20.381	3397	6.794	10.191	7.473.122	8.831.872	9.171.559	25.476.554	7.642.966	3.311.951,99	3.311.952	3.311.952
6	Tamansari	27.436	5.487	915	1.829	2.744	2.011.966	2.377.778	2.469.231	6.858.975	2.057.692	891.666,73	891.667	891.667
7	Gerunggang	133.607	26.721	4454	8.907	13.361	9.797.883	11.579.316	12.024.675	33.401.874	10.020.562	4.342.243,59	4.342.244	4.342.244
F	Kabupaten Belitung	199.874	39.975	6.662	13.325	19.987	14.657.444	17.322.434	17.988.681	49.968.559	14.990.568	6.495.913	6.495.913	6.496.913
1	Membalong	28.114	5.623	937	1.874	2.811	2.061.723	2.436.582	2.530.296	7.028.601	2.108.580	913.718,13	913.718	913.718
2	Tanjungpandan	116.885	23.377	3896	7.792	11.689	8.571.602	10.130.075	10.519.693	29.221.369	8.766.411	3.798.777,98	3.798.778	3.798.778
3	Badau	15.980	3.196	533	1.065	1.598	1.171.844	1.384.907	1.438.172	3.994.923	1.198.477	519.339,99	519.340	519.340
4	Sijuk	32.949	6.590	1098	2.197	3.295	2.416.280	2.855.604	2.965.435	8.237.319	2.471.196	1.070.851,45	1.070.851	1.070.851
5	Selat Nasik	5.945	1.189	198	396	595	435.995	515.267	535.085	1.486.347	445.904	193.225,10	193.225	193.225
G	Kabupaten Belitung Timur	162.714	32.543	5.424	10.848	16.271	11.932.385	14.101.910	14.644.291	40.678.586	12.203.576	5.288.216	5.288.216	5.288.216
1	Dendang	14.838	2.968	495	989	1.484	1.088.121	1.285.961	1.335.421	3.709.503	1.112.851	482.235,40	482.235	482.235
2	Simpang Pesak	11.739	2.348	391	783	1.174	860.861	1.017.381	1.056.511	2.934.752	880.426	381.517,79	381.518	381.518
3	Gantung	37.475	7.495	1249	2.498	3.747	2.748.157	3.247.821	3.372.738	9.368.716	2.810.615	1.217.933,02	1.217.933	1.217.933
4	Simpang Renggang	9.387	1.877	313	626	939	688.345	813.499	844.788	2.346.632	703.990	305.062,19	305.062	305.062
5	Manggar	45.991	9.198	1533	3.066	4.599	3.372.691	3.985.908	4.139.212	11.497.810	3.449.343	1.494.715,32	1.494.715	1.494.715
6	Damar	15.033	3.007	501	1.002	1.503	1.102.434	1.302.876	1.352.987	3.758.297	1.127.489	488.578,58	488.579	488.579
7	Kelapa Kampit	28.252	5.650	942	1.883	2.825	2.071.777	2.448.464	2.542.635	7.062.876	2.118.863	918.173,89	918.174	918.174
Prov. Kep. Bangka Belitung		1.991.150	398.230	66.372	132.743	199.115	146.017.695	172.566.367	179.203.535	497.787.596	149.336.279	64.712.387	64.712.387	64.712.387

9) Telekomunikasi

ANALISIS KEBUTUHAN TELEKOMUNIKASI TAHUN 2043										
No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Proyeksi Penduduk (jiwa)	Jumlah KK (asumsi 1 KK = 5	Asumsi Jumlah Rumah			Kebutuhan Domestik (40 %)	Kebutuhan Non Domestik (10 %)	Total Kebutuhan SST	
				Rumah tipe besar	Rumah tipe sedang	Rumah tipe kecil				
A	Kabupaten Bangka	397.789	79.558	13.260	26.519	39.779	79.558	31.823	3.182	35.005
1	Mendo barat	65.988	13.198	2200	4.399	6.599	13.198	5.279	528	5.807
2	Merawang	37.022	7.404	1234	2.468	3.702	7.404	2.962	296	3.258
3	Puding Besar	27.704	5.541	923	1.847	2.770	5.541	2.216	222	2.438
4	Sungailiat	101.070	20.214	3369	6.738	10.107	20.214	8.086	809	8.894
5	Pemali	59.646	11.929	1988	3.976	5.965	11.929	4.772	477	5.249
6	Bakam	21.685	4.337	723	1.446	2.169	4.337	1.735	173	1.908
7	Belinyu	54.625	10.925	1821	3.642	5.462	10.925	4.370	437	4.807
8	Riau Silip	30.049	6.010	1002	2.003	3.005	6.010	2.404	240	2.644
B	Kabupaten Bangka Tengah	309.496	61.899	10.317	20.633	30.950	61.899	24.760	2.476	27.236
1	Koba	74.904	14.981	2497	4.994	7.490	14.981	5.992	599	6.592
2	Lubuk Besar	56.809	11.362	1894	3.787	5.681	11.362	4.545	454	4.999
3	Pangkalan Baru	64.749	12.950	2158	4.317	6.475	12.950	5.180	518	5.698
4	Namang	28.500	5.700	950	1.900	2.850	5.700	2.280	228	2.508
5	Sungai Selan	52.779	10.556	1759	3.519	5.278	10.556	4.222	422	4.645
6	Simpang Katis	31.755	6.351	1058	2.117	3.175	6.351	2.540	254	2.794
C	Kabupaten Bangka Selatan	242.016	48.403	8.067	16.134	24.202	48.403	19.361	1.936	21.297
1	Payung	25.090	5.018	836	1.673	2.509	5.018	2.007	201	2.208
2	Pulau Besar	15.379	3.076	513	1.025	1.538	3.076	1.230	123	1.353
3	Simpang Rimba	28.619	5.724	954	1.908	2.862	5.724	2.290	229	2.518
4	Toboali	92.659	18.532	3089	6.177	9.266	18.532	7.413	741	8.154
5	Tukak Sadai	15.345	3.069	512	1.023	1.535	3.069	1.228	123	1.350
6	Air Gegas	50.230	10.046	1674	3.349	5.023	10.046	4.018	402	4.420
7	Lepar Pongok	9.549	1.910	318	637	955	1.910	764	76	840
8	Kepulauan Pongok	5.145	1.029	171	343	514	1.029	412	41	453
D	Kabupaten Bangka Barat	243.050	48.610	8.102	16.203	24.305	48.610	19.444	1.944	21.388
1	Kelapa	43.359	8.672	1445	2.891	4.336	8.672	3.469	347	3.816
2	Tempilang	41.456	8.291	1382	2.764	4.146	8.291	3.316	332	3.648
3	Muntok	56.099	11.220	1870	3.740	5.610	11.220	4.488	449	4.937
4	Simpang Teritip	37.603	7.521	1253	2.507	3.760	7.521	3.008	301	3.309
5	Jebus	26.990	5.398	900	1.799	2.699	5.398	2.159	216	2.375
6	Parittiga	37.543	7.509	1251	2.503	3.754	7.509	3.003	300	3.304
E	Kota Pangkal Pinang	436.211	87.242	14.540	29.081	43.621	87.242	34.897	3.490	38.387
1	Rangkui	53.026	10.605	1768	3.535	5.303	10.605	4.242	424	4.666
2	Bukit Intan	69.054	13.811	2302	4.604	6.905	13.811	5.524	552	6.077
3	Girimaya	26.925	5.385	898	1.795	2.693	5.385	2.154	215	2.369
4	Pangkalbalam	24.257	4.851	809	1.617	2.426	4.851	1.941	194	2.135
5	Gabek	101.906	20.381	3397	6.794	10.191	20.381	8.152	815	8.968
6	Tamansari	27.436	5.487	915	1.829	2.744	5.487	2.195	219	2.414
7	Gerunggang	133.607	26.721	4454	8.907	13.361	26.721	10.689	1.069	11.757
F	Kabupaten Belitung	199.874	39.975	6.662	13.325	19.987	39.975	15.990	1.599	17.589
1	Membalong	28.114	5.623	937	1.874	2.811	5.623	2.249	225	2.474
2	Tanjungpandan	116.885	23.377	3896	7.792	11.689	23.377	9.351	935	10.286
3	Badau	15.980	3.196	533	1.065	1.598	3.196	1.278	128	1.406
4	Sijuk	32.949	6.590	1098	2.197	3.295	6.590	2.636	264	2.900
5	Selat Nasik	5.945	1.189	198	396	595	1.189	476	48	523
G	Kabupaten Belitung Timur	162.714	32.543	5.424	10.848	16.271	32.543	13.017	1.302	14.319
1	Dendang	14.838	2.968	495	989	1.484	2.968	1.187	119	1.306
2	Simpang Pesak	11.739	2.348	391	783	1.174	2.348	939	94	1.033
3	Gantung	37.475	7.495	1249	2.498	3.747	7.495	2.998	300	3.298
4	Simpang Renggiang	9.387	1.877	313	626	939	1.877	751	75	826
5	Manggar	45.991	9.198	1533	3.066	4.599	9.198	3.679	368	4.047
6	Damar	15.033	3.007	501	1.002	1.503	3.007	1.203	120	1.323
7	Kelapa Kampit	28.252	5.650	942	1.883	2.825	5.650	2.260	226	2.486
	Prov. Kep. Bangka Belitung	1.991.150	398.230	66.372	132.743	199.115	398.230	159.292	15.929	175.221

10) Persampahan

Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ANALISIS TIMBULAN SAMPAH TAHUN 2043															
No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Proyeksi Penduduk (jiwa)	Standar Produksi Sampah (m3/org/hr)	Perkiraan Produksi Sampah Domestik	Perkiraan Produksi Sampah Non Domestik	Perkiraan timbulan sampah kegiatan industri	Perkiraan timbulan sampah kegiatan komersial	Perkiraan timbulan sampah kegiatan pendidikan	Perkiraan timbulan sampah perkantoran	Perkiraan Total Produksi Sampah	Kebutuhan Bin/Tempat Sampah	Kebutuhan Transfer Depo (200 m3)	Kebutuhan Pelayanan Truk Pengangkut (6 m3)	Kebutuhan TPS (10 m3)	container sampah (6m3)
A	Kabupaten Bangka	397.789	0,0025	994,47	238,67	68,26	68,26	59,67	42,48	1.233,14	79.558	308	123	106	106
	1 Mendo barat	65.988		164,97	39,59	11,32	11,32	9,90	7,05	204,56	13.198	51	20	18	18
	2 Merawang	37.022		92,56	22,21	6,35	6,35	5,55	3,95	114,77	7.404	29	11	10	10
	3 Puding Besar	27.704		69,26	16,62	4,75	4,75	4,16	2,96	85,88	5.541	21	9	7	7
	4 Sungailiat	101.070		252,67	60,64	17,34	17,34	15,16	10,79	313,32	20.214	78	31	27	27
	5 Pemali	59.646		149,11	35,79	10,24	10,24	8,95	6,37	184,90	11.929	46	18	16	16
	6 Bakam	21.685		54,21	13,01	3,72	3,72	3,25	2,32	67,22	4.337	17	7	6	6
	7 Belinyu	54.625		136,56	32,77	9,37	9,37	8,19	5,83	169,34	10.925	42	17	15	15
	8 Riau Sili	30.049		75,12	18,03	5,16	5,16	4,51	3,21	93,15	6.010	23	9	8	8
B	Kabupaten Bangka Tengah	309.496		773,74	185,70	53,11	53,11	46,42	33,05	959,44	61.899	240	96	83	83
	1 Koba	74.904		187,26	44,94	12,85	12,85	11,24	8,00	232,20	14.981	58	23	20	20
	2 Lubuk Besar	56.809		142,02	34,09	9,75	9,75	8,52	6,07	176,11	11.362	44	18	15	15
	3 Pangkalan Baru	64.749		161,87	38,85	11,11	11,11	9,71	6,92	200,72	12.950	50	20	17	17
	4 Namang	28.500		71,25	17,10	4,89	4,89	4,28	3,04	88,35	5.700	22	9	8	8
	5 Sungai Selan	52.779		131,95	31,67	9,06	9,06	7,92	5,64	163,62	10.556	41	16	14	14
	6 Simpang Katis	31.755		79,39	19,05	5,45	5,45	4,76	3,39	98,44	6.351	25	10	8	8
C	Kabupaten Bangka Selatan	242.016		605,04	145,21	41,53	41,53	36,30	25,85	750,25	48.403	188	75	65	65
	1 Payung	25.090		62,73	15,05	4,31	4,31	3,76	2,68	77,78	5.018	19	8	7	7
	2 Pulau Besar	15.379		38,45	9,23	2,64	2,64	2,31	1,64	47,68	3.076	12	5	4	4
	3 Simpang Rimba	28.619		71,55	17,17	4,91	4,91	4,29	3,06	88,72	5.724	22	9	8	8
	4 Toboali	92.659		231,65	55,60	15,90	15,90	13,90	9,90	287,24	18.532	72	29	25	25
	5 Tukak Sadai	15.345		38,36	9,21	2,63	2,63	2,30	1,64	47,57	3.069	12	5	4	4
	6 Air Gegas	50.230		125,57	30,14	8,62	8,62	7,53	5,36	155,71	10.046	39	16	13	13
	7 Lepar Pongok	9.549		23,87	5,73	1,64	1,64	1,43	1,02	29,60	1.910	7	3	3	3
	8 Kepulauan Pongok	5.145		12,86	3,09	0,88	0,88	0,77	0,55	15,95	1.029	4	2	1	1
D	Kabupaten Bangka Barat	243.050		607,62	145,83	41,71	41,71	36,46	25,96	753,45	48.610	188	75	65	65
	1 Kelapa	43.359		108,40	26,02	7,44	7,44	6,50	4,63	134,41	8.672	34	13	12	12
	2 Tempilang	41.456		103,64	24,87	7,11	7,11	6,22	4,43	128,51	8.291	32	13	11	11
	3 Muntok	56.099		140,25	33,66	9,63	9,63	8,41	5,99	173,91	11.220	43	17	15	15
	4 Simpang Teritip	37.603		94,01	22,56	6,45	6,45	5,64	4,02	116,57	7.521	29	12	10	10
	5 Jebus	26.990		67,47	16,19	4,63	4,63	4,05	2,88	83,67	5.398	21	8	7	7
	6 Paritiga	37.543		93,86	22,53	6,44	6,44	5,63	4,01	116,38	7.509	29	12	10	10
E	Kota Pangkal Pinang	436.211		1.090,53	261,73	74,85	74,85	65,43	46,59	1.352,26	87.242	338	135	116	116
	1 Rangkui	53.026		132,56	31,82	9,10	9,10	7,95	5,66	164,38	10.605	41	16	14	14
	2 Bukit Intan	69.054		172,63	41,43	11,85	11,85	10,36	7,37	214,07	13.811	54	21	18	18
	3 Girimaya	26.925		67,31	16,16	4,62	4,62	4,04	2,88	83,47	5.385	21	8	7	7
	4 Pangkalbalam	24.257		60,64	14,55	4,16	4,16	3,64	2,59	75,20	4.851	19	8	6	6
	5 Gabek	101.906		254,77	61,14	17,49	17,49	15,29	10,88	315,91	20.381	79	32	27	27
	6 Tamansari	27.436		68,59	16,46	4,71	4,71	4,12	2,93	85,05	5.487	21	9	7	7
	7 Gerunggang	133.607		334,02	80,16	22,93	22,93	20,04	14,27	414,18	26.721	104	41	36	36
F	Kabupaten Belitung	199.874		499,69	119,92	34,30	34,30	29,98	21,35	619,61	39.975	155	62	53	53
	1 Membalong	28.114		70,29	16,87	4,82	4,82	4,22	3,00	87,15	5.623	22	9	7	7
	2 Tanjungpandan	116.885		292,21	70,13	20,06	20,06	17,53	12,48	362,34	23.377	91	36	31	31
	3 Badau	15.980		39,95	9,59	2,74	2,74	2,40	1,71	49,54	3.196	12	5	4	4
	4 Sijuk	32.949		82,37	19,77	5,65	5,65	4,94	3,52	102,14	6.590	26	10	9	9
	5 Selat Nasik	5.945		14,86	3,57	1,02	1,02	0,89	0,63	18,43	1.189	5	2	2	2
G	Kabupaten Belitung Timur	162.714		406,79	97,63	27,92	27,92	24,41	17,38	504,41	32.543	126	50	43	43
	1 Dendang	14.838		37,10	8,90	2,55	2,55	2,23	1,58	46,00	2.968	11	5	4	4
	2 Simpang Pesak	11.739		29,35	7,04	2,01	2,01	1,76	1,25	36,39	2.348	9	4	3	3
	3 Gantung	37.475		93,69	22,48	6,43	6,43	5,62	4,00	116,17	7.495	29	12	10	10
	4 Simpang Renggang	9.387		23,47	5,63	1,61	1,61	1,41	1,00	29,10	1.877	7	3	3	3
	5 Manggar	45.991		114,98	27,59	7,89	7,89	6,90	4,91	142,57	9.198	36	14	12	12
	6 Damar	15.033		37,58	9,02	2,58	2,58	2,25	1,61	46,60	3.007	12	5	4	4
	7 Kelapa Kampit	28.252		70,63	16,95	4,85	4,85	4,24	3,02	87,58	5.650	22	9	8	8
	Prov. Kep. Bangka Belitung	1.991.150		4.977,88	1.194,69	341,68	341,68	298,67	212,65	6.172,57	398.230	1.543	617	531	531

11) Air Limbah

Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Tahun 2028			Tahun 2033			Tahun 2038			Tahun 2043		
		Jumlah Kebutuhan Air Bersih (Ltr/Hr)	Air Limbah (Ltr/Hr)	Timbunan Tinja (M3/Hr)	Jumlah Kebutuhan Air Bersih (Ltr/Hr)	Air Limbah (Ltr/Hr)	Timbunan Tinja (M3/Hr)	Jumlah Kebutuhan Air Bersih (Ltr/Hr)	Air Limbah (Ltr/Hr)	Timbunan Tinja (M3/Hr)	Jumlah Kebutuhan Air Bersih (Ltr/Hr)	Air Limbah (Ltr/Hr)	Timbunan Tinja (M3/Hr)
A	Kabupaten Bangka	128.677.926	90.074.548	176	134.192.682	93.934.877	184	139.707.439	97.795.207	191	145.222.195	101.655.536	199
1	Mendo barat	20.546.876	14.382.813	28,14	21.728.023	15.209.616	29,76	22.909.171	16.036.419	31,38	24.090.318	16.863.223	32,99
2	Merawang	12.037.758	8.426.430	16,49	12.530.454	8.771.318	17,16	13.023.150	9.116.205	17,84	13.515.847	9.461.093	18,51
3	Puding Besar	8.079.009	5.655.307	11,06	8.757.379	6.130.164	11,99	9.435.746	6.605.022	12,92	10.114.114	7.079.880	13,95
4	Sungailiat	35.362.869	24.754.008	48,43	35.874.580	25.112.206	49,13	36.386.292	25.470.404	49,83	36.898.003	25.828.602	50,53
5	Pemali	15.495.397	10.846.778	21,22	17.588.658	12.312.061	24,09	19.681.920	13.777.344	26,96	21.775.182	15.242.627	29,82
6	Bakam	7.349.489	5.144.642	10,07	7.538.572	5.277.001	10,32	7.727.656	5.409.359	10,58	7.916.739	5.541.717	10,84
7	Belinyu	19.112.363	13.378.654	26,18	19.388.925	13.572.247	26,55	19.665.486	13.765.841	26,93	19.942.048	13.959.434	27,31
8	Riau Siliu	10.694.165	7.485.916	14,65	10.786.092	7.550.264	14,77	10.878.018	7.614.613	14,90	10.969.945	7.678.961	15,02
B	Kabupaten Bangka Tengah	85.872.708	60.110.896	118	94.911.377	66.437.964	130	103.950.045	72.765.031	142	112.988.713	79.092.099	155
1	Koba	19.376.699	13.563.690	26,54	22.032.953	15.423.067	30,18	24.689.206	17.282.444	33,81	27.345.460	19.141.822	37,45
2	Lubuk Besar	14.317.299	10.022.109	19,61	16.458.016	11.520.611	22,54	18.598.734	13.019.114	25,47	20.739.451	14.517.616	28,40
3	Pangkalan Baru	19.152.166	13.406.516	26,23	20.647.473	14.453.231	28,28	22.142.780	15.499.946	30,33	23.638.088	16.546.662	32,37
4	Namang	7.508.282	5.255.797	10,28	8.473.744	5.931.621	11,61	9.439.206	6.607.444	12,93	10.404.667	7.283.267	14,25
5	Sungai Selan	15.222.176	10.655.523	20,85	16.570.871	11.599.610	22,70	17.919.565	12.543.696	24,54	19.268.259	13.487.782	26,39
6	Simpang Katis	10.296.086	7.207.260	14,10	10.728.320	7.509.824	14,69	11.160.554	7.812.388	15,29	11.592.788	8.114.951	15,88
C	Kabupaten Bangka Selatan	77.987.467	54.591.227	107	81.442.929	57.010.050	112	84.898.391	59.428.874	116	88.353.853	61.847.697	121
1	Payung	8.181.050	5.726.735	11,20	8.507.275	5.955.093	11,65	8.833.501	6.183.451	12,10	9.159.727	6.411.809	12,55
2	Pulau Besar	4.088.476	2.861.933	5,60	4.597.157	3.218.010	6,30	5.105.839	3.574.087	6,99	5.614.520	3.930.164	7,69
3	Simpang Rimba	9.331.695	6.532.187	12,78	9.703.804	6.792.663	13,29	10.075.913	7.053.139	13,80	10.448.022	7.313.615	14,31
4	Toboali	30.213.176	21.149.223	41,38	31.417.950	21.992.565	43,03	32.622.724	22.835.907	44,68	33.827.498	23.679.249	46,33
5	Tukak Sadai	5.003.641	3.502.549	6,85	5.203.166	3.642.216	7,13	5.402.690	3.781.883	7,40	5.602.214	3.921.550	7,67
6	Air Gegas	16.378.203	11.464.742	22,43	17.031.297	11.921.908	23,33	17.684.390	12.379.073	24,22	18.337.484	12.836.239	25,11
7	Lepar Pongok	3.113.760	2.179.632	4,26	3.237.924	2.266.547	4,43	3.362.088	2.353.461	4,60	3.486.251	2.440.376	4,77
8	Kepulauan Pongok	1.677.466	1.174.226	2,30	1.744.356	1.221.049	2,39	1.811.247	1.267.873	2,48	1.878.137	1.314.696	2,57
D	Kabupaten Bangka Barat	80.058.288	56.040.802	110	82.949.206	58.064.444	114	85.840.124	60.088.087	118	88.731.041	62.111.729	122
1	Kelapa	13.770.266	9.639.186	18,86	14.456.646	10.119.652	19,80	15.143.026	10.600.118	20,74	15.829.406	11.080.584	21,68
2	Tempilang	11.907.220	8.335.054	16,31	12.982.950	9.088.065	17,78	14.058.679	9.841.076	19,25	15.134.409	10.594.086	20,73
3	Muntok	19.995.220	13.996.654	27,39	20.156.875	14.109.812	27,61	20.318.529	14.222.971	27,83	20.480.184	14.336.129	28,05
4	Simpang Teritip	12.141.109	8.498.776	16,63	12.670.038	8.869.026	17,35	13.198.967	9.239.277	18,08	13.727.895	9.609.527	18,80
5	Jebus	8.863.206	6.204.244	12,14	9.193.248	6.435.273	12,59	9.523.290	6.666.303	13,04	9.853.331	6.897.332	13,49
6	Paritiga	13.381.266	9.366.887	18,33	13.489.449	9.442.615	18,47	13.597.632	9.518.343	18,62	13.705.815	9.594.071	18,77
E	Kota Pangkal Pinang	104.510.600	73.157.420	143	122.756.854	85.929.798	168	141.003.108	98.702.176	193	159.249.362	111.474.554	218
1	Rangkui	15.170.183	10.619.128	20,78	16.566.209	11.596.347	22,69	17.962.236	12.573.565	24,60	19.358.262	13.550.784	26,51
2	Bukit Intan	18.364.918	12.855.443	25,15	20.646.532	14.452.573	28,28	22.928.146	16.049.702	31,40	25.209.760	17.646.832	34,53
3	Girimaya	7.703.079	5.392.156	10,55	8.411.950	5.888.365	11,52	9.120.821	6.384.575	12,49	9.829.692	6.890.785	13,46
4	Pangkalbalam	8.508.268	5.955.787	11,65	8.624.061	6.036.843	11,81	8.739.854	6.117.898	11,97	8.855.648	6.198.953	12,13
5	Gabek	20.082.573	14.057.801	27,50	25.789.477	18.052.634	35,32	31.496.380	22.047.466	43,14	37.203.284	26.042.299	50,95
6	Tamansari	7.849.179	5.494.426	10,75	8.571.495	6.000.047	11,74	9.293.811	6.505.668	12,73	10.016.127	7.011.289	13,72
7	Gerunggang	26.832.399	18.782.679	36,75	34.147.129	23.902.990	46,77	41.461.859	29.023.301	56,79	48.776.589	34.143.612	66,80
F	Kabupaten Belitung	69.437.208	48.606.046	95	70.614.418	49.430.092	97	71.791.627	50.254.139	98	72.968.837	51.078.186	100
1	Membalong	10.093.184	7.065.229	13,82	10.150.066	7.105.046	13,90	10.206.949	7.144.864	13,98	10.263.831	7.184.682	14,06
2	Tanjungpandan	39.694.519	27.786.163	54,37	40.686.952	28.480.866	55,72	41.679.386	29.175.570	57,08	42.671.819	29.870.273	58,44
3	Badau	5.714.415	4.000.091	7,83	5.754.199	4.027.939	7,88	5.793.982	4.055.788	7,94	5.833.766	4.083.636	7,99
4	Sijuk	11.800.673	8.260.471	16,16	11.876.754	8.313.728	16,27	11.952.835	8.366.984	16,37	12.028.916	8.420.241	16,47
5	Selat Nasik	2.134.418	1.494.093	2,92	2.146.447	1.502.513	2,94	2.158.476	1.510.933	2,96	2.170.505	1.519.353	2,97
G	Kabupaten Belitung Timur	50.992.651	35.694.855	70	53.796.012	37.657.209	74	56.599.374	39.619.562	78	59.402.736	41.581.915	81
1	Dendang	4.495.937	3.147.156	6,16	4.802.947	3.362.063	6,58	5.109.958	3.576.971	7,00	5.416.969	3.791.878	7,42
2	Simpang Pesak	3.483.483	2.438.438	4,77	3.750.856	2.625.599	5,14	4.018.230	2.812.761	5,50	4.285.604	2.999.923	5,87
3	Gantung	11.501.895	8.051.326	15,75	12.228.293	8.559.805	16,75	12.954.691	9.068.283	17,74	13.681.088	9.576.762	18,74
4	Simpang Renggiang	2.991.157	2.093.810	4,10	3.136.363	2.195.454	4,30	3.281.569	2.297.098	4,49	3.426.775	2.398.743	4,69
5	Manggar	15.278.987	10.695.291	20,93	15.782.723	11.047.906	21,62	16.286.459	11.400.521	22,31	16.790.195	11.753.136	23,00
6	Damar	5.107.193	3.575.035	6,99	5.234.202	3.663.942	7,17	5.361.212	3.752.849	7,34	5.488.222	3.841.755	7,52
7	Kelapa Kampit	8.134.000	5.693.800	11,14	8.860.628	6.202.439	12,14	9.587.255	6.711.079	13,13	10.313.883	7.219.718	14,13
	Prov. Kep. Bangka Belitung	597.536.847	418.275.793	818	640.663.477	448.464.434	877	683.790.108	478.653.075	937	726.916.738	508.841.716	996



**Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman**

BAB 4

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.12. Tujuan Penyelenggaraan PKP

Tujuan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan dengan mempertimbangkan arahan dan kebijakan nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman, kebijakan pembangunan daerah, kebijakan tata ruang, karakteristik wilayah, profil perumahan dan kawasan permukiman, dan potensi serta permasalahan perumahan dan kawasan permukiman.

Potensi dan masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

No.	Potensi
1.	Pusat - Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis - Salah satu <i>future development</i> Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pusat-pusat kegiatan yang direncanakan dalam RTRW dan Kawasan Strategis Provinsi sebagai potensi penyediaan perumahan, sehingga pemerintah provinsi dapat berperan dalam mengatur dan mengendalikan pembangunan dengan mekanisme hunian berimbang 1:2:3. - Keberadaan kawasan strategis diperkirakan akan berdampak terhadap bangkitan migrasi dan kebutuhan akan hunian
2.	Berdasarkan luas kawasan permukiman eksisting dan rencana kawasan permukiman, teridentifikasi potensi ketersediaan lahan total seluas 111.489,30 Ha.
3.	Berkembangnya Industri Properti - Pada tahun 2022, ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tumbuh positif sebesar 4,40 persen, namun melambat dibanding pertumbuhan tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh perlambatan dan kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha penyumbang terbesar perekonomian. - Pada tahun 2022 kategori Real Estat menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar 3,26 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang nilai tambahnya sebesar 3,01 triliun rupiah. Peranan kategori ini bagi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018-2022 masih cukup kecil yakni sekitar 3 persen setiap tahunnya. - Laju pertumbuhan kategori ini mengalami fluktuasi. Di tahun 2019 masih tumbuh namun tidak setinggi pertumbuhan di tahun sebelumnya, begitu juga dengan di tahun 2020 sampai 2022, dimana banyak kategori yang mengalami kontraksi karena pandemi di tahun 2020, untuk kategori ini masih tumbuh positif. - Kebutuhan akan perumahan yang terus meningkat, baik untuk tempat tinggal maupun investasi, ditandai dengan semakin banyaknya

No.	Potensi
	perumahan-perumahan maupun ruko-ruko baru yang dibangun, mendorong semakin berkembang pesatnya lapangan usaha ini
4.	Adanya Kebijakan Penyederhanaan Perizinan Perumahan MBR dan Pembiayaan Perumahan • PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, tentunya merupakan hal positif dikarenakan dapat membantu mempermudah pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) • PP No. 64 mengatur salah satunya tentang luasan lahan untuk rumah MBR, dimana luas lahan yang dipakai untuk perumahan MBR adalah seluas 0,5 hektar sampai 5 hektar • Dengan perizinan yang lebih singkat dan lebih sederhana, diharapkan pengembang dapat lebih cepat menambah supply rumah • Dalam PP 64/2016, seluruh proses perizinan terkait penyediaan rumah dilakukan melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) • Dukungan pembiayaan perumahan tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan semua para pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkanlah sinergitas yang baik antara pemangku kepentingan dengan Dirjen Pembiayaan Perumahan

No.	Masalah
1.	Backlog Kepemilikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 61.877 unit rumah dan backlog hunian sebanyak 44.081 unit rumah
2.	Aspek Keselamatan Bangunan • Dilihat dari jenis atap rumah, masih terdapat 997 rumah atau sekitar 0,25% di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jenis atap rumah dari jerami/ijuk/ rumbia/ daun;

	- Dilihat dari jenis dinding rumah, masih terdapat 1.197 rumah atau sekitar 0,30 % di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jenis dinding rumah dari bambu dan lainnya; - Dilihat dari jenis lantai rumah, masih terdapat 918 rumah atau sekitar 0,23 % di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jenis lantai bambu dari bambu, tanah dan lainnya;
3.	Dilihat dari aspek kecukupan minimum luas bangunan, keluarga yang memiliki luas rumah/bangunan <7,2 m2 adalah sebanyak 21.681 rumah atau sekitar 5,37%.
4.	Aspek kesehatan lingkungan rumah - keluarga yang menggunakan penerangan utama non listrik sebanyak 1.287 rumah atau sekitar 0,32%, - rumah yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar yaitu sebanyak 7.740 rumah atau sekitar 1,92%, - rumah dengan sumber air minum utama dari sumur tidak terlindung, air permukaan, air hujan, dalinnnya total sebanyak 18.085 atau sekitar 4,48 %.
5	Terdapat Kawasan kumuh kewenangan provinsi seluas 125,14 Ha terdapat di 11 lokasi

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka rumusan tujuan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut:

“Tujuan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan untuk Mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Aman, Layak, Terencana, Terjangkau, Terpadu, Kemitraan dan Berkelanjutan”.

Prinsip dalam peprumusan tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. **Aman**, Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang aman dari bencana;

2. **Layak**, Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi Standar Keselamatan Bangunan, Kecukupan Luas Minimum Bangunan, dan Kesehatan Lingkungan Rumah;
3. **Terencana**, Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi persyaratan tata ruang dan dilengkapi infrastruktur yang handal;
4. **Terjangkau**, Menyediakan unit hunian yang terjangkau terutama MBR;
5. **Terpadu**, Pengembangan dan penanganan kawasan permukiman yang terpadu dan kolaboratif antar sektor, antar pelaku pembangunan dan antar wilayah (Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota);
6. **Kemitraan**, Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan PKP harus memasukkan unsur kemitraan yang melibatkan pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha, dan masyarakat;
7. **Berkelanjutan**, Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

1.13. Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi:

1. Kebijakan 1: **Penyediaan Perumahan yang Layak Huni dan Terjangkau**

Strategi:

- a. Mendorong penyediaan hunian vertikal di PKN, PKW, PKL dan kawasan permukiman kepadatan tinggi
- b. Mengoptimalkan skema pembiayaan perumahan MBR yang telah ada
- c. Menyediakan penjaminan KPR bagi MBR

2. Kebijakan 2: **Peningkatan Kualitas Permukiman**

Strategi:

- a. Mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh
- b. Mencegah berkembang dan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh baru
- c. Meningkatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman
- d. Mengembangkan sistem penyediaan air minum yang layak dan aman bagi Masyarakat
- e. Membangun akses terhadap pelayanan air limbah domestik yang layak dan aman
- f. Meningkatkan penanganan genangan permukiman
- g. Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan
- h. Meningkatkan kualitas bangunan gedung sesuai standar

3. Kebijakan 3: **Penyediaan dan Peningkatan PSU Mitigasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana**

- a. Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan dan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman dan sarana prasarana mitigasi bencana

4. Kebijakan 4: **Pembangunan dan Peningkatan Akses Jaringan Prasarana Dasar Permukiman Yang Terpadu dan Merata Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat**

- a. Meningkatkan akses jaringan pelayanan prasarana permukiman regional
- b. Meningkatkan cakupan pelayanan jaringan prasarana dasar permukiman

5. Kebijakan 5: **Penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta kepentingan strategis provinsi**

- a. Pengembangan sistem informasi pertanahan
- b. Pemanfaatan Tanah BUMD dan Land Banking

6. Kebijakan 6: **Peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**
- Meningkatkan peran kelembagaan bidang PKP
 - Mengembangkan sistem informasi dan basis data PKP
 - Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan PKP

1.14. Arahan Penyediaan Lahan

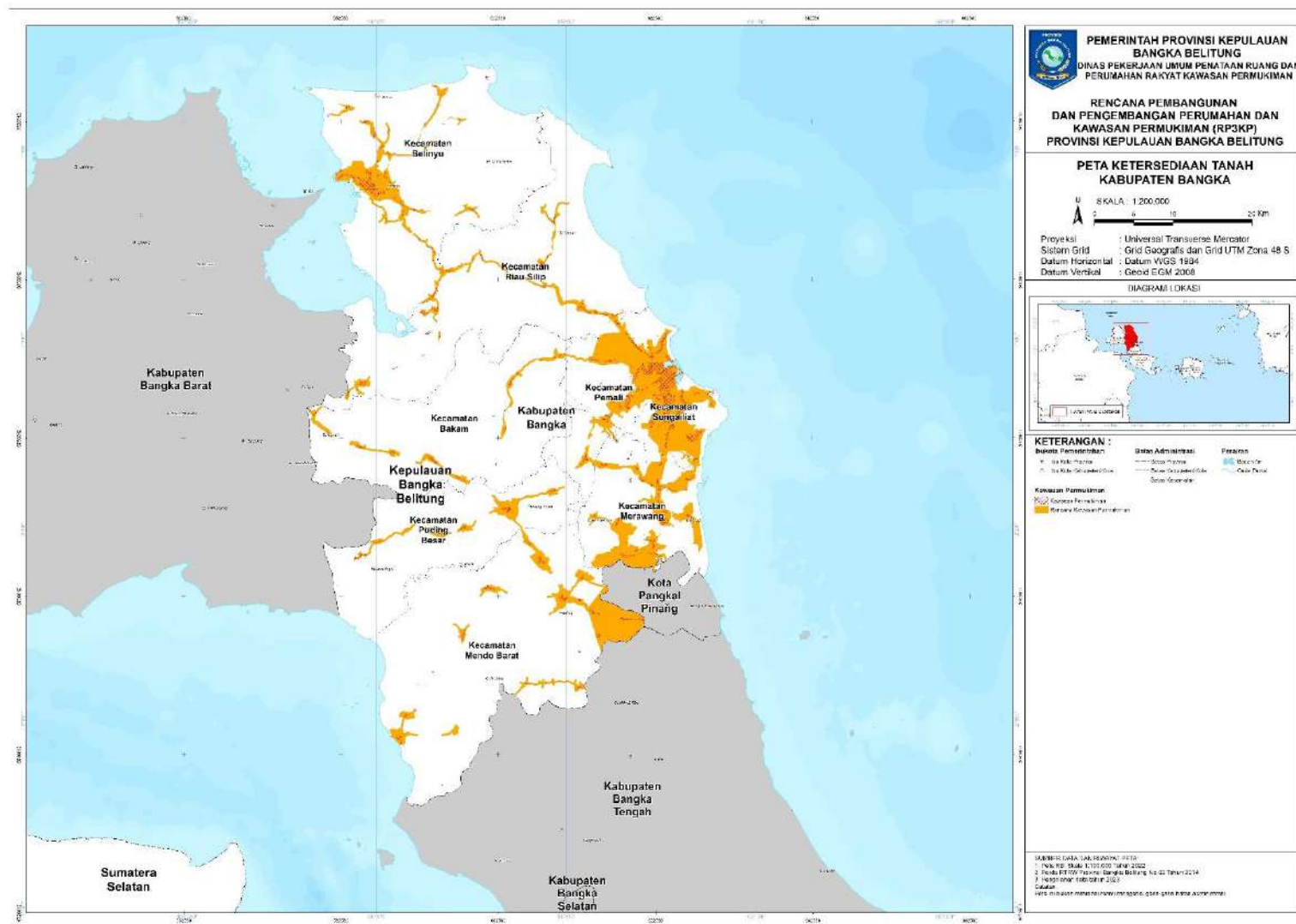
Berdasarkan luas kawasan permukiman eksisting dan rencana kawasan permukiman, teridentifikasi potensi ketersediaan lahan total Tahun 2043 seluas 111.489,30 Ha, hal ini memberi peluang bagi pemerintah daerah dalam penyiapan cadangan lahan bagi pembangunan perumahan. Ketersediaan lahan terbesar yaitu di Kabupaten Bangka yaitu seluas 27.382,4 Ha dan yang paling kecil yaitu Kota Pangkalpinang seluas 4.706,7 Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Rencana Ketersediaan Lahan

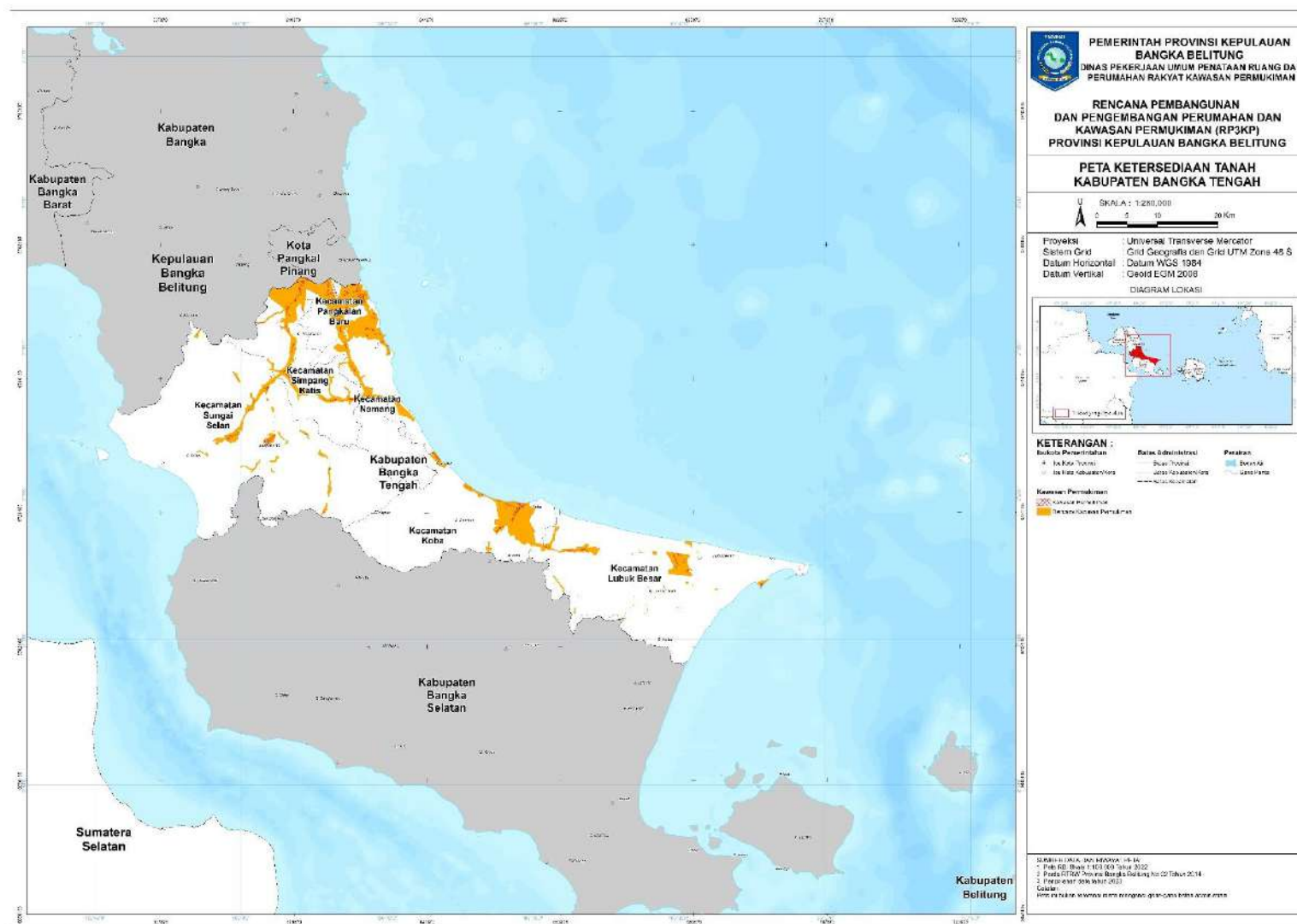
No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Rencana Kawasan Permukiman (Ha)	Kawasan Permukiman Eksisting(Ha)	Ketersediaan Lahan (Ha)
I	Kabupaten Bangka	34.526,80	3.710,54	30.816,26
1	Kecamatan Bakam	1.554,38	173,31	1.381,07
2	Kecamatan Belinyu	4.606,26	625,20	3.981,06
3	Kecamatan Mendo Barat	6.035,32	288,84	5.746,47
4	Kecamatan Merawang	6.353,29	339,03	6.014,26
5	Kecamatan Pemali	3.882,84	229,75	3.653,09
6	Kecamatan Puding Besar	1.723,51	99,11	1.624,40
7	Kecamatan Riau Silip	2.448,72	326,64	2.122,08
8	Kecamatan Sungailiat	7.922,48	1.628,65	6.293,83
II	Bangka Barat	16.307,06	2.543,38	13.763,68
1	Kecamatan Jebus	1.868,36	210,30	1.658,06
2	Kecamatan Kelapa	2.802,72	317,89	2.484,83
3	Kecamatan Muntok	4.156,83	624,01	3.532,82
4	Kecamatan Parittiga	2.287,38	526,25	1.761,14
5	Kecamatan Simpang Teritip	2.786,21	416,52	2.369,69
6	Kecamatan Tempilang	2.405,56	448,41	1.957,14
III	Bangka Selatan	18.872,42	1.830,07	17.042,35
1	Kecamatan Air Gegas	3.347,96	217,23	3.130,73
2	Kecamatan Kepulauan Pongok	356,40	79,21	277,18
3	Kecamatan Lepar Pongok	605,08	190,46	414,62
4	Kecamatan Payung	1.903,38	235,37	1.668,01

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Rencana Kawasan Permukiman (Ha)	Kawasan Permukiman Eksisting(Ha)	Ketersediaan Lahan (Ha)
5	Kecamatan Pulaubesar	1.858,34	71,22	1.787,13
6	Kecamatan Simpang Rimba	1.590,02	116,43	1.473,59
7	Kecamatan Toboali	6.859,71	681,89	6.177,82
8	Kecamatan Tukak Sadai	2.351,54	238,26	2.113,28
IV	Bangka Tengah	22.157,47	1.626,01	20.531,46
1	Kecamatan Koba	4.653,16	308,77	4.344,39
2	Kecamatan Lubuk Besar	2.512,90	240,22	2.272,68
3	Kecamatan Namang	2.819,71	120,35	2.699,36
4	Kecamatan Pangkalan Baru	5.656,59	539,06	5.117,52
5	Kecamatan Simpang Katis	4.107,66	208,34	3.899,32
6	Kecamatan Sungai Selan	2.407,44	209,26	2.198,18
V	Belitung	25.977,27	2.599,11	23.378,16
1	Kecamatan Badau	4.375,29	311,16	4.064,14
2	Kecamatan Membalong	6.821,64	918,85	5.902,79
3	Kecamatan Selat Nasik	707,92	65,60	642,32
4	Kecamatan Sijuk	5.165,41	378,95	4.786,46
5	Kecamatan Tanjung Pandan	8.907,00	924,55	7.982,44
VI	Belitung Timur	16.902,20	2.670,57	14.231,63
1	Kecamatan Damar	2.335,51	329,00	2.006,51
2	Kecamatan Dendang	1.535,42	241,00	1.294,42
3	Kecamatan Gantung	3.698,25	509,80	3.188,46
4	Kecamatan Kelapa Kampit	2.243,19	419,26	1.823,93
5	Kecamatan Manggar	3.726,66	737,05	2.989,61
6	Kecamatan Simpang Pesak	2.113,16	218,04	1.895,12
7	Kecamatan Simpang Renggang	1.250,01	216,44	1.033,57
VII	Kota Pangkal Pinang	8.556,85	1.952,78	6.604,07
1	Kecamatan Bukitintan	2.217,08	337,46	1.879,62
2	Kecamatan Gabek	1.643,28	331,45	1.311,84
3	Kecamatan Gerunggang	3.053,97	310,33	2.743,65
4	Kecamatan Girimaya	449,80	248,94	200,86
5	Kecamatan Pangkal Balam	369,31	197,43	171,88
6	Kecamatan Rangkui	504,26	285,33	218,93
7	Kecamatan Taman Sari	319,15	241,84	77,31
	Grand Total	143.300,08	16.932,47	126.367,61

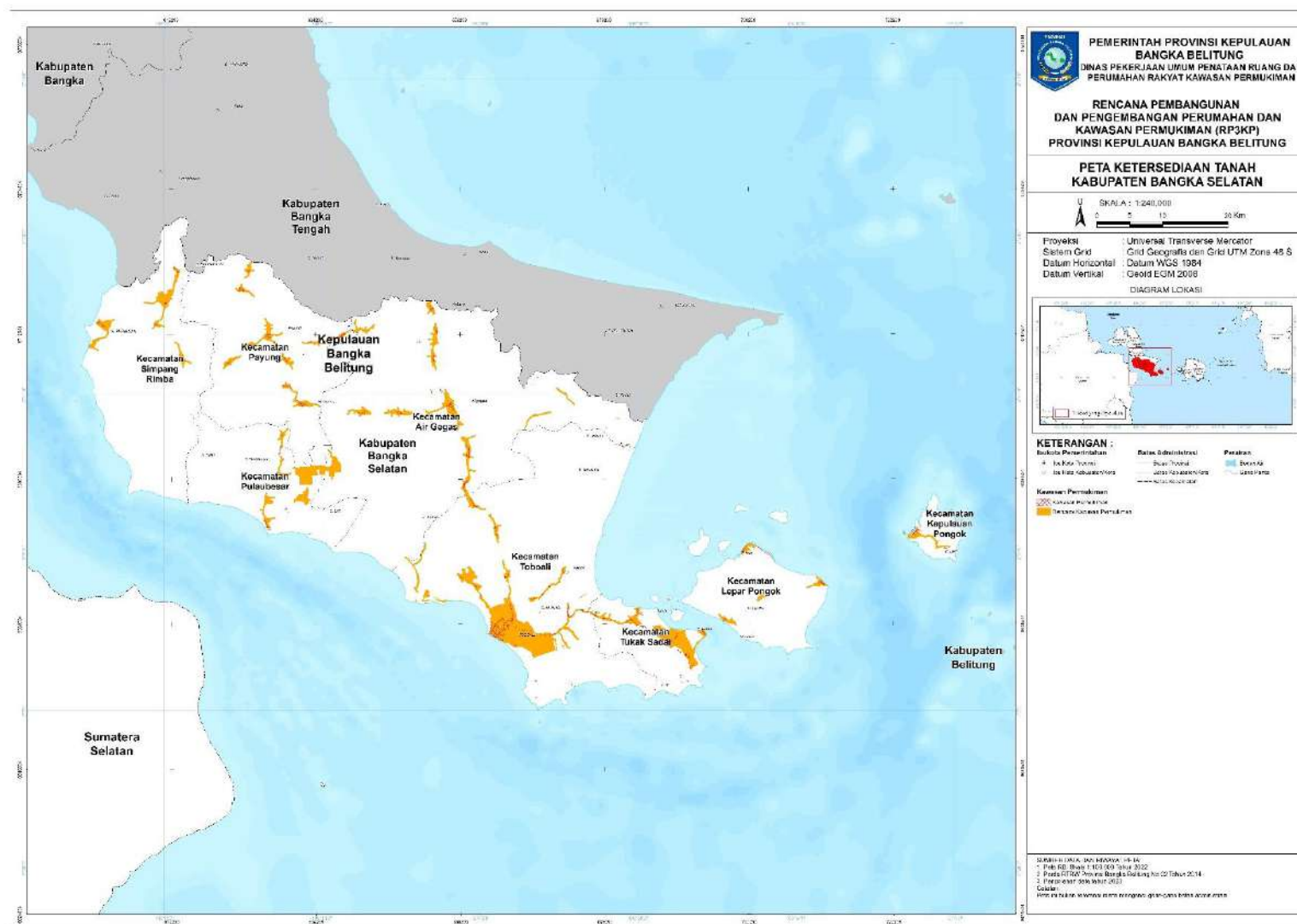
Sumber: Perumusan Rencana Tahun 2023



Gambar 4.1 Peta Rencana Ketersediaan Lahan Kabupaten Bangka



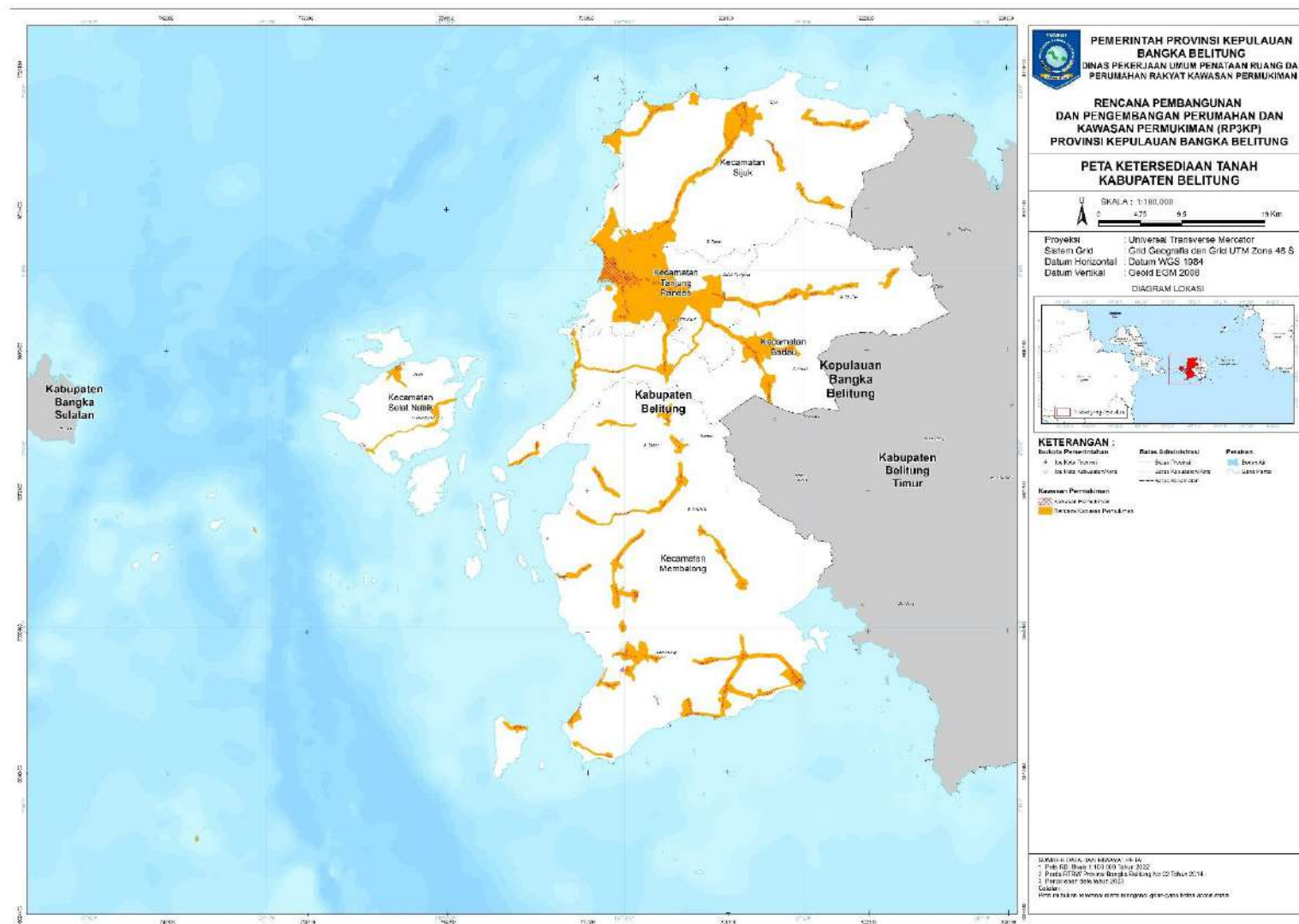
Gambar 4.2 Peta Rencana Ketersediaan Lahan Kabupaten Bangka Tengah



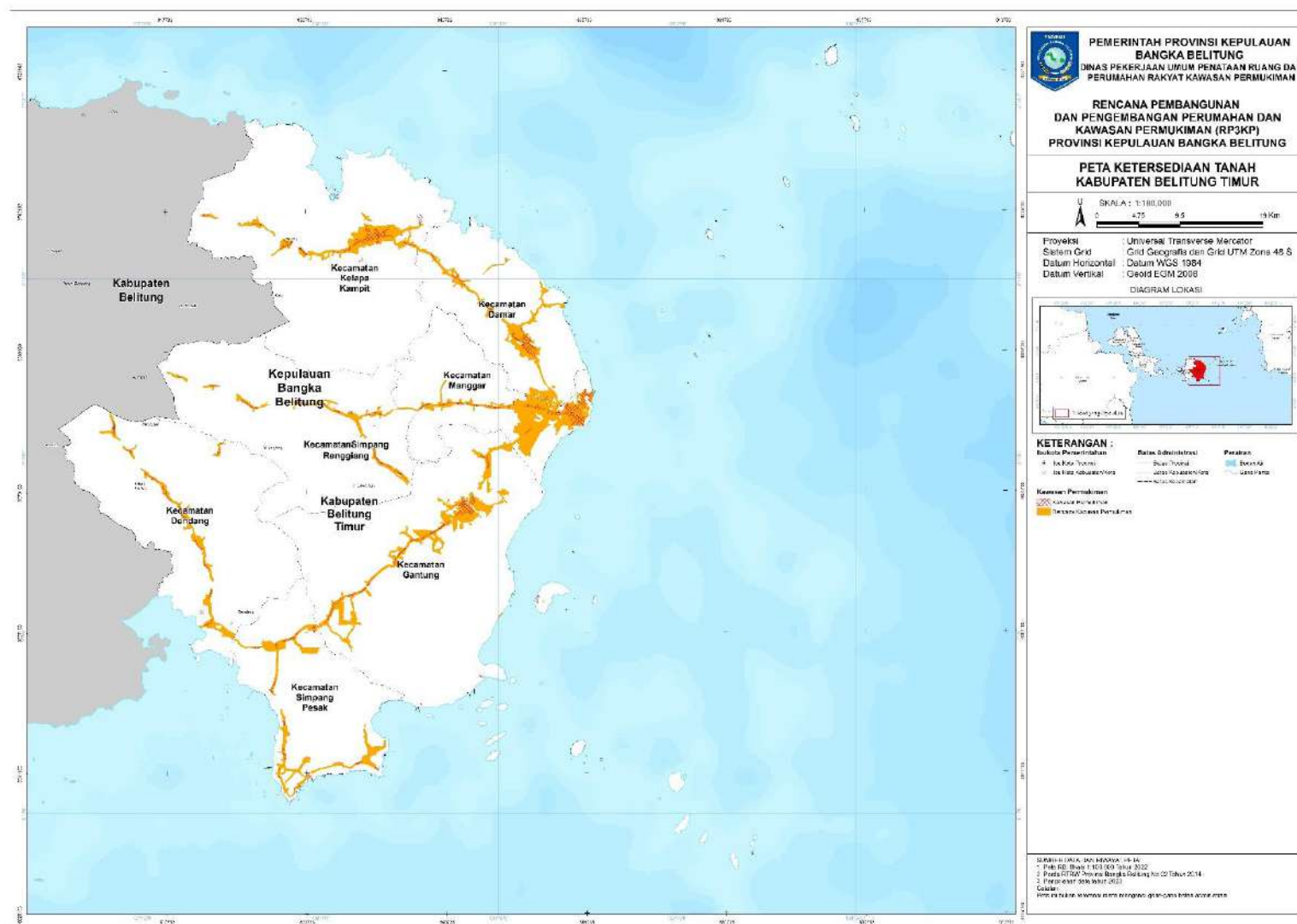
Gambar 4.3 Peta Rencana Ketersediaan Lahan Kabupaten Bangka Selatan







Gambar 4.6 Peta Rencana Ketersediaan Lahan Kabupaten Belitung



Gambar 4.7 Peta Rencana Ketersediaan Lahan Kabupaten Belitung Timur

1.15. Rencana PKP di Lintas Kabupaten/Kota

Arahan Prioritas Penanganan PKP Perkotaan dan PKP Perdesaan Lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan provinsi dalam hal memprioritaskan Kawasan perumahan dan permukiman di kabupaten/kota masing-masing, yang dibagi menjadi dua (2) kategori yaitu Rencana Pengembangan PKP Perkotaan Lintas Kabupaten/Kota dan Rencana Pengembangan PKP Perdesaan Lintas Kabupaten/Kota.

A. Rencana Pengembangan PKP Perkotaan Lintas Kabupaten/Kota

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada di wilayah sekitarnya.

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi :

- 1) Pengembangan permukiman baru yang sesuai dengan rencana peruntukan permukiman dari RTRW dengan batasan kegiatan perkotaan yaitu PKN, PKW dan PKL dimasing-masing kabupaten/kota;
- 2) Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan;
- 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman, terutama kawasan perkotaan yang termasuk sistem pusat kegiatan;
- 4) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
- 5) Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan;
- 6) Mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah perkotaan yang cepat tumbuh;
- 7) Mengembangkan permukiman yang diprioritaskan kepada hunian berimbang;
- 8) Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- 9) Mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana.

Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan kawasan peruntukan permukiman sebagai berikut :

- 1) Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25%);
- 2) Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
- 3) Tidak berada pada daerah rawan bencana;
- 4) Drainase baik sampai sedang;

- 5) Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/danau/mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan;
- 6) Tidak berada pada kawasan lindung;
- 7) Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga;
- 8) Menghindari sawah irigasi teknis;
- 9) Penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan baru 40% - 60% dari luas lahan yang ada, dan untuk kawasan-kawasan tertentu disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan;
- 10) Kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan baru perumahan tidak bersusun maksimum 50 bangunan rumah/ha dan dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai;
- 11) Memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan peruntukan permukiman di perdesaan dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 12) Kawasan perumahan harus dilengkapi dengan:
 - a. Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;
 - b. Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi juga dengan sumur resapan air hujan mengikuti SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon;
 - c. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kapasitas minimum sambungan rumah tangga 60 liter/orang/hari dan sambungan kran umum 30 liter/orang/hari; dan
 - d. Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
- 13) Penyediaan kebutuhan sarana pendidikan di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi dan penyelesaian secara lebih rinci;

- 14) Penyediaan kebutuhan sarana kesehatan di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi dan penyelesaian secara lebih rinci;
- 15) Penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lahan minimal, radius pencapaian;
- 16) Penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi dan penyelesaian secara lebih rinci;
- 17) Pemanfaatan kawasan perumahan merujuk pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah; dan
- 18) Dalam rangka mewujudkan kawasan perkotaan yang tertata dengan baik, perlu dilakukan peremajaan permukiman kumuh yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kampung Kota.

Teridentifikasi perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lintas kabupaten/kota yang memerlukan pengaturan perumahan dan kawasan permukiman lintas kab/kota dan pemberdayaan pemangku kepentingan PKP Provinsi dan lintas kab./kota, yaitu :

1. Desa Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan Desa Maras Senang Kabupaten Bangka
2. Desa Kace Timur Kabupaten Bangka, Kel. Keramat, Kel. Gajah Mada, Kel. Asam Kota Pangkalpinang, Desa Mangkol Kabupaten Bangka Tengah
3. Desa Lubuk Pabrik Kabupaten Bangka Selatan dan Desa Tepus Kabupaten Bangka Tengah.

Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Perkotaan Lintas Kabupaten/Kota dilihat yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat perdesaan dan perkotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada di wilayah sekitarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Rencana Pembangunan Dan Pengembangan PKP Di Lintas Batas Kabupaten Bangka Barat – Kabupaten Bangka

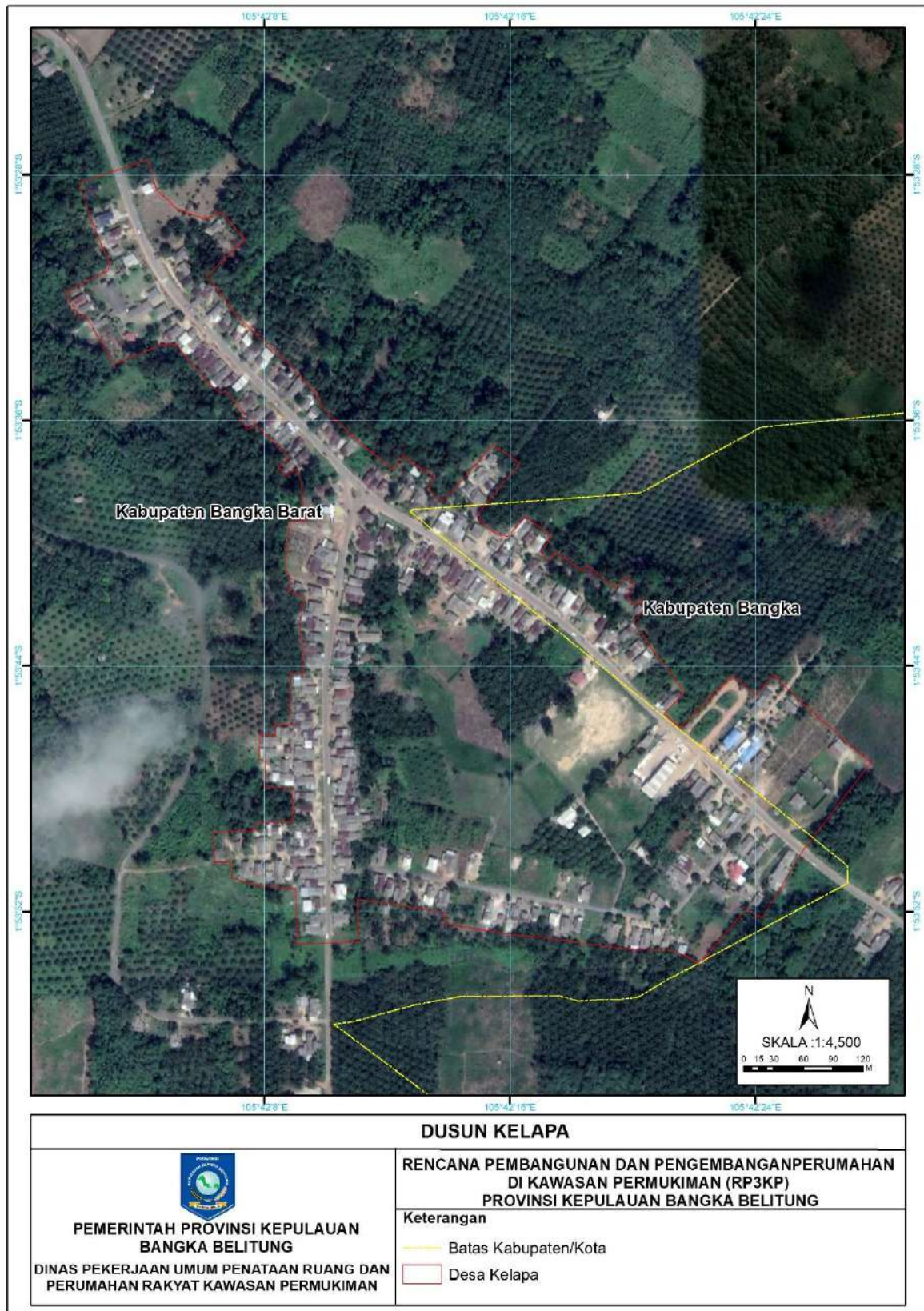
1	Lokasi	Desa Kelapa Kab. Bangka Barat dan Desa Marasa Senang Kab. Bangka	
2	Luas Lahan	23,25 Ha	
3	Jenis Rumah	Rumah Swadaya	
4	Bentuk	Rumah Tunggal dan Deret	
5	Tipologi	Dataran Rendah	
6	Jumlah Rumah	181 Unit	
7	Kebutuhan Penyediaan PSU Perumahan	Kebutuhan Eksisting	Kebutuhan Tahun 2043
	a. Air Minum	5,61 liter/detik	6,84 liter/detik
	b. Persampahan	2 unit TPS	2 unit TPS
	c. Air Limbah	181 unit Septictank	181 unit Septictank
	d. Drainase	Sudah tersedia	Pemeliharaan drainase
	e. Jalan Lingkungan	Sudah tersedia	Pemeliharaan jalan lingkungan
	f. RTH	2 unit taman kelurahan/desa	2 unit taman kelurahan/desa
	g. Pemadam Kebakaran	2 unit hydrant dan 1 Pos Pemadam Kebakaran	2 unit hydrant dan 1 Pos Pemadam Kebakaran

Sumber: Perumusan Rencana Tahun 2023

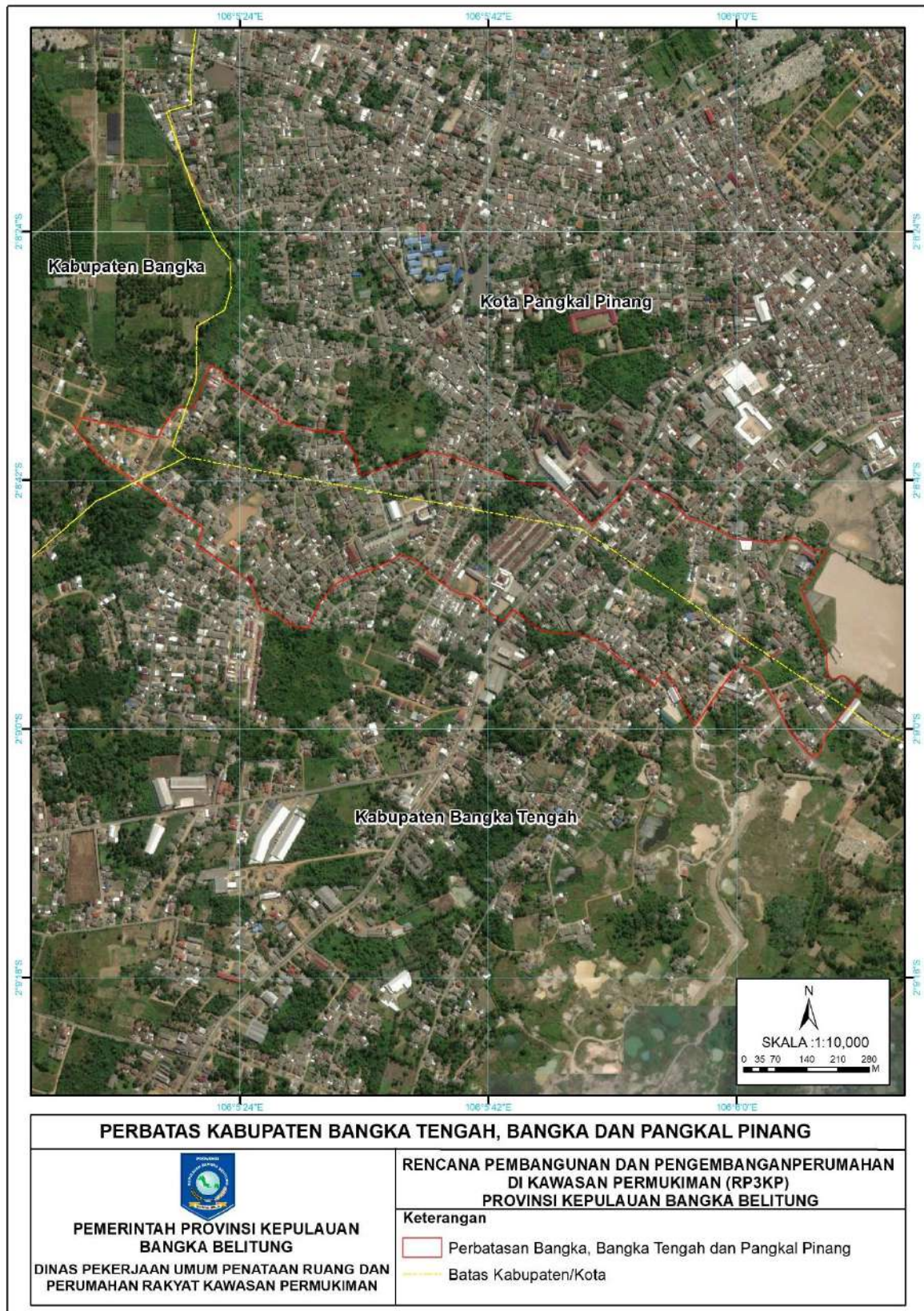
Tabel 4.3 Rencana Pembangunan Dan Pengembangan PKP Di Lintas Batas Kabupaten Bangka – Kabupaten Bangka Tengah – Kota Pangkalpinang

1	Lokasi	Kel. Keramat, Kel. Gajah Mada, Kel. Asam Kota Pangkalpinang- Desa Kace Timur Kab. Bangka Dan Desa Mangkol Kab. Bangka Tengah	
2	Luas Lahan	52,29 Ha	
3	Jenis Rumah	Rumah Komersil dan Swadaya	
4	Bentuk	Rumah Tunggal dan Deret	
5	Tipologi	Dataran Rendah	
6	Jumlah Rumah	347 unit	
7	Kebutuhan Penyediaan PSU Perumahan	Kebutuhan Eksisting	Kebutuhan Tahun 2043
	a. Air Minum	24,40 liter/detik	34,72 liter/detik
	b. Persampahan	5 unit TPS	5 unit TPS
	c. Air Limbah	347 unit septictank	347 unit septictank
	d. Drainase	Sudah tersedia	Pemeliharaan drainase
	e. Jalan Lingkungan	Sudah tersedia	Pemeliharaan jalan lingkungan
	f. RTH	5 unit RTH Kelurahan/desa	5 unit RTH Kelurahan/desa
	g. Pemadam Kebakaran	5 unit hydrant dan 2 Pos Pemadam Kebakaran	5 unit hydrant dan 2 Pos Pemadam Kebakaran

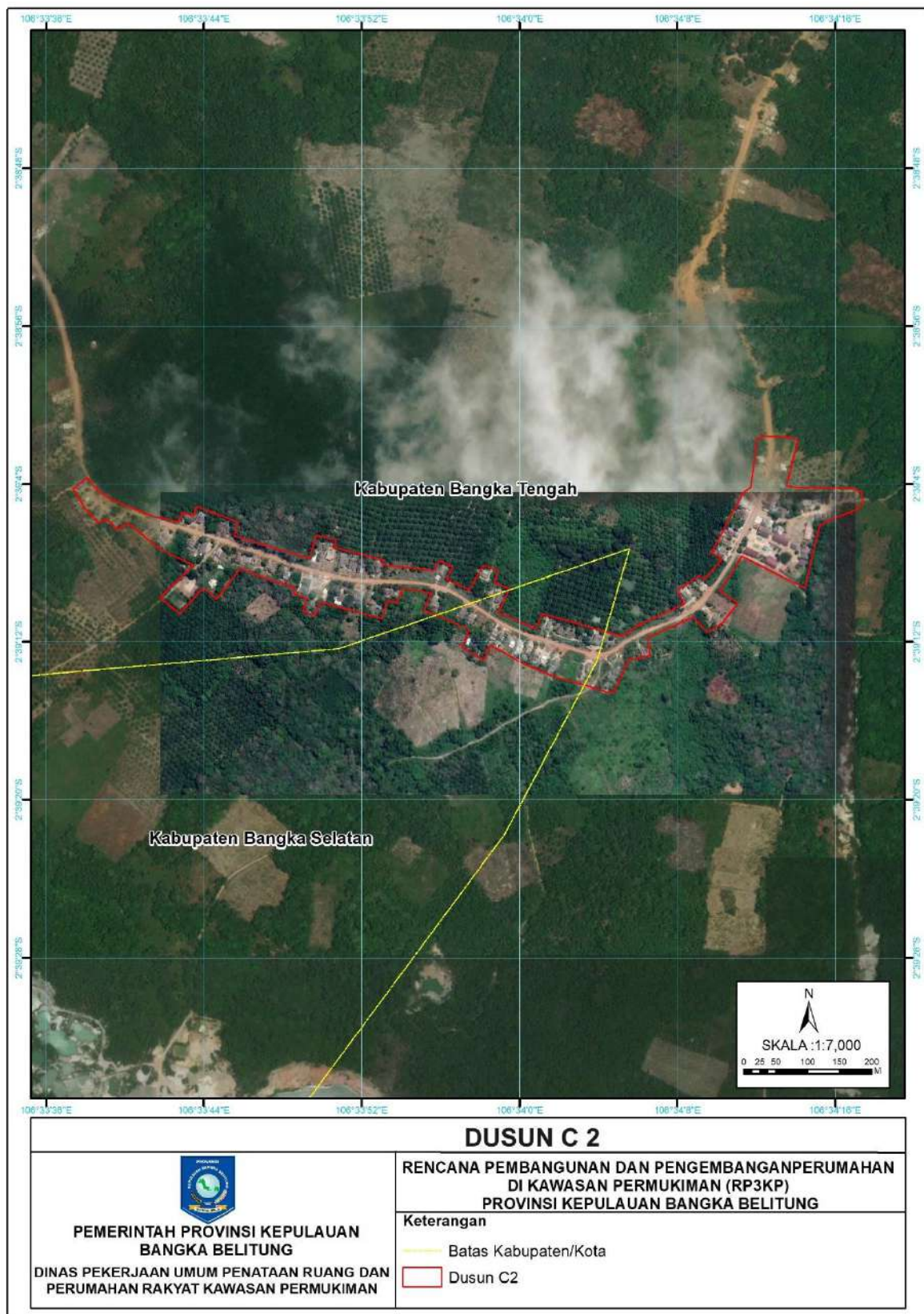
Sumber: Perumusan Rencana Tahun 2023



Gambar 4.8 Rencana Pembangunan Dan Pengembangan PKP Di Lintas Batas Kabupaten Bangka Barat – Kabupaten Bangka



Gambar 4.9 Rencana Pembangunan Dan Pengembangan PKP Di Lintas Batas Kabupaten Bangka – Kabupaten Bangka Tengah – Kota Pangkalpinang



Gambar 4.10 Rencana Pembangunan Dan Pengembangan PKP Di Lintas Batas Kabupaten Bangka Tengah – Kabupaten Bangka Selatan

Tabel 4.4 Rencana Pembangunan Dan Pengembangan PKP Di Lintas Batas Kabupaten Bangka Tengah – Kabupaten Bangka Selatan

1	Lokasi	Desa Tepus Kab. Bangka Tengah –Desa Lubuk Pabrik Kab. Bangka Selatan (Dusun C 2)	
2	Luas Lahan	9,72 Ha	
3	Jenis Rumah	Rumah Swadaya	
4	Bentuk	Rumah Tunggal	
5	Tipologi	Dataran Rendah	
6	Jumlah Rumah	78 unit	
7	Kebutuhan Penyediaan PSU Perumahan	Kebutuhan Eksisting	Kebutuhan Tahun 2043
	a. Air Minum	6,27 liter/detik	9,68 liter/detik
	b. Persampahan	2 unit TPS	2 unit TPS
	c. Air Limbah	78 unit septic tank	78 unit septic tank
	d. Drainase	Sudah tersedia	Pemeliharaan drainase
	e. Jalan Lingkungan	Sudah tersedia	Pemeliharaan jalan lingkungan
	f. RTH	2 unit taman kelurahan/desa	2 unit taman kelurahan/desa
	g. Pemadam Kebakaran	2 unit hydrant dan 1 pos pemadam kebakaran	2 unit hydrant dan 1 pos pemadam kebakaran

Sumber: Perumusan Rencana Tahun 2023

1.16. Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Rencana Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diarahkan di 10 (sepuluh) lokasi kawasan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang perlu ditangani melalui upaya pencegahan dan peningkatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan Surat Keputusan Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Kawasan Kumuh, luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang merupakan wewenang provinsi yaitu seluas 114,97 Ha yang berada di 10 kawasan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Sebaran Kawasan Kumuh Wewenang Provinsi

No	Kab/Kota	Kawasan Kumuh		Luas (Ha)
		Kecamatan	Kel/Desa	
1	Belitung	Tanjung Pandan	Parit	12,7
			Air Saga	10,29
2	Bangka Barat	Tempilang	Air Lintang	10
3	Bangka	Belinyu	Mantung	10,97
4	Belitung Timur	Gantung	Gantung (Trans Danau Nujau)	13,86
5	Pangkalpinang	Rangkui	Keramat (RT007-RW003)	12,5
		Rangkui	Parit Lalang (RT001-RW001)	10,3

No	Kab/Kota	Kawasan Kumuh		Luas (Ha)
		Kecamatan	Kel/Desa	
			Parit Lalang (RT002-RW003)	12,5
6	Bangka Selatan	Lepar	Penutuk	10,32
		Kepulauan Pongok	Pongok	11,53
7	Bangka Tengah	Tidak Terdapat Kawasan Kumuh Provinsi		
JUMLAH				114,97

Sumber :

SK Kumuh Kabupaten Belitung Nomor 188.45/775/KEP/DPUPR/2020
 SK Kumuh Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.45/310.A/4.3.1.1/2020
 SK Kumuh Kabupaten Bangka Nomor 188.45/607/DINPERKPP/2021
 SK Kumuh Kabupaten Belitung Timur Nomor 188.45-695 Tahun 2020
 SK Kumuh Kota Pangkalpinang Nomor 237/KEP/PERKIM/VII/2022
 SK Kumuh Kabupaten Bangka Selatan Nomor 188.45/19.d/DISPERKIM/2023
 SK Kumuh Kabupaten Bangka Tengah Nomor 188.45/152/DIPERKIMHUB/2022

Arahan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:



Sejalan dengan program Pembangunan 1 juta rumah dan 1.000 Tower Rumah Susun Sederhana (Rusuna) yang digulirkan Pemerintah, pembangunan hunian vertikal dinilai tepat, sebagai salah satu alternatif hunian di tengah keterbatasan serta tingginya harga lahan di perkotaan. Diharapkan terbangun sinergi yang lebih mantap antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak swasta, dalam rangka memenuhi tingginya kebutuhan

perumahan di perkotaan, khususnya bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan relokasi kawasan kumuh di tepi air maupun di atas air.

Selain itu, pembangunan rumah vertikal dapat mewujudkan pembangunan Rumah Layak Huni dalam konteks pengurangan backlog dan efisiensi pemanfaatan lahan dengan mendorong penyediaan hunian vertikal di PKN, PKW, PKL, KSP dan kawasan permukiman kepadatan tinggi. Arah pengembangan hunian vertikal pada pusat-pusat permukiman di PKN, PKW, PKL, KSP dan kawasan permukiman kepadatan tinggi terdiri dari:

1. PKNp Kota Pangkalpinang
2. PKW Muntok
3. PKW Tanjungpandan
4. PKW Manggar
5. PKWp Koba
6. PKWp Toboali
7. PKL Belinyu
8. PKL Sungailiat
9. PKL Pangkalan Baru

1.17. Rencana Penyediaan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi

4.6.1 Rencana Penyediaan Rumah/Perumahan Layak Huni Korban Terdampak Bencana

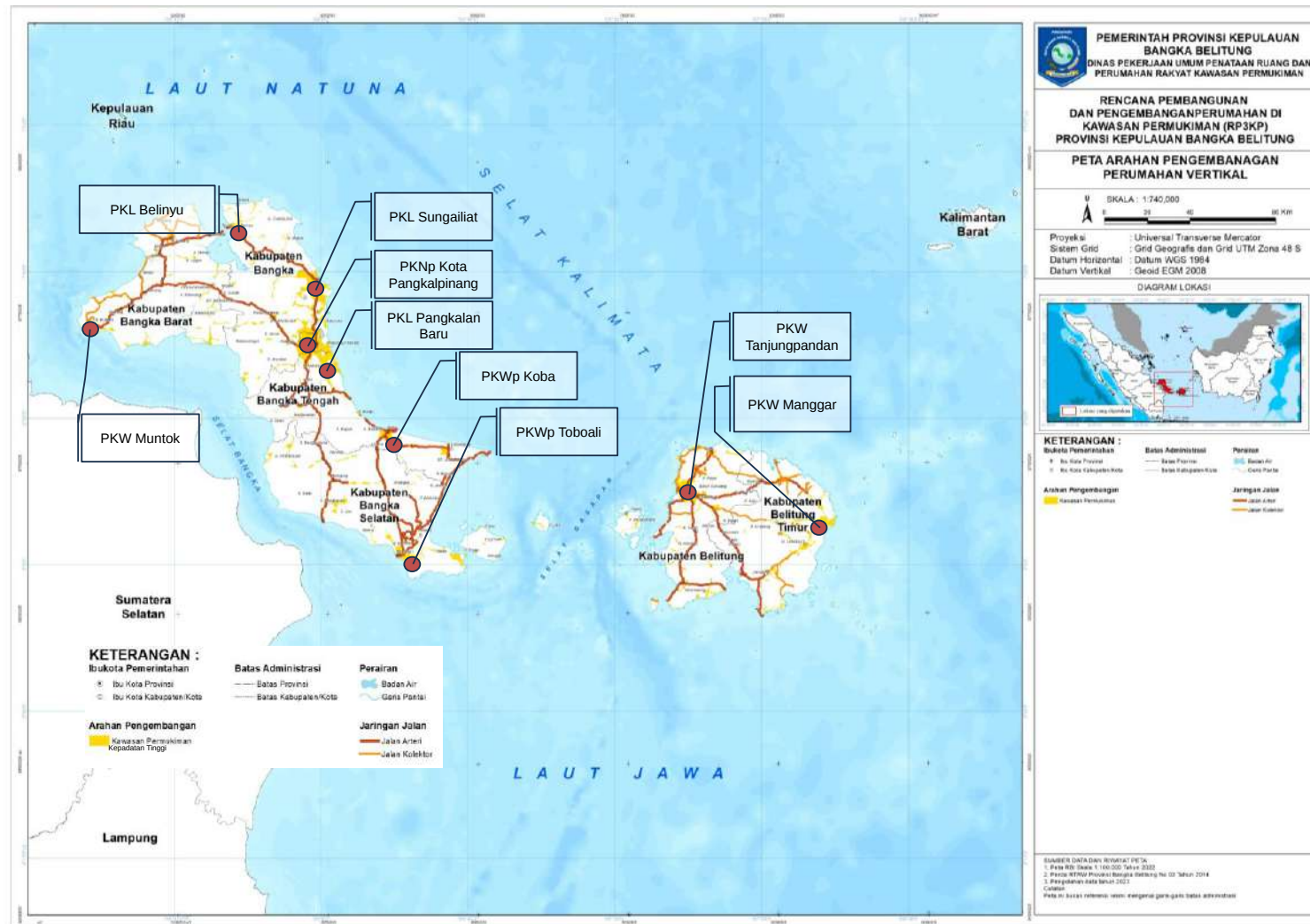
Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan produk hukum turunannya adalah Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR. Berdasarkan peraturan tersebut, SPM yang menjadi kewajiban Bidang Perumahan adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi dan Fasilitas Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

Rehabilitasi Rumah adalah berupa bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat korban bencana di mana rumahnya mengalami kerusakan sedang hingga berat. Jenis material yang diberikan disesuaikan berdasarkan kerusakan rumah dan kebutuhan untuk rehabilitasi. Pembangunan Rumah adalah berupa bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat korban bencana di mana rumahnya mengalami kerusakan roboh. Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:

- a. Pada saat masa pasca bencana;
- b. Surat penetapan status bencana dari Gubernur; dan/atau
- c. Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota



Gambar 4.11 Peta Arah pengembangan hunian vertikal

2. Penerima layanan

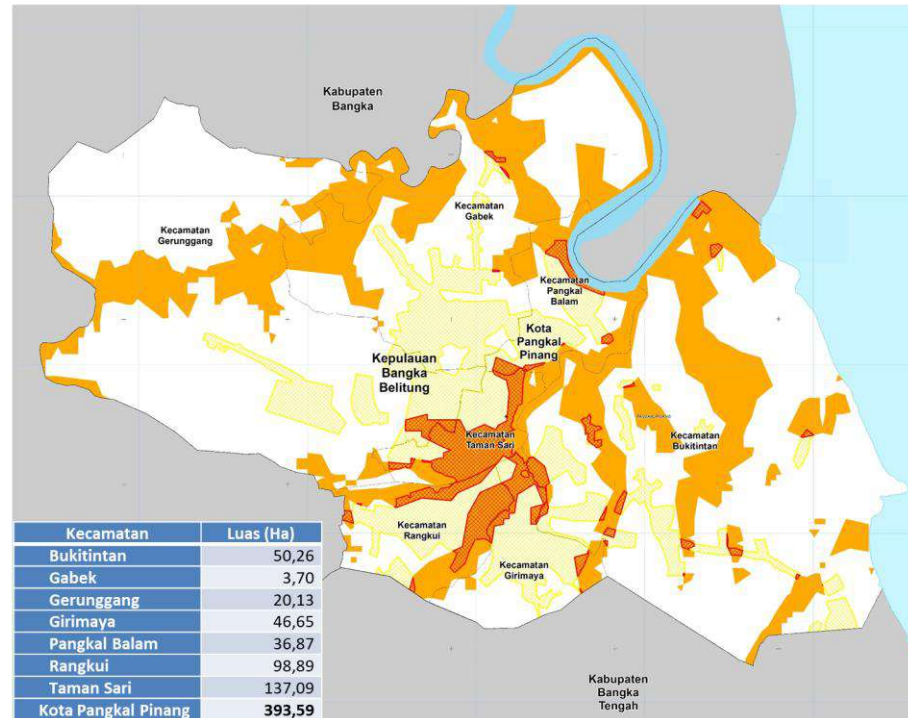
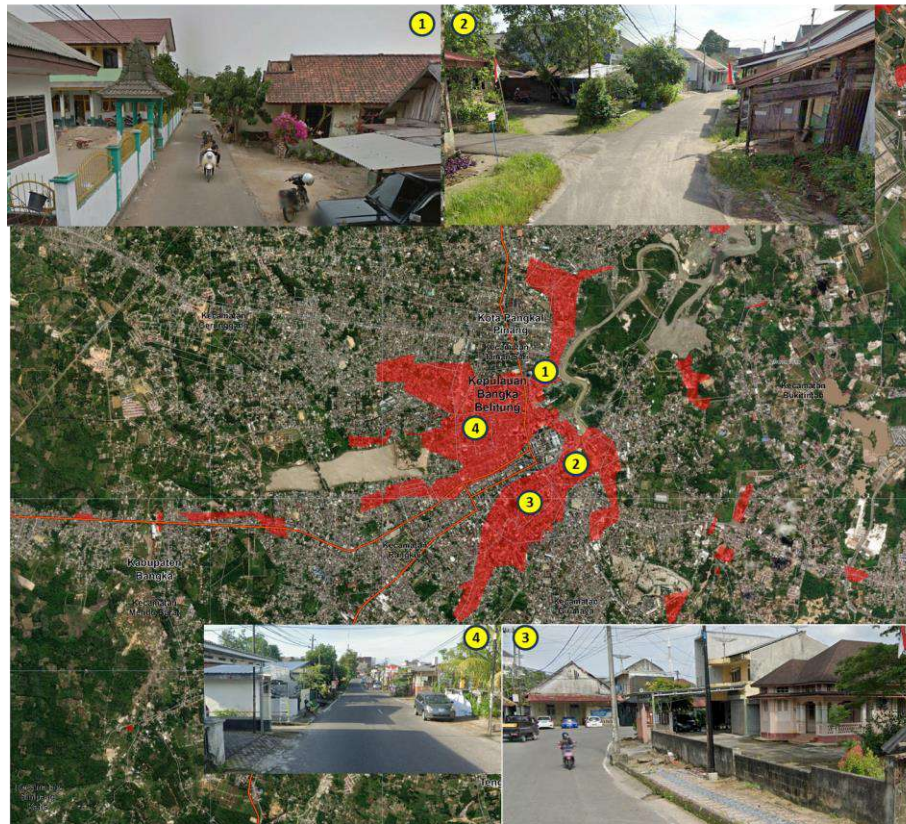
Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Diprioritaskan bagi Rumah Tangga dengan penghasilan kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
 - b. Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan atau mampu menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan/atau Penguasaan Tanah dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - c. Tidak memiliki asset bangunan lain;
 - d. Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.
3. Penerapan SPM, yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana:
- a. Melakukan pendataan awal jumlah korban bencana dan kerusakan rumah;
 - b. Pembentukan dan pelatihan Tim Satgas Bencana sektor perumahan.
 - c. Penyusunan rencana aksi penyediaan dan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana, dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan dikoordinir oleh BPBD.
 - d. Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang
 - e. Pembangunan kembali rumah rusak berat
 - f. Pembangunan baru/ relokasi rumah korban bencana
 - g. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni

4.6.2 Rencana Rehabilitasi Rumah/Perumahan Korban Terdampak Bencana

Teridentifikasi perumahan dan kawasan permukiman yang berada di daerah rawan bencana dengan kategori tinggi. Sehingga diperlukan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana banjir. Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan/ pembangunan dapat berperan dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.

PERMUKIMAN DI DAERAH RAWAN BENCANA PANGKAL PINANG



Kawasan Permukiman

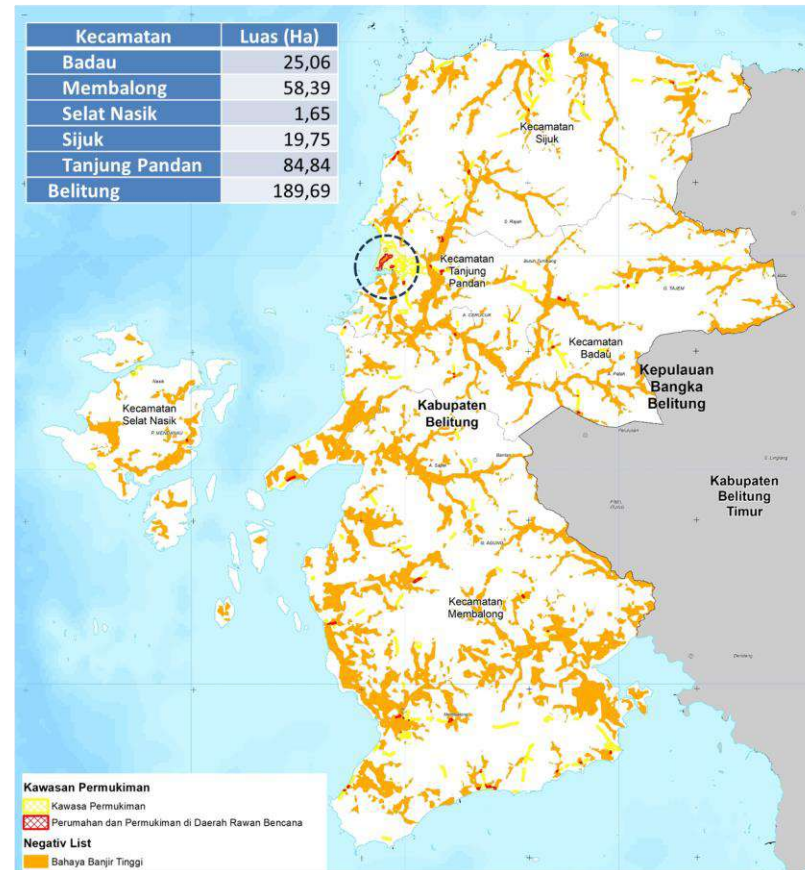
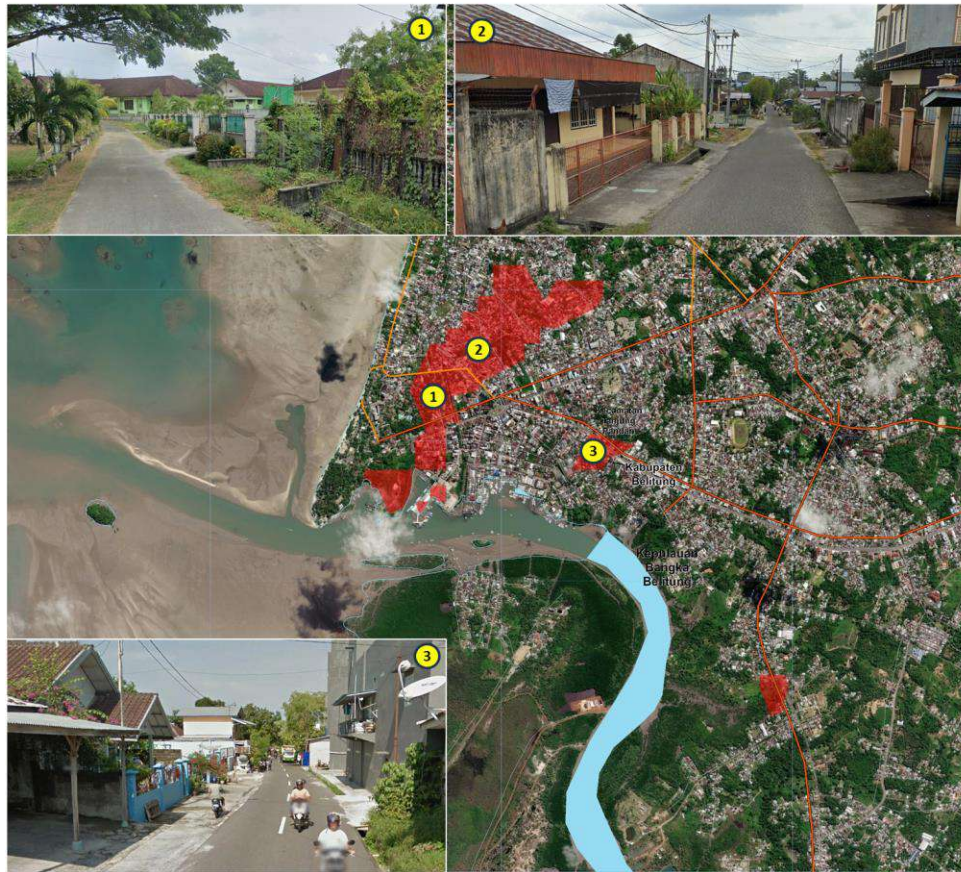
□ Kawasan Permukiman

▨ Perumahan dan Permukiman di Daerah Rawan Bencana

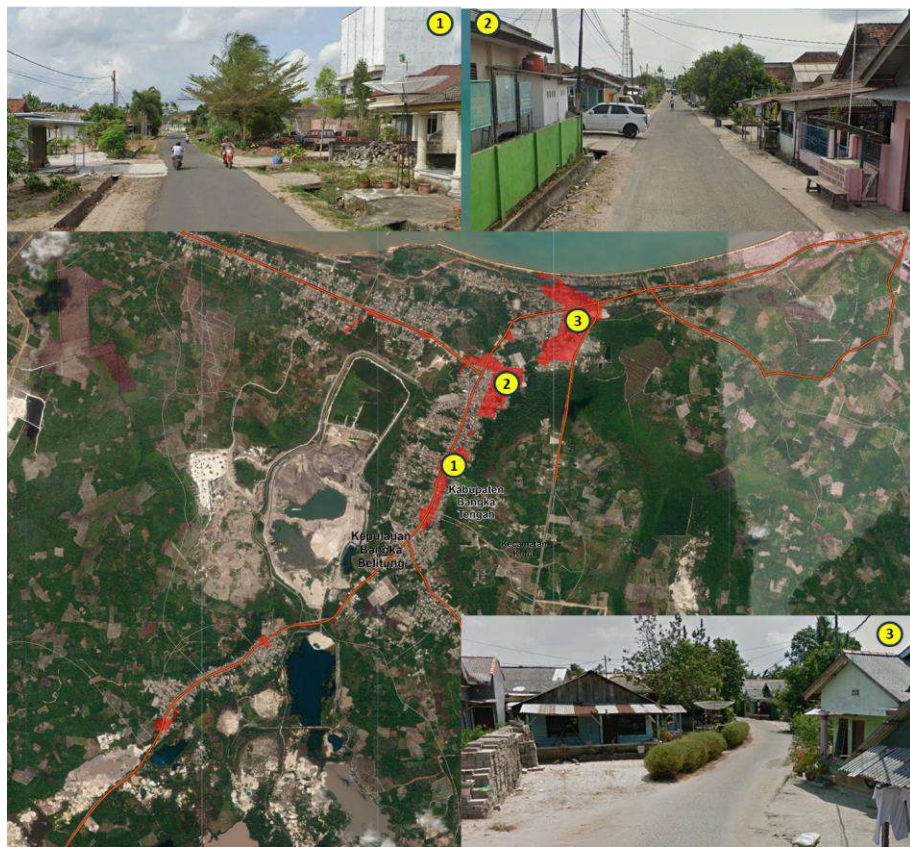
Negativ List

■ Bahaya Banjir Tinggi

PERMUKIMAN DI DAERAH RAWAN BENCANA TANJUNG PANDAN BELITUNG



PERMUKIMAN DI DAERAH RAWAN BENCANA DI KEC. KOBA KAB. BANGKA TENGAH



Kawasan Permukiman

- Kawasan Permukiman
- Perumahan dan Permukiman di Daerah Rawan Bencana

Negativ List

- Bahaya Banjir Tinggi

Kecamatan	Luas (Ha)
Koba	88,27
Lubuk Besar	18,25
Namang	1,22
Pangkalan Baru	48,26
Simpang Katis	9,56
Sungai Selan	14,51
Bangka Tengah	180,08

Tabel 4.6 Arahan Penanganan Perumahan Dan Permukiman Di Kawasan Rawan Bencana Banjir

No	Penanganan	Program
1	Relokasi Perumahan Pada Daerah Dengan Tingkat Kerawanan Bencana Tinggi	Penggantian penguasaan tanah dan/atau bangunan
		Penyediaan subsidi uang Sewa
		Penyediaan Rumah Layak Huni
2	Mitigasi Bencana	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
		Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana
		Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana
		Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana
3	Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman di Daerah Rawan Banjir	Penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir
		Penyediaan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi
		Pengembangan drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah
		Pembuatan sumur resapan
		Pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan permukiman
		Penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi
		Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara

1.18. Rencana Penyediaan PSU Sesuai Kewenangan Provinsi

Program Penyediaan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari:

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman
2. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional:
 - Peningkatan TPA/TPST/SPA
 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA
 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
 - Pembangunan TPA/TPST/SPA
 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional:
 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
 - Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
4. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi:
 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi
 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi
 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
 - Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi
 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi

- Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan
 - Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
5. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tempat Pemakaman Umum
 6. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi



**Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman**

BAB 5

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.19. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Lintas Kabupaten/Kota

Program perumahan dan kawasan permukiman di lintas kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
2. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya:
 - Pembangunan Puskesmas
 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pengembangan Puskesmas
 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
 - Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
- 4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
 - Sistem Drainase Perkotaan

1.20. Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar

Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar terdiri dari:

1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha:
 - Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
 - Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

1.21. Program Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Tidak Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi

Program Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Tidak Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi, terdiri dari:

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi:
 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi
 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi
 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
2. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan
 - Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

1.22. Program Penyediaan PSU

Program Penyediaan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari:

7. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

- Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
- Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman
- 8. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional:
 - Peningkatan TPA/TPST/SPA
 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA
 - Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
 - Pembangunan TPA/TPST/SPA
 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
- 9. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional:
 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
 - Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- 10. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi:
 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi
 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi
 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
 - Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi
 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan
 - Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
- 11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tempat Pemakaman Umum
- 12. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

Tabel 5.1 Indikasi Program

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	Lokasi	PJM-1					PJM- 2	PJM- 3	PJM- 4	Sumber Pembiayaan	Instansi Terkait / Penanggungjawab
							1	2	3	4	5					
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBD Prov.	Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung
			2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBD Prov./APBD Kab.Kota/Swasta	Dinas Kesehatan/Swasta
				0002	Pembangunan Puskesmas										APBD Prov./APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
				0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya										APBD Prov./APBD Kab.Kota/Swasta	Dinas Kesehatan/Swasta
				0005	Pengembangan Puskesmas										APBD Prov./APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
				0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya										APBD Prov./APBD Kab.Kota/Swasta	Dinas Kesehatan/Swasta
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota											
				0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBD Prov.	Dinas PUPRPRKP Prov. Kep. Bangka Belitung/PDAM
				0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Desa Kelapa-Desa Maras Senang; Desa Kace Timur-Kel. Keramat-Kel. Gajah Mada-Kel. Asam-Desa Mangkol; Desa Tepus-Desa Lubuk Pabrik										
				0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota											

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	Lokasi	PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Pembiayaan	Instansi Terkait / Penanggungjawab
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			1	2	3	4	5					
1		04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional											
				0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBD Prov./APBD Kab.Kota	DLHK Prov. Kep. Bangka Belitung, DLHK Kab.Kota
				0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA											
				0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota										APBD Prov.	dinas lingkungan hidup dan kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung
				0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA										APBD Prov./APBD Kab.Kota	DLHK Prov. Kep. Bangka Belitung, DLHK Kab.Kota
				0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA											
		05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional											
				0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah									APBD Prov./APBD Kab.Kota	DPUPRPRKP Prov./DPUPR Kab.Kota
				0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat											
				0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBD Prov.	DPUPRPRKP Prov.
		06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi											
				0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBD Prov./APBD Kab.Kota	DPUPRPRKP Prov./DPUPR Kab.Kota
				0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan											
				0009	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan											

[illegible]

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	Lokasi	PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Pembiayaan	Instansi Terkait / Penanggungjawab
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			1	2	3	4	5					
				0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBN/APBD Prov.	BPBD Prov./DPUPRRKP Prov.
				0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani											
				0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus											
				0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi											
				0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi											
				0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi											
				0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi											
				0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi											
			2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan											
				0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBD Prov./APBD Kab.Kota	DPMPTSP Prov./DPMPTSP Kab.Kota
		03			Program kawasan permukiman											
			1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											
				0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBD Prov.	DPUPRRKP Prov.

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	Lokasi	PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Pembiayaan	Instansi Terkait / Penanggungjawab
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			1	2	3	4	5					
				0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman											
			1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											
				0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kab. Belitung: Parit, Air Saga; Kab. Bangka Barat: Air Lintang; Kab. Bangka: Mantung; Belitung Timur: Gantung (Trans Danau Nujau); Pangkalpinang: Keramat (RT007-RW003), Parit Lalang (RT001-RW001), Parit Lalang (RT002-RW003); Bangka Selatan: Penutuk, Pongok.										
				0004	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											
				0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											
				0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											
		05			Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)											
			1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman											
				0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBD Prov./APBD Kab.Kota/Swasta	DPUPRPRKP Prov./DPUPR Kab.Kota/DLHK/ Disdik/Dinkes/ PDAM/PLN/Developer
				0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman											

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	Lokasi	PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Pembiayaan	Instansi Terkait / Penanggungjawab
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			1	2	3	4	5					
				0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman											
				0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang											
				0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman											
	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota											
				0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBD Prov./APBD Kab.Kota	BPBD Prov./BPBD Kab.Kota
				0009	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota											
				0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota											
				0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota											
		04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											
				0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)											
			2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran											
2	11	04	1.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBD Prov./APBD Kab.Kota	DLHK Prov./DLHK Kab.Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	Lokasi	PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Pembiayaan	Instansi Terkait / Penanggungjawab
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			1	2	3	4	5					
	12	02	1.01	0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									APBD Prov./APBD Kab.Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Prov./Kab.Kota